

# REVOLUSI KEMERDEKAAN INDONESIA DI ACEH (1945 - 1949)

Penyusun

Dr. T. Ibrahim Alfian, M.A.

Drs. Zakaria Ahmad.

Drs. Muhammad Ibrahim.

Drs. Rusdi Sufi.

Drs. Nasruddin Sulaiman.

Drs. M. Isha Sulaiman.

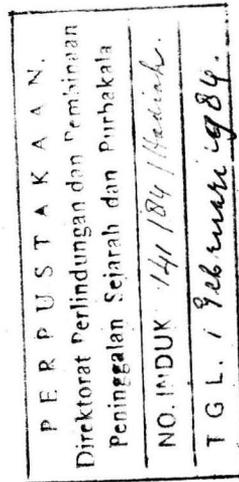
AAAN  
Direktorat  
Kebudayaan

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Proyek Pengembangan Permuseuman  
Daerah Istimewa Aceh

# REVOLUSI KEMERDEKAAN INDONESIA DI ACEH (1945 - 1949)

Penyusun :

Dr. T. Ibrahim Alfian. M.A.  
Drs. Zakaria Ahmad.  
Drs. Muhammad Ibrahim.  
Drs. Rusdi Sufi.  
Drs. Nasruddin Sulaiman.  
Drs. M. Isa Sulaiman.



Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Proyek Pengembangan Permuseuman  
Daerah Istimewa Aceh  
1982

## KATA PENGANTAR

Seri Penerbitan Museum Negeri Aceh nomor 10 ini diterbitkan dengan judul "REVOLUSI KEMERDEKAAN INDONESIA DI ACEH (1945 - 1949)". Penerbitan ini merupakan suatu hasil dari penelitian Sejarah yang dilakukan oleh sebuah team yang di mintakan oleh Museum Negeri Aceh. Team penelitian dan penyusunan naskah ini terdiri dari DR. T. Ibrahim Alfian, MA, Drs. Zakaria Ahmad, Drs. Muhammad Ibrahim, Drs. Rusdi Sufi, Drs. Nasruddin Sulaiman dan Drs. M. Isa Sulaiman yang di koordinir oleh Drs. Muhammad Ibrahim.

Team di dalam melakukan penelitian ini telah mempergunakan sumber-sumber tertulis maupun sumber-sumber lisan. Penggunaan sumber tertulis melalui karya kepustakaan terhadap dokumen-dokumen, majalah, surat kabar, serta buku-buku dan artikel yang terdapat di beberapa perpustakaan di Aceh seperti Museum Negeri Aceh, Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, Universitas Syiah Kuala, IAIN Ar - Raniry, Kantor Gubernur Daerah Istimewa Aceh, dan lain - lain. Selain perpustakaan resmi masih di pergunakan juga perpustakaan perorangan/pribadi. Demikian pula penggunaan sumber lisan telah dilakukan wawancara dengan sejumlah tokoh-tokoh masyarakat yang terlibat secara langsung/ ikut berperan pada masa revolusi kemerdekaan. Terhadap penggunaan ke dua sumber ini dapat dilihat pada daftar bacaan dan daftar informan.

Penerbitan buku ini di biayai oleh Proyek Pengembangan Permuseuman Daerah Istimewa Aceh dengan persetujuan Kepala Museum Negeri Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data-data tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia pada umumnya dan Aceh pada khususnya, terutama pada periode perang kemerdekaan yang jarang di tulis secara lengkap. Data-data tersebut di dalam bentuk tertulis di sajikan melalui penerbitan buku yang sederhana ini, sedangkan dalam bentuk visualisasi akan di sajikan melalui pameran di museum yang berbentuk foto-foto dokumentasi maupun diorama. karya ini berkaitan erat dengan rencana Museum Negeri Aceh untuk membangun gedung Pameran Wawasan Nusantara dan Pameran Perjuangan yang telah mulai dilaksanakan.

Dalam penerbitan buku ini kami menyadari masih banyak yang belum sempurna, baik materi maupun teknik serta bentuk penyajiannya. Oleh karena itu saran - saran dari berbagai pihak dalam usaha perbaikan serta penyempurnaannya sangat kami harapkan.

Pada kesempatan ini sudah pada tempatnya kami menyampaikan terima kasih kepada Kepala Museum Negeri Aceh yang telah merestui penerbitan ini, pimpinan-pimpinan lembaga perpustakaan yang telah kami sebutkan di atas yang telah menyediakan waktu membantu para peneliti, dan kepada para informan yang telah memberikan data-data yang sangat berharga dalam penyusunan buku ini. Secara khusus kami menyampaikan terima kasih pula kepada para peneliti yang telah dengan bersusah payah serta kerja keras, sehingga telah berhasil mewujudkan karya ini secara nyata.

Akhirnya, harapan kami semoga buku yang sederhana ini ada manfaatnya bagi kita sekalian.

Banda Aceh, Nopember 1982.

Proyek Pengembangan Permuseuman Daerah  
Istimewa Aceh  
P e m i p i n .

(Drs. Nasruddin Sulaiman)

NIP. 130518465.

## KATA PENGANTAR

Pada waktu wilayah kepulauan Indonesia sebelah barat dipersatukan di bawah naungan Kerajaan Sriwijaya (mulai abad ke 7 sampai abad 12), wilayah ini pernah mendapat serangan dari luar yaitu dari kerajaan Cola India. Dalam prasasti Tanjore (1030) yang memuat laporan ekspedisi Rajendra Cola Dewa I menyebutkan bahwa salah satu tempat yang turut diserang oleh kerajaan Cola tahun 1025 ialah Ilamuri decam. Dari sekian banyak tempat yang diserang oleh kerajaan Cola tersebut, Ilamuri decam lah yang memberi perlawanan yang paling sengit. Ilamuri decam ini dikemudian hari terkenal dengan nama Aceh.

Permulaan abad 16 orang-orang Barat mulai melakukan ekspansi ke seluruh pelosok dunia. Terkenallah pada masa itu bangsa Portugis dan Spanyol sebagai Conquistador. Malaka sel sebagai pusat perdagangan bangsa-bangsa Asia Tenggara dengan bangsa-bangsa lain diseluruh dunia ditaklukkan oleh Portugis pada tahun 1511. Reaksi pertama terhadap penaklukan ini diberikan Dipati Unus dari kerajaan Demak berupa penyerangan terhadap Portugis di Malaka pada tahun 1512. Dalam sejarah tercatat 25 kali penyerangan dari bangsa kita terhadap imperalisme Portugis yang bermukim di Malaka, 24 kali diantaranya telah dilakukan oleh kerajaan Aceh. Dalam kurun waktu 125 tahun konfrontasi bangsa kita dengan Portugis, telah melahirkan sejumlah tokoh-tokoh pejuang bangsa kita seperti : Sultan Alaidin Riayat Syah Al Qahar, Iskandar Muda, Laksamana Malahayati dan lain-lain.

Pax Neerlandica yang dilaksanakan oleh pemerintah Kolonial Belanda mulai menguasai sebagian besar Wilayah Indonesia telah menjadikan Aceh sebagai sasaran akhir dari daerah-daerah yang akan ditaklukkan' Pelaksanaan rencana itu dilakukan pada tahun 1873. Seperti pada masa-masa yang lampau rakyat Aceh juga telah memberikan reaksi yang nyata terhadap perlakuan kolonialisme. Karena harga kemerdekaan itu tetap mempunyai nilai yang tinggi dihati rakyat Aceh sepanjang zaman, maka Belanda terpaksa harus menanggung akibat yang cukup fatal yang tidak pernah mereka perhitungkan. Perang yang semula merupakan perang antara dua kerajaan telah berubah menjadi perang rakyat semesta yang berlangsung lebih dari setengah abad dan merupakan perang yang terlama dalam melawan penjajahan di Nusantara

ini. Perang yang memberi kebanggaan kepada seluruh bangsa Indonesia ini telah melahirkan pula tokoh-tokoh Pahlawan Nasional Indonesia, seperti : Tgk. Cik Di Tiro, Teuku Umar, Cut Nyak Din, Cut Mutia dan lain - lain.

Pergerakan kebangsaan Indonesia telah mengantar bangsa Indonesia kepintu gerbang kemerdekaan. Dalam periode ini rakyat Aceh pun telah ikut serta secara aktif. Sumpah Pemuda pada tahun 1928 telah diberi bentuk yang nyata, oleh sejumlah pemimpin rakyat Aceh dalam suatu rapat di Deli Bioskop Koetaradja pada tahun 1931 telah melakukan suatu protes sehubungan dengan pemakaian bahasa daerah sebagai bahasa pengantar pada sekolah-sekolah rakyat, karena dianggap memperlemah semangat nasional yang sedang tumbuh akibat sumpah Pemuda tersebut. Sejumlah tokoh-tokoh pergerakan telah lahir pula seperti pahlawan nasional Teuku Nyak Arief dan lain - lain.

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 telah menjadi beban tanggung jawab pada seluruh bangsa Indonesia untuk mempertahankan dan memeliharanya. Sejah mana beban tanggung jawab itu telah dilaksanakan oleh rakyat Aceh sebagai bahagian dari rakyat Indonesia, yang tak dapat dipisahkan, dapat dilihat diantaranya dari karya yang diterbitkan ini oleh Museum Negeri Aceh dengan judul "Revolusi Kemerdekaan Indonesia di Aceh".

Berbagai usaha telah dilakukan oleh Museum Negeri Aceh untuk menanam semangat kebangsaan dan usaha memperkenalkan perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan. Di antara usaha yang dilakukan yaitu berupa pameran-pameran tentang kepahlawanan, penerbitan - penerbitan dan sebagainya.

Penerbitan ini merupakan realisasi permulaan dari rencana yang lebih besar dalam rangka pembangunan gedung Pameran Wawasan Nusantara dan Pameran Perjuangan yang sedang dilaksanakan. Persembahan Museum Negeri Aceh yang banyak cacat celanya ini kiranya akan berguna bagi masyarakat.

Akhirul Kalam Kepala Museum Negeri Aceh mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Proyek Pengembangan Permuseuman Daerah Istimewa Aceh yang telah menyiapkan sejumlah dana untuk penerbitan buku ini dan kepada para penyusun yang telah memberikan sumbangannya sehingga karya ini terwujud kami juga mengucapkan terima kasih yang tulus.—

Banda Aceh, Nopember 1982

Kepala Museum Negeri Aceh.

( Drs. Zakaria Ahmad )

NIP. 130427706.

# DAFTAR ISI

Pengantar Pimpinan Proyek.

Pengantar Kepala Museum Negeri Aceh

## **BAB I PENDAHULUAN**

1

## **BAB II MASA PENDUDUKAN JEPANG 1942 - 1945.**

6

A. Pendaratan dan Penaklukan Belanda oleh Jepang di Aceh. 6

B. Pembentukan Lembaga-lembaga Pemerintahan dan Militer 11

C. Kehidupan Sosial Ekonomi 17

D. Kehidupan Sosial Budaya 19

E. Impak Pemerintah Pendudukan Jepang Terhadap Rakyat Aceh. 21

## **BAB III PROKLAMASI KEMERDEKAAN DI ACEH**

23

A. Sambutan masyarakat Aceh

B. Pembentukan Pemerintahan Republik Indonesia di Daerah Aceh. 36

C. Pembentukan Organisasi Kemiliteran dan Kelasykaran Rakyat. 44

D. Kedatangan Tentara Sekutu dan Tentara Nica di Daerah Aceh. 58

## **BAB IV REVOLUSI KEMERDEKAAN INDONESIA DI ACEH**

A. Peristiwa Cumbok dan aksi TPR. 65

B. Masa Agresi dan Pergantian-pergantian bentuk Pemerintahan di Aceh. 82

C. Peristiwa-peristiwa di Daerah Dalam kaitan dengan Kejadian bersejarah Tingkat Nasional. 96

D. Usaha Masyarakat Aceh dalam beberapa Bidang kegiatan 102

**BAB V SITUASI DAERAH ACEH PADA AKHIR REVOLUSI KEMERDEKAAN. 118**

- A. Menjelang Persetujuan KMB. 118**
- B. Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Sikap Masyarakat Aceh. 122**
- C. Kegiatan Masyarakat dalam Berbagai Bidang Kehidupan 132**

**LAMPIRAN - LAMPIRAN :**

- I. Susunan Pengurus KNI Aceh ..... 145**
- II. Pembagian Wilayah Administrasi Keresidenan Aceh ..... 149**
- III. Susunan Pengurus API di Aceh ..... 150**
- IV. Susunan Pengurus Kelasykaran di Aceh ..... 153**
- V. Maklumat Ulama Seluruh Aceh. .... 155**

**DAFTAR BACAAN ..... 155**

**DAFTAR INFORMAN ..... 165**

**I N D E K ..... 169**

Perpustakaan  
Direktorat Perlindungan dan  
Pembinaan Peninggalan  
Sejarah dan Purbakala

## BAB – I

### P E N D A H U L U A N

Sejak diproklamirkan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, status Daerah Aceh termasuk salah satu keresidenan dari Propinsi Sumatra yang dibentuk sejak tanggal 3 Oktober 1945; dan sebagai kota kedudukan residennya, seperti juga pada masa kolonial Belanda dan Jepang ialah Kutaraja ( sekarang Banda Aceh ). Bersamaan dengan itu daerah-daerah yang disebut **bunshu** dan **gun** ( masing-masing diperintah oleh **Bunshutyo** dan **Guntyo** ) dalam wilayah keresidenan Aceh, kembali dinamakan seperti nama pada masa sebelum pendudukan Jepang yaitu : **A fdeeling** dan **Onderafdeeling** dengan kepala pemerintahannya disebut **Asisten - Residen** dan **Kontroleur**. Kemudian dalam perkembangan berikutnya pada waktu itu nama kedua daerah tersebut dirobah lagi menjadi Kabupaten dan Kewedanaan yang masing-masing diperintah oleh seorang Bupati dan Wedana. Demikian pula daerah-daerah yang dinamakan **son** dengan kepala pemerintahannya disebut **Sontyo** ( daerah-daerah **Zelfbestuur** atau **Uleebalangschap** pada masa pemerintahan kolonial Belanda; kepalanya itu terdiri dari para Uleebalang yang memerintah secara turun-temurun, tetapi Sontyo yang diangkat Jepang tidak mesti harus seorang Uleebalang, sehingga status "istimewa" nya itu dapat dikatakan hilang pada waktu itu ) kembali diakui sebagai daerah Uleebalang yang diperintah oleh para Uleebalang ( **Teuku Chiek**, **Keujrueun**, Bentara dsb ). Tetapi setelah "revolusi sosial" yang meletus pada awal tahun 1946, status "istimewa" dari daerah-daerah Uleebalang itu dihapuskan; dan daerah-daerah tersebut selanjutnya dijadikan "Negeri" yang diperintah oleh 5 orang Dewan Pemerintahan Negeri ( **Bestuur Comisie** ) dan salah seorang di antara mereka, dipilih atau ditunjuk sebagai Kepala Negeri ( dalam perkembangan selanjutnya daerah Kenegerian tersebut dijadikan sebagai Kecamatan yang dikepalai oleh seorang Asisten Wedana yang kemudian disebut dengan Camat ).

Selain itu daerah-daerah yang dikenal dengan nama **Ku** ( dikepalai oleh **Kutyo** ) dan **Kumi** ( dikepalai oleh Kumityo ) dikembalikan kepada nama semula, yaitu : **Mukim** dan **Gampong** yang masing-masing dikepalai oleh **Imum Mukim** ( **Kepala Mukim** ) dan **Keuchiek**.

Untuk menggerakkan roda pemerintahan Republik Indonesia di Daerah Aceh, seperti juga di daerah-daerah lain yang menjadi wilayah negara Republik Indonesia yang baru diproklamkan itu, dalam waktu yang relatif singkat telah berhasil disusun nama-nama para pejabat pemerintahan, sejak dari residen, pejabat kehakiman daerah, pejabat penerangan daerah dan lain-lain hingga kepada anggota Dewan Pemerintahan Negeri, di samping susunan anggota Komite Nasional Daerah. Dan dalam rangka mempertahankan proklamasi dari kemungkinan serangan musuh dibentuk pula kesatuan ketentaraan serta kelaskaran rakyat. tidak saja di kota-kota besar, bahkan tersebar sampai ke pelosok-pelosok di seluruh daerah.

Dalam perkembangan selanjutnya selama Revolusi Kemerdekaan, kedudukan daerah Aceh sebagai bagian dari wilayah Negara Republik Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan, seiring dengan gerak revolusi pada waktu itu. Pada awal tahun 1947 Keresidenan Aceh berada di bawah daerah administratif Sumatra Utara ( pada waktu itu Propinsi Sumatra dibagi menjadi 3 wilayah administratif : Sumatra Utara, Sumatra Tengah dan Sumatra Selatan yang masing-masing dipimpin oleh seorang Gubernur Muda). Dan pada bulan Agustus 1947, berhubung dengan dilancarkannya aksi militer Belanda Pertama terhadap negara Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Wakil Presiden Republik Indonesia, No. 3/BPKU/47, tanggal 26 Agustus 1947, daerah Aceh bersama Kabupaten Langkat dan Tanah Karo ditetapkan menjadi Daerah Militer, yang diperintah oleh Gubernur Militer yang berkedudukan di Kutaraja, meskipun status keresidenan masih tetap dipertahankan.

Pada tahun 1948, daerah administratif Sumatra Utara ditingkatkan statusnya menjadi propinsi Sumatra Utara dengan membawa tiga keresidenan, yaitu : Keresidenan Aceh, Keresidenan Sumatra Timur dan Keresidenan Tapanuli. Sejak waktu itu, Kutaraja yang sebelumnya menjadi ibukota Keresidenan Aceh dan Daerah Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo, juga menjadi ibukota Propinsi Sumatra Utara, sehingga Daerah Aceh umumnya dan Kutaraja khususnya menjadi pusat kegiatan administratif pemerintahan sipil dan militer propinsi Sumatra Utara. Tetapi, setelah terjadi agresi militer Belanda kedua, berdasarkan ketetapan Pemerintah Darurat Republik Indonesia No. 21/Pem./PDRI, tanggal 16 Mei 1949, kekuasaan sipil dan militer dialihkan kepada satu tangan, yaitu kepada Gubernur Militer; sedang jabatan gubernur-gubernur di Sumatra untuk sementara dihapuskan. Dengan demikian jabatan-jabatan sipil di Su-

matra Utara khususnya pada waktu itu tidak berfungsi lagi, dan bekas gubernur diangkat menjadi komisaris Pemerintah Pusat yang diberi hak untuk mengawasi daerah-daerah otonomi (status propinsi sendiri tidak dihapuskan ).

Setelah Pemerintah Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta dan Pemerintah Darurat dibubarkan, sejak bulan Agustus 1949 Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia yang mewakili Pemerintah Pusat untuk Sumatra ditempatkan di Kutaraja. Tindakan Wakil Perdana Menteri setelah menduduki posnya adalah menghapuskan jabatan-jabatan Komisaris Pemerintah Pusat serta Gubernur Militer di seluruh Sumatra dan mengfungsikan kembali daerah-daerah otonomi. Khusus bagi keresidenan Aceh yang sebelumnya berada di bawah Propinsi Sumatra Utara, berdasarkan Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah, No. 8/Des./WPM/1949, tanggal 17 Desember 1949, statusnya ditingkatkan menjadi Propinsi yang berdiri sendiri dengan wilayahnya ditambah sebagian daerah Kabupaten Langkat yang terletak di luar daerah Negara Bagian Sumatra Timur dan Propinsi Tapanuli Sumatra Timur ( bekas Propinsi Sumatra Utara setelah dikeluarkan Propinsi Aceh dan Negara Bagian Sumatra Timur ). Tetapi Propinsi Aceh yang pertama ini, tidak berumur panjang; berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 tahun 1950, yang mulai berlaku sejak tanggal 15 Agustus 1950, Daerah Aceh kembali menjadi sebuah keresidenan yang berada di bawah Propinsi Sumatra Utara.

Dewasa ini daerah Aceh dikenal dengan nama Propinsi Daerah Istimewa Aceh (status propinsi mulai sejak tanggal 1 Januari 1957 berdasarkan undang-undang no.24 tahun 1956 dan sebutan "daerah istimewa" dimulai sejak tanggal 26 Mei 1959, berdasarkan keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia No. 1/Missi 1959). Letak geografisnya adalah di ujung Barat Laut Pulau Sumatra dengan batas-batasnya : di sebelah Utara dengan Selat Malaka: sebelah Selatan dengan Samudra Hindia: dan sebelah Timur dengan Selat Malaka dan Propinsi Sumatra Utara. Adapun pembagian wilayahnya terdiri dari 8 Kabupaten dan 2 kotamadya, yaitu: Kabupaten Aceh Besar dengan ibukotanya Banda Aceh; Kabupaten Pidie, ibukotanya Sigli, Kabupaten Aceh Utara dengan ibukotanya Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Timur, ibukotanya Langsa, Kabupaten Aceh Tengah,

ibukotanya Takengon; Kabupaten Aceh Barat, ibukotanya Meulaboh; Kabupaten Aceh Selatan, ibukotanya Tapaktuan; dan Kabupaten Aceh Tenggara dengan ibukotanya Kutacane; Kotamadya Sabang; dan Kotamadya Banda Aceh, yang juga menjadi ibukota Propinsi Daerah Istimewa Aceh <sup>†</sup>). Selama masa Revolusi Kemerdekaan (1945 - 1949) wilayah Daerah Aceh, kecuali Sabang, tidak pernah berhasil diduduki kembali oleh Belanda, sehingga administrasi pemerintah Republik Indonesia di daerah ini relatif lebih teratur bila dibandingkan dengan daerah-daerah lain pada waktu itu (Aceh tidak pernah melepaskan diri dari Republik Indonesia, seperti yang terjadi dengan beberapa daerah yang menjadi "Negara Bagian" lepas dari R.I).

Uraian di atas merupakan gambaran umum mengenai daerah Aceh, terutama yang menyangkut dengan perkembangan bidang administrasi pemerintahan wilayah daerah tersebut selama masa Revolusi Kemerdekaan. Beriringan dengan terjadinya perubahan struktur tata pemerintahan, di seluruh daerah berlangsung pula perjuangan rakyat Aceh dalam berbagai bidang kehidupan yang pada dasarnya ditujukan untuk mempertahankan Proklamasi 17 Agustus 1945. Di antara bidang-bidang tersebut yaitu : pertahanan dan keamanan (dengan dibentuknya kesatuan ketenteraan, Kelasykaran, dll.), pemerintahan, sosial - ekonomi, sosial budaya, agama, pers, kepemudaan, kewanitaan dan sebagainya.

Pada masa sekarang, setelah 35 tahun bangsa Indonesia memperoleh kemerdekaanya, semakin terasa pentingnya nilai-nilai kesejarahan yang terkandung di dalam Revolusi Kemerdekaan, mengingat perlunya penggalangan kehidupan bangsa dan negara, termasuk penyusunan negara dan penataan bangsa serta nilai-nilai kebudayaan bangsa Indonesia yang tercermin pada masa itu. Dan pada hakekatnya nilai-nilai kesejarahan dimaksud terdapat di dalam keanekaragaman kegiatan perjuangan di daerah-daerah, termasuk daerah Aceh selama periode tersebut. Oleh karena itu diperlukan suatu penulisan yang berupa inventarisasi dan pendokumentasian dari kegiatan perjuangan tersebut; dan semoga hasilnya dapat membe-

---

<sup>†</sup>) Sejak tanggal 1 Januari 1963, berdasarkan SK. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh, No. 153 / 1962, tanggal 28 Desember 1962, nama Kutaraja diganti menjadi Banda Aceh; dan dengan SK. Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, tanggal 9 Mei 1963, No. Des. 52 / 1/43 - 43, Banda Aceh disahkan menjadi nama ibukota Daerah Istimewa Aceh.

rikan sumbangan yang berarti bagi perwujudan cita-cita ke-tunggal ikaan yang menjadi harapan seluruh bangsa Indonesia.

Sehubungan dengan kegiatan perjuangan rakyat Aceh yang telah dilakukan selama masa Revolusi Kemerdekaan, sampai saat ini belum diperoleh suatu deskripsi (terutama dalam bahasa Indonesia) yang menggambarkan secara keseluruhan sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945-1949) Indonesia di Daerah Aceh; yang ada hanya berupa tulisan-tulisan yang bersifat fragmentaris, yang tersebar dalam majallah-majallah dan surat kabar-surat kabar, terutama yang ditulis sendiri oleh para pelaku sejarah pada masa itu. Pada hal deskripsi yang menggambarkan keseluruhan semacam itu sangat diperlukan, terutama untuk memenuhi tujuan serta kepentingan akan nilai-nilai kesejarahan sebagaimana telah disebut di atas.

Selain dari yang telah dikemukakan, masalah tersedianya bahan-bahan sejarah dari sumber lisan yang primer mengenai masa Revolusi Kemerdekaan Indonesia di daerah Aceh, juga memerlukan penggarapan dalam waktu secepat mungkin. Pada masa sekarang para pemimpin yang terlibat langsung dalam proses perjuangan untuk mempertahankan proklamasi kemerdekaan nasional di daerah Aceh, sebagian dari mereka telah meninggal dunia. Oleh karena itu dari mereka yang masih tinggal dan usianya sudah lanjut pula, perlu dikumpulkan bahan-bahan sejarah, terutama yang menyangkut dengan kegiatan perjuangan mereka selama periode tersebut.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka dipandang perlu adanya kegiatan penelitian dan penulisan secara lebih luas dan terperinci dalam bentuk naskah Revolusi Kemerdekaan Indonesia di Daerah Aceh ( 1945 - 1949 ); sehingga dengan demikian diharapkan akan adanya pengertian yang lebih mendalam mengenai periode tersebut, khususnya di Daerah Istimewa Aceh.

## BAB – II

### MASA PENDUDUKAN JEPANG 1942 – 1945

#### A. Pendaratan dan Penaklukan Belanda oleh Jepang di Aceh.

Dalam membicarakan keadaan kehidupan pemerintahan di daerah Aceh pada masa pendudukan Jepang ( 1942 - 1945 ), ada baiknya terlebih dahulu dibahas tentang situasi menjelang pendaratan Jepang di Aceh. Dengan ini kiranya akan mendapatkan suatu gambaran tentang situasi di Aceh pada khususnya dan di Sumatra pada umumnya pada saat-saat menjelang berakhirnya kekuasaan Belanda di Indonesia.

Menjelang berakhirnya kekuasaan Belanda di Indonesia dan di Aceh pada khususnya yaitu pada tahun 1941 dan awal tahun 1942, kebencian rakyat Indonesia terhadap Belanda semakin bertambah memuncak. Walaupun Belanda telah berusaha dengan bermacam-macam cara untuk menghadapinya, namun rasa kemarahan rakyat tidak dapat dibendung lagi. Hal ini akan terlihat dari berbagai kegiatan rakyat yang bertujuan untuk menentang penjajahan Belanda, baik yang merupakan perjuangan dalam bentuk politik maupun dalam bentuk kegiatan fisik. Kedua bentuk kegiatan ini pada umumnya dipelopori oleh para ulama dan uleebalang, yang keduanya merupakan golongan yang mempunyai pengaruh cukup besar di dalam masyarakat Aceh.

Perjuangan dalam bentuk politik, misalnya dengan mengadakan rapat-rapat rahasia untuk menyusun strategi yang tepat dalam menghadapi Belanda, serta mengadakan hubungan dengan luar negeri guna mendapatkan bantuan. Ke-semua kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh kembali kemerdekaan yang sudah demikian lama diperjuangkan. Salah satu rapat penting yang diselenggarakan dalam rangka menyusun strategi dalam suasana perang yang berlangsung antara Jepang dan Belanda, dilangsungkan di rumah Teuku Nyak Arief ( sebagai Kepala Sagi XXVI Mukim ) pada bulan Desember 1941. Rapat tersebut dihadiri oleh beberapa tokoh masyarakat baik dari kalangan ulama mau-

pun dari kalangan adat ( uleebalang). Di antaranya dapat disebutkan Teungku Muhammad Daud Beureueh dan Teungku Abdul Wahab Seulimum yang mewakili Persatuan Ulama Seluruh Aceh ( P U S A ), Teuku Nyak Arief ( panglima Sagi XXVI Mukim ), Teuku Panglima Polem Muhammad Ali ( Panglima Sagi XXII Mukim ), Teuku Ahmad ( uleebalang- Junib - Samalanga) yang mewakili kalangan adat ( uleebalang ). Suatu keputusan penting yang mereka ambil yaitu dikeluarkannya sebuah pernyataan sumpah setia mereka kepada agama Islam, bangsa dan Tanah Air serta menyusun pemberontakan bersama melawan Belanda dan bekerja sama dengan pihak Jepang <sup>1</sup>:

Selain mengadakan rapat seperti tersebut di atas, Persatuan Ulama Seluruh Aceh ( PUSA ) juga aktif dalam menjalin hubungan dengan pihak Jepang yang telah berada atau berhasil menduduki Malasyia ( waktu itu masih bernama Malaya). Orang-orang dari PUSA seperti Said Abu Bakar dan Syekh Ibrahim ditutus secara khusus ke sana (Malaya) guna menjajaki kemungkinan masuknya Jepang ke Aceh dengan tujuan secepat mungkin dapat mengusir Belanda <sup>2</sup>. Perjuangan dalam bentuk politik lainnya adalah berupa suatu tuntutan yang disampaikan oleh Teuku Nyak Arief dalam suatu pertemuan antara Residen Aceh pada waktu itu yaitu J. Pauw dengan para Panglima Sagi dan uleebalang-uleebalang lainnya di Kutaraja.

Dalam pertempuran itu, Teuku Nyak Arief secara tegas mengemukakan kepada Residen Belanda itu agar pemerintahan diserahkan terimakan ke tangan rakyat Aceh sendiri untuk dapat mengatur pemerintahan sendiri. Selanjutnya Teuku Nyak Arief juga mengemukakan bahwa rakyat Aceh akan mampu mempertahankan tanah airnya dan dapat membela diri sendiri setiap ancaman yang datang dari luar, jika seandainya pemerintah Belanda mengalihkan kekuasaan pemerintahan kepada rakyat. Tuntutan ini ditolak oleh Residen Pauw dan sejak saat itu Teuku Nyak Arief tidak pernah lagi mengadakan hubungan dengan pemerintah Belanda. <sup>3</sup>

---

1. M. Joenoes Jamil, *Riwayat Barisan "F"* ( Fujiwara Kikan ) di Aceh. ( Banda Aceh: Pusat Latihan Ilmu-Ilmu Sosial, Aceh, 1975), hal 4 - 5.

2. Nazaruddin Sjamsuddin, *The Course of The National Revolution In Aceh, 1945 - 1949*, Thesis tidak diterbitkan, Monash University, 1974, hal. 34. Lihat juga A. H. Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia*, jilid I, ( Bandung : Disjarah - AD dan Angkasa, 1977 ), hal. 93 - 94.

3. A.H. Nasution, *op. cit.*, hal. 94 - 95.

Menyaksikan kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh tentara Jepang menghadapi sekutu dalam perang Asia Timur Raya melalui pelbagai media, menumbuhkan semangat dan harapan pada diri orang Aceh untuk dapat membebaskan diri dari penjajahan Belanda. Mereka menyadari suasana perang yang sedang berlangsung merupakan kesempatan yang baik untuk menekan pemerintah kolonial Belanda bukan saja dari sudut politik tetapi juga dari sudut fisik. Seberapa jauh tekanan dalam bentuk fisik yang mereka lakukan, dapat diamati pada serangkaian tindakan yang mereka lakukan pada penghujung waktu kekuasaan Belanda di Aceh.

Pada tanggal 19 – 20 Januari 1942, terjadi sabotase kawat-kawat telepon dan rel kereta api yang dilancarkan oleh rakyat di Seulimeum dan Indrapuri (wilayah Aceh Besar). Pada tanggal 24 Januari 1942 Kontrolleur Belanda di Seulimeum, yang bernama Tiggelman dibunuh oleh rakyat; dan kegiatan-kegiatan lain lagi yang dilakukan oleh rakyat di Aceh Besar.

Di luar Aceh Besar juga terjadi perlawanan-perlawanan fisik yaitu tanggal 25 Januari 1942 Asisten Residen Sigli Van den Berg juga mati dibunuh oleh rakyat. Di kawasan Aceh Barat peristiwa yang sama juga tidak terhindarkan. Dapat disebutkan misalnya, pada tanggal 9 Maret 1942, rakyat di bawah pimpinan Teuku Sabi Lageuen menyerang asrama tentara Belanda di Lageuen dan kantor pemerintah di Calang<sup>4</sup>.

Dalam menghadapi keadaan yang demikian krisis, baik suasana di dalam daerah maupun suasana di luar daerah, dimana tentara Jepang sudah mulai merampas wilayah Hindia Belanda; pemerintah kolonial Belanda membentuk dua komando teritorial di Pulau Sumatra. Kedua komando itu terdiri dari Komando Teritorial Sumatra Tengah dan Utara di bawah Mayor Jendral R.T. Overakker; dan Komando Teritorial Aceh yang berada di bawah pimpinan kolonel G.F.V. Gosenson<sup>5</sup>. Sedangkan wilayah Sumatra Selatan sudah diduduki oleh Jepang.

---

4. Peristiwa-peristiwa yang dilancarkan oleh rakyat Aceh menjelang berakhirnya kekuasaan Belanda di Aceh, secara lebih luas dapat dilihat misalnya, dalam Muhammad Ibrahim (Ketua), Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1978 / 1979, hal. 137 - 147.

5. Medan Area Mengisi Proklamasi. (Medan : Badan Musyawarah Pejuang Republik Indonesia, 1966), hal. 26 - 27.

Mayor Jendral R.T. Overakker dan Kolonel Gosenson, membuat suatu rencana yang mencoba untuk mempertahankan sisa pulau Sumatra dari kejatuhannya ke tangan pemerintah Jepang dengan mengambil tempat pertahanan yang terakhir daerah Gayo Luas dan Tanah Alas. Daerah ini memang tepat untuk dipergunakan sebagai daerah pertahanan terutama untuk melakukan gerilya; disebabkan karena kondisinya yang sangat strategis dan untuk memasuki daerah ini hanya melalui dua jalan yaitu dari arah Bireun ke Takengon dan dari arah Kabanjahe (Sumatera Utara) ke Kutacane. Selain daerah ini Kolonel Gosenson juga mencadangkan daerah Geumpang - Tangse (Pidie), karena daerah ini juga memiliki kondisi yang sama dengan daerah Gayo Luas dan Tanah Alas. Pada permulaannya rencana untuk bertahan di daerah Gayo Luas dan Tanah Alas hanya merupakan rencana lokal yang disusun oleh Kolonel Gosenson sebagai benteng pertahanannya yang terakhir untuk bergerilya dalam mempertahankan kedudukan mereka di Aceh. Sejalan dengan rencananya itu, pada tanggal 15 Februari 1942 Gosenson memindahkan Markas Besar Komando Teritorial Aceh dari Kutaraja ke Takengon, yang ditempatkan pada sebuah perkebunan teh Redelong. Demikian pula halnya dengan Mayor Jendral Overakker, sejak jatuhnya pulau Jawa ke tangan Jepang, dia telah mulai memusatkan pasukannya yaitu Komando Teritorial Sumatra Tengah dan Utara dengan menempatkan Markas Besarnya di Bukit Tinggi. Dari Bukit Tinggi mereka tidak bertahan lama oleh karena terus mendapat desakan dari pihak Jepang; dan akhirnya pada tanggal 9 Maret 1942 Mayor Jenderal Overakker kembali memindahkan Markas Besarnya ke Kabanjahe. Pada tanggal itu pula tentaranya yang berasal dari Jambi, Sumatra Barat dan Tapanuli, turut dipindahkan ke Tanah Alas dan Gayo Luas<sup>6</sup>. Dan sejak waktu itulah daerah Gayo Luas dan Tanah Alas dijadikan sebagai pusat pertahanan dari dua Komando Teritorial tersebut.

Jepang mendarat di Aceh pada tanggal 12 Maret 1942, yang pendaratannya dilakukan di tiga tempat, yaitu masing-masing di Krueng Raya (Aceh Besar), Sabang (Pulau Weh) dan Peureulak (Aceh Timur)<sup>7</sup>. Pendaratan Jepang ke Aceh berlangsung

---

6. *Ibid.*, hal. 27 - 29.

7. H. Joenoes Jamil. *op.cit* hal. 76.

dengan sukses yaitu tanpa mendapat rintangan, baik dari pemerintah Belanda maupun dari rakyat Aceh, malah sebaliknya rakyat menyambut baik kedatangan Jepang di Aceh dengan perasaan senang serta turut membantunya. Hal yang demikian tidak mengherankan, oleh karena jauh sebelum Jepang melakukan pendaratan ke Aceh, mereka telah menciptakan suatu suasana politik yang menguntungkan, yaitu dengan mengadakan kontak langsung dengan para pemimpin rakyat, terutama dai golongan P U S A yang selama ini (sebelumnya) menjadi inti dalam melakukan aksi / perlawanan terhadap Belanda <sup>8</sup>.

Sejak saat tentara Jepang mendarat di Aceh, mereka bersama dengan rakyat terutama barisan "F", terus melakukan serangan terhadap tentara Belanda. Jepang melancarkan serangan terhadap pasukan Belanda yang berusaha untuk mempertahankan lapangan udara Lhok Nga. Oleh karena lapangan udara itu sangat vital kedudukannya. Tetapi pasukan Belanda yang mempertahankan Lhok Nga terpaksa mundur melalui pantai Barat guna menggabungkan diri dengan pasukan-pasukan yang masih berada di pantai Barat dan pantai Selatan dengan tujuan untuk mencapai daerah pertahanan di Lawe Butar. Dalam pengunduran dari pengejaran tentara Jepang itu, pasukan Belanda tersebut dihadang oleh anggota barisan "F" di sepanjang pantai Barat Aceh. Karena itu terjadi beberapa kali konflik senjata antara pasukan Belanda tersebut dengan para pejuang di pantai Barat Aceh, yaitu yang berlangsung dari tanggal 13 hingga 18 Maret 1942<sup>9</sup>.

Selain dari mereka yang mengungsi ke arah pantai Barat dan Selatan Aceh, sebagian juga yang masih berada di Aceh Besar dan Pidie melarikan diri ke Tangse dan Geumpang (juga wilayah Pidie) yang merupakan benteng pertahanan Belanda kedua setelah Takengon (di Aceh Tengah), tetapi tentara Belanda ini terus-menerus dikejar oleh tentara Jepang.

---

8. Paul Van't Veer, *De Atjeh - Oorlog* (Perang Belanda di Aceh, alih bahasa Aboe Bakar), (Banda Aceh : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Istimewa Aceh, 1977), hal. 374.

9. M. Joenoes Jamil, *op.cit.*, hal. 56 - 57.

Pasukan Jepang berada di daerah ini pada tanggal 19 Maret 1942; kemudian menggempur pasukan Belanda yang akhirnya mereka menyerah pada hari itu juga<sup>10</sup>. Rencana Belanda yaitu ingin mempertahankan pelabuhan udara Lhok Nga dan Tangse-Geumpang yang dicadangkan sebagai basis pertahanan kedua, namun ternyata kini telah mengalami kegagalan. Sedangkan sisanya, terutama pasukan Belanda yang berada di daerah Aceh Utara, menggabungkan diri dengan pasukan induk yang berkedudukan di Takengon.

Di daerah Tanah Alas dan Gayo Luas kini ada dua markas teritorial yaitu di bawah pimpinan Gosenson dan Overakker. Mulanya Gosenson mempertahankan serbuan Jepang dari jurusan Takengon, sedangkan Overakker mempertahankan serangan yang dilancarkan dari arah Tanah Karo dengan memusatkan pertahanan di Kutacane.

Tentara Jepang terus melancarkan serangan untuk menemukan dan mendesak kedudukan kedua markas teritorial Belanda itu. Bahkan pada tingkat tertentu, tentara Jepang menyerang dari pelbagai jurusan dalam rangka memblokade kedudukan Belanda ( 24 September 1942 ). Tekanan-tekanan yang dilancarkan oleh Jepang seperti itu menyebabkan Overakker dan Gosenson terpaksa menyerah kepada Jepang di Blangkejeren ( 28 Maret 1942 ). Dengan demikian berakhirilah kekuasaan Belanda secara resmi di daerah Aceh.

## B. Pembentukan Lembaga - Lembaga Pemerintahan dan Militer.

Langkah pertama yang dilakukan oleh pemerintah pendudukan Jepang yaitu mengadakan penataan terhadap lembaga pemerintahan dalam rangka memantapkan kekuasaannya. Seperti pendahuluannya, Jepang masih tetap mempertahankan status Aceh dalam bentuk Keresidenan yaitu yang disebut Syu. Sebagai Aceh dalam bentuk Keresidenan yaitu yang disebut Syu. Sebagai Shu - Chu-chokan (residen) ditunjuk S. Inoo; Aceh bersama dengan 9 keresidenan lain di pulau Sumatra, berada di bawah Gunseibu, yang berkedudukan di Bukit Tinggi.<sup>11</sup>

10. Medan Area, *op. cit.*, hal. 31.

11. Sumatra dan Malaya berada di bawah administrasi tentara kedua puluh lima. Lihat Nugroho Notosusanto, *Tentara Peta Pada Jaman Pendudukan Jepang di Indonesia*, (Jakarta : Gramedia, 1979, hal 23 dan 158. Atau Harry J. Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit Islam Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang*, (Daniel Dhakidae pent.) (Jakarta : Pustaka Jaya 1980) hal. 274.

Struktur pemerintahan yang diwarisi oleh Belanda sebelumnya dalam bentuk afdeeling, onderafdeeling, zelfbestuur (keuleebalangan), dan gampong masih tetap diteruskan juga. Hanya saja sebutannya ditukar, yaitu bunshu untuk afdeeling, **gun** untuk onderafdeeling, **son** untuk uleebalangschaap, **ku** untuk kemukiman, dan **kumi** untuk gampong<sup>12</sup>.

Dalam penempatan jabatan pemerintahan, pemerintah penduduk Jepang tampaknya masih tetap meneruskan tradisi pendahulunya, yaitu dengan memilih elite bangsawan atau uleebalang untuk menduduki jabatan-jabatan tersebut oleh karena itu hampir semua jabatan tersebut diduduki oleh para bangsawan.

Namun ada suatu sikap longgar yang dimiliki oleh Jepang dibandingkan dengan pendahulunya, yaitu melepaskan jabatan guncho untuk diduduki oleh kalangan bumi putera<sup>13</sup>.

Dengan dalih suasana masih dalam keadaan perang, pemerintah pendudukan Jepang menekan partai-partai politik atau organisasi-organisasi massa yang sudah tumbuh sebelumnya di Aceh pada masa konsolidasi tersebut. Tindakan ini berakibat organisasi-organisasi yang sudah ada di Aceh seperti Taman Siswa, PUSA, Parindra, dan Muhammadiyah menjadi lumpuh selama masa pendudukan<sup>14</sup>. Dapat disebutkan misalnya organisasi Taman Siswa, dibubarkan oleh Gunseibu, demikian juga Parindra, PUSA dan Muhammadiyah pada mulanya tidak aktif, tetapi pada tahun 1943 diaktifkan kembali. Tetapi para pemimpinnya sudah disibuki oleh tugas rutin dalam birokrasi pemerintahan Jepang<sup>15</sup>.

Para simpatisan Jepang terutama dari golongan PUSA, yang sebelumnya menaruh harapan begitu besar kepada Jepang tentu mera-

---

12. Sebutan bagi kepala wilayah administrasi itu juga disesuaikan dengan bahasa Jepang, yaitu bunshucho bagi kepala bunshu, Guncho bagi kepala gun, soncho bagi sebutan kepala son, kucho bagi kepala ku, dan kumicho bagi kepala kumi.

13. Sebelumnya jabatan kontroleur atau guncho dijabat oleh orang Belanda. Hanya beberapa orang guncho yang bukan dari elite uleebalang. Di antaranya yaitu Sayid Abubakar dan Marah Husen yang menjadi guncho di Bakongan dan Sinabang. Daftar Guncho di Aceh lihat, A.J. Piekaar, *Atjeh en De Oorlog met Japan*. (Bandung: W. Van Hoeve, 1949), hal. 339 - 343.

14. Lihat A. Arief, *Bingkisan Kenang2an Kongres Besar PUSA dan Pemuda PUSA. Tindjukan Sedjarah Pergerakan di Atjeh*, (Seksi Penerangan Panitia Kongres Besar PUSA Kutaradja 1950), hal. 15 - 16.

15. H. J. Benda, *op. cit.*, hal. 274.

sa kurang senang dengan kebijaksanaan yang ditempuh oleh Jepang pada masa konsolidasi itu. Sehingga timbul hubungan yang dingin antara Jepang dengan mereka. Rupanya Jepang menyadari strategi yang mereka tempuh tidak menguntungkan bagi strategi jangka panjang. Sebab mereka sadar bahwa elite ulama berpengaruh dalam kehidupan masyarakat Aceh, yang menempatkan adat dengan hukum ( agama ) sebagai dua sisi mata uang. Jadi kalau mereka mau memperoleh dukungan dari lapisan bawah, potensi ulama harus dimanfaatkan <sup>16</sup>. Lagi pula elite ulama adalah kelompok yang sangat membenci Belanda pada masa sebelumnya. Justru itu maka mereka berusaha untuk menarik elite ulama di Aceh ke dalam orbitnya <sup>17</sup>.

Untuk mewujudkan rencana itu, pemerintah pendudukan Jepang membentuk lembaga Majelis Agama Islam Untuk Kemakmuran Asia Timur Raya ( Maikbatra ) di Aceh pada tanggal 10 Maret 1943. Sebagai ketua ditunjuk Tuanku Abdul Aziz, yang sebelumnya memang merupakan penasehat Chu-chokan dalam urusan Agama Islam <sup>18</sup>. Lembaga ini bertugas untuk memberi penerangan kepada umat Islam tentang pendudukan Jepang. Di samping itu ia juga merupakan wadah konsultatif antara pemerintah Jepang dengan para ulama.

Mengingat tugasnya yang demikian urgen, kepengurusan Maikbatra disempurnakan dan diperluas sehingga para ulama terwakili di dalamnya. Lalu dibentuk kepengurusan baru dengan susunan pengurus Ketua dan Wakil Ketua masing-masing, Tuwanku Abdul Aziz, Teungku Muhammad Daud Beureueh, dan Teungku Hasbi, dan setiausaha Teungku M. Joenoes Jamil. Di samping itu terdapat beberapa orang komisi dan anggota yang mewakili organisasi atau aliran keagamaan di Aceh. Untuk mengontrol organisasi ini, pemerintah menunjuk beberapa orang pejabat Jepang sebagai dewan penasehat <sup>19</sup>.

16. Kebijakan yang hampir serupa dilakukan juga terhadap elite ulama di pulau Jawa. Ibid, hal. 134 - 200.

17. Ibid.

18. Tuwanku Abdul Aziz adalah salah seorang kerabat Sultan yang cukup berpengaruh di kalangan ulama. Sejak Januari 1943, ia sudah menjabat penasehat tersebut. Lihat A. J. Piekaar, op. cit., hal. 23 - 4, 201 dan 205.

19. Komisaris terdiri dari T. Djohan Meuraksa mewakili Muhammadiyah, dan T. Amin Pidie mewakili PUSA. Anggota terdiri dari Teungku Djafar Siddiq Lamjabat, Teungku Hasballah Indrapuri, Teungku Abdulsalam, dan Teungku Abdul Wahab Seulleum. Sedangkan penasehat yaitu S. Masubuchi dan S. Jamamoto. Lihat dalam SM. Amin. Kenang-Kenangan dari Masa Lampau, ( Jakarta : Pradnya Paramita, 1978 ), hal. 27. Tindakan menempatkan pejabat Jepang dalam badan penasehat atau pertimbangan seperti itu juga dilakukan oleh Jepang terhadap MIAI. Shumubu, Jawa Hookokai, Putera, dan Masuyumi di pulau Jawa, lihat H. J. Benda, loc. cit.

Di samping penyempurnaan pengurus, konferensi Maikbatra yang berlangsung pada bulan Maret 1943 memilih beberapa orang ulama, yang bakal mewakili Aceh dalam kongres ulama-ulama Islam Sumatra dan Malaya yang bakal berlangsung di Singapura pada tanggal 5 – 6 April 1943.

Konferensi yang disponsori oleh pemerintah pendudukan Jepang itu sudah barang tentu bertujuan untuk menggalang persatuan umat Islam serantau bagi membantu Jepang dalam perang Asia Timur Raya<sup>20</sup>.

Pemerintah pendudukan Jepang menyadari bahwa surat kabar atau majalah merupakan salah satu media komunikasi yang ampuh untuk menyebarkan propaganda politik. Oleh karena itu Jepang mendirikan dan menerbitkan sebuah surat kabar bagi menggantikan surat-surat kabar yang sudah ada sebelumnya di Aceh<sup>21</sup>. Realisasi dari cita-cita tersebut yaitu dengan diterbitkannya surat kabar Atjeh **Shinbun** pada bulan Juni 1942. Koran yang terbit dua kali seminggu ( Rabu - Sabtu ) itu pada hakekatnya merupakan terompet pemerintah dalam menyebarkan propaganda<sup>22</sup>.

Peperangan Asia Timur Raya yang masih terus berlangsung mendorong pemerintah pendudukan untuk memobilasi rakyat bagi keperluan perang. Lau pada permulaan tahun 1943 dibentuk lembaga **Syu Min Koa Hookokai** ( Badan Kebaktian Penduduk Aceh Untuk Membina Asia ) dan Badan Perlindungan Tanah Air. Seperti lembaga-lembaga lain, lembaga ini berada dibawah naungan Jepang yaitu Shu chokan S. Iino. Pemimpinnya terdiri dari tokoh-tokoh ulama dan ulebalang yang cukup berpengaruh . Dengan demikian Jepang berharap melalui lembaga ini akan dapat dikumpulkan dana dan daya bagi keperluan perang.

---

20. Dalam konferensi itu, Aceh diwakili oleh Tuwanku Abdul Aziz, Teungku Muhammad Daud Beureueh, Teungku Hasbi, dan Teungku M. Joenoes Jamil, Majalah Minalmi Nomor khusus Aceh.

21. Sebelum kedatangan Jepang di Aceh terdapat beberapa koran. Di antaranya Atjeh Nieuwsblad kepunyaan pemerintah Belanda, Koran PUSA Penyoeleoh di bawah Teungku Ismail Yakub, dan beberapa koran lain baik yang berasal dari Medan atau daerah lainnya seperti Penyedar dan sebagainya. Lihat A. Arief, op.cit., hal. 15 atau Anthony Reid, *The Blood of the People : Revolution and the End of traditional Rule in Northern Sumatra*, ( Kuala Lumpur : Oxford University Press, 1980 ) hal. 25.

22. Koran tersebut diterbitkan oleh Gunseikan Bu Atjeh Sinbunsha Kutaradja. Kepala pengarang dijabat oleh S. Masubuti kemudian digantikan oleh S. Sagawa. Pemimpinnya A. Wahid seorang wartawan dari Medan. Sedangkan redaktur umumnya orang Aceh. Di antaranya Amelz, A. Hasjmy, A. Arief, A. Gani Mutiara, Teungku Ismail Yakub, dan T. Alibasyah Talsya. Lihat A.J. Piekar, op.cit., hal. 359, atau Anthony Reid, op.cit., hal. 108-109.

Kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh tentara sekutu dalam peperangan Asia Timur Raya pada tahun 1943, mempengaruhi Pemerintah pendudukan Jepang dalam pengadaan tenaga militer di Aceh. Jepang menyadari bahwa rakyat, terutama pemuda harus diikuti-seratkan dalam tugas kemiliteran, setidaknya sebagai satuan militer pembantu disamping satuan tentara reguler yang tersedia. Untuk merealisasi rencana tersebut perlu dibentuk satuan-satuan militer untuk merekrut generasi muda bagi tujuan mobilisasi <sup>23</sup>.

Di daerah Aceh, Jepang membentuk beberapa satuan militer yang terdiri dari **tokubetsu Keisatsutai** ( polisi khusus ), **Heiho** ( serdadu pembantu ), dan **Gyu gun** ( tentara sukarela ) <sup>24</sup>.

Satuan militer yang pertama dibentuk adalah Tokubetsu Keisatsutai ( Februari 1943 ). Lembaga ini menjalankan tugas sebagai polisi dalam membantu roda pemerintahan. Kecuali itu ia juga diberi tugas untuk menjaga lapangan udara ( Trumon dan Blang Peutek ). Para anggota satuan ditarik dari pada pemuda. Kepada mereka diberikan pengetahuan dasar kepolisian <sup>25</sup>.

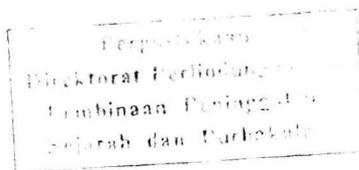
Beberapa bulan kemudian dibentuk pula satuan Heiho ( Mei 1943). Seperti halnya dengan Tokubetsu, para anggota kesatuan ditarik dari kalangan pemuda. Pada mulanya satuan Heiho ini dimaksudkan untuk mengkoordinir kelompok-kelompok pekerja kasar yang setiap saat dapat dikerahkan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan berat bagi keperluan perlengkapan tentara reguler Jepang. Dengan kata lain ia dibentuk sebagai satuan penunjang dari tentara reguler. Tetapi lambat laun mereka diberikan latihan militer dan digabungkan dalam satuan militer Jepang. Kepada mereka diberi pakaian seragam dan sistem kepangkatan sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

Berikutnya dibentuk pula satuan militer dalam bentuk Gyu gun di Aceh ( November 1943 ). Seperti halnya dengan dua satuan terdahulu, para anggota satuan direkrut dari kalangan pemuda di

23. Pembentukan satuan militer ini, di Jawa dikenal dengan Peta, Seinendan, dan Hisbullah. Sedangkan di Sumatra yaitu Tokubetsu Keisatsutai, Heiho, dan Gyu gun. Lihat H.J.Benda, op. cit., hal. 178 - 183; Anthony Reid, op. cit., hal. 116 - 119; atau Nugroho Notosusanto, op.cit., hal 42-186.

24. Masing-masing satuan ini terbentuk secara bertahap di Aceh, Tokubetsu Keisatsutai Februari 1943, Heiho Mei 1943, dan Gyu gun November 1943. Anthony Reid, loc. cit.

25. Kepala Tokubetsu Keisatsutai untuk keresidenan Aceh disebut Kaimubucho. Pada waktu berakhir pendudukan Jepang diperkirakan ada 750 orang satuan. Lihat Nasution, Sejarah Perjuangan Nasional di Bidang Bersenjata, ( Djakarta : Mega Book Store, 1964 ) hal 126.



Aceh. Satuan ini diharapkan bisa menjadi barisan kedua setelah tentara reguler Jepang dalam peperangan menghadapi sekutu. Dengan kata lain, ia dimaksudkan sebagai pasukan defensif dalam mempertahankan wilayah Aceh dari serangan sekutu<sup>26</sup>.

Satuan Gyu gun tersebut dikelompokkan atas tiga tingkatan, yaitu *hei tei* (perajurit), *kasikan* (bintara), dan *syako* (perwira). Seseorang anggota Gyu gun akan bisa beralih dari satu tangga ke tangga yang lain berdasarkan keahlian dan ketrampilan, yang ia perlihatkan dalam latihan militer.

Sesuai dengan sifatnya sebagai pasukan defensif, satuan militer Gyu gun di Aceh mempunyai dua macam tugas. Pertama satuan Gyu gun yang mengawal pantai dan daerah pedalaman. Dan kedua satuan Gyu gun yang mengawal lapangan udara. Sejalan dengan tugas yang bakal dilakukan, kedua kelompok itu mendapat latihan khusus. Satuan kelompok pertama dilatih di *rensetasi* (kamp latihan) *Idi*. Sedangkan kelompok kedua dilatih di *rensetai Lhok Nga*<sup>27</sup>.

Satuan-satuan militer baik dalam bentuk *tokubetsu keisatsutai*, *heiho*, dan Gyu gun tampaknya telah menarik bagi sebagian pemuda di daerah Aceh. Motivasi yang mendorong mereka untuk memasuki satuan-satuan militer tersebut adalah pelbagai macam. Di antaranya dapat disebutkan keinginan untuk memperoleh jaminan hidup karena kehidupan ekonomi petani yang kurang baik, keinginan untuk menghindarkan pelbagai macam kerja rodi bagi kepentingan pemerintah militer, keinginan untuk membela tanah air, dan untuk memenuhi semangat petualang<sup>28</sup>.

Sementara itu, kemerosotan yang dialami oleh tentara Jepang dalam perang Asia Timur Raya, mendorong pemerintah pendudukan untuk memperluas partisipasi politik bagi bangsa Indonesia. Di samping untuk memperoleh dukungan bagi mereka, Jepang juga berharap rakyat Indonesia nanti akan bisa mengatur diri sendiri dalam

26. Ada dua gelombang penarikan Gyu gun di Aceh. Gelombang pertama kebanyakan dijadikan *heitai* dan *kasikan*. Sedangkan penarikan gelombang kedua bersifat selektif bagi keperluan *syako*. Mereka yang ditarik untuk gelombang ini diutamakan dari kalangan bangsawan atau barisan F., *Syammaun Gaharu*. Beberapa Catatan Tentang Perjuangan Kemerdekaan di Aceh Sejak Proklamasi Kemerdekaan Sampai Dengan Pengakuan Kemerdekaan Republik Indonesia. Prasaran pada Seminar Perjuangan Aceh, (Medan, 1976).

27. Latihan di *rensetai Idi* dibuka pada tanggal 8 Desember 1943, dan di *rensetai Lhok Nga* pada bulan Maret — 1944. Lihat dalam *Medan Area*, op.cit., hal. 50 - 51.

28. Di samping jumlah anggota *Heiho* yang disebutkan di muka, ada 5000 anggota Gyu gun terdaftar di Aceh, menurut estimasi *Medan Area*, *Ibid*, hal. 50 - 51. Sedangkan anggota *tokubetsu* tak diketemukan berapa besar jumlahnya.

menghadapi sekutu. Sikap dan rencana demikian tercermin pada pidato perdana menteri Tojo di muka diet (parlemen) Jepang, maupun dalam kunjungannya ke pulau Jawa pada bulan Juli 1943.<sup>29</sup>

Untuk merealisasikan rencana tersebut, pemerintah pendudukan Jepang membentuk Atjeh Shu Sangi Kai (Dewan Penasehat Daerah Aceh) pada tanggal 17 November 1943. Badan ini semacam badan legislatif di bawah pimpinan Teuku Nyak Arief, yang beranggotakan 30 orang.<sup>30</sup> Anggotanya terdiri dari pelbagai macam kelompok elite dari Aceh. Setahun kemudian (Februari 1945), keanggotaan Shu Sangi Kai diperluas oleh Shu chokan S Iinoo. Perluasan itu disamping dimaksudkan untuk menyempurnakan susunan anggota, juga untuk menarik para elite dari pelbagai macam kelompok di Aceh kedalam lembaga tersebut<sup>31</sup>. Dengan demikian, pemerintah pendudukan Jepang secara leluasa mengontrol para elite berpengaruh di Aceh melalui lembaga ini.

### C. Kehidupan Sosial - Ekonomi.

Peperangan Asia Timur Raya yang berlangsung terus-menerus selama masa pendudukan Jepang di Aceh tampaknya amat berpengaruh terhadap kehidupan perekonomian rakyat Aceh, terutama dalam bidang pertanian dan perdagangan. Keadaan demikian barangkali karena Jepang menghadapi blokade ekonomi dari sekutu, dan pabrik-pabrik atau perusahaan besar yang beroperasi di Indonesia sebelumnya sudah seret karena pemiliknya adalah orang Eropa, (terutama orang Belanda,) ditangkap atau melarikan diri. Faktor lain yang tidak kurang penting, yaitu pengerahan tenaga rakyat bagi menyelesaikan proyek-proyek besar milik militer Jepang

Pada mulanya Jepang memang bermaksud untuk meningkatkan kehidupan perekonomian rakyat Aceh dengan membentuk

---

29. Lihat H.J. Benda, *op.cit.*, hal. 270-290.

30. Sebelumnya sudah terlebih dahulu dibentuk Shusangi In (Dewan Penasehat Pusat) Sumatra di Bukit Tinggi 24 Maret 1945. Dalam lembaga itu Aceh diwakili oleh Teuku Nyak Arief dan Teungku Muhammad Daud Beureueh. Sungguhpun Atjeh Shu Sangi Kai dibentuk pada bulan November, tetapi baru diresmikan oleh Shu chokan S Iinoo pada 8 Desember 1943. Anggotanya terdiri dari 7 orang guncho, 7 orang soncho, dan 16 orang berasal dari ulama dan cendekiawan di Aceh. Daftar anggota lengkapnya lihat SM Amin, *op.cit.*, hal. 21, atau A.J. Piekaar, *op.cit.*, hal. 344 - 345.

31. Dengan ketetapan Atjeh Shu chokan No. 2 tanggal 1 Februari 1945, anggota Shu Sangi Kai dirubah dari 30 orang menjadi 40 orang. Anggota lama hanya 19 orang lagi. 11 orang diganti dengan anggota baru. Dan juga diangkat beberapa anggota baru mewakili kelompok minoritas. Di antaranya Thio Kie San, dan dr F.J. Nainggolan. Lihat A. J. Piekaar, *ibid.*, hal. 346 - 347.

Atjeh Shu Seityo Sangu kotabutyo ( kepala urusan ekonomi dan lalu lintas daerah Aceh ) di bawah pimpinan S. Mashubuti. Perangkat lembaga ini mempunyai rencana muluk bagi peningkatan taraf kehidupan rakyat Aceh. . Beberapa rencana yang menjadi perhatiannya antara lain adalah bidang pengairan, perluasan areal persawahan, kerajinan ( terutama pemeliharaan ulat sutera), dan juga perternakan <sup>32</sup>. Kesemua rencana ini mempunyai maksud agar rakyat Aceh berswasembada dalam situasi masa perang.

Dalam perkembangan selanjutnya ternyata rencana yang disusun itu tidak terwujud sepenuhnya. Pengairan dan perluasan sawah yang merupakan tulang punggung perekonomian Aceh tidak banyak dibenah. Pemerintah Jepang hanya mengandalkan pengerahan tenaga rakyat bagi perbaikan irigasi. Tambahan para petani amat disibuki oleh tugas kerja rodi ataupun membuat ku bu-ku bu pertahanan militer.

Penyedotan tenaga oleh Jepang terhadap petani tentu membawa implikasi luas terhadap kehidupan pertanian, terutama sawah di Aceh. Sehingga pengelolaan sawah di Aceh kurang teratur. Tambahan lagi dengan dibentuknya semacam badan BDK oleh pemerintah Jepang untuk membeli dan mengutip padi dari sisa produksi petani buat keperluan suplai militer <sup>33</sup>. Kesemua faktor ini terjalin sedemikian rupa dan membawa pengaruh kepada kegalauan para petani untuk bersawah. Ini tentu membawa akibat kepada merosotnya produksi padi di Aceh, yang pada gilirannya akan menimbulkan bahaya kelaparan <sup>34</sup>.

Kemerosotan perekonomian juga terasa dalam kehidupan perniagaan. Dengan berkurangnya barang-barang impor atau substitusi impor, terutama tekstil sehingga barang itu menjadi langka di pasaran. Kekurangan tekstil ini amat berpengaruh pada kehidupan rakyat Aceh yang mengandalkan tekstil import.

---

32. Uraian mengenai rencana lembaga itu dapat dilihat pada Majalah Minami.

33. Badan itu dibentuk sampai ketinggian son. Harga pembelian gabah sudah mereka tentukan. Sungguhpun ada ketentuan padi yang mereka kutip adalah sisa produksi bagi kebutuhan makan keluarga petani, tetapi tidak jarang peraturan ini mereka abaikan. Lihat dalam T.Sabi Ubit, "Rakyat yang berjihad patriotik melawan penjajahan Jepang", Berita Buana, (Jakarta, 22 Mei 1975). Dan wawancara dengan T.M. Amin.

34. Pada bulan Mei 1944 diperkirakan 65% penduduk Aceh kekurangan beras. Amat kontras dengan masa pendudukan Belanda di mana Aceh adalah surplus beras. Lihat A.J. Piekaar, op.cit., hal. 225 - 6 , 290 - 2.

Akibatnya sebagian besar penduduk terpaksa menggunakan go-  
ni, tikar, bahkan kulit kayu sebagai bahan pakaian<sup>35</sup>.

#### D. Kehidupan Sosial Budaya

Seperti halnya dengan kehidupan sosial-ekonomi, kehidupan sosial budaya ( terutama pendidikan, kesenian, dan kehidupan beragama ) masyarakat Aceh amat terpengaruh oleh peperangan Asia Timur Raya selama pendudukan Jepang

Pemerintah pendudukan Jepang amat menyadari bahwa pendidikan merupakan salah satu alat yang ampuh bagi proses sosialisasi. Oleh karena itu ia amat memperhatikan sistem pendidikan yang dijalankan baik oleh sekolah-sekolah pemerintah ( sebelumnya Belanda ) maupun sekolah-sekolah yang dikelola oleh beberapa organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah dan Taman Siswa di Aceh.

Pada dasarnya Jepang mengelompokkan sekolah - sekolah umum yang terdapat di Aceh atas dua kelompok. Pertama adalah **kokuminko** ( sekolah negara ) yang merupakan tingkat dasar sebagai ganti *volkschool* atau *vervolg-school* sebelumnya. Dan kedua sekolah menengah, yang terdiri atas dua jenis yaitu **Shu Takko** ( sekolah lanjutan lima tahun ) dan **Sihang Gakko** ( sekolah guru )<sup>36</sup>.

Materi pendidikan pada sekolah-sekolah tersebut disesuaikan dengan kepentingan kolonialisme Jepang. Bahasa Belanda dan Inggris yang sudah diajarkan sebelumnya dihapuskan. Bahasa pengantar yang dipergunakan adalah bahasa Melayu dan bahasa Jepang. Demikian juga tulisan Hiragana dan Katagana, serta lagu-lagu Jepang seperti *Kimigayo* dan *Taiso* diajarkan pula. Bahkan pada setiap pagi, semua murid diharuskan melakukan upacara **sakerei** ( sikap badan membungkuk atau rukuk menghadap ke istana kaisar di negeri Jepang )<sup>37</sup>.

---

35. Bahkan pada tingkat tertentu diketemukan penduduk yang menggantikan kain kafan (pembungkus mayat) dengan tikar. Kesulitan itu bukan saja menyangkut pakaian, tetapi juga dengan bahan sandang pangan lainnya seperti gula. Wawancara dengan T.M.-Amin.

36. Sebagian besar guru-gurunya adalah guru-guru sebelumnya, di antaranya untuk tingkat sekolah menengah yaitu Karim Duriat, Suratno, Ali Murtolo, Hasyim MK, dan Burhanudin Harahap. Lihat 10 Tahun Darussalam dan Hari Pendidikan (Banda Aceh : Yayasan Pembina Darussalam, 1969), hal. 329.

37. Ibid., hal. 374.

Perhatian Jepang bukan saja kepada pendidikan umum yang bercorak Barat, malahan juga terhadap lembaga-lembaga pendidikan keagamaan yang sudah tumbuh dan berkembang di Aceh baik dalam bentuk pesantren maupun dalam bentuk madrasah. Untuk ini ditunjuk seorang inspektur yaitu Teungku Ismail Yakub yang bertugas mengawas dan membina pendidikan keagamaan di Aceh <sup>38</sup>.

Pagelaran kesenian rakyat yang biasa dilakukan baik dalam upacara keagamaan dan upacara daur hidup seperti **dalail, dikedulod** ( syair selawat kelahiran nabi ), seudati, ratoh, laweut, dan sebagainya sudah amat kurang dipertunjukkan. Keadaan demikian berkaitan erat dengan kehidupan perekonomian rakyat yang morat-marit karena situasi masih dalam keadaan perang <sup>39</sup>.

Kehidupan beragama juga terpengaruh sehingga agak kurang semarak selama masa pendudukan Jepang. Hal ini disebabkan karena bermacam tugas pengerahan tenaga bagi keperluan militer dan kehidupan ekonomi yang lesu. Oleh sebab itu upacara pengajian di mesjid atau meunasah tidak begitu lancar <sup>40</sup>.

Sungguhpun pada tingkat desa kehidupan beragama agak merosot dan untuk menghindari gejala akibat hal itu, maka Jepang merangkul para elite ulama, terutama yang modernis ke dalam orbitnya. Ini dimaksudkan di samping untuk tujuan politik dan juga untuk menghindari jangan terjadi kelompok elite ini membakar semangat rakyat untuk memberontak melawan mereka <sup>41</sup>. Cara yang ditempuh yaitu dengan menarik dan menggiring mereka ke dalam lembaga-lembaga pemerintahan yang sudah dibentuk (Maikbatra, Shu Sangi Kai dsbnya). Malahan untuk memperlihatkan penghargaan mereka kepada agama

---

38. A.J. Piekaar, op. cit., hal. 284 - 286.

39. Wawancara, Teungku M. Sufi dan T.M. Amin.

40. Umumnya orang Aceh melakukan pengajian pada malam hari. Sedangkan minyak lampu pada waktu itu amat sukar diperoleh. Bahkan ada larangan untuk menhidupkan lampu stromking pada malam hari, karena suasana perang. Wawancara dengan T.M. Amin.

41. Pada waktu itu sudah mulai berkembang ungkapan "Jajuz WaMa'jud" (sejenis makhluk jahat yang bakal merusak keimanan Muslim) bagi Jepang. Malahan pada tingkat tertentu berkembang ungkapan "talet asee, tapeu tamong buy" (kita kejar/usir anjing, kita masukkan babi). 2 binatang haram Islam untuk sebutan bagi Belanda dan Jepang. Seberapa jauh rasa frustrasi ini terlihat pada peristiwa Cot Plieng di bawah pimpinan Teungku A. Jalil (November 1942). Lihat A.J. Piekaar, op.cit., hal. 112 - 113, 304 - 07.

Islam, Jepang membentuk **shu kyo hoin** (mahkamah atau lembaga pengadilan Islam), pada tanggal 15 Februari 1944. Lembaga yang mempunyai birokrasi sampai ketingkat kampung ini kemudian diperluas tugasnya sehingga meliputi juga urusan zakat dan wakaf<sup>42</sup>.

#### **E. Impact Pemerintah Pendudukan Jepang Terhadap Rakyat Aceh.**

Kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah pendudukan Jepang (1942-1945) yang dimaksudkan dalam rangka mewujudkan persekemakmuran Asia Timur Raya membawa implikasi luas terhadap kehidupan masyarakat Aceh. Implikasi itu dinyatakan pada struktur pemerintahan, kekuatan politik, dan partisipasi masyarakat dalam kekuasaan dengan kadar yang berbeda-beda.

Perluasan partisipasi kepada para elite di Aceh dengan memberikan kesempatan untuk menduduki pelbagai macam lembaga (pemerintah lokal, Maikbatra, Shu Sangi Kai, Shu kyo Hoin dsbnya) secara tidak langsung memberikan latihan atau ketrampilan untuk menjadi administrator. Pengalaman yang mereka peroleh dalam pelbagai kedudukan itu memberi modal bagi diri mereka untuk membentuk struktur pemerintahan pada masa berikutnya.

Demikian juga dalam bidang kemiliteran. Satuan-satuan militer yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang memberi bekal pengalaman tentang pengetahuan militer moderen di kalangan pemuda Aceh. Para pemuda yang mendapat pendidikan kemiliteran ini bakal bisa mengorganisir lembaga kemiliteran pada masa berikutnya.

Dukungan yang diberikan oleh pemerintah kolonial terhadap golongan elite ulama dengan maksud mengharapkan partisipasi mereka memberi efek yang dalam pada kehidupan politik di Aceh pada masa berikutnya. Kecuali terjadi mobilitas vertikal, para ulama mendapat pengalaman baru bagaimana menjadikan diri sebagai administrator. Akibat lain lagi yang tidak kurang penting, yaitu semakin luasnya peranan ulama da-

---

42. S. M. Amin, *op. cit.*, hal. 27.

lam kehidupan politik di Aceh (melalui Maikbatra, Atjeh Shu sangi kai dsbnya). Malahan organisasi mereka semakin intensif melalui lembaga Atjeh Shu Kyo Hoin.

Di lain pihak, elite uleebalang tidak mendapat konsesi politik yang luas seperti elite ulama. Mereka masih tetap meneruskan peran tradisionalnya. Kemajuan yang diperoleh yaitu dengan diberi kepercayaan menduduki jabatan guncho, yang sebelumnya dijabat oleh Belanda. Sungguhpun jabatan guncho tersebut diberikan oleh Jepang pada pihak mereka, namun dalam batas tertentu Jepang memperlonggar kedudukan tersebut bagi golongan lain.

Kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah pendudukan Jepang bukan tidak dibayar dengan harga mahal. Tekanan ekonomi yang diderita oleh rakyat, pengerahan tenaga rakyat bagi keperluan militer Jepang, usaha Japanisasi terhadap kehidupan sosial kultural menimbulkan perasaan frustrasi di kalangan rakyat Aceh, yang tadinya berharap harap terlalu banyak kepada pemerintah pendudukan Jepang. Sikap frustrasi ini pada tingkat tertentu menimbulkan konflik seperti yang terjadi pada perang Cot Plieng Bayu, Perang Pandrah Jeunieb, dan perlawanan pasukan gyu gun di bawah pimpinan Teuku Hamid. Seberapa jauh sikap kurang senang yang dipertunjukkan oleh rakyat terhadap Jepang tampak dalam perlawanan fisik yang mereka pertunjukkan, tetapi juga dalam ungkapan-ungkapan seperti Jajuz Wa Ma'juz dan taleet Asee, ta teurimong buy sebagai ungkapan kekesalannya kepada Jepang.

---

## BAB III

### PROKLAMASI KEMERDEKAAN DI ACEH

#### A. Sambutan Masyarakat Aceh.

Seperti telah dijelaskan dalam bab terdahulu, bahwa pendaratan Jepang ke Aceh pada mulanya mendapat dukungan sepenuhnya dari berbagai lapisan masyarakat. Hal ini tidak lain oleh karena rakyat mengharapkan dengan kedatangan Jepang berarti kemerdekaan yang telah demikian lama dinantikan akan segera terwujud, sesuai dengan janji yang telah pernah diucapkan sebelum mereka memasuki Aceh. Janji yang telah mempengaruhi rakyat itu, terutama disampaikan melalui barisan Fujiwara Kikan dan juga sebagai hasil pertemuan dengan delegasi PUSA yang diutus ke Malaya dan Pulau Pinang.

Tetapi apa yang diharapkan oleh rakyat itu, ternyata sebaliknya yang terjadi. Rakyat Aceh semenjak daerahnya diduduki Jepang telah merasa, bahwa perlakuan Jepang kadang-kadang lebih kejam dari apa yang telah pernah dipraktikkan oleh pemerintah Kolonial Belanda. Seperti telah disinggung juga di muka rakyat sangat menderita terutama dalam bidang kehidupan ekonomi. Banyak harta rakyat yang dirampas untuk kepentingan perang melalui kaki tangannya, seperti BDK, ; demikian pula tenaga rakyat di peras untuk membuat kubu-kubu pertahanan, lapangan terbang dan lain-lain melalui pengarahannya tenaga rakyat yang dikenal dengan romusha. Hal-hal yang demikian itulah yang menyebabkan rasa kebencian rakyat semakin hari semakin bertambah, yang untuk ini tercermin dari perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh rakyat, seperti peristiwa yang dilancarkan oleh Teungku Abdul Jalil, Gerakan Gyugun di bawah pimpinan Teuku Abdul Hamid di Meureudu dan Peristiwa Pandrah—Jeunieb yang berlangsung beberapa bulan sebelum Jepang meninggalkan Daerah Aceh<sup>1</sup>.

Keadaan yang demikian tidaklah akan berlangsung lebih lama; tetapi segera berubah, terutama setelah pasukan Sekutu dapat menguasai beberapa daerah di Pasifik. Sebagai akibat dari perubahan situasi internasional pada waktu itu, menyebabkan

---

<sup>1</sup> Mengenai peristiwa yang digerakkan oleh Tgk. Abdul Jalil (Peristiwa Cot Plieng Bayu), Gerakan Gyugun di Meureudu dan Peristiwa Pandrah—Jeunieb, lihat lebih lanjut, Muhammad Ibrahim et. al, *Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh*, P3KD, Dep. P dan K, (Jakarta; 1977/1978), hal. 190 — 199.

Jepang harus mengadakan perubahan berusaha untuk mendekati penduduk kembali; berbagai daya upaya dijalankan dengan tujuan mengambil hati rakyat yang telah lama membenci mereka. Pelaksanaan dari politik yang dianut ini dapat dilihat antara lain, di mana-mana diadakan rapat umum; demikian pula dengan menggunakan mass-media, seperti harian Aceh Sinbun, untuk menarik hati rakyat.

Meskipun Jepang telah berusaha semaksimal mungkin agar rakyat tetap bersimpati kepada mereka, namun rasa kebencian itu tidak dapat terkendalikan lagi; sampai pada saat Jepang akan meninggalkan Aceh masih ada saja peristiwa-peristiwa berdarah yang diakibatkan dari rasa kebencian itu. Menjelang diumumkan kapitulasi atau pada saat-saat telah mulai jatuhnya beberapa front pertahanan di daerah-daerah yang telah mereka rebut pada awal perang Pasifik keadaan di daerah Aceh semakin bertambah genting. Dalam saat-saat yang demikian pemerintah Jepang telah mengambil beberapa langkah kebijaksanaan yang lebih merupakan pengamanan terhadap rakyat umum. Diantara tindakan pengamanan itu adalah menyita pesawat radio yang dimiliki oleh dan mengawasi dengan ketat kantor berita Domei yang selama ini memonitoring berita -tentang kemenangan Jepang atau pesan-pesan pemerintahannya kepada daerah-daerah penduduk. Demikian pula halnya dengan mass-media lainnya; bahkan satu-satunya surat kabar resmi pada waktu itu di Aceh, yaitu : Aceh Sinbun, juga diawasi dengan ketat agar berita-berita tentang kemunduran Jepang di front Pasifik, yang mungkin diketahui oleh para anggota redaksi secara rahasia (staf redaksi terdiri dari orang Jepang dan Indonesia) tidak dimuat sebagai berita.<sup>3</sup>

Dengan tindakan pemerintah Jepang itu menyebabkan para pemimpin di daerah Aceh menjadi sulit dalam mengikuti bagaimana perkembangan politik internasional yang sesungguhnya pada waktu itu. Dan hal ini pulalah yang menyebabkan hampir tidak ada komunikasi lagi antara pemimpin-pemimpin pergerakan di suatu daerah dengan daerah lainnya. Kini yang diketahui umumnya hanya siaran-siaran resmi pemerintah atau pemberitahuan

---

<sup>2</sup> Lihat juga, S.M. Amin, *Kenang-kenangan dari masa lampau*, Pradnya Paramita, (Jakarta : 1978), hal. 10 - 16.

<sup>3</sup> Muhammad Ibrahim, et. al., *op. cit.*, hal. 201.

da  
rak  
lan  
sar  
sej  
sur  
tan  
Me

besar-pembesar Jepang yang selalu menganjurkan agar bersatu padu dalam menghadapi sekutu dan sebagai imbalan Jepang akan tetap memelihara keamanan di Daerah Aceh. Ketika tiba saatnya bangsa Indonesia menerima kemerdekaan yang telah pernah di janjikan. Sehubungan dengan ini surat Aceh Sinbun dalam penerbitan istimewanya, Jum'at 13 September 1944 menyiarkan Pidato Radio Perdana Jepang, yang antara lain berbunyi :

nga  
ber  
janj  
Beg  
doe  
mei  
gen  
oer  
m'  
r

..... **Kemaharajaan Dai Nippon** memakloemkan dengan terang, bahwa kemoedian hari Hindia Timoer akan dicemerdekaannya soepaja dapat mentjapai kebahagiaannya oentoek bangsanja sendiri. **kejoejoeran Kemaharajaan Nippon** atas pendoedoek-pendoli Asia Timoer ini ..... Marilah kita bersama - sama oei hati dengan kokoh sebagai wadja dan serahkanlah segala oentoek mentjapai kemenangan bersama-sama majoe oemoelihkan Asia oentoek Asia. Kalaoe dilakoekan sedemikian peperangan soetji sekarang ini pastilah kita dapat rakan moesoeh-moesoeh kita Amerika, Inggeris, dan

l  
deka  
2605). Dan tu  
itu, yaitu dalam nomor istimewa yang terbit tanggal 7 Agustus 1945 :

m penerbitan lain dimuat pula semboyan : "Bergibantu Tentara, Menunju kearah Indonesia Merdeka". **Sinbun Kamis 15 Februari 1945 atau 15 Ni Gat** (2605). Dan tu, a hari sebelum Jepang menyerah, Aceh Sinbun sekali lagi memuat berita mengenai kemerdekaan yang dijanjikan Jepang itu, yaitu dalam nomor istimewa yang terbit tanggal 7 Agustus 1945 :

**"Kemerdekaan Indonesia jang di idam-idamkan akan ditjip-takan dalam masa jang singkat ini, demikian boenji Makloemat Balatentara Kawasan Selatan ..... Dasarnja dan Pokoknja Negara Indonesia Merdeka jang akan lahir dan soesoenan siasatnja serta hal - hal jang penting, akan ditetapkan oleh Panitia Kemerdekaan Indonesia dengan meroendingkan seteliti-telitinja. Berhoeboeng dengan ini pada hari ini Soematera Saikosikikan Kakka memberi nasehat jang menjatakan Kemerdekaan Indonesia akan segera terkabul, — Negara Indonesia akan menjadi satoe.**

<sup>4</sup> Nomor istimewa Aceh Sinbun itu tersimpan pada Aboe Bakar Bsf. dan telah dimuat pula, sebagai halaman tambahan, dalam buku yang diterjemahkannya, yaitu H.C. Zentgraaf, *Aceh*, belum diterbitkan, hal. 407 — 8.

**baghian dari lingkungan Asia Timoer Raja yang gilang gemilang jang Nippon sebagai poesatnja<sup>5</sup>.**

Tetapi bagai manapun ketatnya dilakukan pengawasan agar kekalahan mereka tidak diketahui ataupun tidak tersiar kepada rakyat, namun kemudian hal itu bisa juga diketahui, terutama melalui perwira-perwira Gyugun yang masih dipekerjakan oleh Jepang dan ditempatkan di staf intelijen. Selain itu juga melalui beberapa anggota redaksi Aceh Sinbun (disini ditempatkan sebuah radio untuk kepentingan Jepang); Secara rahasia, dan sepengetahuan redaksi orang Jepang, mereka selalu berusaha untuk mendengar berita - berita yang berasal dari pihak sekutu. Kemudian baik para perwira Gyugun, maupun para anggota Aceh Sinbun secara lisan dan rahasia berusaha pula untuk menyampaikan berita - berita tersebut, terutama yang menyangkut dengan kedudukan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya kepada para pemuka masyarakat. Penyampaian secara rahasia ini dimaksudkan agar terhindar dari jaringan Intelijen Jepang yang selalu mengamati gerak para pemuka masyarakat.<sup>6</sup> Kalau sekiranya diketahui pasti akan membahayakan mereka; bagi pemuka masyarakat yang dicurigai atau dituduh tidak memihak Jepang akan ditangkap, bahkan ada pula yang dibunuhnya. Penangkapan dan pembunuhan dalam jumlah yang besar terhadap orang-orang yang dicurigai telah direncanakan<sup>7</sup> dan juga telah pernah dilakukan, seperti penangkapan atas diri Teuku Raja Jum'at Lhong, Teuku Ali Basyah Peukan Bada dan Teuku Dullah Seulimeum. Demikian pula pembunuhan terhadap Teuku Mohd. Hasan Geuleumpang Payong dan Rizal, bekas pengurus perkara-perkara di Landraad Kutaraja. Kepada mereka ini dituduh melakukan perlawanan terhadap Dai Nippon dan menghambat kemenangan dalam perang Asia Timur Raya<sup>8</sup>.

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, terbit tanggal 15 Pebruari 1945 tersimpan pada Muhammad Ibrahim (EJD dari pengutip)

<sup>6</sup> A. Hasjmy dan T. Alibasyah Talsya, *Hari-hari pertama Revolusi 45 di Daerah Modal*, Kanwil Dep. P dan K Prop. Daerah Istimewa Aceh - SI. Aceh, 1976, hal. 7 - 8.

<sup>7</sup> . Nama-nama Pemimpin Rakyat yang direncanakan ditangkap dan dibunuh di Aceh Timur, lihat, Abdullah Hussain, *Terjebak (I)* Pustaka Antara, (Kuala Lumpur; 1965), hal. 371 - 6.

<sup>8</sup> . S.M. Amin, *op. cit.*, 15 - 16.

Di lain pihak, yang makin menambah keyakinan para pemimpin rakyat akan kemunduran tentara Jepang disetiap front adalah dari tindakan atau perbuatan mereka sendiri di beberapa tempat di Aceh. Tindakan tersebut adalah pemberhentian sukarelawan angkatan laut Jepang yang berasal dari bangsa Indonesia, di Sabang dan pembubaran kesatuan Gyugun serta menyuruh mereka agar pulang ke kampung masing-masing dan jika diperlukan lagi akan dipanggil kembali nanti. Dalam pada itu tersiar pula berita tentang adanya beberapa opsir Jepang yang melakukan tindakan bunuh diri.<sup>9</sup> Dari kejadian-kejadian tersebut semakin memperkuat dugaan mengenai kekalahan yang diderita Jepang, sebab hal-hal yang serupa itu sebelumnya tidak pernah dilakukan oleh Jepang di Daerah Aceh.

Sejalan dengan politik yang telah disebutkan di atas, yakni politik ingin mendekati rakyat dari berbagai golongan, baik para bangsawan, ulama ataupun lain-lain, maka pada bulan Juli 1945 para pembesar Jepang menghubungi tokoh-tokoh pemuda yang ada di Kutaraja, antara lain Tuanku Hasyim. Dalam pertemuan pada waktu itu, pihak Jepang kembali menegaskan, bahwa Dai Nippon pasti akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Oleh karena itu mereka meminta untuk mengkoordinir pemuda-pemuda sehingga lahir suatu angkatan pemuda yang kuat di Aceh. Bahkan beberapa hari kemudian Tuanku Hasyim diminta oleh Atjeh Syu Seityo Matsubushi(?) untuk mengadakan suatu rapat pemuda Kutaraja. Juga dijelaskan bahwa Atjeh Syu Tyokan (residen Aceh) S. Iino dan ia sendiri akan hadir dan sekaligus menyampaikan pidato pada rapat tersebut. Rapat pemuda yang dimintanya itu akhirnya dapat dilangsungkan pada tanggal 14 Agustus 1945 di Atjeh Bioskop Kutaraja dan dihadiri oleh pemuda-pemuda serta masyarakat dari setiap unsur. Suatu hal yang mengejutkan para pemuda — karena tidak diketahui tempat pada hari itu Jepang telah menyerah— adalah tidak hadirnya Syu Tjokan dan satu-satunya yang hadir dari pihak Jepang adalah Matsyubushi, yang mengucapkan pidato singkat tanpa bersemangat. Sedang dipihak pemuda telah menyampaikan pidatonya secara penuh membakar semangat, tidak saja dari unsur pemuda, seperti Ali Hasjmy, Tuanku Hasyim, tetapi juga telah turut berbicara penuh semangat dua

<sup>9</sup> Ismail Jacob, "Eiwayat Gema Proklamasi di Aceh", *Warta Pendidikan dan Kebudayaan*, np. 7, tahun 1971, Perw. Dept. P dan K Propinsi Daerah Istimewa Aceh, hal. 23.

orang pemimpin Aceh, yaitu : Teuku Nyak Arief dan Tengku Muhammad Daud Beureueh<sup>10</sup>

Rapat pemuda yang diadakan tepat pada hari menyerah Jepang itu telah memberikan arti yang penting bagi para pemuda, terutama yang berada di Kutaraja dan Aceh Besar; mereka telah mendengar langsung pengarahan-pengarahan yang diberikan oleh para pemimpin mereka pada waktu itu. Karena tidak mengherankan apabila nanti setelah diketahui Indonesia telah merdeka, para pemuda-pemuda cepat berhasil mengorganisir dirinya dalam satu barisan pemuda yang diberi nama Ikatan Pemuda Indonesia (lihat bagian berikutnya dibawah). Ini adalah merupakan hasil nyata dari rapat tersebut, meskipun pada waktu rapat berlangsung tidak dengan tegas menyinggung hal-hal yang menyangkut dengan perlunya dikoordinir kekuatan pemuda untuk mempertahankan kemerdekaan yang akan di proklamirkan (tidak diberikan oleh Jepang).

Dengan gambaran sebagai mana yang telah dikemukakan di atas, dapatlah menunjukkan, bahwa suasana di Ibukota Aceh Syu (keresidenan Aceh) khususnya dan di tempat-tempat lain di Aceh umumnya, pada bulan-bulan terakhir menjelang kekalahan Jepang tampaknya kacau dan tidak menentu. Para pemimpin rakyat tidak mengetahui dengan pasti apa yang sedang terjadi, sebab berita-berita (informasi) umumnya tidak dapat dijadikan pegangan. Karena peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada waktu itu tidak dapat diketahui dengan segera; kapitulasi Jepang tanggal 14 Agustus 1945 dan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 tidak dapat didengar pada saat peristiwa itu berlangsung. Kedua peristiwa bersejarah ini baru diketahui oleh rakyat Aceh setelah beberapa waktu berselang.

Mengenai peristiwa kapitulasi Jepang pada mulanya hanya diketahui secara samar-samar, yaitu melalui para perwira Gyugun yang masih bekerja di staf intelijen Jepang dan juga melalui beberapa orang Indonesia (Ghazali Yunus, M. Nur, Amiruddin S, Bustamam dan Bustami) yang bekerja pada kantor berita Domai di Kutaraja.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> . Tuanku Hasyim, "Detik-detik Proklamasi 1945" Warta Pendidikan dan Kebudayaan, *op. cit.*, hal. 13.

<sup>11</sup> Aboe Bakar Bsf, *op. cit.*, hal. 563; Ismail Jacob, *op. cit.*, hal. 22.

Mula-mula berita yang samar-samar ini tidak begitu terpengaruh dalam masyarakat, tetapi kemudian setelah terlihat tindakan dan gerak-gerik Jepang sendiri, sebagaimana telah disebutkan di atas maka berita tersebut semakin tersebar luas dalam masyarakat. Keadaan yang serba tidak kepastian itu pada mulanya tidak ditanggapi secara serius oleh para pembesar Jepang di Aceh. Tyokan sendiri, sebagai penguasa tertinggi di sana tidak pernah memberikan keterangan resmi mengenai kekalahan Jepang itu. Hal ini mungkin di dasarkan pada pertimbangan, bahwa jika situasi yang sesungguhnya diketahui oleh rakyat, diperkirakan mereka akan mendapat perlawanan dari rakyat, sebagai mana yang telah dialami oleh Belanda sebelumnya, yaitu pada waktu mereka akan meninggalkan Aceh (apa yang diduga itu, seperti akan diuraikan dalam bagian berikutnya, memang benar terjadi).

Karena situasi daerah semakin tidak menentu, maka pada tanggal 23 Agustus 1945 Tyokan S. Iino terpaksa memanggil para pemimpin rakyat ke tempat kediamannya (pendopo Gubernur sekarang). Adapun tokoh-tokoh pemimpin yang dipanggil itu ialah : Teuku Nyak Arief, Teuku Panglima Polem Mohd. Ali, Tengku Mohd. Daud Beureueh, Said Abu Bakar dan Teuku Ahmad Danu<sup>12</sup>. Dalam pertemuan itu S. Iino secara resmi menyampaikan hal-hal yang menyangkut dengan situasi daerah Aceh dan posisi Jepang pada waktu itu, tetapi tidak sedikitpun menyinggung mengenai Proklamasi Kemerdekaan Indonesia; Ia hanya menegaskan bahwa perang telah selesai dan kepada para pemimpin rakyat dianjurkan untuk bersama dengan pemerintah Jepang menjaga keamanan di daerah Aceh. Selain itu pada tanggal 24 Agustus 1945 Bunsyutyo Aceh Timur, Obara, juga telah menyampaikan hal yang serupa kepada para guntyo, suntyo dan kutyo yang ada dalam wilayahnya. Ditambahkan lagi olehnya kata-kata : "Apa boleh buat perang sudah damai, jadi Indonesia tidak dapat merdeka lagi"<sup>13</sup> (yang dimaksudkan tentu kemerdekaan "hadiah" Jepang, sebab kemerdekaan yang diproklamirkan oleh bangsa Indonesia sendiri telah terjadi tujuh hari sebelumnya; dan ini tidak diberitahukan kepada yang hadir pada waktu itu).

Pembicaraan antara pemimpin rakyat dengan Tyokan S. Iino

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal. 23.

<sup>13</sup> Abdullah Hussain, *Peristiwa*, (HI) Pustaka Antara (Kuala Lumpur : 1965), hal. 5.

tanggal 23 Agustus itu tidak diketahui oleh rakyat umum, berhubung pertemuan diadakan tertutup dan yang hadir juga terbatas. Karena itu mengingat pentingnya, diminta agar Tjokan mengumumkan secara resmi mengenai apa yang telah disampaikannya dalam pertemuan tersebut kepada segenap lapisan masyarakat. Untuk maksud inilah pada tanggal 25 Agustus 1945 Tyokan S. Iino mengeluarkan sebuah maklumat yang ditujukan kepada seluruh rakyat Aceh. pada hari itu juga, setelah semua pegawai *gunseibu*, baik bangsa Jepang maupun bangsa Indonesia, hadir di halaman pendopo, Tyokan memberikan penjelasan mengenai telah terjadinya perdamaian antara Dai Nippon dengan sekutu. Penjelasan itu diberikan berdasarkan maklumat Soematera Saikosikikan Kakka, yang menyatakan bahwa peperangan Asia Timur Raya telah berakhir dan kemaharajaan Dai Nippon telah bersedia melangsungkan perdamaian dengan Amerika, Inggris, Rusia dan China. Selanjutnya Tyokan S. Iino juga menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya atas segala bantuan rakyat Aceh serta kerja sama yang baik dengan Dai Nippon selama ini <sup>14</sup>

Maklumat resmi yang dikeluarkan oleh Atjeh Syu Tyokan itu dalam waktu yang relatif singkat telah tersebar luas keseluruh pelosok daerah Aceh. Harian Atjeh Sinbun yang terbit sebagai edisi terakhir pada hari keluarnya maklumat tersebut juga memuatnya, karena dianggap isinya penting untuk diketahui secepat mungkin oleh rakyat umum dan tentu juga sebagai kenang-kenangan terakhir pada penutup usianya itu <sup>15</sup>. Demikian pula halnya dengan para pemuda yang telah memperoleh maklumat tersebut; secara cepat diperbanyak dan ditempelkannya disetiap sudut kota, bahkan secara meraton dikirimkan keluar Kutaraja, sehingga dalam waktu beberapa hari saja sebagian besar rakyat telah mengetahui keadaan yang sesungguhnya <sup>16</sup>.

Mengenai dengan berita proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang diucapkan oleh Bung Karno dan Hatta tanggal 17 Agustus 1945 juga terlambat beberapa hari di terima di Aceh. Agaknya hal

<sup>14</sup> Ismail Jacob, *op. cit.*, hal. 23-4.

<sup>15</sup> Ismuha, "Pengetahuan saja sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945", *Warta P dan K*, no. 7 tahun 1971, Perw. Dep. P dan K Propinsi Daerah Istimewa Aceh, hal. 5-6.

<sup>16</sup> *Ibid.*, : Ismail Jacob, *loc. cit.*

ini juga menjadi salah satu faktor sehingga setelah diketahui Jepang telah menyerah kalah, timbul keragu - raguan pada sebagian masyarakat Aceh terutama di wilayah-wilayah afdeeling, siapa sebenarnya, setelah Jepang, yang akan mendarat lagi ke Aceh, Amerika, Inggris, Australia, China atau Belanda; bahkan orang China telah bersiap-siap untuk menyambut kedatangan tentara Tjiang Kai Sek pada waktu itu<sup>17</sup>. Tetapi keadaan segera berubah setelah berita proklamasi Kemerdekaan diterima dengan pasti dan khususnya para pemuda mulai bertindak tegas dengan mengorganisir dirinya ke dalam barisan-barisan Pemuda.

Sebelum berita Proklamasi Kemerdekaan sampai ke Aceh umumnya rakyat di sana hanya mengetahui, bahwa dari pulau Sumatera ada wakil yang ditunjuk untuk mewakili Sumatera sebagai anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Mereka ini terdiri dari Mr. Teuku Moh. Hasan, Dr. Amir dan Mr. Abbas, yang pada tanggal 7 Agustus 1945 berangkat ke Jakarta melalui Singapura untuk menantikan kembalinya Bung Karno dari Saigon. Dari Singapura tanggal 14 Agustus mereka bersama-sama Bung Karno menuju ke Jakarta.<sup>18</sup> Mengenai apa kegiatan ketiga wakil dari Sumatera itu sejak keberangkatannya tanggal 7 Agustus tidak diketahui dengan pasti, oleh karena komunikasi antara Daerah Aceh dengan Jakarta, tidak lancar lagi terutama sejak menjelang dan setelah kapitulasi Jepang.

Mr. Teuku Mohd. Hasan bersama dengan ke dua rekannya itu baru kembali ke Sumatera melalui Palembang pada tanggal 24 Agustus 1945. Di Palembang Mr. Mohd. Hasan, yang telah diangkat menjadi Wakil Pemimpin Besar untuk Sumatera sejak tanggal 22 Agustus, meminta kepada Dr. A.K. Gani untuk membentuk Komite Nasional Indonesia (KNI) daerah Sumatera Selatan dan mengharapkan agar dapat menyiarkan berita Proklamasi Kemerdekaan ke daerah-daerah lain menurut cara yang mungkin ditempuhnya. Dari Palembang ketiga Tokoh pemimpin ini meneruskan perjalanan menuju ke Medan dengan singgah di beberapa kota seperti Jambi, Bukit Tinggi, Tarutung dan baru sampai di

---

<sup>17</sup>. Abdullah Hussain, *op. cit.* (II), hal. 14, seksi Penerangan / Dokumentasi Komite Musyawarah Angkatan 45 Daerah Istimewa Aceh, *Modal Revolusi 45*, 1960, hal. 54; lihat juga bahan *Seminar Sejarah Perjuangan Pemuda Indonesia Daerah Tk. II Aceh Tengah*, (Takengon: 24 - 25 Pebruari 1965) Kolonel Haji Syahadat, *Perjuangan Rakyat Aceh Tenggara sejak tahun 1873 s/d Kemerdekaan RI Mendatang Penjajahan Prasaran*, 1976, hal. 124.

<sup>18</sup> Teuku Mohd. Hasan, Wawancara, tanggal 20 Juni 1979.

sana pada tanggal 29 Agustus 1945. Di kota-kota yang disinggahi itu Mr. T. Mohd. Hasan juga menganjurkan pembentukan KNI daerah setempat serta menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan. Di Bukit Tinggi anjuran itu disampaikan tanggal 26 Agustus melalui Adinegoro dan Muhammad Syafii, selaku ketua Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera (*Soematera Tyo-Sangi In*)<sup>19</sup>

Setelah tiba di Medan, Mr. T. Mohd. Hasan sebagai wakil Pemerintah Pusat R.I. untuk Sumatera juga segera melaksanakan tugasnya seperti yang telah dilakukan sebelumnya di daerah-daerah lain di Sumatera, yaitu menyampaikan berita proklamasi dan anjuran pembentukan KNI daerah di Sumatera bagian Utara, termasuk daerah Aceh. Namun sebelum datang berita resmi itu, secara tidak resmi sebenarnya berita Proklamasi Kemerdekaan juga telah lebih dahulu diterima di daerah Aceh; hanya pada waktu itu belum meluas diketahui oleh seluruh rakyat di sana, tetapi terbatas pada beberapa orang pemuka masyarakat saja. Menurut Hoesin Yoesoef (bekas Panglima Devisi X TNI Sumatera) berita yang pertama diketahui tentang Proklamasi Kemerdekaan adalah di Bireuen pada tanggal 19 Agustus 1945. Berita itu diketahui oleh Hoesin Yoesoef, yang pada waktu itu bekerja pada staf intelgen resmi *Fojoka* dengan pangkat Letnan Gyugun, melalui sebuah radio Jepang yang di tempatkan di sana. Kemudian berita tersebut segera disampaikan kepada perwira-perwira Gyugun lainnya, seperti kepada Agus Husein dan lain-lain, serta kepada pemuka-pemuka masyarakat di sekitar Kota Bireuen.<sup>20</sup>

Di Kutaraja berita tentang Proklamasi Kemerdekaan baru diketahui pada tanggal 21 Agustus 1945, yaitu melalui para pemuda (Ghazali Yunus dan kawan-kawan) yang bekerja pada kantor berita Jepang, Domei. Mereka secara rahasia berhasil mendengarkan radio yang ditempatkan disana dan setelah itu segera memberi tahukannya kepada teman-teman akrab mereka, sehingga pada hari itu juga para pemuda Indonesia yang bekerja

---

19 *Ibid.*

20 Hoesin Yoesoef, "Sejarah Perjuangan Pemuda di Daerah Aceh", *Warta Pendidikan dan Kebudayaan*, no. 7 th. 71, hal. 30; Seksi Penerangan/Dokumentasi Musyawarah Angkatan 45 Daerah Istimewa Aceh, *op. cit.*, hal. 41-2.

pada *Hodoka* (Kantor Berita penerangan Jepang) dan harian Atjeh Sinbun di Kutaraja telah mengetahui berita gembira itu<sup>21</sup>. Selanjutnya, beberapa hari kemudian Teuku Nyak Arief juga menerima kawat pemberitahuan tentang Proklamasi Kemerdekaan dari Dr. A.K. Gani di Palembang, serta Muhammad Syafei dan Adinegoro di Bukit Tinggi yang secara resmi melalui Mr. Teuku Mohd. Hasan – telah mengetahui berita tersebut, seperti disebutkan di atas, masing-masing tanggal 24 dan 26 Agustus yang lalu<sup>22</sup>. Setelah itu, sampai tibanya berita resmi dari wakil Pemerintah Pusat yang kemudian diangkat menjadi Gubernur Sumatera, Mr. Teuku Mohd. Hasan, selama akhir Agustus – September 1945 berita Proklamasi Kemerdekaan dengan cepat mulai tersebar ke seluruh pelosok daerah Aceh, sejak dari pesisir utara, Timur, Barat dan Selatan sampai ke daerah Aceh Tengah dan Tenggara<sup>23</sup>.

Seiring dengan diterimanya berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di tempat-tempat, itu dilakukan pula pengibaran bendera sang merah putih. Pengibaran bendera itu terutama dilakukan di depan kantor-kantor resmi pemerintah Jepang yang selalu mendapat tantangan dan perlawanan dari tentara Jepang<sup>24</sup>. Kemudian meluas ke tempat-tempat umum, seperti tanah lapang, toko-toko dan lain-lain yang juga selalu dihalang-halangi oleh pihak penguasa Jepang yang masih berkuasa atas nama sekutu pada waktu itu.

Dari sekian tempat yang telah dikibarkan bendera Sang Merah Putih, yang terpenting adalah yang dilakukan pada tanggal 24 Agustus 1945 di depan kantor Keimubu (Kantor Polisi Jepang; Kantor Baperis sekarang) oleh para pegawai bangsa Indonesia. Dalam penaikan bendera di sini telah timbul insiden dengan serdadu Jepang yang sedang mengawal Tyokan tidak jauh dari kantor itu (Pendopo Gubernur sekarang). Insiden ini terjadi sewaktu Muhammad Hasyim, Wakil Kepala Polisi yang diangkat Jepang

21 Seksi Penerangan/Dokumentasi Musyawarah Angkatan 45 Daerah Istimewa Aceh, *op. cit.*, hal. 54; A. Hasjmy dan T. Alibasyah, *op. cit.*, hal. 11; Jarahdam I/Iskandar Muda, *Dua Windu Kodam I/Iskandar Muda*, 1972, hal. 79; Aboe Bakar Bsf, *op. cit.*, hal. 390.

22 Ismuha, *op. cit.*, hal. 7; Ismail Yacob, *op. cit.*, hal. 26.

23 Mengenai tersiamya berita Proklamasi ke daerah-daerah tersebut lihat. Seksi Penerangan Angkatan 45, *op. cit.* Abdullah Husein, *op. cit.*, (II), Kolonel Haji Syahadat, *op. cit.*, hal. 123 dst; Panitia Seminar Perjuangan Pemuda Aceh Tengah, *op. cit.*, hal. 9 dst.

24 Jarahdam I. *op. cit.*, hal. 80; Ismuha *op. cit.*, hal. 8.

sedang memimpin penaikan bendera Merah Putih di sana. Pada waktu itu Muhammad Hasyim ditegur dan dihalang-halangi; bahkan kemudian bendera yang telah dikibarkan itu diturunkannya. Perbuatan serdadu Jepang itu tidak diterima dan pada saat itu pula seorang peserta, yaitu Muhammad Amin Bugis, dengan bersemangat merampas kembali Bendera Merah Putih dari serdadu Jepang itu, lalu menaiki tiang bendera untuk selanjutnya mengikat tali bersama bendera kembali. Tindakan dengan semangat yang meluap ini tidak berhasil dihalangi oleh pihak Jepang, sehingga mereka membiarkan saja Bendera Merah Putih berkibar di depan kantor Keimubu itu <sup>25</sup>. Dan di tempat ini pula kemudian dibangun sebuah tugu untuk memperingati penaikan bendera Merah Putih yang sampai saat ini dianggap pertama kali di daerah Aceh (tugu tersebut sekarang dapat kita saksikan di depan Kantor Baperis).

Selanjutnya pada tanggal 25 Agustus 1945, pemuda A. Hasjmy beserta rekan-rekannya juga menaikkan bendera Merah Putih di depan kantor Aceh Sinbun. Di sini juga mendapat tantangan dari pihak pembesar Jepang, antara lain dari H. Nagamatsu, seorang pejabat teras pada Hodoka (Kantor penerangan Jepang), namun usaha mereka menemui kegagalan <sup>26</sup>. Setelah itu kegiatan penaikan bendera Merah Putih semakin bersemangat dilakukan ditempat-tempat lain di Kutaraja dan sekitarnya. Dan selama bulan September sampai awal Oktober 1945 pengibaran Bendera Merah Putih telah berlangsung di Kota-kota lain di seluruh Aceh, seperti : Sigli, Bireuen, Lho' seumawe, Lho' sukun, Idi, Langsa, Kuala Simpang, Kuta Cane, Takengon, Meulaboh, Tapaktuan dan lain-lain <sup>27</sup>.

Untuk lebih meratakan pengibaran bendera Merah Putih sampai ke pelosok-pelosok desa dan sejalan pula dengan memperingati dua bulan Proklamasi Kemerdekaan, tanggal 13 Oktober 1945 Komite Nasional Indonesia (KNI) Daerah Aceh, melalui Maklumat No. 2 secara resmi memerintahkan pengibaran bendera

---

<sup>25</sup> Jarahdäm I/Iskandar Muda, *op. cit.*, hal. 79.

<sup>26</sup> T.A. Talsya, "Perjuangan Kemerdekaan di Aceh", *Santunan*, no: 18—th. III, April 1978, hal. 10; A. Hasjmy dan T. Albasyah Talsya, *op. cit.*, hal. 8.13.

<sup>27</sup> Mengenai kegiatan penaikan bendera di kota-kota tersebut, lihat a.l., Seksi Penerangan Komite Musyawarah Angkatan 45 Daerah Istimewa Aceh, *op. cit.* : Abdullah Husein, *op. cit.*, (II), hal. 52 dst.; Kolonel Haji Syahadat, *op. cit.*, hal. 123 dst.

sampai tanggal 17 Oktober pada tiap-tiap rumah di seluruh Daerah Aceh. Adapun isi maklumat tersebut selengkapnya <sup>28</sup>, ialah :

## MAKLOEMAT NO. 2

Dipermakloemkan kepada segenap pendoedoek bangsa Indonesia di daerah Atjeh, soepaja dimoeka tiap-tiap roemah dikibarkan bendera kebangsaaan Indonesia, dengan ketentuan :

- a. dikibarkan moelai ini hari sampai tanggal 17 Oktober 1945.
- b. Bendera dikibarkan moelai djam 7 pagi sampai djam 6 sore (Sumatera).
- c. Djikalau waktoe hoedjan, bendera tidak usah dikibarkan.

Koetaradja, 13 Oktober 1945,

Ketoea Poesat  
Komite Nasional  
Toeankoe Mahmoed.

Mengenai pembentukan KNI daerah Aceh, yang sampai saat itu telah mengeluarkan tiga buah maklumat (yang pertama, tanggal 4 Oktober tidak bernomor mengenai pemerintahan R.I. di Sumatera dan Aceh; kedua tanggal 10 Oktober maklumat no. 1 mengenai uang kertas Jepang masih berlaku dan uang kertas Belanda cetakan baru tidak berlaku di daerah Aceh <sup>29</sup>), sebenarnya telah dirintis sebelum bulan Oktober. Pada tanggal 28 Agustus 1945 Teuku Nyak Arief, setelah menerima kawat dari Dr. A.K. Gani dan Muhammad Syafie, telah mengambil inisiatif untuk itu. Sebagai ketua pertama terpilih Teuku Nyak Arief yang selama ini juga memangku jabatan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh bentukan Jepang (Aceh – Syu Sangi-Kai) dan sebagai wakil ketua terpilih Tuanku Mahmud. Tetapi pada waktu susunan anggotanya belum sempurna; baru setelah secara resmi pemerintahan R.I. di daerah Aceh terbentuk (Keresidenan Aceh sejak tanggal 3 Oktober 1945), susunan anggotanya disempurnakan, yakni sejumlah 65 orang (lihat lampiran) dan ditunjuk (belum mungkin diadakan pemilihan) berdasarkan pencalonan dari partai-partai. Selanjutnya

---

<sup>28</sup> Foto asli maklumat itu, lihat. Seksi Penerangan/Dokumentasi Musyawarah Angkatan 45 Daerah Istimewa Aceh, *op. cit.* hal. 66.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hal. 40; Aboe Bakar Bsf, *op. cit.*, hal. 392.

jabatan ketua, sejak tanggal 10 Oktober 1945, seperti terlihat dari maklumat yang dikeluarkan, digantikan oleh Tuanku Mahmud, sedang Teuku Nyak Arief tetap memangku Jabatan residen Aceh, yang telah dijabatnya sejak 3 Oktober 1945. Adapun kantor KNI Daerah Aceh yang pertama adalah bekas *Centraalkantoor derland-chapskassen* di Kutaraja (Jalan Cut Mutia sekarang) dan kemudian berpindah kesebuah gedung bekas milik seorang pengusaha Belanda, bernama *Kerlen* (sekarang menjadi Kantor Polisi Resort Kotamadya Banda Aceh/Kabupaten Aceh Besar di jalan Cut Mutia)<sup>30</sup>

Selain itu dapat juga ditambahkan, bahwa sejak berita Proklamasi Kemerdekaan diterima di daerah Aceh, Teuku Nyak Arief selalu mengibarkan bendera Merah Putih kecil pada mobil<sup>31</sup>. Hal ini juga menyebabkan rakyat semakin berani bertindak untuk mengibarkan bendera, baik di tempat-tempat umum, maupun di depan rumahnya sendiri.

Dan beriringan dengan kegiatan pengibaran bendera Sang Merah Putih di seluruh Daerah Aceh berlangsung pula tindakan pengambilan-alihan kekuasaan dan perebutan senjata dari pihak Jepang serta membentuk pemerintahan R.I. di sana. Hal ini akan dibicarakan lebih lanjut dalam bagian berikut dibawah ini.

## B. Pembentukan Pemerintahan Republik Indonesia di Daerah Aceh.

Meskipun berita Proklamasi Kemerdekaan telah tersebar luas di Daerah Aceh sejak akhir Agustus – September 1945, namun pemerintahan R.I. yang definitif baru terbentuk dan digerakkan di sana sejak tanggal 3 Oktober 1945, yaitu setelah keluarnya pengumuman resmi Gubernur Sumatera yang menyatakan bahwa: "Pemerintahan Negara Repoeblik Indonesia moelai dengan resmi di jalankan dengan Poelaoe Soematera, dengan pengangkatan residen-residen seloeroeh dan staf Goebernoer dengan mempergoenakan kekoeasaan yang diberikan Presiden Negara Repoeblik Indone-sia"<sup>32</sup>. Tetapi ini tidak berarti pada waktu sebelumnya para pemimpin di Aceh tidak berusaha ke arah itu, bahkan pengumuman tersebut lebih merupakan pengesahan dari pihak atasan kepada

<sup>30</sup> Mardanas Safwan, *Teuku Nyak Arief, Proyek Biografi Pahlawan Nasional Dept. P dan K, (Jakarta: 1975)*, hal. 11,88; S.M. Amin, *op. cit.* hal. 35; Aboe Bakar Bsf, *op.cit.*, *op. cit.*, hal. 568.

<sup>31</sup> Mardanas Safwan, *op. cit.*, hal. 11.

<sup>32</sup> Panitia penerbitan Boekoe Peringatan, *Satoe Tahoen N.R.I. Di Soematera (17-8-1945 — 17-8-1946)*, diterbitkan oleh Pemerintah Poesat Soematera.

pemerintah daerah keresidenan Aceh yang telah disusun sebelumnya dan telah menyatakan sumpah setia kepada Negara Republik Indonesia, serta kendatipun adanya hambatan-hambatan dari pemerintahan pendudukan Jepang yang masih berkuasa atas nama sekutu pada waktu itu mulai menggerakkan roda pemerintahan disana.

Sehubungan dengan di atas, pada bulan September 1945 Teuku Nyak Arief dalam kedudukannya selaku *Atjeh-syu Sangi-kai-tyo* (Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh; dan secara tidak resmi pada waktu itu Teuku Nyak Arief juga telah menjadi ketua Komite Nasional Daerah Aceh), telah membuat surat Perintah kepada Teuku Panglima Polem Mohd. Ali (Panglima Sagi XXII Mukim Aceh Besar) untuk menemui *Atjeh Syu Sei Tyo* "*Somubu-tyô* (Kepala Urusan Pemerintahan umum pada Kantor Keresidenan Aceh). Dalam surat itu Teuku Nyak Arief meminta agar Somubu Tyo menghadap *Atjeh Syu Tjokan* (Residen Aceh) S. Iino untuk membicarakan penyerahan pemerintahan dari Jepang kepada Teuku Panglima Polem. Ditegaskan juga melalui Panglima Polem, bahwa sejak waktu itu Teuku Nyak Arief tidak bersedia lagi mengadakan hubungan dengan Jepang. Pembicaraan pada hari itu tidak memperoleh hasil yang positif; alasannya ialah Tyokan (Residen) tidak dapat bertindak lebih jauh selain dari yang telah ditentukan oleh sekutu. Namun, nampaknya sikap Tyo kan S. Iino tidak sekeras lagi seperti pada waktu yang lalu. Hal ini tampak juga dari kedatangan Somubu Tyo ke rumah Teuku Panglima Polem pada sore harinya dengan membawa uang sebanyak R. 100.000,- (seratus ribu rupiah Jepang) yang katanya berasal dari pemberian Tyokan untuk dapat dipergunakan dimana perlu. Uang itu kemudian oleh Teuku Panglima Polem diserahkan kepada Teuku Nyak Arief yang dipergunakan sebagai modal pertama untuk menggerakkan roda pemerintahan Republik Indonesia di Daerah Aceh <sup>33</sup>.

Karena sikap Tyokan S. Iino yang demikian menyebabkan para pemimpin di Aceh menentukan sikapnya sendiri. Mereka segera bertindak untuk menyusun aparat pemerintahan Keresidenan Aceh. Dan dalam bulan September 1945 itu juga semua

<sup>33</sup> Wawancara Aboe Bakar Bsf. dengan Almarhum Teuku Panglima Poleh Mohd. Ali tanggal 17 Nopember 1971, yang seluruhnya dimuat kembali oleh pewawancara sebagai halaman tambahan dari buku yang diterjemahkannya: H.Z. Zentgraaff, *Atjeh*, terjemahan belum diterbitkan, hal. 409-10. Juga dimuat dalam memoires TMA Panglima Polem, terjemahan J.H.J. Brendgen. 1972, hl. 13.

pegawai bangsa Indonesia, yang selama ini bekerja pada kantor pemerintahan Jepang di ibukota Kutaraja, disumpahkan oleh Teungku Ismail Ja'cob menjadi pegawai Pemerintah Republik Indonesia<sup>34</sup>. Kegiatan pengambil alihan pemerintahan dari tangan Jepang secara bertahap terus ; dilaksanakan; dan tampaknya tentara Jepang tidak mampu mengatasinya, walaupun Tyokan S. Iino sejak tanggal 25 Agustus 1945 telah mengeluarkan maklumat yang mengancam: "Barang siapa yang melaksanakan keamanan atau mengganggoe kesentosaan negeri akan dikenakan hoekoeman berat"<sup>35</sup>.

Hal ini tentu erat hubungannya dengan adanya semangat rakyat yang meluap-luap, terutama dalam rangka kegiatan mereka merebut senjata dari tentara Jepang, di samping sikap keras dan diplomatis para pemimpin Aceh dalam menghadapi pejabat teras pemerintahan Jepang di sana, sehingga membuat mereka, yang pada waktu itu memang tidak bersemangat lagi, menjadi lemah dan tidak berdaya.

Langkah selanjutnya yang perlu mendapat perhatian segera adalah mengenai kepala pemerintahan di daerah-daerah seluruh Aceh. Untuk ini para pegawai Indonesia, yang selama ini ditetapkan oleh Jepang sebagai *Fuku Bunsyu-tyo* (Wakil Asisten Residen; Asisten Residen adalah orang Jepang sendiri) sementara ditunjuk untuk menjabat Asisten di daerahnya. Sedang Guntyo (Contreleur atau Kepala Wilayah ) dan Suntyo yang mengepalai daerah Uleebalang sebagaimana biasa tetap mengepalai pemerintahan di daerah mereka masing-masing. Mengenai nama-nama daerah tersebut pada mulanya dikembalikan seperti nama sebelum masa pendudukan Jepang, yaitu : daerah-daerah yang dikepalai oleh Asisten Residen disebut *Afdeeling* (kemudian tahun 1946, menjadi Kabupaten di kepalai oleh Bupati) dan daerah-daerah yang dikepalai oleh Contreleur atau kepala Wilayah disebut *Onderafdeeling* ( tahun 1946 menjadi wilayah dan kemudian Kewedanaan). Sedang daerah-daerah Uleebalang yang dipimpin oleh seorang uleebalang (Teuku Chik, Keujruen, Raje dsb), namanya tidak dikembalikan menjadi daerah *Zelfbestuur* atau uleebalang seperti pada masa pemerintahan Kolonial Belanda, melainkan tetap dise-

<sup>34</sup> Ibid., hal. 410.

<sup>35</sup> Foto asli makloemat tersebut, lihat, seksi Penerangan/Dokumentasi Komite Musyawarah Angkatan 45 Daerah Istimewa Aceh, *op. cit.*, hal. 83;

but daerah Uleebalang (setelah terjadi revolusi sosial, pada awal tahun 1946 daerah ini disebut *Negeri* dengan dikepalai oleh 5 orang Dewan Pemerintahan Negeri ).

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas menjadi jelas, bahwa, sekalipun ada tekanan dan hambatan dari tentara dan pemerintahan Jepang yang pada waktu itu masih berkuasa atas nama sekutu, secara tidak resmi unsur-unsur pemerintahan negara Republik Indonesia di daerah Aceh telah mulai bekerja sebelum keluarnya pengumuman dan penetapan resmi Gubernur Propinsi Sumatera (salah satu Propinsi, yang membawahi beberapa keresidenan, termasuk keresidenan Aceh di Sumatera, dari 8 Propinsi Negara Republik Indonesia sesuai dengan keputusan sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 19 Agustus 1945).

Pada tanggal 22 Agustus 1945 Ir. Soekarno atas nama pemimpin Besar Bangsa Indonesia pada waktu itu mengangkat Mr. Teuku Muhammad Hasan, anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dari Sumatera, sebagai wakilnya di Sumatera; dan "mewajibkan beliaoe serta memberikannya koeasa oentoek menyelenggarakan segala kepoetoesan yang diambil dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan dan Oentoek mewoejoedkan cita-cita yang lain, yang telah dilahirkan dalam sidang tersebut.<sup>36</sup> Kemudian, untuk lebih mempertegas pengangkatan ini, pada tanggal 29 September 1945, Presiden Negara Republik Indonesia Ir. Sukarno, menetapkan Mr. Teuku Muhammad Hasan menjadi Gubernur Propinsi Sumatera dan wakil Pemerintah Pusat disana

Berdasarkan wewenang yang diberikan itu, mak pada tanggal 3 Oktober 1945 Gubernur Sumatera mengeluarkan pengumuman seperti yang telah disebutkan di muka yang kemudian disusul dengan ketetapan-ketetapan mengenai pengangkatan residen di seluruh Sumatera, susunan staf pemerintahan Sumatera dan jawatan-jawatan beserta dengan kepala Jawatan masing-masing, baik pada tingkat propinsi maupun pada tingkat Keresidenan. Sebagai wakil

---

<sup>36</sup> Kutipan dari surat pengangkatan resmi yang ditandatangani oleh Pemimpin Besar Bangsa Indonesia, Ir. Sukarno; *Dokumen*, Mr. Muhammad Hasan, sekarang bertempat tinggal di Jakarta. Dalam Surat Pengangkatan ini selain Mr. T.M. Hasan, juga diangkat wakil untuk Boerneu, Selebes, Sunda Kecil dan Maluku, masing-masing Ir. Pangeran Moehammad Noer, Dr. G.S.S. J.Ratulangie, Mr. I Goesti Ketoet Poedja dan Mr. J. Latuharhari.

pemerintah pusat Negara Republik Indonesia, Gubernur Sumatera juga menetapkan sejumlah peraturan yang seharusnya menjadi wewenang pemerintah pusat, seperti : Peraturan tentang Pembentukan Dewan Perwakilan Sumatera (tanggal 12 April 1946, no. 8/ M.G.S.), Peraturan Gaji Pegawai Negeri di Sumatera (PGS 1946, tanggal 22 Juli 1946, no. 128 a), Peraturan tentang pengeluaran uang/tanda pembayaran resmi di Sumatera (tanggal 8 April 1947, no. 92/K.0) dan masih banyak lagi<sup>37</sup>.

Dengan ketetapan-ketetapan ini, maka administrasi pemerintahan Republik Indonesia secara resmi telah mulai dijalankan di Sumatera, termasuk juga di daerah Aceh.

Sejak tanggal 3 Oktober 1945, berdasarkan ketetapan Gubernur Sumatera dari Negara Republik Indonesia No. 1/X, Teuku Nyak Arief selama ini seperti telah disebutkan di muka selaku Ketua Komite Nasional Indonesia Daerah Aceh telah banyak berperan dalam menggerakkan roda pemerintah Republik Indonesia di sana, diangkat menjadi Residen Aceh.<sup>38</sup> Setelah itu disusul pula dengan sejumlah ketetapan lain, seperti Ketetapan Gubernur tanggal 28 Desember 1945, no. 71, tanggal 23 Pebruari 1946, no. 48, tanggal 11 Agustus 1946, No. 204 dan lain-lain, yang berhubungan dengan pembagian Wilayah administrasi keresidenan Aceh, penunjukan kepala-kepala Jawatan, asisten residen dan kepala-kepala wilayah (controleur) di seluruh daerah Aceh (untuk daerah-daerah Uleebalang kepala Pemerintahan dipegang secara turun temurun dan segera beralih setelah terjadi revolusi sosial, dimana status daerah-daerah tersebut menjadi negeri yang dalam proses selanjutnya menjadi Kecamatan). Pada dasarnya ketetapan-ketetapan yang dikeluarkan itu adalah merupakan pengesahan terhadap kebijaksanaan yang telah ditempuh sebelumnya oleh para pemimpin daerah Aceh pada umumnya dan Teuku Nyak Arief khususnya. Mengenai para pejabat yang diangkat itu pada umumnya terdiri dari pejabat-pejabat, seperti juga telah disinggung di muka, yang telah pernah di tetapkan oleh pemerintah Jepang sebelumnya (Fuku Bunsutyu, Guntyo dsb); dan sebagian besar

---

<sup>37</sup> Penjelasan tentang kedudukan Mr. T.M. Hasan sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Sumatera. *Dokumen milik Mr. T.M. Hasan.*

<sup>38</sup> Isi lengkap ketetapan Gubernur tanggal 3 Oktober 1945, no. 1/X, lihat, Mardanas Safwen, *Pahlawan Nasional Teuku Nyak Arief*, Proyek Biografi Pahlawan Nasional Dept. P dan K (Jakarta, 1975), 154 (Lampiran III).

dari mereka adalah terdiri dari para uleebalang yang memang mempunyai keahlian untuk itu, berhubung dengan tingkat pendidikan mereka yang pernah diperoleh pada masa pemerintahan kolonial Belanda dahulu. Hal ini akan banyak mengalami pergeseran nanti pada tahun 1946, setelah terjadinya revolusi sosial (mengenai nama-nama pejabat pemerintahan sampai tahun 1948, pembagian wilayah administrasi Keresidenan Aceh, lihat *lampiran* dan bandingkan nama-nama pejabat tersebut sebelum dan sesudah terjadi revolusi sosial).

Dalam menjalankan Pemerintahan sehari-hari Residen T. Nyak Arief dibantu oleh wakil Residen T. Mohd. Ali Panglima Polem dan Badan Eksekutif Komite Nasional Indonesia (KNI) Daerah Istimewa Aceh yang diketahui Tuanku Mahmud (Wakil Ketua, kemudian ketua KNI Daerah Aceh) dengan di dampingi oleh anggota staf harian KNI yang terdiri dari M. Hoesin, Teuku Hanafiah, S.M. Geudong, Hasan Basri dan M. Mochtar.<sup>39</sup> Demikian juga di afdeeling-afdeeling (Kabupaten), asisten Residen menjalankan pemerintahan di sana bersama-sama dengan Komite Nasional setempat. Mengenai pembentukan Cabang Komite Nasional di sini, juga tidak luput dari hambatan-hambatan tentara Jepang, sehingga ada daerah-daerah baru pada awal tahun 1946 berhasil membentuknya, seperti daerah Aceh Tengah umpamanya secara definitif pembentukannya baru dapat dilakukan pada tanggal 19 Pebruari 1946, yang dilantik oleh Residen Teuku Muhammad Daudsyah (Residen Aceh yang ke dua) dengan susunan pengurusnya terdiri dari Ketua I dan II : Saleh Yafas dan Muda sedang, setia usaha Mukhtar S.K. dan beberapa orang anggota<sup>40</sup>.

Untuk dapat diketahui secara lebih luas mengenai pembentukan pemerintahan Republik Indonesia di Sumatera umumnya dan daerah Aceh khususnya serta mengenai situasi negara pada waktu itu setelah satu hari pengangkatannya, Residen Teuku Nyak Arief selaku ketua Komite Nasional Indonesia (KNI) Daerah Aceh pada tanggal 4 Oktober 1945 mengeluarkan maklumat yang ditujukan kepada seluruh rakyat di daerah Aceh. Mengingat pentingnya maklumat tersebut, sebagai maklumat pertama (bukan Makloemat No.I)

---

<sup>39</sup> Aboe Bakar *Isf*, *op. cit.*, hal. 411.

<sup>40</sup> Panitia, *Seminar Sejarah Perjuangan Pemuda Daerah Tingkat II Aceh Tengah*, (Takengon: 24-25 Pebruari 1965), hal. 12.

yang secara resmi dikeluarkan oleh KNI Daerah Aceh, baiklah isi seluruhnya dikutip seperti berikut.<sup>41</sup>

#### MAKLOEMAT.

1. Siaran pihak Belanda, bahwa Ir. Soekarno dan Drs. Hatta ditangkap bohong semata-mata.
2. Republik Indonesia de facto diakoei, de jure beloem.
3. Van der Plas dan Van Mook ingin mengadakan moesjawarah dengan Soekarno.
4. Belanda tidak dibolehkan oleh Sekoetoe mendatangkan lasjkarnja sebab mungkin terjadi peperangan antara Indonesia dan Belanda.
5. Goebernoer Soematera Mr. T. M. Hasan.
6. Residen Aceh Teuku Nyak Arief.
7. Pemerintah Republik Indonesia bekerdjasama antara tentara Inggris dan India sebagai wakil sekoetoe oentoek menjaga keamanan.
8. Amerika, Inggris, Sovjet dan Tjoengking sekarang sedang membentoeek Madjelis Tinggi Oentoek Oeroesan Asia Timoer Raja.
9. Sjech Djamil Djambek Menjeroekan kepada Kaoem Moeslimin seloeroeh Soematera oentoek mencoerahkan segala tenaga lahir dan bathin oentoek Repoeblik Indonesia.
10. Di Langsa dan Tapak Tuan telah berdiri barisan Pemoeda.

Pengoeroes Komite Nasional Daerah Atjeh  
Teuku Nyak Arief.

Dengan terbentuknya badan Pemerintah Republik Indonesia di Daerah Aceh dan disusul pula dengan maklumat tersebut di atas kedudukan pemerintah Jepang di sana semakin terdesak; apalagi setelah Tuanku Mahmud secara diam-diam menyerukan kepada pegawai-pegawai bangsa Indonesia yang bekerja pada kantor-kantor pemerintah Jepang di Kutaraja agar mereka tidak melakukan tugasnya selama 3 hari dan berhasil baik<sup>42</sup>. Sementara itu pada mobil Residen Teuku Nyak Arief selalu dikibarkan bendera Merah

<sup>41</sup> Aboe Bakar Bsf, *op. cit.*, hal. 392; asli Makloemat tersebut ada tersimpan pada penulis ini.

<sup>42</sup> *Ibid.*, hal. 411 ; penulis ini (Aboe Bakar Bsf.), sebagai pegawai pada waktu itu, turut serta dalam aksi tersebut.

Putih kecil yang juga turut memberi pengaruh psikologis kepada pegawai-pegawai bangsa Jepang, terutama dalam kaitan dengan usaha pegawai-pegawai bangsa Indonesia untuk menguasai kantor-kantor pemerintahan. Dan berkat sikap diplomatis Tuanku Mahmud selaku Ketua Badan Eksekutif KNI Daerah Aceh dalam menghadapi perundingan-perundingan dengan Tyokan S. Iino (Residen Jepang), satu demi satu kantor-kantor pemerintahan Jepang itu berhasil dikuasai oleh pegawai-pegawai bangsa Indonesia, yang sebenarnya, setelah disumpah pada bulan September 1945, telah menjadi pegawai negeri Republik Indonesia, tanpa banyak menghadapi rintangan dan bentrokan.

Bagaimanapun, Pemerintahan Republik Indonesia di daerah Aceh, yang baru dibentuk dibawah pimpinan Residen Teuku Nyak Arief dan Tuanku Mahmud selaku Ketua Badan Eksekutif KNI daerah Aceh, harus menghadapi berbagai masalah yang mendesak sesuai dengan situasi negara pada waktu itu, adapun masalah-masalah tersebut, yang memerlukan penyelesaian dengan secepat mungkin, dalam garis besarnya dapat diperinci sebagai berikut :

1. Masalah pertahanan negara yang menghadapkan pemerintah daerah dalam waktu singkat harus mengorganisir kekuatan bersenjata di seluruh daerah Aceh.
2. Masalah tentara pendudukan Jepang yang belum meninggalkan daerah Aceh dan kedatangan utusan sekutu, di samping tujuan lain yang mereka sembunyikan (dimaksudkan di sini adalah mempelajari situasi daerah Aceh untuk membuka jalan, kalau mungkin, bagi masuknya tentara kolonial Belanda kembali ke sana).
3. Perpecahan antara sesama pemimpin Aceh dan kemudian men-jurus kepada pecahnya perang saudara yang dikenal dengan nama revolusi sosial.

Meskipun Teuku Nyak Arief, sebagai Residen Aceh, hanya 4 bulan memimpin pemerintahan di sana, namun ke tiga masalah pokok yang disebutkan di atas berhasil diselesaikannya dengan baik sekali. Pada waktu ia meletakkan jabatan, pada bulan Januari 1946, dasar-dasar pemerintahan R.I. yang permanent telah terwujud di sana, sehingga penggantinya, Residen Teuku Muhammad Daudsyah dapat meneruskan ke arah kesempurnaan. Ba-

gaimana peranan Teuku Nyak Arief, dalam mendarma baktikan tenaganya bagi kepentingan Negara Republik Indonesia selama masa jabatannya yang singkat itu, akan diuraikan lebih lanjut dalam bagian-bagian berikut dibawah ini :

### C. Pembentukan Organisasi Kemiliteran dan Kelasykaran Rakyat.

Sejak berita proklamasi diterima di daerah Aceh, khususnya di Kutaraja, para pemimpin di sana telah memikirkan dan berusaha ke arah pembentukan Organisasi pertahanan dan keamanan rakyat di daerah Aceh, dalam rangka mempertahankan Kemerdekaan Indonesia yang baru diproklamirkan itu. Inisiatif ini pada mulanya datang dari beberapa bekas perwira *Gyugun* (organisasi pertahanan rakyat atau tentara sukarela yang dibentuk Jepang dan kemudian dibubarkan) di Kutaraja, antara lain : Syamaun Gharu, Nyak Neh Rika, Usman Nyak Gade, Teuku Hamid Anwar, Said Usman, Bakhtiar Idham dan masih banyak lagi.

Pada tanggal 27 Agustus 1945 (hari Senin) para perwira tersebut berkumpul di salah satu kamar Hotel Sentral, Jalan Mohd. Jam Kutaraja (sekarang telah dibongkar). Pertemuan yang pertama kali ini dan tidak resmi karena menghindari pengawasan Jepang telah menghasilkan suatu keputusan, yaitu : mengirim utusan yang terdiri dari Syammaun Gaharu dan T. Hamid Azwar kepada Teuku Nyak Arief, guna mendengar pendapat beliau mengenai gagasan mereka. Hasil konsultasi itu ternyata sangat memuaskan; Teuku Nyak Arief, yang pada waktu itu belum menjadi residen Aceh, tetapi selalu diminta pertimbangannya sesuatu yang oleh para pemimpin disana, menyambut baik idee pembentukan suatu badan (organisasi) yang dapat mempersatukan semua bekas Gyugun, Heiho, Tokubetsu Hikojo Kinmutai dan Tokubetsu Keisatsutai, yang akan menjadi dasar bagi tumbuhnya angkatan perang Indonesia di Aceh nanti. Disarankan juga agar dalam pembentukan itu diikuti sertakan bekas tentara KNIL (tentara Hindia Belanda) dahulu, sehingga mereka dapat menyumbangkan pengalaman dan keahliannya bagi Negara Indonesia merdeka. <sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> . Lihat lebih lanjut, Usman Nyak Gade, *Sekitar pembentukan Angkatan Pemuda Indonesia (API) di Aceh*, MSI, (Banda Aceh): hal. 2—3; Seksi Penerangan dan Dokumentasi Komite Musyawarah Angkatan 45 Daerah Istimewa Aceh, *op. cit.*, hal. 27—30; A. Hasjmy dan T. Alibasjah Talsya, *op. cit* hal. 14-15; *Majalah Santunan*, no. 21 thn. III, hal. 9.

Setelah melakukan pembicaraan yang mendalam melalui beberapa kali musyawarah, akhirnya diputuskan untuk mendirikan Angkatan Pemuda Indonesia (API) diseluruh daerah Aceh. Maka pada permulaan bulan Oktober 1945 tersusunlah secara definitif struktur dan susunan pengurus API di Aceh, yang terdiri dari :

1. Markas daerah, berkedudukan di Kutaraja (markasnya mula-mula di Hotel Sentral, kemudian berpindah ke Toko J. Pinke Ujung Peunayong, Toko B. Naas sekarang Sabang Coy., Asrama Kuta Alam dan akhirnya ke Asrama Keraton) dengan susunan pengurus, Ketua/Komandan : Syamaun Gaharu; Kepala Staf : T.A. Hamid Azwar; Sekretaris : Husin Yusuf; anggota sekretariat : Ishak; Anggota : Nyak Neh Rika, Said Usman, Said Ali, T.M. Daud Samalanga, T. Sarong, Bakhtiar Idham, T. Abdullah dan Saiman.
2. Wakil Markas Daerah, untuk sementara dibentuk hanya 4 daerah, yaitu :
  - 2.1. Wakil Markas daerah Aceh Besar dan Pidie, di bawah pimpinan Nyak Neh;
  - 2.2. Wakil Markas Daerah Aceh Utara dan Tengah, di bawah pimpinan T.M. Syah;
  - 2.3. Wakil Markas Daerah Aceh Timur, di bawah pimpinan Bakhtiar; dan
  - 2.4. Wakil Markas Daerah Aceh Barat dan Aceh Selatan, di bawah pimpinan Tjut Rachman. <sup>44</sup>

Setelah staf pengurus API daerah Aceh berhasil di susun, pada tanggal 6 Oktober 1945, jam 13.00 waktu setempat, dikeluarkan seruan yang ditujukan kepada seluruh lapisan masyarakat agar membantu dan menyokong API yang lahir itu. Seruan yang telah mengejutkan pemerintah Jepang di Kutaraja pada waktu itu, selengkapnya berbunyi :

#### SEROEAN TANAH AIR. <sup>45</sup>

Di seloeroeh Atjeh telah berdiri Angkatan Pemoeda Indonesia - A . P . I .

---

44 . Seksi Penerangan dan Dokumentasi Komite Musyawarah Angkatan 45 Daerah Istimewa Atjeh, *op.cit.*, hal. 31.

45 Lihat juga photo asli Seruan tersebut., dalam *Ibid.*, hal. 31.

- A.P.I. akan mendjadi dasar tentara Repoeblik Indonesia.
- A.P.I. akan mempertahankan Kemerdekaan Indonesia.
- A.P.I. akan mendjaga keamanan dan ketenteraman Oemoem.

### SOKONGLAH A. P. I.

Bentoeklah badan penjokong API (Bapa) disegala pelosok. Bapa moesti berdiri di samping API kalau tidak API ta' moengkin bergerak.

**Kaoem hartawan !!** Lemparlah Keradjaan toean-toean pada ini waktoe oentoek Indonesia Merdeka.

**Kaoem bangsawan !!** Bangoen, sadar dan toendjanglah tjita-tjita jang soetji ini.

Segala lapisan dan segala golongan ! Korbankanlah harta, tenaga dan pikiran harta djiwa sekalipoen asal oentoek Kemerdekaan INDONESIA.

API mempoenjai poeloehan pasoean dan riboean Angkatan Pemoeda di se-loeroeh Atjeh.

A.P.I. menoenngoe B.A.P.A.

Markas Daerah Angkatan  
Pemoeda Indonesia (M.D.A.P.I).

Dengan lahirnya API di Daerah Aceh maka dasar yang kuat untuk tumbuhnya tentara resmi Negara Republik Indonesia di sana telah mulai diletakkan. Dalam proses selanjutnya API bertukar nama menjadi TKR (Tentera Keamanan, kemudian Keselamatan Rakyat), lalu menjadi TRI (Tentara Republik Indonesia) dan akhirnya menjadi TNI (Tentera Nasional Indonesia) sesuai dengan ketentuan dari pemerintah Pusat. Dan pada uraian-uraian berikut selanjutnya akan dikemukakan peranan API dalam mengemban tugasnya, seperti yang telah diikrarkan, yaitu : mempertahankan kemerdekaan Indonesia serta menjaga keamanan dan ketenteraman umum (lihat di atas).

Sementara itu, pada bulan September 1945, bekas anggota KNIL (Tentera Hindia Belanda) juga mengambil inisiatif untuk membentuk polisi istimewa di Kutaraja. Pasukan Kepolisian ini, setelah dibentuk polisi tentara, pada bulan Februari 1946 dilebur menjadi pasukan meriam di bawah pimpinan bekas

Letnan II KNIL, Lintong, yang berasal dari daerah Minahasa (Sulawesi Utara)<sup>46</sup>. Pasukan Meriam ini diperlengkapi dengan senjata-senjata berat yang direbut dari Jepang, terutama dalam pertempuran yang terjadi di Lho 'Nga pada bulan Desember 1945 (lihat di bawah); dan telah turut berjasa di samping pasukan meriam lainnya, dalam menjaga pantai di sekitar Kutaraja selama Revolusi Kemerdekaan. Selanjutnya dari pihak Kepolisian, mulai tampak kegiatan Polisi-polisi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari ikatan pemerintah Jepang. Bahkan di Langsa, Aceh Timur, sejak 1 Oktober 1945 Kepala Polisi di sana Abdullah Hussein telah mulai bertindak kearah itu; dan dalam bulan Oktober itu juga ia beserta anak buahnya telah menyatakan diri menjadi Polisi dari Negara Republik Indonesia.<sup>47</sup> Di Kutaraja, Wakil Kepala Polisi Daerah Aceh, Muhammad Hasyim, setelah menerima kawat tanggal 1 Oktober 1945 dari bawahannya, Abdullah Hussein di Langsa, juga segera bertindak untuk menguasai Kantor Polisi daerah Aceh. Seperti telah disebutkan dimuka pada akhir 1945 dengan pistol ditangan ia telah memimpin penaikan bendera Merah Putih di samping Kantor Polisi Jepang. Atas inisiatifnya dalam waktu relatif singkat barisan Kepolisian Negara Republik Indonesia berhasil dibentuk di daerah Aceh dan Muhammad Hasyim pada awal Revolusi Kemerdekaan ditunjuk menjadi Kepala Polisi R.I. yang pertamadi sana.<sup>48</sup>

Dipihak lain, para pemuda yang tidak bergabung dalam API juga berusaha untuk mendirikan badan Perjuangan Rakyat dengan tujuan yang sama, yaitu mempertahankan proklamasi dari segala rong-rongan musuh, baik yang datang dari luar maupun dari dalam daerah. Di kantor Surat Kabar Aceh Sinbun (Surat Kabar masa Pendudukan Jepang di bawah asuhan tenaga-tenaga Indonesia dan Jepang; setelah Proklamasi tidak terbit lagi), para pengasuh surat kabar tersebut seperti A. Hasjmy, Talsya dan lain-lain, sejak berita Proklamasi diterima di sana telah melakukan kegiatan untuk mendirikan sebuah organisasi pemuda yang diberi nama Ikatan Pemuda Indonesia (IPI). Pada tanggal 4 Oktober 1945 susunan pengurus

---

<sup>46</sup> Aboe Bakar Bsf, *op. cit.*, hal. 391.

<sup>47</sup> Mengenai kegiatan Abdullah Hussein pada awal Revolusi Kemerdekaan, lihat buku kenang-kenangan yang ditulisnya sendiri, *Peristiwa, Pustaka Antara*, (Kuala Lumpur, — 1965), Passim.

<sup>48</sup> *Ibid.*; Aboe Bakar Bsf, *op. cit.*, hal. 391—2, 568.

IPI yang pertama telah tersiar, terdiri dari, Ketua I dan II : A. Hasjmy dan T. Manyak Arief; Setia Usaha I dan II : Usman dan Anwar Manyak; Bendahara : Zaini Bakry; Pembantu - pembantu M. Saleh Rahmany, Muhammad ZZ. Tuanku Abdul Wahab dan Muhammad Juned; dan diperlengkapi dengan komisaris-komisaris Tuanku Hasyim, Ghazaly Yunus, Murdani, Tungku Idris, Asman Potan Harahap, Mukhtar Lubis, Said Ahmad Dahlan dan H. Jamin.<sup>49</sup> Kemudian pada tanggal 6 Oktober 1945 IPI bertukar nama menjadi Barisan Pemuda Indonesia (BPI) dengan susunan pengurus yang diperbaharui, terdiri dari, Ketua Umum, I dan II : A. Hasjmy, M. Saleh Rahmany dan Muhammad Z.Z.; Setia Usaha Umum, I, II, III, dan IV, masing-masing terdiri dari Tuanku Hasyim, Potan Harahap, Sulaiman Arsyad Abubakar dan Sang Syarif: Bendahara : H. Jamin ; dan diperlengkapi dengan, badan Keuangan, ketua : Muhammad Junat ; Badan Penerangan Ketua : Said Ahmad Dahlan; Badan pengarahan tenaga, Ketua : Sauni dan Zaini Bakry; Badan Kepanduan, ketua: Murdani, dan Badan Palang Merah, Ketua : Asman.<sup>50</sup>

Dengan terbentuknya API dan BPI berarti dasar-dasar organisasi kemiliteran dan perjuangan telah mulai diletakkan di Aceh. Dalam waktu relatif singkat ke dua organisasi itu meluas ke seluruh daerah. Dan ini, seperti telah disinggung juga di atas, sangat mengejutkan pemerintah Jepang di Kutaraja. Karena itu pada malam hari tanggal 6 Oktober 1945, setelah siangnya keluar seruan API dan terbentuk susunan pengurus BPI, Atjeh Syu Tyokan S. Iino mengundang para pemimpin Aceh ke rumahnya guna membicarakan situasi ibukota Kutaraja khususnya dan daerah Aceh pada umumnya.

Mereka yang turut hadir pada malam itu, dari pihak Aceh : Teuku Nyak Arief (Residen R.I. Daerah Aceh), Tuanku Mahmud (Ketua KNI Aceh), Teungku Muhammad Daud Beureueh (Ketua PUSA dan anggota KNI Daerah Aceh), Syamaun Gaharu (Ketua Markas API), A. Hasjmy (Ketua BPI), T. Ahmad Jeunieb (Asisten Residen R.I. Aceh Besar), T. Tjut Hasan (Konsul Muhammadiyah Daerah Aceh) dan Said Aboe Bakar (pelopor fujiwara kikan); dari pihak Jepang: Tyokan S. Iino sendiri, Atjeh Syu Seityo S. Masubutsi, Keimutyo (Kepala Polisi), Bo-ei Tai tyo (Kepala Perta-

<sup>49</sup> *Ibid.*, hal. 393.

<sup>50</sup> *Ibid.*, hal 394; juga, A. Hasjmy & Talsya, *op. cit.*, hal. 12-9.

hanan), Kempei Taityo (Kepala Polisi Militer) dan Juru Bahasa T. Eiri Dalam pertemuan itu S. Iino menegaskan bahwa, meskipun Jepang telah kalah, namun masih diberi kuasa oleh sekutu dan bertanggung jawab di dalam hal pemerintahan dan keamanan daerah ini. Karena itu segala kegiatan yang dilakukan harus dengan izin pemerintah Jepang. Dan diminta agar API dan BPI yang telah didirikan tanpa seizinnya serta mengarah seperti organisasi ketenteraan segera dibubarkan. Teuku Nyak Arief, seperti biasa kalau berhadapan dengan penjajah, menjawab dengan pedas, yang intinya, bahwa Jepang harus tahu diri mereka telah kalah dan tidak berhak lagi mengatur rakyat Indonesia, seperti pada masa mereka berkuasa dulu. Sedang Syamaun Gaharu menegaskan, bahwa tidak seorangpun berhak memerintahkan untuk membubarkan API, kecuali kalau Residen Negara Republik Indonesia yang memerintahkannya.<sup>51</sup> Dapat dikatakan pertemuan malam itu gagal total dan merupakan pukulan berat bagi pemerintah Jepang di daerah Aceh.

Pada tanggal 9 Oktober 1945 Teuku Nyak Arief, selaku Residen Aceh dari Negara Republik Indonesia memerintahkan agar API sebagai dasar dari Tentara Republik Indonesia harus lebih disempurnakan, sehingga benar-benar mengarahkan kepada organisasi ketenteraan yang lengkap. Karena itu Syamaun Gaharu selaku Ketua Markas Daerah segera melaksanakan perintah itu. Wakil Markas Daerah (WMD) yang sebelumnya hanya 4 buah ditambah menjadi 8 WMD dan pada tiap-tiap WMD dibentuk 3—4 pasukan yang dipimpin oleh seorang Komandan pasukan; kemudian disusul pula dengan *Surat Edaran* yang ditujukan kepada seluruh bekas prajurit Gyugun, Heiho dll. agar dalam waktu singkat segera mendaftarkan diri pada WMD atau pasukan setempat (mengenai nama-nama WMD dan pasukan beserta Komandannya masing-masing lihat lampiran).

Pada tanggal 12 Oktober 1945 Residen T. Nyak Arief melantik API seluruh daerah Aceh secara serentak di Kutaraja (dalam surat edaran yang disebutkan di atas pelantikan itu akan dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober; jadi mundur dua hari dari rencana semula).<sup>52</sup> Semenjak itu secara resmi API Daerah Aceh menjadi

<sup>51</sup> Seksi penerangan/Dokumentasi Komite Musyawarah Angkatan 45 Daerah Istimewa Atjeh, *op. cit.*, hal. 33—45; Usman Nyak Gade, *op. cit.*, hal. 6; Aboe Bakar, *op. cit.*, hal. 395—6.

<sup>52</sup> Seksi penerangan/Dokumentasi *Op. cit.*; Usman Nyak Gade, *op. cit.*; lihat juga lampiran.

organisasi Tentara Republik Indonesia yang sah di sana. Dalam proses selanjutnya, sejak tanggal 1 Desember 1945, API bertukar nama menjadi TKR (Pada waktu itu tidak lagi Tentara Keamanan Rakyat, tetapi Tentara Keselamatan Rakyat) dengan Komandannya tetap seperti semula yaitu Syamaun Gaharu (berpangkat Kolonel) dan Teuku Nyak Arief, selaku residen Aceh, dengan pangkat Jenderal Mayor Tituler, menjadi pelindungnya. Sejak tanggal 24 Januari 1946, sejalan dengan keputusan Pemerintah Pusat tanggal 8 Januari 1946 mengenai penggantian nama TKR Menjadi TRI (Tentara Republik Indonesia), TKR Aceh menjadi TRI Devisi V Sumatera. Dalam penyempurnaan selanjutnya, setelah penggantian Komandan Komandan pada bulan Maret 1946 dari Syamaun Gaharu kepada Husen Yusuf, TRI Aceh (Devisi V Sumatera) dijadikan Devisi Gajah I/dengan pengecualian kesatuan di Kutacane yang dijadikan Batalyon I Resimen I Devisi Gajah II (Sumatera Timur); dan pada bulan April 1947, Devisi Gajah I digabung dengan Devisi Gajah II menjadi TRI Devisi X Sumatera, yang pada waktu aksi Militer Belanda pertama markasnya berkedudukan di Bireuen (Aceh Utara), dengan Panglima dan Kepala Stafnya masing-masing Kolonel Husein Yusuf dan Kolonel H. Sitompul, bekas komandan devisi gajah II. Selanjutnya di Aceh juga dibentuk Angkatan Laut Daerah Aceh (ALDA), yang dipimpin oleh Said Usman (Kutaraja), H. Daud Daryah (Meulaboh) M. Adam (Langsa) dan lain-lain.<sup>53</sup>

Sementara itu barisan Pemuda Indonesia (BPI), dalam rangka lebih meningkatkan organisasi itu sebagai Barisan Kelasykaran dan penyebaran keseluruh daerah, pada tanggal 12 Oktober 1945 mengadakan konperensi pertama dengan mengambil tempat di rumah Tuanku Abdul Azis, Jalan Mohd. Jam No. 1. Konperensi di ikuti oleh para pemuda yang datang dari berbagai pelosok daerah Aceh atas undangan Husein Al Mujahid yang pada mulanya dimaksudkan untuk membentuk suatu gerakan pemuda dengan tujuan mempertahankan proklamasi Kemerdekaan Indonesia, tetapi berhubung telah ada BPI rencana itu dibatalkan. Dalam konperensi itu diputuskan, bahwa pengurus pusat BPI yang telah di-

<sup>53</sup> Raden Soehardjo Hardjo Wardjojo, Komandan tertinggi Tentara R.I. Soematera, "Kearah kesempoeraan", *Satoe tahoen N.R.I. di Soematera (17-8-1945 - 17-8-1946)*, Pemerintah Poesat Soematera, 1946 hal. 18-9; Huesien Yusuf, "Detik Proklamasi di Aceh", *Modal Revolusi* 45, 1960, hal. 41-51; S.M. Amin, *Kenang-kenangan Dari masa Lampau*, Pradya Pramita, Jakarta, 1978, hal. 94-6; Aboe Bakar Bsf, *op. cit.*, hal. 406.

susun sebelumnya disetujui dan ditempatkan di Kutaraja, sedang di daerah-daerah Aceh Besar, Aceh Utara, dan Aceh Selatan, masing-masing ditempatkan seorang wakil majlis Daerah (WMD), yaitu Teungku Abdul Jalil Amin, Teungku Abdul Gani, Teungku Usman Peureulak dan Teungku Muhammad Abdul Syam.<sup>54</sup>

Selanjutnya 5 hari kemudian, tepatnya tanggal 17 Oktober 1945, BPI bertukar namanya menjadi Pemuda Republik Indonesia (PRI); dan sejak waktu itu PRI Daerah Aceh mulai membentuk cabang-cabangnya diseluruh wilayah daerah Aceh, bahkan juga ranting-rantingnya di *Kemukiman* (Daerah di bawah Negeri atau Kecamatan sekarang). Pada hari itu juga PRI Daerah Aceh mengeluarkan Maklumat No. 4, berisi "panggilan umum" yang ditujukan kepada seluruh Pemuda Indonesia yang berumur 18 tahun ke atas untuk mendaftar diri menjadi anggota PRI di wilayah atau ranting setempat. Ditegaskan pula dalam maklumat itu, bahwa : "Kemerdekaan Tanah Air tidak didapati dengan jalan mengemis, tetapi ia harus ditempa oleh tangan Poeteranya sendiri". Kemudian pada tanggal 20 Desember 1945 berdasarkan Ketetapan markas Tertinggi Pemuda Republik Indonesia di Yogyakarta, nama PRI Daerah Aceh mengalami perubahan lagi, yaitu Pemuda Sosialis Indonesia (PESINDO ) Daerah Aceh, dengan Ketuanya tetap seperti semula, ialah : A. Hasjmy.

Dapat ditambahkan, bahwa, meskipun Pesindo daerah Aceh bernaung di bawah Pesindo Pusat, namun orientasi idiologinya jauh berbeda, sehingga akibat sikapnya yang demikian Komisariat Dewan Pusat Pesindo Sumatera menganggap Pesindo daerah Aceh tidak sah; dan setelah meletus peristiwa Madiun (Pemberontakan PKI/Muso), pada tanggal 19 Oktober 1948 Pesindo daerah Aceh melepaskan hubungan organisasinya dengan Pesindo Pusat yang telah turut campur dalam pemberontakan PKI itu.<sup>55</sup>

Karena Pesindo daerah Aceh mempunyai cabang dan ranting tersebar diseluruh Wilayah, maka dengan tidak banyak menemui kesukaran organisasi itu berhasil baik mengkoordinir Lasykarnya, yaitu : Kesatria Pesindo, yang kemudian dikenal dengan nama : Devisi Rencong, Barisan Kelasykaran ini terdiri dari 7 resimen,

<sup>54</sup> Aboe Bakar Bsf, op. cit., hal. 397 - 8

<sup>55</sup> *Ibid.*, hal. 399-0, 405; T.A. Talsya, "Fragmen Revolusi 45 Di Aceh (XVIII)"; *Sinar Darussalam* no. 75/76, Pebruari/Maret, Banda Aceh, 1978, hal. 85-8.

masing-masing ditempatkan di Kutaraja, Sigli (Pidie), Lhokseumawe (Aceh Utara), Aceh Tengah, Aceh Timur, Aceh Barat dan Aceh Selatan; ditambah dengan resimen wanita Pocut Baren dengan Komandannya dari wanita sendiri, ialah : Zahara dan satu Batalyon Istimewa Altileri yang dipimpin langsung oleh Komandan Devisi Nyak Neh Lhok Nga. Selain itu, devisi juga dilengkapi dengan a.l. perbekalan/persenjataan, di Lhok Nga, pelayanan di Ulee Lheue dan Bank Pesindo di Kutaraja (mengenai struktur organisasi dan personalia Divisi Rencong selengkapnya, lihat lampiran) <sup>56</sup>.

Devisi Rencong Pesindo merupakan badan kelasykaran yang terlengkap, baik dari segi struktur organisasinya, maupun dari segi persenjataannya dan yang pertama lahir di daerah Aceh. Setelah itu menjelang tahun 1946 dibentuk pula Barisan Mujahidin di bawah pimpinan Teungku Mohd. Daud Beureueh dan Cek Mat Rahmany. Barisan Kelasykaran Mujahidin dikenal dengan nama Devisi X/Teungku Chik Di Tiro yang pada mula, Komandan Devisinya Hasballah Daud, kemudian Cek Mat Rachmany; dan terdiri dari 5 resimen, yang masing-masing resimen membawahi beberapa batalyon (Susunan selengkapnya, lihat lampiran). Pada pertengahan tahun 1946 dibentuk lagi Barisan Berani Mati Lasykar Teungku Chik Paya Bakong, sebagai penjelmaan Tentara Perjuangan Rakyat (TPR) yang lahir pada permulaan tahun 1946. Markas Devisi ini tidak di tempatkan di Kutaraja seperti dua badan Kelasykaran yang disebutkan terdahulu, melainkan di Idi (Aceh Timur), yaitu kota kelahiran Tentara Perjuangan Rakyat (TPR), di bawah pimpinan Amir Husein Al Mujahid.

Adapun struktur organisasi divisi terdiri dari staf pimpinan divisi, komandan batalyon divisi berani mati, anggota staf Tentara Perjuangan Rakyat, staf Istimewa/mobilisasi dan staf istimewa/mobilisasi wanita (personalia tiap bagian itu, lihat lampiran). Selain tiga badan kelasykaran yang telah disebutkan itu, di daerah juga terdapat dua resimen Tentara Pelajar Republik Indonesia (TRIP, dibentuk Bulan September 1947); dan ke dua, yang dibentuk pada bulan Desember 1947 dan langsung berada di bawah Komando Divisi X TNI Sumatera, adalah Tentara Pelajar Islam (TPI). Badan Kelasykaran Pelajar ini juga diperlengkapi dengan bagian Palang Merah

---

<sup>56</sup> Jarahdam I/Iskandar Muda, *Dua Windu Kodam - I/Iskandar Muda*. Jarahdam-I/Iskandar Muda, 1972, hal. 103 - 5; Aboe Bakar Bsf, *op. cit.*, hal. 405 - 6

dan Dapur Umum (Struktur organisasi dan personalia kedua resimen tentara pelajar ini, selengkapnya lihat lampiran. <sup>57</sup>

Perlu juga dikemukakan, bahwa selama Revolusi Kemerdekaan (1945 – 1949) antara kesatuan-kesatuan angkatan bersenjata resmi (TKR/TRI) dan badan-badan kelayakaran di daerah Aceh, yang pada masa sekarang anggota-anggotanya itu dihitung sebagai veteran pejuang Kemerdekaan dan jumlahnya diperkirakan tidak kurang dari 60.000 orang, tetapi yang baru terdaftar secara resmi pada kantor Administrasi Veteran I, Pusat Cadangan Nasional Daerah Aceh hanya 35.075 orang, <sup>58</sup> Dalam berbagai kegiatan perjuangan yang mereka lancarkan, selalu tampak berada dalam suatu koordinasi yang utuh; tidak terdapat unsur-unsur pemecahan dan persaingan yang berarti yang dapat melemahkan perjuangan pada waktu itu. Hal ini, nanti setelah keluarnya penetapan pemerintah (Berita Negara no. 24 tahun 1947) dan Ketetapan Wakil Presiden, Selaku Panglima Tertinggi TRI pada waktu itu, tertanggal Bukit Tinggi, 26 Agustus 1947, no. 3/BKPU/47 mengenai penyatuan TRI dengan lasykar-lasykar Rakyat menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) di seluruh Indonesia, merupakan faktor yang memperlancar proses penyatuan TRI dengan Badan-badan Kelayakaran (Divisi Rencong, Teungku Chik di Tiro, Teungku Chik Paya Bakong, Resimen TRIP dan TPI) di daerah Aceh. <sup>59</sup>

Setelah terbentuknya Pemerintahan Republik Indonesia dan Badan Perjuangan (API dan IPI/BPI) di daerah Aceh, maka mulai direncanakan perebutan senjata dari Jepang secara lebih intensif. Sebelumnya kegiatan pengumpulan senjata juga telah dilakukan, yaitu senjata-senjata yang berasal dari kesatuan Gyugun, direbut secara diplomasi atau disembunyikan pada saat organisasi militer itu dibubarkan oleh Jepang. Dalam hubungan ini, umpamanya seperti yang disembunyikan di sebelah Utara kota Bakongan (Aceh Selatan) sebanyak 12 pucuk senjata beserta 6.000 peluru atas inisiatif Abdullah Syarief dan kemudian diserahkan kepada kesatuan API di sana. <sup>60</sup>; juga di Calang (Aceh Barat),

---

<sup>57</sup> *Ibid.*, hal. 103 – 112; *Ibid.*,

<sup>58</sup> *Harian Pelita*, Jum'at 27 April 1979, hal. III. (Jumlah yang terdaftar secara resmi itu adalah catatan terakhir berdasarkan team Tibiminvet Puscadnas tahun 1977)

<sup>59</sup> S. M. Amin, *op. cit.*, hal. 96–7; Jarahdam—I/Iskandar Muda, *op. cit.*, hal. 103, 118.

<sup>60</sup> *Ibid.*, hal. 102.

atas inisiatif A.K. Jailani beserta dengan kawan-kawannya, 2 senapan mesin 4 bren dan 50 pucuk karabin tidak berhasil dilucuti oleh pihak Jepang.<sup>61</sup>

Ada dua faktor yang juga turut memberi dorongan dan semangat kepada seluruh rakyat Aceh dalam merebut senjata dari Jepang. yaitu : Makloemat Oelama Seloeroeh Atjeh dan seruan kepada kaum Muslimin, berasal dari seorang Ulama Besar di Aceh, Teungku Haji Hasan Krueng Kalee, mengenai kewajiban mempertahankan Kemerdekaan Indonesia yang baru di proklamirkan itu. Maklumat Ulama tersebut, tertanggal Kutaraja 15 Oktober 1945, ditandatangani oleh 4 orang ulama besar, yaitu : Teungku Haji Hasan Krueng Kalee, Teungku Muhd. Daud Beureueh , Teungku Haji Jakfar Sidiq Lamjabat dan Teungku Haji Ahmad Hasballah Indrapuri serta disetujui oleh residen Aceh, Teuku Nyak Arief dan Ketua Komite Nasional Daerah Aceh, Tuanku Mahmud. Isi pokoknya adalah, selain seruan bersatu padu di bawah kepemimpinan Ir. Soekarno, juga penegasan bahwa perjuangan mempertahankan Kemerdekaan adalah perjuangan suci yang disebut dengan "perang sabil" (perang di jalan Allah), suatu penegasan yang mendahului revolusi Muktamar Umat Islam Indonesia di Yogyakarta, tanggal 7 – 8 Nopember 1945 dengan isi yang serupa, yaitu : 60 Miljoen Kaoem Moeslimin Indonesia siap berdjihad Fi Sabilillah. Perang di Djalan Allah oentoeik menentang tiap-tiap pendjadjahan"<sup>62</sup> (mengenai isi selengkapnya maklumat ulama itu lihat lampiran).

Mengenai seruan yang dikeluarkan oleh Teungku Haji Hasan Krueng Kalee pada tanggal 18 Zulkaedah 1364 H (akhir Oktober 1945) dan kemudian disiarkan oleh Pimpinan daerah PRI secara meluas keseluruh Aceh dengan surat pengantar tanggal 8 Nopember 1945, no. 116/1945<sup>63</sup>, intisari isinya tidak berbeda dengan maklumat ulama yang terdahulu, yaitu kewajiban mengorbankan jiwa dan harta untuk memerangi kafir penjajah membela kemerdekaan tanah air. Tegasnya kedua pernyataan tersebut telah memberi kekuatan batin bagi rakyat Aceh dalam berjuang selama revolusi Kemerdekaan yang diawali dengan perebutan kekuasaan

---

<sup>61</sup> *Ibid.*, hal. 100; Komite Musjawarah Angkatan 45, *op. cit.*, hal. 91.

<sup>62</sup> *Harian Kedaulatan Rakyat*, tahun 1, Jum'at, 9 Nopember 1945, hal. pertama.

<sup>63</sup> Dada Meraxa (ed), *Ungkapan sejarah Aceh*, tanpa penerbit, 1976, hal. 23.

dan senjata dari tentara pendudukan Jepang.

Dalam proses perebutan senjata tersebut, langkah-langkah yang ditempuh oleh rakyat Aceh pada umumnya dan badan perjuangan/ketentaraan (API/TKR; BPI/PRI) khususnya, adalah pada mula-mula dengan jalan diplomasi dan intimidasi, tetapi kalau menemui kegagalan, diikuti pula dengan tindakan kekerasan, yaitu dengan melakukan penyerangan terhadap pos-pos konsentrasi tentara Jepang. Cara ini, dalam garis besarnya, dapat dijelaskan sebagai berikut. Mula-mula sekelompok rakyat yang dikoordinir oleh API/TKR dan/atau BPI/PRI dengan bersenjatakan rencong, tombak, pedang dan sebagainya, turun ke kota-kota dan membayangi pos-pos tentara Jepang di sana. Kadang-kadang sebelum tindakan ini dimulai, lebih dahulu telah dikeluarkan selebaran-selebaran berisi berbagai ancaman, yang pada dasarnya seakan-akan keselamatan Jepang tidak terjamin lagi di Aceh. Hal ini menjadikan tentara Jepang, yang sudah kalah dan tidak bersemangat lagi pada waktu itu, gelisah dan ketakutan. Karenanya mereka segera memanggil para pemimpin rakyat di kota tersebut, baik yang duduk dalam badan pemerintahan R.I., ketentaraan, atau kelasykaran. Dalam pertemuan yang berlangsung itu, para pemimpin rakyat menekankan, bahwa yang diinginkan oleh rakyat adalah senjata dari Jepang dan diancam pula, sekiranya Jepang tidak memberikannya, rakyat akan menyerang. Dan memang kalau pertemuan gagal penyerangan segera dimulai, yang setelah berlangsung beberapa waktu, kadang-kadang dilanjutkan dengan perundingan kembali yang berakhir dengan kemenangan dipihak pemimpin rakyat.

Dengan cara sebagaimana disebutkan di atas, kegiatan perebutan senjata dari pihak Jepang selalu terjadi di kota-kota/tempat-tempat di mana tentara Jepang ditempatkan, di seluruh daerah Aceh. Dalam wilayah Aceh Besar, di Seulimum tanggal 25 Nopember 1945 tentara Jepang terpaksa menyerahkan 180 pucuk senjatanya, akibat kepungan API bersama dengan barisan rakyat disana dan besoknya dilanjutkan dengan penyerahan 3 pucuk meriam dan 3 gudang amunisi<sup>64</sup>. Akibat kepungan API dan barisan rakyat itu, tanggal 3 Desember 1945 pasukan Jepang meninggalkan Seulimum menuju lapangan udara Blang Bintang, tempat pemusatan ten-

64 Jarahdam I/ Iskandar Muda, *op. cit.*, hal. 88.

tera Jepang untuk diberangkatkan keluar daerah Aceh. Kemudian, di Lhok Nga setelah terjadi pertempuran sengit tanggal 1 Desember, pihak Jepang menyerahkan 10 pucuk senjata; dan pada waktu pasukan Jepang mengosongkan Lhok Nga tanggal 6 Desember 1945 untuk seterusnya menuju Blang Bintang, pihak TKR dan PRI telah berhasil menguasai sejumlah besar meriam pantai bersama dengan tujuh gudang amunisi<sup>65</sup>. Sasaran berikutnya ialah Blang Bintang; penyerangan dilakukan pada tanggal 7 Desember, tetapi pihak TKR dan Barisan Rakyat (PRI) tidak berhasil menguasai berhubung kuatnya pertahanan tentera Jepang di sana. Sementara itu Tyokan (Residen) Aceh, S. Iino, berhubung adanya tekanan yang terus menerus, juga telah menyerah terimakan 600 pucuk senjata kepada pihak TKR<sup>66</sup>.

Demikian pula di tempat-tempat lain di luar Wilayah Aceh Besar. Dengan taktik yang serupa TKR bersama dengan barisan rakyat selalu berhasil memperoleh senjata dari pihak Jepang. Umumnya, di Sigli (Pidie), akhir Nopember 1945, sebanyak 200 pucuk senjata; di Aceh Utara ; yaitu : di Bireuen dan Lhok Seumawe (tanggal 18 Nopember, masing-masing sebanyak 320 dan 300 pucuk, di Juli (20 Nopember, 6 buah Tank, 3 meriam pantai, 3 senapan mesin, 2 buah truk, 72 karabin dan 7 gudang amunisi), di Gelanggang Labu (22 Nopember, sebanyak 620 pucuk), dari Krueng Panjoe (tanggal 24 Nopember, disini terjadi pertempuran sengit selama 3 hari dan berakhir dengan penyerahan 300 pucuk senjata); di Aceh Timur, terutama di Idi dan Langsa, masing-masing tanggal 9 dan 13 Desember 1945 sebanyak 220 dan 300 pucuk senjata<sup>67</sup>. Selain itu juga di daerah-daerah Aceh Barat, Aceh Selatan dan Aceh Tengah (Aceh Tenggara pada waktu itu termasuk Wilayah Aceh Tengah)<sup>68</sup>.

Untuk sekedar perbandingan mengenai hasil yang dicapai selama kegiatan perebutan dan pelucutan senjata dari Jepang itu dapat dicatat : pada upacara memperingati 6 bulan Kemerdekaan Indonesia (17 Pebruari 1946) di Lapangan Blang Padang Kutaraja

<sup>65</sup> *Ibid.*, hal. 89; *Harian Waspada*, Medan 17 Agustus 1979.

<sup>66</sup> T.A.Talsya "Perjuangan Kemerdekaan di Aceh", *Santunan*, No. 28, Pebruari 1979, hal. 10.

<sup>67</sup> Jarahdam—I/Iskandar Muda, *Loc. Cit.*, hal. 91—6; Komite Musyawarah Angkatan 45, *op. cit.*; *Santunan*, No. 28, Pebruari 1979 hal. 10.

<sup>68</sup> *Ibid.*; Untuk daerah Aceh Tengah/Tenggara, lihat juga panitia Seminar, *Sejarah Perjuangan Pemuda Indonesia Daerah Tk. II Aceh Tengah*, Takengon, 24—25 Pebruari 1965, hal. 9—12; H. Syahadat, *Perjuangan Aceh Tenggara sejak tahun 1873 s/d Kemerdekaan R.I. Menentang Penjajahan*, Seminar perjuangan Aceh Sejak tahun 1873 s/d Kemerdekaan R.I., Medan, 22—26—Maret 1976, hal. 123—9.

TRI telah dapat mengadakan parade dengan satu resimen pasukan lengkap dengan persenjataannya <sup>69</sup>. Ini belum lagi persenjataan yang dimiliki oleh TRI dan lasykar-lasykar rakyat di daerah-daerah kabupaten dan kewedanaan di seluruh Aceh.

Rupanya aksi perebutan dan pelucutan senjata yang dilancarkan oleh API/TKR bersama dengan barisan rakyat telah menyebabkan posisi tentera penjajahan Jepang semakin terdesak. Tampaknya mereka tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi di Aceh. Oleh karena tentera Jepang yang telah dikonsentrasikan di Blang Bintang, pada tanggal 15 Desember 1945 meninggalkan lapangan terbang itu menuju pelabuhan Ulee Lheue. Dalam perjalanan sampai di Kutaraja, mereka sempat juga menyandra beberapa tokoh pimpinan TKR, seperti Syamaun Gaharu, Teuku A. Hamid Azwar, Teuku Mohd. Syah dan lain-lain, yang dibawa bersama mereka ke Ulee Lheue. Tetapi, kemudian, setelah melalui perundingan yang dilakukan oleh Tuanku Mahmud dengan para pejabat Jepang dan disusul pula dengan ultimatum yang dikeluarkan oleh Residen Teuku Nyak Arief, para perwira TKR itu dibebaskan kembali. Dan pada tanggal 18 Desember 1945 tentera Jepang bersama dengan pegawai sipil pemerintahannya dengan kapal sekutu meninggalkan Ulee Lheue setelah lebih dahulu meledakkan sebagian besar kenderaan bermotornya <sup>70</sup>

Selain itu tentera Jepang yang dikonsentrasikan di Langsa (Aceh Timur), pada tanggal 22 Desember 1945 juga meninggalkan Aceh menuju Sumatera Timur (Medan). Tetapi kemudian pihak sekutu memerintahkan mereka kembali ke Aceh untuk mengambil senjata yang ditinggalkan disana, yakni senjata-senjata yang telah berhasil direbut oleh TKR dan lasykar rakyat, bukan senjata yang ditinggalkan dengan sengaja yang memang tidak ada. Ini berarti tentera Jepang harus menghadapi kembali TKR dan Lasykar rakyat yang sudah lengkap persenjataannya — yang hampir seluruhnya berasal dari mereka pula, sehingga sudah dapat diperkirakan, bagaimanapun, mereka akhirnya akan menerima kegagalan; namun karena perintah itu datang dari sekutu yang telah mengalahkannya, mereka tidak bisa mengelak dan terpaksa harus melaksanakannya.

---

<sup>69</sup> Komite Musyawarah Angkatan 45, *Loc. cit.*,; Santunan No. 28 Banda Aceh, Pebruari 1979.

<sup>70</sup> Aboe Bakar Bsf., *op. cit.*, hal. 405.

Untuk membendung tentara Jepang yang menyerbu ke wilayah Aceh Timur itu pihak TKR mendatangkan pasukan tambahan dari Kutaraja, Bireuen, Takengon, Lhok Seumawe dan Lhok Sukon, sedang pasukan TKR dan Lasykar rakyat yang berada di bagian Timur, seperti dari Idi dan lain-lain, sebagian besar dipusatkan ke sekitar kota Langsa. Tujuan tentera Jepang pertama-tama adalah menduduki kembali kota Kuala Simpang dan Langsa. Maka terjadilah pertempuran sengit di sekitar ke dua kota tersebut, seperti : Kampung Durian dan Kampung Tupak (tanggal 24 Desember 1945); pada hari itu juga Kuala Simpang berhasil diduduki dan menyusul Langsa tanggal 25 Desember setelah terjadi pertempuran di Kampung Upak dan Bukit Meutuah; Tetapi pasukan Jepang itu tanggal 26 Desember terpaksa mundur kembali ke Kuala Simpang. Dan setelah pertempuran berlangsung selama hampir satu bulan, maka pada tanggal 20 Januari 1946 pihak TKR bersama lasykar rakyat berhasil memukul mundur tentera Jepang kembali ke Medan.<sup>71</sup> Dengan demikian daerah Aceh berhasil dibersihkan dari tentera Jepang dan kekalahannya itu merupakan pukulan berat tidak saja bagi Jepang, tetapi juga bagi sekutu sendiri.

#### D. Kedatangan tentera Sekutu dan tentera Nica di Daerah Aceh.

Sebagaimana telah disebutkan dalam bagian pendahuluan, bahwa satu-satunya wilayah daerah Aceh yang berhasil diduduki oleh sekutu/Belanda selama Revolusi Kemerdekaan adalah Pulau Weh (Sabang). Pulau yang terletak di ujung paling Utara Sumatera itu, dilihat dari segi kemiliteran memang cukup strategis, sebagai basis pertahanan terdepan dari arah Barat Laut Indonesia; karena tidak mengherankan, apabila Jepang menjelang saat kekalahannya menempatkan kira-kira 10.000 kekuatan tentaranya disana di bawah komando Vice Admiral Hirose . Demikian pula dengan tentera Sekutu/Belanda, pertama-tama perhatiannya diarahkan ke pulau tersebut.

Pada tanggal 25 Agustus 1945 armada Sekutu yang terdiri dari beberapa kapal perang Inggris telah berada di muka pelabuhan

---

<sup>71</sup> Jarahdam—I/Iskandar Muda. *op. cit.*, hal. 96—100; Pemerintah Pusat Soematera, *op. cit.*, hal. 6.

an Sabang. Dalam pasukan ini ikut serta Kesatuan Marine Belanda dan juga Pemerintah Belanda yang menjadi bagian dari AMACAB (Allied Military Administration Civil Affairs Branch). Pada hari itu juga Hirose menyerah terimakan Pulau Weh kepada Sekutu yang disusul dengan pendaratan tentara serta pengibaran bendera Inggris dan bendera Belanda di kota pelabuhan tersebut. Kemudian, untuk menggerakkan administrasi pemerintahan di pulau Weh ditetapkan seorang perwira Belanda, Letnan Hamers yang bertindak atas nama Panglima Sekutu, tetapi dengan tidak langsung seperti ternyata kemudian atas nama pemerintah Hindia Belanda. Setelah itu dipertahankan pula agar Jepang segera mengembalikan ribuan kuli kebun, yang berasal dari daerah Aceh, Sumatera Timur dan Tapanuli dan yang selama ini bekerja sebagai rumusnya disana, ke tempat asal mereka masing-masing <sup>73</sup>.

Pada tanggal 29 Agustus 1945 Sekutu memanggil Guntyo Sabang, Teuku Abaih, ke kapalnya untuk diberitahukan, bahwa Jepang telah menyerah dan karenanya pulau Weh telah diserahkan kembali kepada Pemerintah Hindia Belanda. Dalam hubungan ini Teuku Abaih, sebagai Kepala pemerintahan angkatan Jepang, khususnya dan rakyat pada umumnya, mengingat kekuatan tentara Sekutu dan Jepang yang besar di sana, tidak mungkin melakukan tindakan apa-apa selain dari menerima pemberitahuan tentara Sekutu tersebut. Semenjak itu, dengan dukungan sekutu, pemerintahan NICA (*Netherlands Indies Civil Administration*) mulai dirintis di pulau Weh. Dan sejak tanggal 3 September 1945, Letnan Hamers yang selama ini bertindak atas nama sekutu, digantikan oleh seorang pegawai Nica, bernama; C.A. Sani dalam kedudukannya selaku Comanding Officer. Untuk melaksanakan tugasnya sehari-hari, C.A. Sani dibantu oleh seorang kepala PID (*Politike Inlichtingen Dienst*) yang bernama Emil Dahniel <sup>74</sup>

Dengan berhasilnya diduduki pulau Weh berarti pula Tentara NICA mempunyai basis pertahanan yang kuat di ujung Barat Laut Indonesia. Dari sini, selama Revolusi Kemerdekaan, mereka

---

<sup>73</sup> A. J. Piekaar, *Atjeh en de Oorlog met Japan*, W. Van Hoeve, Bandung, 1949, hal. 246; Aboe Bakar Bsf, *op. cit.*, hal. 424; T.A. Talsya, *op. cit.*, hal. 58-9.

<sup>74</sup> A. Hasjmy & T.A. Talsya, *op. cit.*, hal. 30.

selalu melancarkan operasi Militer, melakukan pengawasan yang ketat diperairan Selat Malaka dan Samudera Indonesia, terutama dalam kaitan dengan usaha mereka untuk mendarat ke daratan Aceh dan membendung kegiatan rakyat Aceh mengadakan hubungan perdagangan dengan luar negeri. Namun usaha-usaha mereka itu dapat dikatakan selalu menemui kegagalan, sampai pengakuan kedaulatan Indonesia, mereka tidak pernah berhasil mendarat disana dan rakyat Aceh selalu berhasil menembus blokade Belanda itu.

Di wilayah daerah Aceh lainnya, juga sekutu berusaha untuk mendaratkan tentaranya. Beberapa waktu menjelang kekalahan Jepang tanggal 14 Agustus 1945, sekelompok pasukan dari *I.3.6. force*, di bawah pimpinan bekas kepala Pabean Belanda di Sigli, B.W. Lefrandt, telah berada di sekitar pegunungan Seulimeum (Aceh Besar) dalam rangka membuat persiapan untuk memungkinkan penerjunan pasukan payung Sekutu yang akan menunjang rencana penyerbuan pertahanan pantai Jepang di pesisir Aceh<sup>75</sup>. Tetapi penyerbuan ini tidak jadi dilaksanakan berhubung Jepang telah lebih dahulu menyerah dari rencana penyerbuan yang dipersiapkan itu.

Selanjutnya kira-kira dua bulan setelah Jepang menyerah, satu kelompok dari *A.D.C.8. I.3.6. force* di bawah pimpinan Mayor Marteen J. Knottenbelt tiba di Kutaraja dalam rangka penyelidikan mengenai keadaan militer, politik dan ekonomi di Aceh. M.J. Knottenbelt adalah anggota pasukan Belanda dan datang ke Aceh atas perintah SACSEA (*Supreme Allied Commander South East Asia*). Tanggal 1 Oktober 1945, ia bersama dengan seorang Kapten Inggris dan seorang Letnan Belanda diterjunkan di dekat Medan: untuk sampai ke tujuannya, yaitu ke ibukota Daerah Aceh, Kutaraja, di Medan Knottenbelt menghubungi para pejabat Jepang guna memperoleh perlengkapan dan tambahan rombongan. Pada tanggal 4 Oktober 1945 sebagian rombongannya berangkat melalui darat, sedang besoknya tanggal 5 Oktober, Knottenbelt berangkat dengan pesawat pembom ringan milik Jepang dan men-

---

<sup>75</sup> A.J. Piekaar. *op. cit.*, hal. 246; terjemahan karangan A.J. Piekaar untuk bagian ini (hal. 246 — 251), lihat Aboe Bakar Bsf., *Op. cit.*, hal. 423 — 30.

darat di Lhok Nga (Lapangan Udara Militer yang dibuat oleh Jepang, kira-kira 14 km arah ke selatan Kutaraja) <sup>76</sup>.

Meskipun Knottenbelt datang selaku wakil sekutu, namun pada mobilnya selalu dikibarkan bendera kecil Belanda, sehingga menjadikan suasana semakin panas karena meluapnya amarah rakyat. Selama di Kutaraja, dalam rangka tugasnya, ia berusaha untuk mengadakan kontak dengan para pemimpin Indonesia; dan kepada berbagai instansi Jepang ia mengirimkan sejumlah angket yang menyangkut dengan keadaan militer, politik dan ekonomi di Aceh. Berdasarkan jawaban angket yang diterima dari para pejabat Jepang, pada tanggal 14 Oktober 1945 Knottenbelt dapat mengirimkan laporan kepada Markas Besarnya; dan sejak itu dianggap tugasnya telah selesai, meskipun belum berhasil menghubungi para pejabat Indonesia.

Berdasarkan saran-saran yang diterima dari pihak Jepang, rombongan segera akan meninggalkan Kutaraja kembali ke Medan atau ke Sabang. Tetapi berhubung datangnya perintah atasan untuk mengamati perkembangan selanjutnya maka rencana keberangkatan tersebut diurungkan. Karena itu Knottenbelt kembali berusaha untuk mengadakan kontak dengan para pemimpin Indonesia, meskipun dihalangi oleh para pejabat Jepang yang merasa takut, kemungkinan akan dituduh oleh pihak Sekutu, bahwa mereka banyak memberi "angin" kepada para pemimpin rakyat dalam menggerakkan roda pemerintahan Republik Indonesia di daerah Aceh.

Pada tanggal 15 Oktober 1945, atas "jasa baik" seorang Cina peranakan, Goh Moh Wan yang dimasa pendudukan Jepang menjadi juru bahasa *Kompeitai*, Knottenbelt berhasil bertemu dengan Residen Aceh Teuku Nyak Arief. Dalam pertemuan yang diliputi oleh suasana ketegangan pada hari itu, Teuku Nyak Arief sambil mengepalkan tangannya dengan nada keras — sesuai dengan yang ditulis oleh Knottenbelt sendiri — menegaskan, bahwa ..... "ia suka bekerja sama dengan Sekutu, tetapi tidak dengan orang-

---

<sup>76</sup> Uraian secara lebih luas, lihat tulisan Knaottenbelt sendiri, "Kontak dengan Aceh" dalam, *Vrij Nederland*, tahun 6 no. 26, London, 19 Januari 1946; lihat juga, A.J.Piekaar, *loc. cit.*, : dan Aboe Bakar Bsf., *loc. cit.*

orang Belanda, Penguasa-penguasa Belanda – babi-babi sombong – tentara Belanda yang keparat ! <sup>77</sup> Selanjutnya Teuku Nyak Arief menegaskan lagi, bahwa masalah pelucutan senjata Jepang menjadi tanggungannya; oleh karena itu tentara sekutu tidak ada gunanya datang ke daerah Aceh. Dalam pada itu Knottenbelt sempat pula bertemu dengan beberapa tokoh pemimpin Indonesia lainnya, seperti dengan Ketua Komite Nasional Indonesia Daerah Aceh, Tuanku Mahmud, namun pertemuan-pertemuan tersebut lebih banyak menemui kegagalan bahkan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh utusan Saceea itu tampak turut lebih memperuncing suasana di daerah Aceh.

Sampai dengan awal Nopember 1945 semakin terasa lagi bagi Knottenbelt, bahwa keselamatan dirinya di daerah Aceh kian hari semakin tidak terjamin; hampir tiap malam selalu datang ancaman, berupa pelemparan batu dari jauh dan sebagainya ke arah rumah tempat tinggalnya dipinggiran lapangan Blang Padang. Karena itu ia mengambil keputusan untuk tidak perlu lagi lama-lama tinggal di Kutaraja dan tanggal 10 Nopember ia kembali ke Medan. Betapa gawat keadaan pada waktu itu dapat dilihat pada hari keberangkatan rombongan Knottenbelt; kendaraan; Teuku Nyak Arief terpaksa berjalan di depan sekali untuk menghindari hal-hal yang mungkin dapat mengancam jiwa utusan SACSEA itu. <sup>78</sup>

Hasil penyelidikan Knottenbelt selama satu bulan lebih di daerah Aceh dituangkan dalam bentuk laporan sementara yang sekaligus juga merupakan sebuah rekomendasi yang berharga bagi Sekutu dan Belanda dalam menentukan sikap selanjutnya. Adapun isi laporan itu seluruhnya adalah sebagai berikut :

” Hendaknya dianggap sebagai kewajiban saya untuk mengingatkan disini, bahwa, menurut hemat saya, adanya utusan Sekutu di Aceh dapat lebih memperburuk suasana. Sebab-sebabnya ialah: pertama; perselisihan paham yang timbul antara pihak Jepang dengan Indonesia mengenai masalah siapa

---

<sup>77</sup> Knottenbelt, *op. cit.*, menurut terjemahan, Aboe Bakar, PDIA, 13 Mei 1979.

yang berkuasa sekarang' yang sehari kesehari menjadi semakin parah; kedua, dengan adanya utusan sekutu di tempat tahulah orang-orang Jepang, bahwa tindak-tanduk mereka itu diamat-amati dan tahu pula orang-orang Indonesi, bahwa mereka tidak dapat mempengaruhi orang-orang Jepang untuk tidak mentaati perintah-perintah SECSEA; ke tiga, Aceh dapat diibaratkan sebagai sebuah tong mesiu yang untuk meledaknya hanya diperlukan sebuah nyala api kecil, sementara seorang utusan SECSEA yang bijak sana dan ahli tidak akan mungkin dapat memadamkannya jika ia telah meledak, akan tetapi ia akan berguna sekiranya tangan yang memamatkan api itu belum sempat mendatangkan suatu malapetaka." <sup>79</sup>

Berdasarkan laporan tersebut, maka pihak Sekutu tidak mendatangkan lagi utusannya ke Aceh dan rencana untuk menduduki daerah ini juga diurungkan. Demikian pula dengan pihak NICA, meskipun tidak sepenuhnya, mereka juga terpengaruh oleh rekomendasi Knottenbelt itu. Disini ditulis "tidak sepenuhnya" dan "terpergaruhi", karena, seperti juga telah disinggung dimuka, tentara Nica, baik yang ditempatkan di Sabang maupun di Medan, selalu berusaha untuk mendarat di daerah Aceh, tetapi dengan perhitungan yang teliti dan hati-hati. Rencana pendaratan ini lebih digiatkan lagi setelah pecahnya aksi Militer Belanda II, 18 Desember 1948. Pada waktu itu berkali-kali dilancarkan serangan udara terutama terhadap Komando Aliteri TNI di Lapangan Udara Lhok Nga dan beberapa kota lainnya, seperti Ulee Lheu, Sigli, Lhok Seumawe, Langsa, Meulaboh dan sebagainya. Terhadap serangan-serangan tersebut selalu dibalas dengan meriam-meriam anti pesawat, yang di Aceh pada waktu itu dikenal dengan nama : *pompom* <sup>80</sup>. Demikianpula dengan marine Belanda, selalu berusaha melakukan percobaan pendaratan pada tempat-tempat yang strategis dan pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Aceh, seperti : Ulee Lheue, Uyong Bateë, Krueng Raya, Sigli, Ulee Ka-

<sup>79</sup> Lihat lebih lanjut, A.J. Piekaar, *op. cit.*, 248; Aboe Bakar Bsf, *op. cit.*, hal. 394, 402, 426; A. Hasjmy & T.A. Talsya, *op. cit.*, hal. 30-3; T.A. Talsya, "Perjuangan Kemerdekaan di Aceh" *Santunan*, Tahun ke IV, no. 34, Agustus 1979, hal. 20.

<sup>80</sup> Uraian lebih lanjut, lihat, A.G. Mutiara, "Banda Aceh Pernah Berperan sebagai Ibukota R.I." *Seminar Perjuangan Aceh sejak 1872 sampai dengan Kemerdekaan Indonesia*, Medan Maret 1976; lihat juga, Hoesin Joesoef, *op. cit.*, hal. 50-1; A. Hasjmy & T.A. Talsya., *op. cit.*, hal. 25 - 8.

reung, Lhok Seumawe, Kuala Langsa, Meulaboh, Tapak Tuan dan lain-lain. Armada-armada perang Belanda yang sering beroperasi di perairan Aceh pada waktu itu, antara lain Jan van Bukker, Banda dan Jan van Gallen<sup>81</sup>. Tetapi karena kuatnya pertahanan pantai yang di perlengkapi dengan meriam-meriam pantai hasil rampasan dari tentara Jepang serta dilandasi pula oleh semangat rakyat yang bergelora untuk mempertahankan Kemerdekaan dan hal-hal ini selalu diselidiki oleh pihak Belanda, a.l. melalui nelayan yang sedang mencari ikan dengan menyeret mereka ke kapal untuk diminta berbagai keterangan mengenai situasi di darat maka rencana pendaratan Belanda itu selalu ditemui kegagalan. Rupanya apa yang ditunggu Belanda agar suatu waktu Aceh tidak lagi, sebagaimana disebutkan oleh Knottenbelt, sebagai tong mesiu yang kalau dinyalakan, dengan nyala api yang kecil sekalipun, akan menda-tangkan malapetaka (tentunya bagi sipenyala sendiri), tidak pernah tiba sampai mereka mengakui Kemerdekaan Indonesia.

---

<sup>81</sup> Mengenai rencana dan usaha Belanda untuk mendarat di Aceh, lihat lebih lanjut dalam buku-buku pada cetakan kaki no. 80 di atas.

## B A B IV

### REVOLUSI KEMERDEKAAN INDONESIA DI ACEH

#### A. Peristiwa Cumbok dan Aksi TPR

Pada masa proklamasi kemerdekaan muncul beberapa kelompok elite di Aceh, yang mempunyai orientasi politik tertentu. Orientasi politik yang mereka anut tercermin dalam cara mereka memberi tanggapan dan penafsiran terhadap proklamasi kemerdekaan. Karena itu konstelasi politik sesudah proklamasi atau selama masa revolusi di Aceh merupakan refleksi dari interaksi yang berlangsung antara masing-masing kelompok elite.

Kelompok elite pertama adalah golongan uleebalang, yang secara tradisional menduduki jabatan pemerintahan lokal di Aceh. Sungguhpun secara sederhana uleebalang digolongkan kepada satu kelompok, tetapi sebenarnya mereka mempunyai status yang berbeda-beda. Perbedaan status ini berkaitan erat dengan usia silsilah dengan Sultan Aceh, dan otoritas politik dalam tata feodal seperti luas daerah kekuasaan, dan sebagainya.<sup>1</sup>

Kedua, elite ulama, yang secara tradisional merupakan pemimpin spiritual dalam masyarakat Aceh. Seperti halnya dengan golongan bangsawan atau uleebalang, mereka yang tergolong dalam kelompok elite ulama ini memiliki status yang berbeda sejalan dengan kualitas ilmu yang dimilikinya. Di samping itu, elite ulama ini dapat dikelompokkan kepada dua kelompok, yaitu elite ulama modernis dan elite ulama ortodoks. Di antara kedua kelompok ini tampaknya elite ulama modernis yang sudah mempunyai organisasi yang agak teratur yaitu PUSA. Dengan demikian mereka mempunyai jaringan komunikasi dengan seluruh anggotanya yang tersebar di seluruh Aceh. Sejak masa pendudukan Jepang, elite ulama modernis sudah banyak menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan, terutama yang berhubungan dengan

---

1. Dilihat dari segi luar teritorial, terlihat aneka macam sebutan kaum bangsawan. Diantaranya panglima sagi XXII, XXV, XXVI mukim, uleebalang, uleebalang cut, mukim dan keujruen. Demikian juga dalam hubungan dengan kerabat sultan, seperti tuwanku dan panglima polem.

keagamaan<sup>2</sup>. Sedangkan elite ulama ortodok umumnya masih tetap meneruskan peran tradisionalnya, terutama di pesantren-pesantren.

Kelompok elite ketiga adalah elite pemuda. Secara kasar mereka dapat digolongkan kepada dua golongan, yaitu elite pemuda yang mendapat pendidikan militer Jepang dan elite pemuda yang mendapat pendidikan sekolah keagamaan modernis. Mereka yang termasuk kelompok elite pertama umumnya bersatu untuk membentuk angkatan bersenjata di Aceh yaitu API<sup>3</sup>. Sedangkan kelompok elite kedua, membentuk badan-badan kelasykaran. Sungguhpun di antara mereka terdapat kepentingan politik tertentu, tetapi di antara para elitnya mempunyai hubungan tradisional melalui organisasi Pemuda PUSA<sup>4</sup>.

Kelompok elite yang keempat, yaitu elite minoritas. Mereka ini terdiri dari para cendekiawan ataupun pemimpin golongan minoritas yang berasal dari daerah luar Aceh. Oleh karena itu mereka hanya terdiri dari beberapa orang saja.<sup>5</sup>

Proklamasi kemerdekaan dan kevakuman kekuasaan akibat penyerahan kekuasaan Jepang kepada sekutu, diberi tafsiran dan tanggapan oleh masing-masing kelompok. Di antara kelompok elite itu tampaknya kelompok elite ulama (terutama modernis) dan pemuda yang amat bernafsu untuk meraih pengaruh pada waktu itu. Mereka melihat jalur militer merupakan jalur yang ampuh untuk meraih kekuasaan. Justeru itu, mereka membentuk lembaga militer atau kelasykaran, yang bakal dijadikan ujung tombak bagi perwujudan orientasi politiknya.

Di pihak lain, kelompok elite bangsawan yang masih tetap meneruskan tradisi pemerintah lokal pada mulanya tidak membentuk pasukan militer ataupun kelasykaran. Keadaan demikian

---

2. Di antaranya dapat disebutkan Teungku Muhammad Daud Beureueh, Teungku A. Wahab Seulimum, Teungku Hasballah Indrapuri dan Teungku Ismail Yakub. Mereka menduduki jabatan Maikbatra, Syu Sangi Kai, dan sebagainya, lihat bab. II.

3. Umumnya mereka bekas anggota Gyu Gun. Diantaranya Syammaun Gaharu dan T.A Hamid Azwar.

4. Di antaranya Teungku Amir Husin Al Mujahid, Ali Hasjmy, dan Cek Mat Rahmany. Sungguhpun sebelum tahun 1940, masing - masing kelompok mempunyai organisasi, tetapi tatkala dibentuk Pemuda PUSA pada tahun 1940, mereka menyatakan diri bernaung di bawahnya. Lihat Anthony Reid, *op cit.*, hal. 25 - 27.

5. Di antaranya Mr. SM. Amin, Sutikno Padmosuparto John Lie, Ali Murtolo. Lihat Bab , II.

barangkali karena mereka sudah cukup puas dengan membina API yang dibentuk oleh para pemuda bekas Gyu Gun pada bulan Oktober 1945 yang lalu. Tetapi pembentukan lasykar-lasykar yang merupakan "tentara bayangan" di samping API menimbulkan perasaan curiga di kalangan sebagian kelompok elite uleebalang, terutama di daerah Aceh Pidie. Sikap kecurigaan demikian bisa difahami bila dihubungkan dengan hubungan yang terjalin antara pemimpin kelasykaran dan pengurus PUSA yang berkedudukan di Pidie tambahan lagi kekuatan API yang belum begitu tangguh.

Sikap kecurigaan itu pada tingkat tertentu membawa kepada konflik seperti yang telah terjadi antara Asisten Residen Teuku Cut Hasan dengan satuan lasykar BPI pada waktu upacara pengibaran bendera Sang Saka Merah Putih di Sigli, demikian juga halnya dengan peristiwa yang sama antara satuan BPI dengan uleebalang Cumbok di Lameulo.<sup>6</sup>

Insiden Sigli dan Lameulo itu menimbulkan reaksi luas dalam kalangan elite ulama dan kelasykaran, yang mereka tafsirkan sebagai perlawanan terhadap pemerintahan republik. Sebaliknya para uleebalang di Pidie merasa dirinya terancam oleh reaksi dari pihak elite ulama dan kelasykaran. Tambahan lagi persekutuan yang terjadi antara sebagian golongan mereka (Teuku Nyak Arief dan Teuku Panglima Polem Muhammad Ali) dengan para lasykar dalam kedua kasus itu.

Menyadari situasi demikian, Teuku Umar Keumangan, Beureunun, mengambil prakarsa untuk melaksanakan pertemuan uleebalang pada tanggal 22 Oktober 1945 di Beureunun, Pidie. Pertemuan untuk membicarakan masalah konsolidasi kekuatan dan memperkuat solidaritas antara para elite uleebalang tampaknya tidak semulus yang diharapkan. Hal demikian tampak pada ketidakhadiran beberapa orang di antara mereka. Di sini jelas

---

6. Upacara penaikan bendera Sang Saka Merah Putih baru terlaksana di kedua kantor itu setelah mereka mendapat tekanan dari Residen Teuku Nyak Arief. Lihat Nazaruddin Syamsuddin, *The Course of the National Revolution in Aceh, 1945 - 1949*, thesis unpubl. (Monash University : 1974), hal. 122.

menunjukkan terjadinya perbedaan kepentingan dari masing-masing uleebalang.<sup>7</sup>

Sungguhpun terdapat beberapa uleebalang di daerah Pidie yang tidak menghadiri pertemuan itu, namun mereka berhasil mengambil sikap terhadap gerakan-gerakan revolusioner yang sedang berkembang di daerah Aceh umumnya dan Pidie khususnya. Sikap itu diwujudkan dalam langkah usaha pembentukan *markas uleebalang* dibawah pimpinan Teuku Muhammad Daud Cumbok dengan berkedudukan di Lameulo. Untuk mehandingi lasykar - lasykar yang sudah terbentuk di Aceh, lalu mereka memandang perlu untuk membentuk badan kelasykaran yang akan menjadi ujung tombak mereka, yaitu Barisan Penjaga Keamanan (BPK) dan Perhimpunan Indonesia.<sup>8</sup>

Di antara kedua kelasykaran itu hanya BPK yang tumbuh dan berkembang. Lasykar tersebut dalam perkembangan berikut dipecah atas 3 satuan, yang masing-masing mempunyai misi khusus. Ketiga satuan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Barisan Cap bintang dengan tugas utama menghadapi perlawanan rakyat yang menentang kekuasaan para uleebalang.
2. Barisan cap sauh dengan tugas utama di bidang usaha keuangan untuk membiayai gerakan mereka.
3. Barisan cap tombak dengan tugas utama menangkap para pemimpin rakyat (lasykar) yang menentang atau menghalang-halangi mereka<sup>9</sup>.

Sifat dan tujuan yang melandasi pembentukan lasykar BPK ini tentu menimbulkan suasana yang tidak nyaman dengan lasykar

7. Pertemuan itu bukan saja tidak berhasil mengumpulkan para uleebalang yang cukup berpengaruh di luar Pidie seperti T Panglima Polem Muhammad Ali, Teuku Nyak Arief dan Teuku Daudsyah, tetapi juga terhadap beberapa uleebalang di Pidie, yang punya hubungan dengan kaum republik seperti Teuku Bentara Pineung (ayah Mr. T.M. Hasan Gubernur Sumatra) tidak mengahdirinya. Lihat Nazaruddin Syamsuddin, *op. cit.*, hal 123. atau Revolusi 45 di Aceh hal . 18.

8. BPK berpusat di Lameulo di bawah pimpinan adik Teuku Muhammad Daud Cumbok yaitu Teuku Mahmud. Sedangkan Perhimpunan Indonesia direncanakan tidak bersifat lokal tetapi meliputi seluruh Aceh di bawah Teuku Cut Hasan berkedudukan di Kutaraja. Organisasi terakhir tidak berkembang karena sekali lagi tidak mendapat restu dari beberapa uleebalang terkemuka yaitu Teuku Chiek Muhammad Johan Alamsyah Peusangan dan Teuku Muhammad Daudsyah Idie. Nazaruddin Syamsuddin, *op. cit.* hal. 123 - 4.

9. S.M. Amin *op. cit.*, hal. 132. Dan lihat juga Nazaruddin Syamsuddin, *op. cit.* hal . 125 - 6; Serta A. Arief, *Disekitar Peristiwa Pengkhianat Tjumbok* (Kutaradja : Penerbit A. Arief/ Semangat Merdeka, 1946) hal. 8 - 9.

lainnya, terutama BPI/PRI yang sudah mengembangkan sayap di daerah-daerah keulebalangan di Pidie. Suasana tidak nyaman terasa dalam rangka meraih pengaruh di kalangan masyarakat luas, terutama di daerah basis BPK, yaitu Lameulo. Suasana tidak aman dalam proses inter-aksi mereka pada tingkat tertentu menimbulkan konflik. Di antaranya dapat disebutkan tindakan penangkapan terhadap beberapa anggota satuan PRI di Lameulo pada tanggal 3 November 1945. Malahan pada tanggal 8 November 1945 kantor PRI Lameulo mereka duduki.<sup>10</sup>

Perlakuan yang diterima oleh satuan lasykar PRI di Lameulo dengan segera disampaikan ke markas induknya di Kutaraja sehingga menjadi persoalan yang pelik bagi pemerintah daerah. Karena PRI adalah juga merupakan suatu lasykar yang cukup tangguh pada waktu itu di Aceh. Karena itu pemerintah daerah mengkhawatirkan jangan terjadi tindakan balas dendam. Menghadapi situasi demikian. Tuanku Mahmud yang menjabat sebagai Ketua Komite Nasional Daerah terpaksa mengirimkan wakil ke Lameulo untuk memperdamaikan sengketa yang terjadi antara PRI dan BPK<sup>11</sup>.

Suasana hubungan yang berlangsung antara markas Uleebalang dengan lasykar-lasykar di Aceh tampaknya kian hari kian bertambah tegang. Dalam suasana tegang itu berkembang issue tentang pembentukan *Comite van ontvangst* di Lameulo yang bertujuan untuk mempersiapkan kedatangan Belanda. Issue tersebut dipergunakan oleh pihak kelasykaran dan kelompok revolusioner untuk menyudutkan gerakan markas uleebalang<sup>12</sup>.

---

10. Nazaruddin Syamsuddin, *op. cit.*, hal. 128.

11. Utusan tersebut tidak membawa penyelesaian tuntas karena tidak dipatuhi oleh pihak BPK; lihat SM. Amin *loc. cit.*

12. Kebenaran tuduhan itu masih diragukan dan memerlukan penelitian yang mendalam. Sebab literatur mengenai gerakan Cumbok di Aceh selama ini amat berat sebelah. Karangan mengenai peristiwa Cumbok ini pada umumnya ditulis oleh lawan mereka, yang sangat subyektif dan sepihak. Selain itu terdapat juga penulis yang agak netral seperti Mr. S. M. Amin, tetapi pada masa itu ia mempunyai aliansi politik dgn kelompok revolusioner. Menarik untuk dikonfrontir bagaimana pernyataan antara Teuku Cut Hasan dan Teuku Mahmud dengan Mr. T.M. Hasan Gubernur Sumatra sewaktu berkunjung ke Sigli 9 - 12 Desember 1945, yang menyatakan bahwa mereka (gerakan Cumbok) memiliki juga rencana merah putih. Lihat dalam Nazaruddin Syamsuddin, *op. cit.*, hal 130, 135; Abdullah Husein *Peristiwa* (Kuala Lumpur : 1956), hal. 263. Demikian juga wawancara dengan Mr. T. M. Hasan.

Setelah berhasil mematahkan gerakan PRI di Lameulo, Markas Uleebalang mengalihkan perhatiannya ke Sigli, yaitu untuk memperoleh senjata dari serdadu Jepang yang bakal meninggalkan daerah Aceh. Tindakan ini perlu dilakukan secepatnya agar senjata itu jangan jatuh ke tangan lasykar-lasykar revolusioner. Untuk mewujudkan rencana tersebut satuan BPK berangkat memasuki kota Sigli pada tanggal 25 November 1945. Rencana pihak BPK itu cepat diketahui oleh PRI. Oleh karena itu satuan mereka juga memasuki kota Sigli untuk menghalang-halangi agar senjata jangan diserahkan kepada pihak BPK.

Kedatangan dua kelompok lasykar yang saling bertentangan untuk memperoleh senjata dari tangan serdadu Jepang menimbulkan suatu hal yang pelik baik di pihak Jepang maupun di pihak TKR, yang pada waktu itu amat kecil jumlahnya. Ini dapat dimengerti karena kedua satuan lasykar saling mengklaim dirinya sebagai yang berhak. Untuk menghindari jangan sampai terjadi krisis antara kedua lasykar, pihak TKR menawarkan jasa baik agar pihak Jepang mau menyerahkan senjata kepada TKR. Namun pihak Jepang tampaknya tidak berhasil diyakinkan oleh TKR. Malahan mereka memberi jawaban bahwa pemerintah pendudukan Jepang masih terikat perjanjian dengan sekutu<sup>13</sup>.

Tetapi dalam perkembangan selanjutnya ternyata Jepang menyerahkan sebagian senjata kepada satuan lasykar BPK. Tindakan itu menimbulkan suasana genting antara BPK dengan PRI. Akibatnya terjadilah bentrokan senjata antara kedua lasykar itu pada permulaan Desember 1945. Bentrokan senjata yang berlangsung antara BPK dan PRI di Sigli mengundang perhatian pemerintah daerah. Atas inisiatif pemerintah daerah melalui TKR, pertempuran yang berlangsung di Sigli dapat dihentikan (6 Desember 1945). Jalan penyelesaian yang ditempuh yaitu pengosongan kota Sigli oleh kedua lasykar, penyerahan keamanan kota Sigli kepada TKR, dan penyerahan senjata kepada TKR.<sup>14</sup>

Dengan terhentinya pertempuran di kota Sigli tidak berarti perdamaian telah tercapai. Ketetapan yang telah disetujui bersama

---

13. S.M. Amin. *op. cit.* hal. 133 - 4.

14. TKR dipimpin oleh Syammaun Gaharu dan Teuku Hamid Azwar. Lihat S.M. Amin, *op. cit.* hal 135: atau *Pemerintah RI Daerah Aceh op.,cit.* hal. 21 - 22.

itu, tidak seluruhnya ditaati. Pertempuran masih saja berlangsung di luar kota; dan Markas Uleebalang ternyata tidak mengembalikan seluruhnya senjata yang diperoleh dari Jepang kepada TKR. Kemudian, tanggal 10 Desember Markas Uleebalang untuk kedua kalinya mengadakan pertemuan di kediaman Teuku Laksamana Umar, Uleebalang Njong di Luengputu. Hasil pertemuan itu telah turut memperuncing suasana kembali dan ini berarti tidak menghiraukan lagi ketentuan yang telah disepakati bersama di Sigli, adalah mereka setuju agar Markas Uleebalang bertindak lebih tegas lagi untuk menanggapi dan kalau perlu membunuh para pemimpin yang menentang gerakan mereka. Dan diharapkan akhir Desember 1945, pelaksanaan rencana ini sudah dapat selesai.<sup>15</sup>

Untuk merealisasi keputusan pertemuan Luengputu, tentara Markas Uleebalang, BPK, segera bertindak. Mereka mulai melepaskan tembakan-tembakan terhadap kampung-kampung yang diperkirakan sebagai tempat pemusatan kekuatan lawan mereka; kemudian disusul pula dengan aksi pembakaran gedung-gedung yang diperhitungkan akan digunakan sebagai pertahanan atau tempat pertemuan pemuda-pemuda dan pemimpin-pemimpin lawannya itu. Tanggal 16 Desember 1945, BPK dengan senjata-senjata berat yang dimilikinya, menembaki kampung-kampung di sekitar Luengputu dan Meutareum yang memang selama ini menjadi tempat pemusatan para pemuda, terutama dari organisasi PRI. Dan tanggal 20 Desember 1945 mereka membakar gedung sekolah agama di Tieteu serta kantor-kantor kehakiman di beberapa tempat.<sup>16</sup>

Untuk menghadapi tindakan Markas Uleebalang yang semakin meningkat itu, di pihak lain para pemimpin dan pemuda yang jiwanya tampak semakin terancam, mulai pula mengkoordinir diri secara lebih terpadu. Pada tanggal 22 Desember 1945, mereka mendirikan suatu organisasi yang diberi nama : Markas Besar Rakyat Umum (MBRU) dengan tempat kedudukan sementara di Gampong Garut dan kemudian dipindahkan ke kota Sigli. Organisasi ini ternyata mendapat sambutan hangat dari sebagian besar

---

15 *Ibid.*

16 *Ibid.*

rakyat kecil; di mana-mana di seluruh daerah Pidie didirikan barisan-barisan perjuangan yang tunduk di bawah komando MBRU itu. Akibatnya Markas Uleebalang lebih meningkatkan lagi serangan-serangannya; pada tanggal 30 – 31 Desember 1945, tembakan-tembakan mereka kembali diarahkan ke Meutereum, Langga, Ilot dan Lala, sehingga kampung-kampung di sekitarnya mengalami kerusakan berat. <sup>17</sup>

Dalam pada itu Markas Besar Rakyat Umum (MBRU) juga mulai bergerak. Gerakan mereka diawali dengan sebuah Maklumat yang ditujukan kepada kaum muslimin pengikut mereka yang pokok isinya adalah jangan membakar rumah dan mengambil harta orang, serta orang-orang yang ditangkap harus diperlakukan dengan baik <sup>18</sup>. Suatu seruan yang secara psikologis telah dapat menarik simpati rakyat tetapi sebelumnya dilupakan oleh pihak Markas Uleebalang walaupun mungkin saja, seperti umumnya dalam suatu pertempuran, isi maklumat tersebut tidak terlaksana sepenuhnya. Sementara itu kekacauan tidak saja terjadi di wilayah-wilayah Lameulo, Beureunun dan Luengputu, tetapi telah meluas hampir ke seluruh wilayah Pidie, sejak dari Meureudu perbatasan Aceh Utara sampai ke daerah uleebalang XII Mukim Pidie pada perbatasan Aceh Besar.

Dengan bertambah luasnya "perang saudara" di wilayah Pidie itu, Pemerintah Daerah di Kutaraja semakin khawatir akan bahaya yang sedang mengancam, terutama dalam kaitan dengan kekuatan perjuangan yang pada waktu itu sangat dibutuhkan untuk menghadapi kemungkinan tentara NICA, yang memang sebagaimana telah diuraikan di muka telah merencanakan, melancarkan penyerbuan ke daerah Aceh. Karena itu, tanggal 6 Januari 1946 Markas Umum Perjuangan dan Pertahanan Rakyat Daerah Aceh (badan yang mengkoordinir kegiatan militer di daerah Aceh, didirikan dalam bulan Desember 1945) mengadakan sidangnya yang pertama untuk membahas situasi di Pidie. Dan kemudian dilanjutkan dengan sidangnya yang kedua tanggal 8 Januari; dalam memberikan pendapat dan juga laporan, ialah

---

17. *Ibid.*

18. Keempat fasal isi maklumat tersebut, lihat *ibid.*, hal. 27.

Ketua Markas Umum sendiri (Syammaun Gaharu, dari TKR), Teungku Mohammad Daud Beureueh dari Mujahidin, Ali Hasjmy dari Pesindo (keduanya dalam sidang pertama tidak hadir), Ismail Yakob (salah seorang tokoh PUSA, tetapi di sini mewakili PNI) serta Husein Yusuf dan Teuku Muhammad Syah, yang keduanya mewakili TKR <sup>19</sup>. Setelah sidang selesai dan demikian pula setelah adanya desakan dari Komite Nasional Indonesia (KNI) Daerah Aceh, pada tanggal 8 Januari itu Pemerintah Republik Indonesia Daerah Aceh, bersama dengan Markas Umum Perjuangan dan Pertahanan Rakyat Daerah Aceh (disingkat Markas Umum Daerah Aceh) mengeluarkan Maklumat dan Ultimatum yang ditujukan kepada Markas Uleebalang di Lameulo. Kedua pernyataan ini ditandatangani oleh Wakil Residen Aceh, Teuku Panglima Polem Mohammad Ali dan Syammaun Gaharu, selaku ketua Markas Umum Daerah Aceh.

Dalam Maklumat tersebut Pemerintah Daerah dan Markas Umum Daerah Aceh menyatakan, setelah diadakan penyelidikan secara mendalam, bahwa mereka yang mengadakan perlawanan di daerah Cumbok, Lameulo dan di tempat-tempat lain dalam wilayah Pidie adalah "musuh Negara Republik Indonesia". Dan diingatkan bagi orang-orang yang telah terpengaruh agar menghindari diri dari mereka, kalau tidak mereka juga akan dikenakan hukuman sesuai dengan kesalahannya <sup>20</sup>. Sedang Ultimatum yang mengiringi Maklumat tersebut, isinya memerintahkan mereka, yang telah dinyatakan sebagai musuh Negara Republik Indonesia itu, mulai hari Kamis tanggal 10 Januari 1946, jam 12 siang, supaya menghentikan perlawanan dan menyerah; kalau tidak, mereka akan ditundukkan dengan kekerasan <sup>21</sup>.

Ternyata Ultimatum yang dikeluarkan Pemerintah itu tidak diindahkan sama sekali oleh pihak Markas Uleebalang. Aksi-aksi mereka tidak menjadi reda, bahkan semakin meningkat. Daerah-daerah yang cukup parah dilanda oleh aksi perlawanan mereka,

---

19. Uraian selengkapnya, lihat Nazaruddin Syamsuddin, *op. cit.*, hal 141 - 3.

20. Isi Maklumat tersebut selengkapnya, lihat S.M. Amin *op. cit.*, hal 137.

21. Isi selengkapnya Ultimatum tersebut, lihat *ibid.* Juga *Pemerintah R.I. Daerah Atjeh, op. cit.* hal 27.

selain Lameulo, juga Keumala, Beureunun, Luengputu, Panteraja, Trienggading, Meureudu dan lain-lain. Ada dua faktor yang cukup menentukan, sehingga Markas Uleebalang menolak untuk menyerah. Pertama, perhitungan mengenai adanya kemampuan mereka untuk bertempur sampai tercapai kemenangan, mengingat persenjataan yang mereka miliki jauh lebih kuat, bila dibandingkan dengan TKR, apa lagi dengan senjata yang dimiliki barisan pengikut Markas Besar Rakyat Umum (MBRU). Kedua, "hukuman" yang dijatuhkan kepada mereka justeru oleh Pemerintah sendiri, melalui Maklumatnya itu sebagai pengkhianat dan musuh Negara, bahkan dipertegas lagi oleh kelompok lawannya, sebagai kaki tangan NICA<sup>22</sup>, pengkhianat Bangsa dan Agama<sup>23</sup>, tampaknya terlampau berat dirasakan dan besar sekali konsekwensinya. Dengan "hukuman" yang dijatuhkan itu mereka telah dapat memperkirakan setelah menyerah akhirnya juga mereka setidak-tidaknya terbatas terhadap para pemimpin mereka-akan dihadapkan ke "pengadilan revolusi" sesuai dengan suasana revolusi pada waktu itu. Oleh karena itu mereka bertekad lebih baik meneruskan perlawanan dan mati di medan pertempuran.

Setelah batas waktu yang ditentukan berlalu, maka TKR dengan didukung oleh barisan yang berada di bawah komando MBRU mulai bertindak. Satu demi satu kota-kota, seperti Meureudu, Luengputu, Beureunun dll., dalam waktu yang relatif singkat berhasil dibersihkan dari pengikut Markas Uleebalang. Kemudian seluruh kekuatan diarahkan ke Lameulo, yang belum dapat dikuasai. Dengan didukung oleh satuan-satuan tambahan yang khusus didatangkan dari Kutaraja, akhirnya pada tanggal 13 Januari 1946, TKR berhasil merebut kota kedudukan Markas Uleebalang itu, meskipun selama ini tentara mereka, Barisan Penjaga Keamanan (BPK) dengan sekuat tenaga selalu mempertahankannya.

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, dalam suasana kemenangan, pada hari itu juga (13 Januari) Markas Besar Rakyat Umum (MBRU) mengeluarkan sebuah Maklumat yang

---

22. Maklumat Penjelasan Markas Besar Rakyat Umum tanggal 17 Januari 1946.  
23. S.M. Amin, *op cit.*, hal. 152 - 3.

memberitahukan bahwa kekuatan Markas Uleebalang telah dapat dipatahkan dan karena itu diharapkan kepada seluruh lapisan masyarakat agar tetap tenang. Ditegaskan lagi, bahwa merampas dan menggelapkan harta pihak lawan dilarang keras; sedangkan senjata-senjata yang dirampas dari mereka harus diserahkan kembali kepada Markas Besar Rakyat Umum (MBRU) <sup>24</sup>.

Setelah kota Lameulo jatuh, sisa-sisa pasukan Barisan penjaga keamanan (BPK) bersama dengan para pemimpin Markas Uleebalang lainnya, termasuk Teuku Muhammad Daud Cumbok sendiri, mengundurkan diri ke gunung-gunung dengan maksud hendak meneruskan perlawanan secara bergerilya. Namun dalam waktu tiga hari-saja, yaitu pada tanggal 16 Januari 1946, mereka dapat ditangkap semuanya. Mereka yang tertangkap itu terutama para pemimpin mereka, dibawa ke Sigli, lalu ke Sanggeue untuk diminatkan berbagai keterangan sehubungan dengan kegiatan mereka selama ini; dan selanjutnya untuk "diadili". Kemudian untuk lebih diketahui dan dipahami oleh segenap lapisan masyarakat mengenai gerakan Markas Uleebalang yang telah berhasil dipatahkan itu, pada tanggal 17 Januari 1946, sekali lagi Markas Besar Rakyat Umum (MBRU) mengeluarkan sebuah Maklumat. Pada dasarnya isi Maklumat, yang diberi nama "Maklumat Penjelasan" itu, adalah merupakan kelengkapan penjelasan dari Maklumat yang terdahulu (13 Januari) <sup>25</sup>

Kekalahan yang diderita oleh pihak gerakan Cumbok di Pidie itu agaknya disebabkan oleh pelbagai faktor. Faktor pertama yaitu gerakan mereka kurang mendapat bantuan dari para elite uleebalang di daerah lain, karena para uleebalang di Aceh pada waktu itu terpecah atas beberapa golongan mengenai pandangan mereka terhadap kemerdekaan. Akibatnya gerakan Cumbok itu hanya terbatas pada beberapa daerah keuleebalangan yang mempunyai ikatan solidaritas dengan Teuku Muhammad Daud Cumbok.

---

24. Isi selengkapnya Maklumat tersebut, lihat, *Pemerintah R.I. Daerah Atjeh., op.cit.*, hal. 28 - 9.

25. Isi selengkapnya Maklumat tersebut, lihat *ibid.* hal. 32 - 5. Dan juga S.M. Amin. *op.cit.*, hal 139 - 41.

Faktor kedua yaitu kelihaihan dan kepintaran golongan lasykar rakyat menggunakan simbol-simbol keagamaan dan kemerdekaan dalam rangka menarik perhatian dan pengaruh dari sebagian besar rakyat Aceh. Dengan mengemukakan simbol-simbol keagamaan dan kemerdekaan, pihak lasykar memandang dan mengklaim gerakan mereka sebagai tugas suci keagamaan. Untuk meneguhkan gerakan mereka, pihak lasykar tidak segan-segan mengemukakan fatwa-fatwa yang diperoleh dari beberapa orang ulama. Reaksi emosional yang dipertunjukkan oleh para anggota BPK seperti penganiayaan kepada ulama dari pihak lasykar dan tembakan yang mereka lakukan terhadap bangunan keagamaan, malangnya dimanfaatkan oleh pihak lasykar untuk membenarkan tuduhan mereka.

Faktor ketiga yaitu keberhasilan dari para elite kelasykaran mempengaruhi pendapat umum di ibukota keresidenan Aceh. Media komunikasi yang terdapat di Kutaraja, terutama surat kabar ***Semangat Merdeka*** sangat aktif mempengaruhi pendapat umum mengenai gerakan itu<sup>26</sup>. Keberhasilan mereka mempengaruhi massa lewat media, karena media tersebut dikelola oleh para aktivis mereka.

Faktor yang terakhir yaitu keberhasilan mereka merangkul pihak pemerintah daerah baik sipil maupun militer. Keberhasilan ini tampak aliansi yang berbentuk antara pihak lasykar revolusioner dengan pemerintah daerah (residen dan komite nasional daerah) dan militer, yaitu TKR dalam menumpas gerakan cumbok tersebut.

Penumpasan terhadap gerakan Cumbok itu rupanya belum memuaskan hati bagi sebagian pemuda revolusioner yang terlalu berharap banyak. Amir Husin Al Mujahid, yang pada waktu sebelumnya adalah ketua pemuda PUSA, memandang bahwa masih banyak pejabat baik bersifat lokal maupun kedaerahan (keresi-

---

26. Para redaktur koran *Semangat Merdeka* adalah mereka yang bekerja pada Atjeh Sinbun sebelumnya. Di antaranya A. Arief dan A. Hasjmy pimpinan PRI Divisi Rencong. Ekspresi membandingkan T. Muhammad Daud Cumbok dengan *Musailamah* (nabi palsu), lihat A. Arief, *op. cit.*, hal. 2. Demikian juga sanjak A. Hasjmy memuja kematian M. Ali Arief dengan judul *Engkau Pahlawan dalam tahiku*, karena kematiannya dalam insiden tersebut. Lihat harian *Semangat Merdeka* (Kutaraja, 14 - 1 - 1946) hal.1

denan) yang harus dibersihkan <sup>27</sup>. Untuk merealisasikan rencananya itu ia membentuk satuan lasykar khusus dengan sebutan Tentara Perjuangan Rakyat (TPR) pada bulan Januari 1946 di Idie.

Langkah pembersihan pertama yang ia lakukan yaitu terhadap beberapa orang uleebalang yang mereka pandang feodal di Aceh Timur. Beberapa orang uleebalang, di antaranya Teuku Abdullah Paloh, Teuku Ali Basyah, Teungku Arifin dan Teungku Sulong dicopot dari jabatan mereka baik sebagai zelfbesturder maupun sebagai kontroleur atau asisten residen. Sebagai penggantinya ditunjuk orang-orang yang mereka anggap revolusioner <sup>28</sup>.

Setelah melakukan gerakan pembersihan di Aceh Timur, mereka mengalihkan perhatian ke bagian Aceh lainnya, terutama ke daerah Aceh Utara, Pidie, dan Aceh Besar. Teungku Amir Husein Al Mujahid menyadari bahwa satuan TPR yang ia miliki tidak begitu kuat untuk melakukan gerakan yang demikian besar. Untuk mengamankan dan melicinkan gerakan yang ia lakukan, perlu diadakan persekutuan dengan pihak TRI. Lalu ia menjalin hubungan dengan Mayor Husin Yusuf, yang pada waktu itu menjabat sebagai ajudan dan staf umum Divisi V TRI di Bireun <sup>29</sup>. Dan rupanya kedua tokoh ambisius ini mempunyai kesamaan pikiran dalam melakukan gerakan pembersihan.

Kerjasama yang dijalin antara TPR dan TRI ini memberi dorongan pada Teungku Amir Husin Al Mujahid untuk menggerakkan satuan TPR ke luar daerah Aceh Timur. Dalam gerakan penjarahan yang ia lakukan tatkala ia menuju ke Kutaraja, satuan lasykar TPR Teungku Amir Husin Al Mujahid berhadapan dengan lasykar Teuku Inbrahim Panglima Agung di Cunda, Lhok Seumawe <sup>30</sup>. Akibatnya terjadi bentrokan fisik antara kedua lasykar

---

27 Menurut informasi, persetujuan yang dijalin oleh Mayor Husin Yusuf tidak pernah dilaporkan kepada pimpinan Divisi V TRI Kolonel Syammaun Gaharu. Ini menunjukkan betapa lemahnya lembaga organisasi TRI pada waktu itu. Lihat Nazaruddin Syamsuddin, *op. cit.*, hal. 152 - 3.

28. Dalam gerakan itu Abdullah Husin (kepala polisi Langsa) ditunjuk sebagai Wedana Langsa. Dan Teuku Muhammad Ali sebagai asisten residen Aceh Timur. Lihat Abdullah Husin, *op. cit.*, hal. 176.

29. *Ibid.*

30 Ia kemenakan dari Teuku Raja Bujang Uleebalang, Nisam

tersebut, yang masing-masing pihak ingin mempertahankan kedaulatannya. Rupanya pasukan Teuku Ibrahim Panglima Agung cukup tangguh untuk dikalahkan oleh TPR. Oleh karena itu, pihak TPR terpaksa meminta bantuan lasykar Mujahiddin dari Teungku Muhammad Daud Beureuh untuk mengakhiri perlawanan yang diberikan oleh pasukan Teuku Ibrahim tersebut.<sup>31</sup>

Setelah berhasil mengalahkan perlawanan lasykar Teuku Ibrahim, maka lasykar TPR secara lempang menuju ke Kutaraja. Sepanjang rute yang dilalui, mereka melakukan penjarahan terhadap uleebalang-uleebalang yang mereka anggap perlu diganti. Di Kutaraja satuan TPR mendapat bantuan dari lasykar kesatria Pesindo. Gabungan lasykar TPR dengan Pesindo inilah yang meneruskan gerakan penjarahan terhadap uleebalang-uleebalang di pantai Barat Aceh.<sup>32</sup>

Kerjasama yang terjalin antara TPR – TRI (Husin Yusuf) – lasykar Pesindo, menimbulkan nafsu yang meluap-luap pada diri Teungku Amir Husein Al Mujahid. Tambahan lagi mabuk kemenangan yang ia peroleh selama gerakan penjarahan. Kesemua ini mendorong dirinya untuk menuntut lebih banyak. Sikapnya itu dituangkan dalam bentuk tuntutan agar residen Teuku Nyak Arief dan Komandan Divisi V TRI Sumatera di Aceh Kolonel Syammaun Gaharu supaya meletakkan jabatan.<sup>33</sup>

Demi untuk tetap terpeliharanya keutuhan dan persatuan bangsa yang sangat dibutuhkan pada waktu itu dan untuk tidak terjadi pertumpahan darah yang lebih besar lagi, maka Teuku Nyak Arief dan Syammaun Gaharu bersedia meletakkan jabatannya. Pada awal bulan Maret 1946, Teuku Nyak Arief menyerahkan jabatan Residen Aceh kepada Teuku Muhammad

31. Satuan Lasykar yang dikirim oleh Teungku Muhammad Daud Beureuh dipimpin oleh Daud Tange. Nazaruddin Syamsuddin, *op. cit.*, hal. 154 - 5.

32. Satuan Pesindo yang mendampingi satuan TPR melakukan penjarahan ke pantai Barat Aceh di bawah pimpinan Teungku M. Sahim Hasjmy. Di pantai barat para uleebalang dikumpulkan di Meukek kemudian dibawa ke Takengon. Wawancara dengan M. Sahim Hasjmy.

33. Selain dari Teuku Husin Trumon, Asisten Residen Aceh Besar yang sudah diamankan mereka juga melakukan tuntutan kepada dua pucuk pimpinan pemerintah keresidenan. Lihat Nazaruddin Syamsuddin, *ibid.*

Daud—Syah, uleebalang Idi Rayeuk yang sebelumnya telah memegang jabatan sebagai Asisten Residen Aceh Timur dan kemudian sebagai Asisten Residen diperbantukan pada kantor Residen Aceh. Sedang jabatan Teuku Nyak Arief sebagai Staf Umum TRI Komandemen Sumatera dengan pangkat Jenderal Mayor Tituler, tanpa lebih dulu mendapat persetujuan Komandan Tertinggi TRI Sumatra, telah diserahkan-terimakan bersama dengan pangkatnya — kepada Teungku Amir Husein Al Mujahid, pimpinan tertinggi TPR itu. Kemudian Teuku Nyak Arief diasingkan ke Takengon dan pada tanggal 4 Mei 1946 Pemimpin Rakyat yang telah menghabiskan usianya untuk kemerdekaan tanah airnya itu meninggal dunia di sana <sup>34</sup>.

Selanjutnya, setelah staf Divisi TRI mengadakan pertemuan di rumah kediaman Teuku Panglima Polem Muhammad Ali (Wakil Residen Aceh), maka Kolonel Syammaun Gaharu juga menyerahkan-terimakan jabatannya kepada Husin Yusuf, salah seorang bawahannya (Ajudan Staf Umum Divisi dengan pangkat Mayor) yang telah mengadakan hubungan rahasia di Bireun dengan Teungku Amir Husein Al Mujahid, sehubungan dengan rencana gerakan TPR itu <sup>35</sup>. Dan tanggal 12 Maret 1946, berdasarkan Maklumat TRI No. 4 tahun 1946 yang dikeluarkan oleh "Jendral Mayor Teungku Amir Husin Al Mujahid"; selaku "Anggota Staf Umum TRI Komandemen Sumatra" (pangkat dan jabatan yang diperoleh dari Teuku Nyak Arief) disusunlah staf pimpinan TRI Aceh (Divisi V TRI Sumatra) yang baru, yaitu : Sebagai Komandan Divisi, Husin Yusuf dengan pangkat sama dengan Syammaun Gaharu, Kolonel; Wakil, Nurdin Sufi dengan pangkat letnan Kolonel dan Kepala Staf Divisi, Bachtiar dengan pangkat Mayor; serta dilengkapi dengan personalia, kepala-kepala bagian divisi sampai kepada staf pimpinan resimen. <sup>36</sup>

---

34. Mengenai hidup dan perjuangan Pahlawan Nasional Teuku Arief, dapat dilihat misalnya dalam, Mandanas Safwan, *Teuku Nyak Arief, Proyek Biografi Pahlawan Nasional*, Departemen P dan K, Jakarta, 1975.

35. Mengenai serah terima jabatan itu, lihat selengkapnya wawancara Aboe Bakar Bsf dengan T. Mohd, Syah, Aboe Bakar Bsf, *op cit.*, hal 431 - 4.

36. Susunan selengkapnya staf pimpinan yang diperbaharui itu, lihat Sejarah Militer Kodam I/Iskandar Muda, *op. cit.* hal. 114. - 6.

Tindakan-tindakan Teungku Amir Husin Al Mujahid bersama dengan TPR-nya itu, rupanya telah menimbulkan kegelisahan dalam masyarakat Aceh, termasuk dalam kalangan militer sendiri. Banyak yang tersinggung dengan perlakuan mereka, yang dianggap tidak wajar, terhadap para pemimpin yang selama ini dinilai oleh rakyat besar jasanya dalam membina Negara Republik Indonesia di daerah Aceh. Rasa tidak senang itu semakin meluas, setelah ternyata Teungku Amir Husin Al Mujahid sendiri, kemudian menjadi orang terkemuka dalam militer dan berkuasa di Aceh. Karena itu tidak mengherankan ketika dari kalangan militer timbul sebuah kelompok yang merencanakan untuk menyatuhkan Teungku Amir Husin Al Mujahid dari kedudukannya. Pada akhir April 1946 kelompok ini berhasil menculik Teungku Amir Husin Al Mujahid di tempat ia menginap, Hotel Aceh, Kutaraja. Kemudian dia dibawa ke Sigli dan diserahkan kepada Teungku Abdul Wahab Seulimum, seorang tokoh Markas Besar Rakyat Umum (MBRU) yang pada waktu itu telah ditunjuk sebagai pejabat Bupati Kabupaten Pidie. Di Sigli, Teungku Amir Husin Al Mujahid, direncanakan oleh kelompok yang menculiknya, akan dipertemukan dengan Syammaun Gaharu dan dalam pertemuan itu ia akan diminta untuk memberi penjelasan serta sekaligus mempertanggungjawabkan apa yang telah dikerjakannya selama ini. Tetapi di sana, berkat usaha para pengikutnya, Teungku Amir Husin Al Mujahid berhasil dibebaskan dan selamat dari bahaya yang sedang mengancamnya, sehingga ia dapat kembali menduduki jabatannya semula<sup>37</sup>.

Setelah peristiwa penculikan Teungku Amir Husin al Mujahid, maka berakhir pula revolusi sosial yang telah banyak menelan korban jiwa, harta dan tenaga justeru disaat sedang bergelornya Revolusi Kemerdekaan Indonesia di daerah Aceh. Sejalan dengan aksi tersebut, daerah-daerah keulebalangan yang terdapat di Aceh dirubah sebutannya menjadi *negeri* yang kemudian berubah lagi menjadi kecamatan. Pada setiap negeri dibentuk lembaga pemerintahan yang disebut *bestuur comitie* (dewan pemerintah negeri)

---

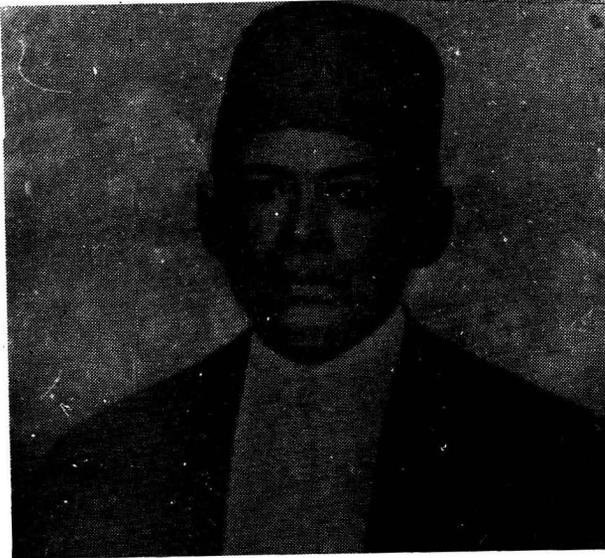
37. Mengenai penculikan Teungku Amir Husin Al Mujahid, lihat lebih lanjut wawancara Aboe Bakar Bsf dengan Abdullah Masri, Aboe Bakar Bsf, *op. cit.*, hal. 434-48 Lihat juga dalam , Nazaruddin Syamsuddin, *op. cit.*, hal. 169 - 70.



Salah satu bukti sejarah yang menunjukkan usaha rakyat Aceh dalam mempertahankan tanah air. Gambar ini menunjukkan peristiwa yang terjadi di Benteng Kuto Reh (Aceh Tenggara) ketika Belanda berhasil merebutnya pada tahun 1904 di bawah pimpinan VanDoalen. Belanda melakukan pembunuhan massal terhadap 561 orang rakyat di antaranya 89 orang wanita dan 59 orang anak - anak.



Cut Nyak Dhen ketika berhasil ditangkap dari salah satu tempat persembunyiannya di kawasan Aceh Barat pada tanggal 4 Nopember 1905, dalam suatu operasi yang dilakukan patroli Belanda di bawah pimpinan Letnan Van Vuuren. Kemudian di asingkan ke Sumedang (Jawa Barat) dan meninggal di sana pada tanggal 9 Nopember 1908.



Teuku Chiek Muhammad Thayeb Peureulak. Anggota Volksraad dari Aceh sejak 23 Pebruari 1918 sampai 20 Mei 1920. Akibat terus menerus menentang kebijaksanaan pemerintah pendudukan Belanda, beliau tdk diperkenankan menyelesaikan masa jabatan sebagai anggota.



Teuku Muhammad Daud Beureueh.  
Gubernur Militer untuk daerah Aceh  
Langkat dan Tanah Karo.



Teungku Amir Husin Al Mujahid.



Rumah Teuku Umar, Uleebalang di Keumangan.



Aceh Chokan Iino selaku pimpinan pemerintahan Jepang di Aceh melakukan pertemuan dengan pemimpin Aceh, di Kutaraja (Banda Aceh) pada thn 1944. Pada gambar barisan depan (dari kiri ke kanan) Teuku Nyak Arief, Aceh Chokan Iino dan Teungku Muhammad Daud Beureueh (Atjeh Sinbun).



Mr. Teuku Muhammad Hasan Gubernur Sumatera.



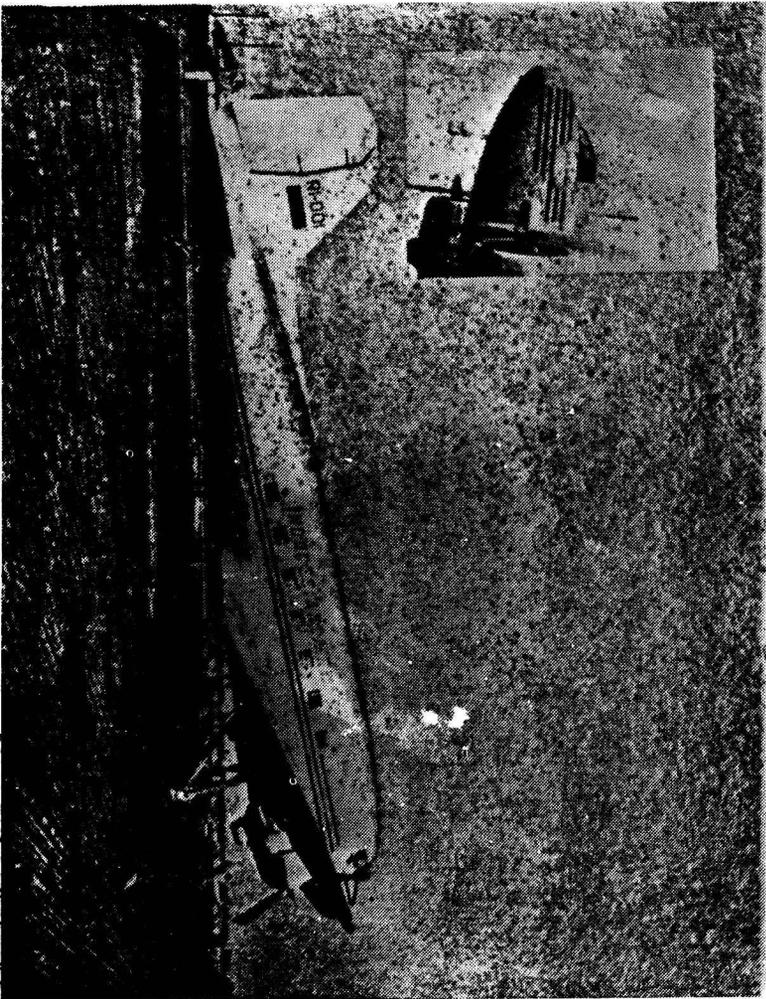
Teuku Nyak Arief, Panglima Sagi XXVI Mukim. Pada tahun 1927 - 1931 diangkat sebagai anggota volksraad, di dalam volksraad beliau di juluki "Rencong Aceh". Pada tahun 1945 + diangkat menjadi Residen Aceh yang pertama.



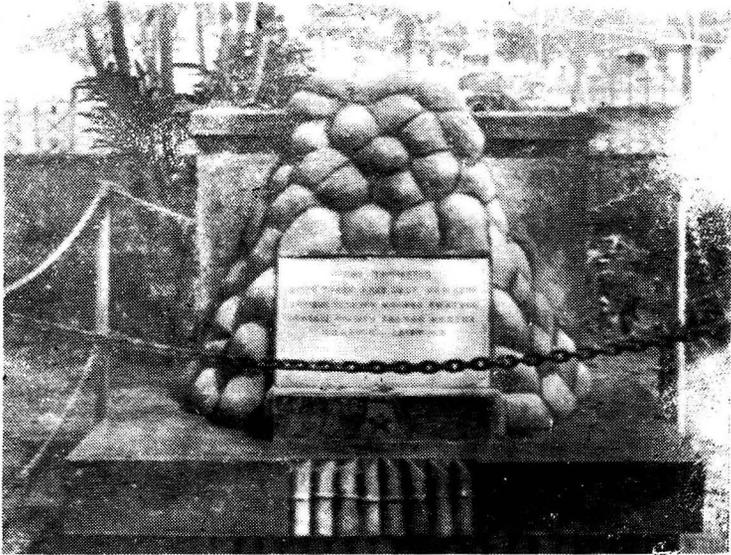
Komandan Divisi x dan staf setelah selesai melakukan inspeksi ke front Medan Area. Pada gambar (kiri-kanan) Komandan Batalion Kapten Hasan Saleh, Komandan Batalion Kapten A.M. Namploh, Komandan Resimen II Letkol Teuku Cut Rahman, dan Kolonel Husen Yusuf Komandan Divisi x.



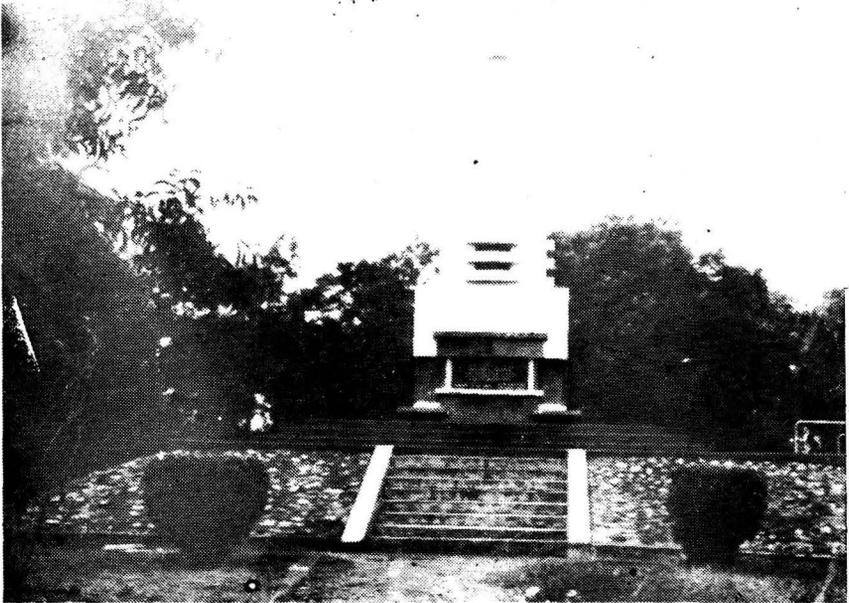
Para wanita di daerah Aceh turut aktif sebagai pejuang pada masa revolusi. Pada gambar menunjukkan satu resimen wanita (Resimen Pocut Baren) di bawah pimpinan Mayor Zahara, pada gambar di sebelah kiri. (Modal Revolusi, 45).



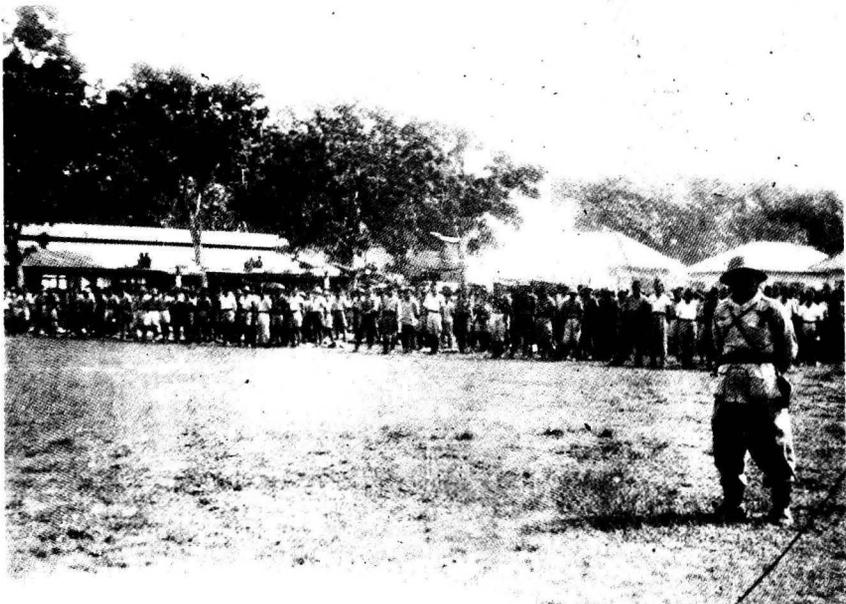
Pesawat terbang Sulawesi I.



Tugu kenang-kenangan sebagai tempat pengibaran bendera merah putih yang pertama di Aceh.



Tugu proklamasi yang terletak di Taman Sari Banda Aceh.



Laskar rakyat di siapkan untuk di kirim ke front Medan Area. Pada gambar ( tanda X ) Letkol Teuku Cut Rahman Komandan Resimen II. Divisi Gajah I ( Div. X ) memimpin upacara di Bireuen sebelum berangkat ke front Medan Area.



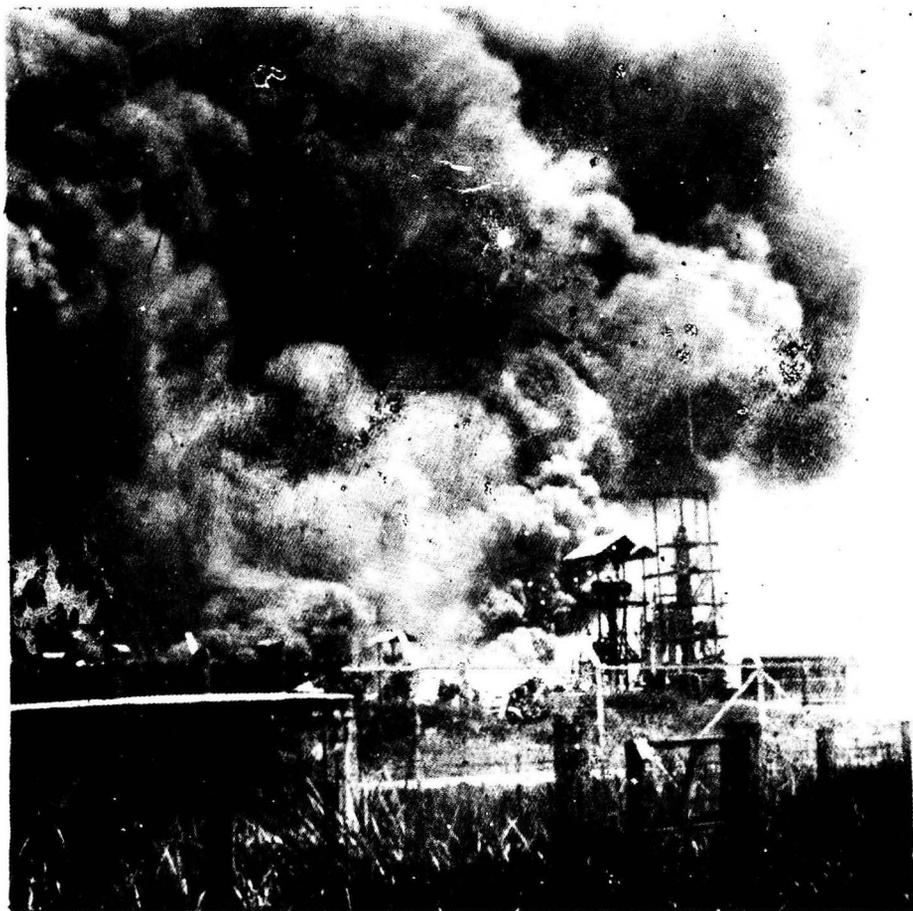
Gubernur Militer Tgk. Muhammad Daud Beureueh sedang memeriksa persenjataan di Rantau Kuala Simpang. Letkol Teuku Cut Rahman (Komandan Resimen II tanda X) dan Gubernur Militer ( paling kanan).



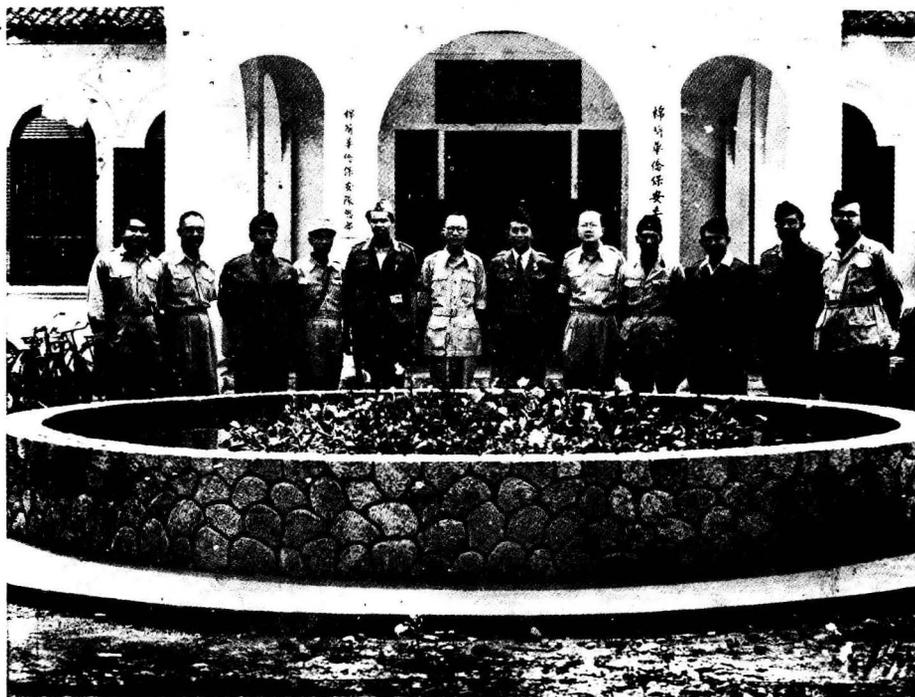
Para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh bergambar bersama dengan Pemerintah. Duduk di tengah pakai tongkat Gubernur Militer Aceh, Langkat dan Karo Tgk. Muhammad Daud Beureueh.



Presiden Sukarno sedang memeriksa barisan meriam di Kutaraja pada tahun 1948 (Modal Revolusi 45).



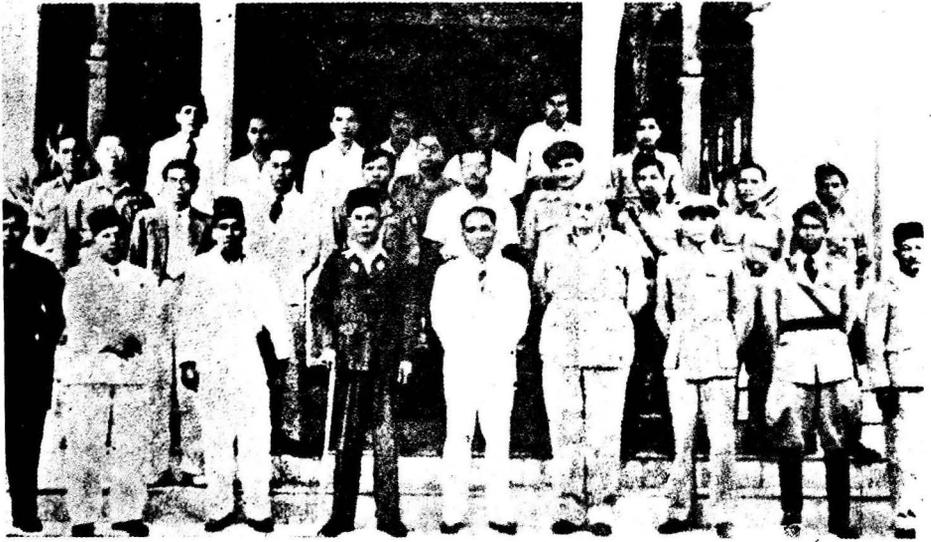
Pangkalan Berandan di bumi hanguskan oleh Pasukan Divisi X pada tanggal 13 Agustus 1947.



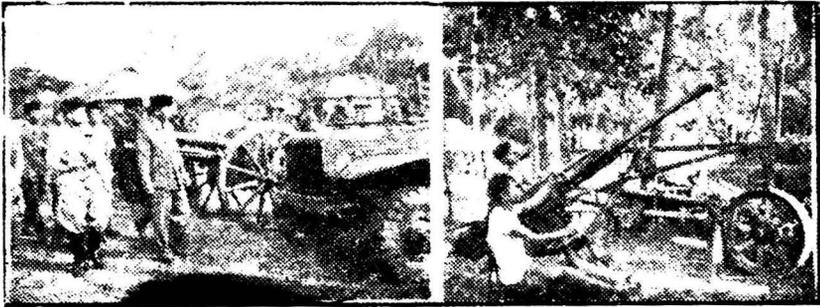
Selesai melakukan perundingan tentang garis demarkasi antara Fho Antui dengan Divisi Gajah I & II di Medan. Gambar no. 3 dari kanan Letkol Teuku Cut Rahman Komandan Resimen II Div. I. \_\_\_\_\_



Untuk meningkatkan pengetahuan kepada rakyat, oleh Kepala Jawatan Penerangan Aceh ( Osman Raliby) telah memelopori berdirinya Panti Pengetahuan Umum (University Extension Classes) pada awal tahun 1947 ( Album Perjuangan).



Untuk membicarakan soal-soal pelaksanaan gencatan senjata, tiga orang opsir KTN pada tanggal 10 Maret 1948 telah mengunjungi Gubernur Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo di Kutaraja (Banda Aceh). Pada gambar opsir KTN tampak bersama Gubmil Tgk. Mohammad Daud Beureueh ( bertongkat di tengah-tengah) (Album Perjuangan).



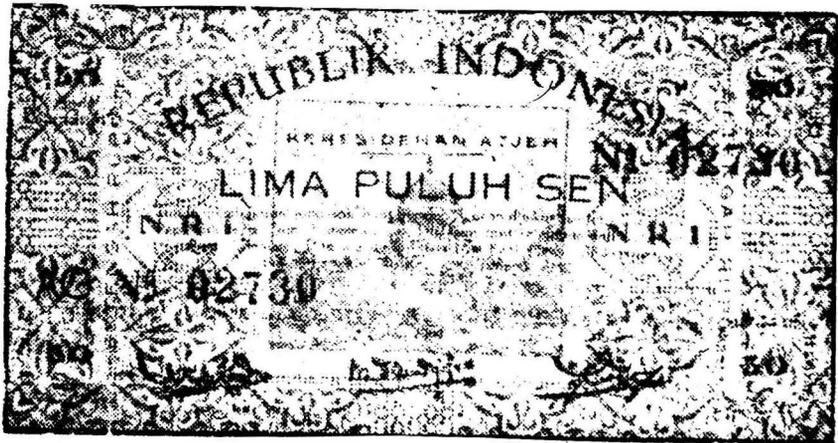
Aceh banyak menghasilkan sendiri alat-alat senjata seperti meriam yang dikerjakan di bengkel Lhoknga (Aceh Besar). Pada gambar Presiden Sukarno dalam suatu inspeksi senjata - senjata berat di Kutaraja (Banda Aceh) pada tahun 1948. (Modal Revolusi 45).



Wakil Presiden Drs. Mohd. Hatta dalam kunjungannya ke Aceh pada tahun 1949. Pada gambar wakil Presiden (kanan) dan gubernur militer (kiri). (Deppen).



Presiden Sukarno sedang menerima parade barisan meriam pada tahun 1948 di Kutaraja (Banda Aceh).



Dua macam uang kertas Republik Indonesia yang dicetak dan berlaku di Aceh pada masa revolusi. (Modal Revolusi 45 ).



Selain uang Republik Indonesia sebagai alat pembayaran yang sah, di Aceh terdapat juga alat pembayaran khusus berupa bon-bon kontan yang di keluarkan oleh Markas Pertahanan Aceh Timur di Langsa. (Gambar atas dan tengah).

yang beranggota lima orang wakil rakyat. Salah seorang di antaranya menjabat sebagai kepala negeri <sup>38</sup>.

Dengan berakhirnya revolusi sosial, tidak berarti kegelisahan dalam masyarakat Aceh berakhir pula. Adanya usaha-usaha dari anasir-anasir yang tidak berhak untuk mengambil harta peninggalan pihak uleebalang yang telah dikalahkan itu dan tidak terjaminnya keselamatan jiwa, dengan adanya penganiayaan-penganiayaan terhadap famili mereka atau yang dianggap sebagai sisa-sisa pengikut mereka, bukan tidak mustahil akan menyebabkan meletusnya perang saudara kembali. Untuk ini pemerintah daerah harus mengatasinya secepat mungkin. Sehubungan dengan harta peninggalan mereka, Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Badan Pekerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh, pada tanggal 24 Juni 1946 telah mengeluarkan Peraturan Daerah No. 1/1946, yaitu : "Peraturan Tentang Menguasai atau Memiliki Harta Benda Peninggalan Uleebalang-Uleebalang Daerah Aceh" <sup>39</sup>

Dalam peraturan itu (pasal 1) dikemukakan, untuk menyelesaikan masalah tersebut, Pemerintah Daerah ditugaskan untuk membentuk Majelis Penimbang. Adapun susunan pengurus Majelis Penimbang yang kemudian dibentuk oleh Pemerintah Daerah itu, adalah sebagai berikut : sebagai ketua I, II, III, IV, V dan VI, masing-masing ditunjuk, Teungku Abdul Wahab Seulimum (Bupati Pidie), M. Husein, Teungku Haji Mustafa Ali, Hasan Ali, Teuku Mohammad Amin dan Teungku Itam Peureulak; sedang Panitera umum ditunjuk Teungku Nyak Umar <sup>40</sup>

Sehubungan dengan masalah adanya gangguan/penganiayaan terhadap famili atau yang dituduh sebagai sisa-sisa pengikut Markas Uleebalang, dalam rangka menjamin keselamatan mereka, juga Pemerintah Daerah mengeluarkan sebuah ketetapan, yaitu : Ketetapan Residen Aceh tertanggal 13 Agustus 1946, No. 59/NRI <sup>41</sup>. Dalam ketetapan itu disebutkan tempat tinggal khusus

---

38. H.T.M. Amin. *Susunan Pemerintah Republik Indonesia di Aceh*. Masyarakat Sejarawan Indonesia Cabang Banda Aceh, (1976), hal. 5 - 6.

39. Isi pasal demi pasal dari Peraturan ini, dapat dilihat misalnya dalam S.M. Amin, *op. cit.*, hal. 147. - 51.

40. H.T.M. Amin, *op. cit.*, hal. 7.

41. Isi selengkapnya ketetapan ini, dapat dilihat dalam S.M. Amin, *op. cit.*, hal 144. - 6.

bagi mereka dan selama di sana kepada mereka diberikan sokongan sebanyak 100 Rupiah,— sebulan ditambah dengan sumbangan beras seperti yang diberikan/dibagikan kepada pegawai negeri pada waktu itu. Adapun tempat yang dimaksud sebagai tempat tinggal mereka yang dianggap "berbahaya" itu tidak lain adalah Kota Takengon dan sekitarnya. Di sana mereka ditempatkan pada tiga tempat yang terpisah, yaitu : desa Sadong (Teuku Nyak Arief ditempatkan di sini), penjara Takengon, dan penginapan Suka Jaya <sup>42</sup>. Dan di antara mereka yang dinyatakan ditahan, tetapi tidak sempat dibawa ke Takengon berhubung keluar dari Daerah Aceh, ialah Syammaun Gaharu dan Teuku A. Hamid Azwar, dua tokoh militer yang sebelumnya aktif berusaha untuk mengakhiri perang saudara di daerah Pidie, namun karena keduanya berselisih paham dengan pihak TPR, maka mereka dinyatakan juga sebagai orang yang "berbahaya", dan karenanya perlu "d diamankan". Mereka yang ditahan itu, kemudian secara bertahap mulai dibebaskan, yaitu setelah dilakukan penilaian oleh Badan Penyelidik Keadaan orang-orang Tahanan Rakyat, suatu Badan yang dibentuk Pemerintah Daerah pada bulan April 1947 dengan anggota-anggotanya terdiri dari Teuku Mohammad Amin (mewakili pemerintah), Teungku Abdurrachman dari Masyumi dan Teungku Ishak Amin dari Pesindo <sup>43</sup>. Namun baru pada tahun 1949 para tahanan itu dinyatakan bebas semuanya.

Dengan usaha-usaha yang ditempuh Pemerintah Daerah, sebagaimana diuraikan di atas, diharapkan perang saudara yang telah berlangsung selama 6 bulan lebih itu tidak akan terulang lagi. Dengan demikian seluruh tenaga dapat diarahkan sepenuhnya bagi perjuangan menghadapi ancaman pihak kolonial Belanda yang pada waktu itu semakin giat berusaha untuk menduduki Indonesia kembali.

## **B. Masa Agressi dan Pergantian-pergantian Bentuk Pemerintahan Di Aceh.**

---

42. Nazaruddin Syamsuddin, *op. cit.*, hal. 161 - 2.

43. S.M. Amin. *op. cit.*, hal. 146 - 7.

Dari masa proklamasi hingga aksi militer I hampir seluruh wilayah Aceh – kecuali pulau Weh – luput dari pendudukan Belanda. Rupanya Belanda agak kurang bernafsu untuk menundukkan Aceh terlebih dulu. Sikap demikian barangkali berkaitan erat dengan pengalaman yang mereka alami baik dalam perang Aceh maupun tatkala menjelang pendudukan Jepang di Aceh. Hal lain yang tidak kurang penting yaitu perhatian mereka (Belanda) yang masih terpusat untuk memusnahkan pemerintah pusat Republik Indonesia di Yogyakarta.

Namun bagaimanapun, sebagai bagian dari wilayah Republik Indonesia, pergolakan-pergolakan yang terjadi pada bagian Indonesia lainnya ikut bergema ke daerah Aceh sebagaimana diperlihatkan dalam pelbagai bentuk. Oleh karena itu setiap kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah pusat Republik Indonesia akan terpengaruh dalam kehidupan pemerintahan di Aceh. Demikian halnya dengan setiap tindakan yang dilakukan oleh Belanda terhadap pemerintah republik.

Salah satu di antaranya yaitu penataan kembali terhadap organisasi ketentaraan yang dilakukan oleh pemerintah republik pada bulan April 1947. Dalam penataan tersebut, divisi Gajah I digabungkan dengan divisi Gajah II dengan sebutan Divisi X TRI, dengan kedudukan komandonya di Bireuen<sup>44</sup>. Pemilihan lokasi Bireuen itu dilakukan karena kota Medan sudah berada di bawah kekuasaan sekutu.

Di samping Divisi X, di Aceh juga sudah tumbuh beberapa satuan bersenjata kelasykaran yang secara umum mempunyai tujuan yang sama dalam mempertahankan pemerintah republik. Satuan kelasykaran tersebut meliputi, kesatria Pesindo/Divisi Rencong, Divisi Teungku Chiek Ditiro, Divisi Teungku Chiek Paya Bakong (TPR), dan Mujahiddin.

---

44. Upacara pelepasan dilakukan oleh panglima TRI komandemen Sumatra Jendral Mayor R. Suharjo Harjo Wardoyo di Pematang Siantar pada 26 April 1947. Sebelumnya divisi Gajah I Aceh berada di bawah Kolonel Husin Yusuf dan divisi II Sumatra Timur di bawah Kolonel Sitompul. Komandan dan Wakil Komandan masing-masing ditunjuk Kolonel Husin Yusuf dan Kolonel Sitompul. Lihat *Sendam I, op. cit.*, hal. 116-117. dan *Modal Revolusi 45*, hal. 49.

Pasukan bersenjata yang terdapat di Aceh baik TRI maupun lasykar-lasykar bersenjata tersebut di atas, ikut ambil bagian untuk menghadang tentara sekutu, tatkala mereka mendarat di Medan (bulan Desember 1946). Dari bulan ke bulan pasukan Aceh yang ikut ambil bagian di Medan Area semakin bertambah. Maka untuk mengkoordinasi pasukan tersebut, dibentuk suatu resimen yang diberi nama Resimen Istimewa Medan Area, yang lebih dikenal dengan nama singkatan RIMA. Pimpinan RIMA mula-mula adalah Mayor Hasan Ahmad, kemudian Mayor Tjut Rahman. Susunan dan kedudukan dari pasukan RIMA adalah sebagai berikut :

- Batalyon I dipimpin oleh Kapten Hanafiah, berkedudukan di Kampung Lalang.
- Batalyon II, pimpinannya adalah Kapten Nyak Adam Kamil, berkedudukan di Kerambil Lima.
- Batalyon III, berkedudukan di Kelumpang; pimpinannya berganti-ganti, yaitu Kapten Alamsyah, Kapten Ali Hasan dan Kapten Hasan Saleh.
- Batalyon IV, pimpinannya Kapten Burhanuddin, berkedudukan di Binjai.
- Batalyon di bawah pimpinan Wiji Alfiah, di Sunggal.
- Batalyon dari Divisi Rencong, di bawah pimpinan Mayor Nyak Neh berkedudukan di Kampung Lalang.

Kesatuan lasykar dari Divisi Teungku Chiek Di Tiro dan dari Divisi Teungku Chiek Paya Bakong masing-masing dipimpin oleh Teungku Thaleb dan Gam Basyah Samalanga. Ditambah lagi lasykar dari Aceh Tengah di bawah pimpinan Teungku Ilyas Leube <sup>45</sup>.

Dari apa yang telah dikemukakan di atas ternyata bahwa meskipun Belanda belum memasuki daerah Aceh, namun rakyat Aceh telah menggerakkan/mengerahkan pasukan dan lasykar bersenjata ke daerah Sumatera Timur, bukan hanya untuk membantu perlawanan di sana, tetapi juga sekaligus untuk menutup pintu bagi Belanda masuk ke Aceh.

---

<sup>45</sup>. *Ibid.*, hal. 127, dan 128. Lihat juga *Komite Musyawarah 45 Daerah Istimewa Aceh, op., cit.* hal. 67-8.

Dengan dilakukannya agresi militer Belanda I, pada tanggal 21 Juli 1947, maka hampir seluruh wilayah Tanah Air kita dilanda oleh serangan Belanda tersebut. Daerah Aceh yang mempunyai kawasan pantai yang ratusan kilo meter panjangnya siap menghadapi blokade Belanda. Sehari sebelum meletusnya agresi tersebut, di Kutaraja telah dipersiapkan pertahanan pantai dan pengawasan umum untuk menghadapi setiap kemungkinan. Pada hari agresi itu, terjadi serangan angkatan udara Belanda di Lhok Nga, suatu lapangan terbang dekat Kutaraja. Pesawat Belanda tersebut datang dari Sabang melalui Ulee Lhuee <sup>46</sup>, dan serangan yang berlangsung sekitar 30 menit itu, dilakukan dengan menggunakan senapan mesin dan granat. Lhok Nga merupakan pangkalan udara RI di Aceh yang tangguh dan memiliki perlengkapan perang yang cukup baik menurut ukuran masa itu. Memiliki senjata berat dan ringan, meriam penangkis udara, meriam pantai, bengkel persenjataan yang mampu membuat senjata-senjata ringan dan memperbaiki senjata berat. Selain Lhok Nga, Ulee Lheue, Kutaraja, Sigli, Lhok Seumawe, Idi, Langsa, Calang, Meulaboh, Tapak Tuan, Ujung Batee, Krueng Raya dan Lhok Seudu juga mendapat serangan dari pihak Belanda, baik dari laut maupun dari udara.

Akibat kegawatan ini, maka pada tanggal 12 Agustus 1947, di Kutaraja dalam suatu pertemuan Dewan Pertahanan Daerah, dibentuk suatu Badan Koordinasi Daerah Aceh, yang dihadiri oleh partai-partai dan organisasi-organisasi seperti Masyumi, PNI, Pe-sindo, PGRI, PUSA dan Muhammadiyah. Sebagai ketua adalah Amelz, dibantu oleh Oesman Raliby dan M. Abdul Syam. Tujuan Badan Koordinasi Daerah Aceh ini adalah :

1. Mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan 100% Negara Republik Indonesia atas dasar kesatuan dan persatuan.
2. Membina NRI yang berdasarkan Kedaulatan Rakyat dan keadilan Sosial.
3. Mengusahakan dan menegakkan suatu pemerintahan yang kokoh, progresif dan berdaulat.

---

46. A.H. Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia* jilid V. (Bandung : Angkasa, 1979) hal. 289. dan 291.

4. Melaksanakan Mobilisasi Umum.
5. Menyesuaikan kehidupan politik, ekonomi dan sosial untuk kepentingan pertahanan Tanah Air<sup>47</sup>.

Sehubungan dengan agresi I tersebut, Panglima Sumatra Suhardjo Hardjo Wardoyo mengirim sebuah radiogram yang berbunyi sebagai berikut :

pemimpin-pemimpin rakyat aceh.  
pengembalian kota medan terletak ditangan saudara-saudara  
segenap penduduk aceh ttk  
jangan sangsi ttk  
alirkan terus kekuatan aceh ke medan dan jangan berhenti  
sebelum medan jatuh ttk hbs  
panglima sumatra<sup>48</sup>

Dengan adanya radiogram tersebut, beban yang harus dipikul rakyat Aceh menjadi bertambah. Rakyat Aceh memang telah membantu Medan Perang Sumatra Timur sejak akhir tahun 1946, kini tinggal meningkatkannya lagi. Tugas yang diinstruksikan oleh Panglima Sumatra itu, disambut rakyat Aceh dengan penuh tanggung jawab.

Pada tanggal 17 Agustus 1947, bertepatan dengan hari Raya Idul Fitri, dibuka suatu tugu peringatan kemerdekaan yang terletak di Taman Sari Kutaraja. Residen Aceh T.M. Daud Syah membaca teks Proklamasi, dan A. Hasjmy selaku anggota Badan pekerja perwakilan, membuka selubung tugu yang berwarna merah-putih. Setelah hening cipta, Residen membaca amanat Presiden. Dan pada malam harinya diadakan suatu rapat umum di salah satu gedung bioskop Kutaraja.<sup>49</sup>

Berhubung dengan masuknya tentara Belanda di beberapa daerah di bawah tanggung jawab Divisi X, maka pada tanggal 22 Agustus 1947, di Bireun disusun kembali sektor-sektor yang berada di bawah Divisi X, antara lain :

---

47. A.H. Nasution, *op. cit.*, hal. 581.

48. Sendam I/ Iskandar Muda, *op. cit.* hal. 124.

49. A.H. Nasution, *op. cit.*, hal. 582.

- Sektor I daerah pertempuran RIMA dipimpin oleh Letnan Kolonel Hasballah Haji, terdiri dari 3 batalyon lebih.
  - Sektor II Tanah Karo, Deli dan Serdang, dipimpin oleh Letnan Kolonel Djamin Ginting, terdiri dari 2 batalyon.
  - Sektor III di Simalungun, dipimpin oleh Letnan Kolonel R.Siahaan, terdiri dari 2 batalyon.
  - Sektor IV di Asahan dan Labuhan Batu dipimpin oleh Kolonel Kasim Nasution, terdiri dari 3 batalyon.
  - Sektor V Aceh Tengah, dipimpin oleh Mayor Teuku Manyak, terdiri dari 1 batalyon lebih.
  - Sektor VI, dipimpin oleh Tjut Rachman dengan daerah tanggung jawab Resimen V Divisi X, terdiri dari 4 batalyon.
  - Sektor VII daerah tanggung jawab Resimen IV Divisi X dipimpin oleh Mayor Hasan Ahmad.
  - Sektor VIII daerah tanggung jawab Resimen Divisi X dipimpin oleh Letnan Kolonel A. Wahab Makmur, terdiri dari 2 batalyon.
- Untuk kelancaran komando maka di Sumatra Timur, dibentuk sub komando Divisi X dipimpin oleh Mayor A.H. Siahaan<sup>50</sup>.

Sejak awal agresi I di samping Angkatan Bersenjata yang telah disebutkan di atas, tumbuh pula dua resimen Tentara Pelajar, yaitu Resimen Tentara Pelajar Islam (TPI) di bawah pimpinan A.K. Yakoby dan Resimen Tentara Republik Indonesia Pelajar (TRIP) di bawah pimpinan Yahya Zamzami. TRIP dibentuk secara resmi pada tanggal 24 September 1947, dihadiri oleh Wakil Gubernur Militer Mayor Sofyan Harun. Anggota TRIP adalah terdiri dari pelajar-pelajar SMP, Sekolah Guru Sekolah Tehnik dan SMA, sedang anggota TPI umumnya berasal dari pelajar Sekolah Menengah Islam dan Perguruan Islam lainnya<sup>51</sup>.

Sebagai akibat dari beberapa serangan pihak Belanda, yang berlangsung sejak tanggal 17 – 8 – 1947 sampai dengan Oktober 1947, atas beberapa tempat strategis di Aceh, yang berarti juga peningkatan ancaman Belanda terhadap Aceh, maka Gubernur Militer Daud Beureueh pada tanggal 4 Oktober 1947 menyampaikan seruannya kepada seluruh rakyat Aceh. Tentara dan lasykar

---

50. Sendam I/ Iskandar Muda. *op. cit.* hal. 125 - 7.

51. A.H. Nasution., *op. cit.* hal. 584.

supaya tabah dalam perjuangan dan agar setiap tindakan yang dilakukan hendaklah disesuaikan dengan kepentingan negara yang sedang menjadi perhatian Internasional<sup>52</sup>.

Penyempurnaan susunan ketentaraan berjalan terus. pada tanggal 10 Nopember 1947, diresmikan pembaharuan susunan Staf Divisi Ksatria Pesindo dan Pelantikan Resimen I dengan batalyon-batalyon dan kompi-kompi yang berada di Kabupaten Aceh Besar. Suatu komunike pada tanggal 13 Desember 1947 dari juru bicara Divisi Rencong menyatakan, bahwa Kepala Staf Umum Divisi Rencong telah melantik Abdurrachman dan Hasan Abbas, masing-masing dengan pangkat Senapati dan Senapati Muda pada Resimen Istimewa Pertambangan. Pada tanggal 14 Desember 1947, dilangsungkan konfrensi Mujahiddin seluruh Aceh untuk reorganisasi barisan-barisannya. Pada hari itu pula berlangsung Konperensi Kilat Kesatria Pesindo Divisi Rencong, yaitu antara para Komandan semua Resimen, untuk memperbincangkan soal-soal sekitar pembentukan T.N.I. Dan pada tanggal 18 Desember 1947, instruksi Pesindo daerah Sumatra mengeluarkan pengumuman sebagai berikut:

1. Mulai tanggal pengumuman, segenap angkatan perang Kesatria Pesindo seluruh Sumatra serentak untuk mengambil bagian dalam usaha pembentukan T.N.I. secara resmi.
2. Tentang pelaksanaan dalam praktek berkenaan dengan tehnik, dan lain-lain dilaksanakan dengan seksama dan bijaksana atas dasar perundingan bersama di seluruh Keresidenan oleh pimpinan-pimpinan Dewan Daerah dengan penuh bertanggung jawab kepada Dewan Pusat dalam waktu secepat mungkin.

Akan tetapi masih banyak tindakan yang perlu dilakukan sebelum terwujud satu Tentara Nasional Indonesia yang sungguh-sungguh<sup>53</sup>.

Setelah kota Tanjung Pura jatuh ke tangan musuh, tentara dan lasykar kita mundur ke Pangkalan Brandan dan kota ini dijadikan Pusat Markas Komando Pertahanan kita di sektor Barat – Utara (K S B O) Medan Area. Panglima Tertinggi Angkatan Perang

---

52. *Ibid.* hal. 207.- 9.

53. *Ibid.* hal. 209 - 20.

Republik Indonesia pada tanggal 4 Agustus 1947 mengumumkan perintah penghentian tembak menembak sesuai dengan seruan Dewan Keamanan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa). Karena beberapa kesulitan, perintah gencatan senjata di daerah Komando Sektor Barat – Utara (KSBO) – baru dapat dilaksanakan pada bulan Pebruari 1948. Pada tanggal 6 Agustus 1947 Panglima Divisi X Kolonel Husin Yusuf membentuk Staf Komando Sektor Barat–Utara dengan komandannya Letnan Kolonel Hasballah Haji. Kekuatan KSBO ini terdiri dari 11 Batalyon dan pasukan-pasukan lasykar rakyat lainnya<sup>54</sup>. Memang agak sulit bagi pasukan kita melawan Belanda di Sumatera Timur. Keadaan medan yang datar tidak cocok untuk pertempuran gerilya. Keadaan persenjataan kita tidak sesuai untuk pertempuran frontal apalagi untuk menghadapi tank dan pesawat udara.

Pada tanggal 20 Maret 1948, berlangsung Konperensi ke 4 Pesindo daerah Aceh, dengar mengambil keputusan sebagai berikut :

1. Memperkokoh susunan organisasi ke dalam untuk menuju masa organisasi.
2. Menuju sentralisasi organisasi Pesindo Sumatra Utara.
3. Melaksanakan rencana 6 pasal Pesindo Daerah Aceh, menuju pembangunan dalam masa 3 tahun. Mengusahakan penyempurnaan TNI dan adanya pertahanan rakyat semesta.
4. Mengajak segenap rakyat agar menyokong dan berusaha segiatgiatnya sebagai faktor yang penting bagi pemerintah untuk melaksanakan program politik 6 pasal.

Pada tanggal 23 Mei 1948, Panglima Divisi Rencong dan Ketua Umum Pesindo daerah Aceh mengumumkan, bahwa mulai tanggal 1 Juni 1948, Kesatria Pesindo Divisi Banteng bergabung ke dalam TNI. Gubernur Militer Aceh, Daud Beureueh mempersiapkan dekritnya untuk meng-TNI-kan seluruh badan-badan bersenjata di Aceh. Namun usaha ini menjadi terbengkalai, oleh karena datangnya Presiden Republik Indonesia Sukarno ke Aceh pada waktu itu<sup>55</sup>.

54. Sendam I/Iskandar Muda, *op. cit.* hal. 139 - 40. lihat juga A.H. Nasution, *IV op. cit.*, hal. 288.

55. A.H. Nasution, *op. cit.* hal. 265.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa; selama masa agresi militer Belanda I, di Aceh sudah tersusun suatu kekuatan yang terpadu antara pemerintah, tentara, lasykar-lasykar bersenjata termasuk pelajar-pelajar dan seluruh lapisan masyarakat. Rakyat Aceh dengan segala potensi yang ada, sudah mampu menggagalkan seluruh usaha Belanda yang mengancam kota-kota dan tempat-tempat lainnya yang strategis baik di pantai sebelah Timur di perairan Selat Malaka maupun di pantai sebelah Barat di perairan Samudra Hindia (Samudra Indonesia). Kemudian rakyat Aceh secara aktif mengerahkan kekuatan di daerah pertempuran Medan Area Sektor Barat – Utara dalam rangka membendung usaha Belanda memasuki Aceh melalui Daerah Sumatra Timur.

Seperti juga di daerah-daerah lain, sesudah persetujuan “Renville”, keadaan di Aceh semakin bertambah sulit. Situasi yang demikian ini menyebabkan daerah Langkat untuk sementara digabungkan dengan daerah Aceh. Tetapi kemudian timbul suatu masalah, yaitu, pelaksanaan satu organisasi tentera tidak dapat di-realisis, karena tiap-tiap komponen mempunyai hubungan dengan politik tertentu. Pimpinan Divisi X, yang dipegang oleh Kolonel Husin Yusuf serta Kolonel Sitompul, tidak dapat menguasai seluruh badan bersenjata. Gubernur Militer Tgk. Muhammad Daud Beureueh menjadi satu-satunya pergantungan *gezag* negara dewasa itu di Aceh. Akan tetapi pembatasan hak/kewajiban antara Gubernur Militer, Panglima dan Pemerintah Sipil, tidak jelas/tegas. Daerah Sumatera Timur yang digabungkan dengan Aceh, tetap menunjukkan gejala hendak melepaskan diri. Bekas-bekas lasykar yang belum mendapat penempatan yang wajar, seperti T. Yusuf dkk, tampak sebagai suatu golongan yang tidak berdiam diri dan menerima begitu saja keadaan baru. Dalam pada itu, di kalangan tertentu tetap terdapat ikhtiar-ikhtiar untuk menjadikan Aceh suatu daerah Istimewa.<sup>56</sup>

Divisi X sebagai gabungan Divisi Gajah I (Aceh) dan Divisi Gajah II (Sumatera Timur), adalah suatu gabungan yang tidak utuh oleh karena penggabungan itu tidak mempunyai dasar yang kuat tetapi hanya sekedar untuk menunjukkan bahwa orang-

---

56. *Ibid.*, hal. 477.

orang Aceh—Tapanuli, dapat bersatu. Lagi pula Divisi yang begitu besar tidak dapat dikomando oleh tenaga-tenaga manusia yang ada pada waktu itu, mengingat faktor-faktor geografis, etnologis, psikologis dan lain-lain faktor. Aliran pikiran pada waktu itu sudah mengarah ke sentralisasi komando, sedangkan hal-hal di atas ditambah dengan kecakapan perwira-perwira yang ada, mengharuskan adanya desentralisasi. Dengan demikian perasaan kesukuan belum dapat teratasi, dan orang Tapanuli merasa tidak dapat hidup di Aceh dan kembali ke Tapanuli tanpa perintah.<sup>57</sup>

Pada tanggal 3 Juni 1947 pemerintah mengeluarkan penetapan yang dimuat dalam Berita Negara No. 24 – tahun 1947, antara lain berbunyi :

- a. Mulai tanggal 3 Juni 1947 disahkan berdirinya Tentara Nasional Indonesia.
- b. Segenap anggota Angkatan Perang dan segenap Lasykar-Lasykar bersenjata mulai saat ini dimasukkan serentak kedalam Tentera Nasional Indonesia.
- c. Pucuk pimpinan Tentera Nasional Indonesia dipegang oleh Panglima Besar Tentera Nasional Indonesia.

Berhubung seluruh perhatian sedang diarahkan untuk menghadapi Agresi Militer Belanda, maka realisasi penggabungan semua Lasykar bersenjata kedalam Tentera Nasional Indonesia di Daerah Aceh belum dapat diselenggarakan tepat pada waktunya.<sup>58</sup>

Guna merealisasikan penetapan Pemerintah tersebut, dalam rangka penyusunan Tentera Nasional Indonesia di Daerah Aceh, maka bulan Desember 1947 Staf Gubernur Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo mengadakan sidang-sidang pendahuluan bersama-sama dengan Divisi X/TRI Komandemen Sumatera di satu pihak dan kesatuan-kesatuan lasykar bersenjata di lain pihak, yaitu Divisi Rencong, Divisi X Tgk. Chiek Ditiro, Divisi Tgk. Chiek Paya Bakong dan Divisi Hisbullah. Sidang-sidang itu dipimpin langsung oleh Gubernur Militer Jendral Mayor Tituler Tgk. Mohd Daud Beureueh dan dibantu oleh penasehat-penasehat militernya. Adapun wakil dari masing-masing kesatuan ditentukan, yaitu Komandan/

---

57. *Ibid.* hal. 478.

58. *Sendam I / Iskandar Muda, op. cit.*, hal. 118 - 119.

Panglimanya dengan disertai oleh 3 orang pengikutnya sebagai berikut :

- a. Divisi X/TRI Komandemen Sumatera: Kolonel Husin Yusuf dengan 3 orang pengikutnya.
- b. Divisi Rencong : Nyak Neh dengan 3 orang pengikutnya.
- c. Divisi X/Tgk. Chiek Ditiro: Cek Mat Rahmany dengan 3 orang pengikutnya.
- d. Divisi Tgk. Chiek Paya Bakong: Ajad Musi dengan 3 orang pengikutnya.
- e. Divisi Hisbullah : Zainal Arifin Abbas dengan 3 orang pengikutnya.

Pada tanggal 8 Desember 1947 mula-mula dibentuk Panitia Badan Perancang Pembentukan TNI dengan susunan keanggotaannya sebagai berikut :

- a. Ketua : Kolonel R.M.S. Suryosularso.
- b. Pembantu-pembantu : Jenderal Mayor Tituler Tgk. Amir Husin al Mujahid, Letnan Kolonel Tituler Tgk. A. Wahab, Letnal Kolonel Tituler Sutikno P. Sumarto, Mayor Tituler A. Adami, Mayor Tituler Hasan Ali.

Badan perancang ini setelah mengadakan penyelesaian rencananya, maka mengajukan kepada sidang Staf Gubernur Militer yang di langsunkan berturut-turut sejak tanggal 20 s/d 31 – Desember 1947, suatu konsepsi di mana dengan ini dibentuklah sebuah Dewan Pimpinan Sementara TNI dengan susunan keanggotaannya adalah sebagai berikut :

- a. Ketua : Letnan Kolonel Tituler Tgk. A. Wahab.
- b. Wakil Ketua : Kolonel R.M.S. Kolonel Suryosularso.
- c. Penasehat-penasehat: 1. T.M. Daud Syah Residen Aceh.  
2. Tuanku Mahmud Residen Inspektur.  
3. T.M. Amin, Kepala Bahagian Pemerintahan Umum.
- d. Staf Umum :  
Ketua : Kolonel Suryosularso  
Anggota-Anggota : 1. Komandan Divisi X TRI Komandemen Sumatera.  
2. Komandan Divisi Rencong.

3. Komandan Divisi X Tgk. Chiek Ditiro.
4. Komandan Divisi Tgk. Chiek Paya Bakong.<sup>59</sup>

Pada akhir bulan Mei 1948, Gubernur Militer Daud Beureueh berhasil menyatukan Badan-badan bersenjata Aceh menjadi satu organisasi TNI. Pada tanggal 13 Juni 1948 dikeluarkan penetapan Gubernur Militer Aceh No. GB/59/S-Pen. yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mulai tanggal 1 Juni 1948 dalam daerah kemiliteran Aceh, Langkat dan Tanah Karo telah ditetapkan "TNI" yang buat sementara waktu dinamakan APRI Divisi X Sumatra.
2. Mulai tanggal tersebut di atas seluruh kesatuan kelasykaran Mujahiddin Divisi Tgk. Chiek Paya Bakong dan lain-lain kesatuan bersenjata dalam daerah kemiliteran Aceh, Langkat dan Tanah Karo menjadi lebur dan digabungkan menjadi angkatan Perang Divisi X Sumatra.
3. Mulai tanggal pembentukan Komando dan Staf Komando dari Angkatan Perang TNI Divisi tersebut, pimpinan ketenteraan seluruhnya berada dibawah pimpinan Komando dan Staf Komando Angkatan Perang TNI Divisi X Sumatra.

Selain itu diumumkan pula susunan Divisi X TNI Sumatera sebagai berikut :

1. Komandan Divisi Jenderal Mayor Tituler Tgk. Mohd Daud Beureueh yang pada bulan Oktober 1948 diganti oleh Kolonel Husin Yusuf.
2. Kepala Staf adalah, Letnan Kolonel Cek Mat Rahmany. Anggota Staf lainnya adalah Abdul Muthallib, Letnan Kolonel M. Nasir, Kapten A. Bakar Majid, Mayor Nyak Neh, Mayor Hasan Ahmad, Mayor Dr. Sudono, Mayor T. Hamzah, Mayor A. Muzakkir Walad, Letnan Satu T. Ibrahim, Kapten M. Husin, Kapten M. Adam, Mayor A.G. Mutiara, Mayor Z. Arifin Abbas.
3. Resimen-resimen yang tergabung dalam Divisi ini adalah :
  - Resimen I di Kutaradja dipimpin oleh Letnan Kolonel Hasballah Haji.

---

59. *Ibid.* hal. 141. - 142.

- Resimen II di Bireuen, dipimpin oleh Mayor A. Rahman
- Resimen III di Meulaboh, dipimpin oleh Mayor T. Manyak.
- Resimen IV di Kutacane, dipimpin oleh Mayor Jamin Gintings.
- Resimen V di Kuala Simpang, dipimpin oleh Letnan Kolonel A. Wahab Mamur.<sup>60</sup>

Kalau kita perhatikan susunan Staf nampaklah tokoh-tokoh gabungan dari TRI Divisi X, Divisi Rencong dan Divisi Tgk. Chiek Di Tiro. Oleh karena itu peleburan segala pasukan bersenjata ke dalam wadah TNI tidak mengalami kesukaran. Dengan demikian di Aceh hanya ada satu Angkatan Perang yaitu TNI; dan Acehlah yang mula pertama berhasil membentuk TNI seperti yang direncanakan Pemerintah Pusat.<sup>61</sup>

Ketika Presiden Sukarno datang di Aceh dengan pesawat RI-002 mendarat di lapangan Lhok Nga, pada tanggal 15 Juni 1948, disambut dengan meriah, baik oleh Pemerintah Daerah maupun oleh pemimpin-pemimpin TNI yang baru saja terbentuk. Di lapangan Udara Lhok Nga, Presiden memeriksa barisan kehormatan dan menyaksikan senjata-senjata berat yang kita miliki. Kedatangan Presiden ini disamping untuk membakar semangat rakyat yang memang belum pernah dilakukannya di Aceh, sekaligus pula menyaksikan kekuatan rakyat Indonesia di Aceh. Selain itu dalam suatu rapat raksasa dan pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat Aceh, Presiden mengharapkan bantuan Pemerintah dan Rakyat Aceh untuk membeli pesawat terbang, dalam rangka melancarkan komunikasi antar pulau di Indonesia dan dengan Luar Negeri (uraian lanjutan mengenai pembelian pesawat terbang ini, lihat dalam Sub C di bawah ini).

Sesuai dengan perkembangan maka Medio Nopember 1948. Wakil Presiden mengadakan reorganisasi di Komando Sumatra. Mayor Jendral Suhardjo ditarik ke Jawa. Penggantinya Kolonel

---

60. A.H. Nasution, *op. cit.* VIII, hal. 499 - 500 Lihat juga Sendam I Iskandar Muda, *op. cit.* hal. 142 - 144.

61. A. Hasyimi, *op. cit.*, hal. 153.

Hidayat, sedang jabatan Gubernur Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo diserahkan kepada Letnan Kolonel Askari.<sup>62</sup>

Jatuhnya Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1948, baru diketahui di Aceh pada sore harinya. Setelah menerima berita ini A. Gani Mutyara selaku perwira dan Kepala Penerangan TNI Divisi X Sumatra melaporkan peristiwa tersebut, kepada Gubernur Militer Teungku Mohd Daud Beureueh. Setelah itu A. Gani Mutyara berpidato di Studio Radio Republik Indonesia Kutaradja, menjelaskan situasi yang sedang dihadapi dan langkah-langkah yang harus di ambil. Kemudian berpidato pula Osman Raliby, Kepala Jawatan Penerangan Daerah Aceh dalam nada dan isi yang sama. Keesokannya baru berpidato Gubernur Militer dengan penuh semangat yang ditujukan kepada seluruh rakyat, tentera dan pasukan gerilya di Medan Area. Beliau menganjurkan supaya penyerangan yang sudah dimulai dilaksanakan dengan kemenangan.<sup>63</sup>

Sebagaimana telah diuraikan terdahulu bahwa di Aceh sebelum agresi II telah tersusun TNI tanpa ada ekkses-ekksesnya. Juga pemerintah sipil telah mempunyai aparatnya sampai kedesa-desa. Oleh karena itu dalam menghadapi agresi II bagi Aceh sudah lebih baik keadaannya bila dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Dalam menghadapi agresi Militer Belanda, Aceh telah menyiapkan rencana sebagai berikut :

- a. Mempersiapkan kekuatan bersenjata untuk perang gerilya, bila keadaan menghendaki demikian. Dan memberi penjelasan seluas-luasnya kepada masyarakat; tugas ini dilakukan oleh Penerangan TNI Divisi X, Penerangan Sipil ditambah badan-badan penerangan dari partai-partai dan organisasi massanya.
- b. Mempersiapkan tambahan senjata dari luar negeri, terutama dari Malaya. Senjata itu diangkut oleh TNI yang ditugaskan untuk itu atau diseludupkan dengan tongkang dan motor boot oleh para saudagar. Salah seorang tokoh yang terkenal yang memasukkan senjata ini adalah Mayor John Lie, sebagai pejuang

---

62. A.H. Nasution, *op. cit.*, hal. 471 dan 501 : Lihat juga A. Gani Mutyara, *Banda Aceh Pernah Berperan Sebagai Ibukota Republik Indonesia*, (Medan. : Panitia Seminar Perjuangan Aceh, 1976).

63. A. G. Mutyara. *ibid.*, hal. 1

dan pelaut yang ulung sudah sejak Perang Dunia II.

- c. Mempersiapkan aparat-aparat yang harus mengenal tempat-tempat penting seperti lapangan udara, pemancar radio dll.
- d. Mempersiapkan dana untuk biaya pertahanan daerah Aceh sendiri, untuk biaya pasukan di Sumatra Timur, biaya para diplomat RI di luar negeri. Sumber dana ini adalah hasil ekspor Aceh dan dari dana yang dikumpulkan oleh pedagang-pedagang Aceh, seperti N.V. Permai di Penang.
- e. Mempersiapkan logistik dan menentukan lokasi logistik bila terjadi perang gerilya. Dan memindahkan gudang-gudang perbekalan ke arah pedalaman.
- f. Mempersiapkan lokasi baru bagi pasukan, bila kota direbut musuh. Mempersiapkan Kutaradja, Tangse dan Takengon sebagai ibu-kota Republik Indonesia untuk menggantikan Yogya.<sup>64</sup>

Karena kegagalan agresinya melalui beberapa serangan laut di beberapa tempat di Aceh, maka Belanda mencoba menempuh dengan cara lain. Yaitu mereka mengadakan propokasi melalui Radio Medan yang sudah mereka kuasai. Pada awal Januari 1949, Radio Medan menyiarkan bahwa seluruh Aceh telah dikuasai oleh Tentera Belanda. Kota-kota besar seperti Kutaradja, Sigli, Langsa dan lain-lain telah direbut oleh tentara kerajaan Belanda. Berita ini disiarkan pada siang hari dan ditangkap oleh Kepala Perwartaan Jawatan Penerangan TNI Divisi X Sumatra, Letnan II Muchtar Nasution. Tetapi berita ini kemudian dibantah oleh Radio Rimba Raya (Radio Pemerintah RI di Aceh pada masa itu).

### **C. Peristiwa-Peristiwa Di Daerah Dalam Kaitan Dengan Kejadian Bersejarah Tingkat Nasional.**

Seperti telah diuraikan dalam BAB II di atas, bahwa pada masa awal Revolusi, terjadi pertempuran-pertempuran antara barisan-barisan bersenjata Indonesia dan pasukan-pasukan Jepang di semua kota-kota besar di Indonesia. Pihak Indonesia beranggapan bahwa dalam wilayah kekuasaan Negara Indonesia yang merdeka hanya boleh ada satu pemerintah berdaulat, dan kedaulatan itu

---

64. *Ibid.*, 1 - 4 Lihat juga A. H. Nasution. *op. cit.* jilid. VI, hal. 392.

dilambangkan oleh kekuatan bersenjata yang menegakkannya. Pengalaman-pengalaman pahit selama minggu-minggu pertama merdeka, telah menimbulkan keyakinan bahwa diplomasi tanpa dukungan angkatan bersenjata tidak ada hasilnya. Diplomasi harus berdasarkan kedudukan yang kuat. Salah satu unsur kekuatan itu adalah angkatan bersenjata. Karena itu pada tanggal 5 Oktober 1945, Presiden mengeluarkan sebuah maklumat, mengenai pembentukan Tentera Keamanan Rakyat.<sup>65</sup> Dengan dikeluarkannya maklumat tersebut, maka di Aceh juga didirikan API (Angkatan Pemuda Indonesia atau Angkatan Perang Indonesia), kemudian agar sesuai dengan Maklumat Presiden tersebut, dirubah namanya menjadi TKR.

Agresi Militer Belanda yang pertama, pada tanggal 21 Juli 1947, terhadap Republik Indonesia, menjadikan persoalan Indonesia dibicarakan di forum Internasional. Sehubungan dengan ini dibentuk suatu komisi jasa-jasa baik yang lebih dikenal dengan nama KTN (Komisi Tiga Negara) yang anggota-anggotanya terdiri dari negara Australia (pilihan Republik Indonesia), Belgia (pilihan Belanda), dan Amerika Serikat (pilihan anggota Australia dan Belgia). Salah satu tugas komisi ini adalah menyelesaikan masalah pelaksanaan genjatan senjata. Dalam rangka membicarakan pelaksanaan masalah ini, tiga opsir KTN, pada tanggal 10 Maret 1948, telah mengadakan kunjungan ke Aceh untuk melihat situasi di sana. Selama di Aceh ketiga opsir ini telah diterima oleh Gubernur Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo, Tgk. Mohd. Daud Beureueh di Kutaradja. Dan dalam menyambut opsir-opsir KTN ini (diantaranya terdapat seorang opsir Tiongkok) perkumpulan Chung Hui (suatu perkumpulan orang-orang Cina) Kutaradja, telah diadakan suatu resepsi yang dihadiri juga oleh beberapa tokoh masyarakat Aceh.<sup>66</sup>

Hasil kerja KTN, mengecewakan pejuang-pejuang Indonesia, karena dalam kenyataannya Republik Indonesia diharuskan me-

---

65. "Pembentukan Angkatan Bersenjata Kita", dalam harian *Kompas*, (Jakarta 14 Agustus 1970), hal. III.

66. Radik Utoyo, Sudirdjo, Cs. *Album Perjuangan Kemerdekaan 1945 - 1950*, (Jakarta : C.V. Alda. 1976), hal. 200.

ngakui hasil agresi Militer Belanda. Sesudah diadakan lagi perundingan-perundingan antara RI dengan Belanda, maka pada tanggal 17 Januari 1948, dicapai lagi suatu persetujuan baru, yaitu **Persetujuan Renville**. Dalam persetujuan ini Republik Indonesia mengakui garis yang ditetapkan van Mook (yaitu suatu garis yang menghubungkan pucuk pasukan Belanda yang oleh pihak Belanda merupakan tapal-tapal batas antara daerah Republik dan daerah pendudukan Belanda). Juga ditekankan lagi mengenai pembentukan Republik Indonesia Serikat di mana Republik Indonesia merupakan salah satu negara bagian.<sup>67</sup> Keputusan-keputusan yang diambil berdasarkan persetujuan Renville ini, diterima oleh rakyat Aceh dengan perasaan was-was, tetapi mereka tidak mengatakan menolak.<sup>68</sup>

Setelah persetujuan Renville, van Mook meneruskan pembentukan negara-negara boneka, yang kemudian disusunnya dalam suatu federasi boneka. Daerah Aceh sebagai bagian dari Republik Indonesia, tidak luput/inceran van Mook untuk dijadikan sebagai salah satu Negara Federal. Melalui Tgk. Dr. Mansur, yang menjadi Wali Negara Sumatera Timur (sebagai salah satu federal), mengajak Gubernur Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo, Tgk. Mohammad Daud Beureueh, untuk membentuk negara Federal Aceh, serta ikut menghadiri dan mengorganisir "Muktamar Sumatra".<sup>69</sup> Ajakan ini disampaikan dalam bentuk surat yang dijatuhkan dari pesawat terbang di atas Kutaradja; selain itu juga disebarakan pamflet-pamflet atau surat selebaran dibeberapa tempat di Aceh, untuk mempengaruhi pendapat umum, agar mendesak Gubernur mereka, menerima ajakan itu. Isi surat yang ditanda tangani Dr. Mansur tersebut, berbunyi sebagai berikut :

Kehadapan Paduka Yang Mulia  
Gubernur Militer Aceh di  
Kutaradja.

Perkembangan perjalanan politik di Indonesia menunjukkan semakin jelas, bahwa adalah berfaedah dan baik bagi suku-suku

<sup>67</sup>.Nugroho Notokusanto, *Sedjarah Dan Hankam*. (Djakarta:Lembaga Sejarah Hankam, 1968) hal. 114.

<sup>68</sup>. Insider, *Atjeh Sepintas Lalu* ( Djakarta : Fa Archapada, 1950), hal. 42.  
<sup>69</sup>. Sendam I/Iskandar Muda, *op. cit.* hal. 152.

bangsa Sumatera untuk mencapai suatu kerja sama yang akan dapat terkoordinir bukan saja dalam lapangan politik, ekonomi, tetapi juga dengan beberapa banyak cara lain.

Itulah sebabnya maka saya boleh memulai menggerakkan untuk mengundang wakil-wakil segala daerah Sumatera buat turut serta dalam Muktamar Sumatera yang akan dilangsungkan di Medan pada tanggal 28 Maret ini. Tujuan konperensi ini yang 5 hari lamanya mengadakan perhubungan yang pertama di antara daerah-daerah dan suku-suku bangsa Sumatera yang berbagai-bagai itu, dan saya menyatakan penghargaan saya moga-moga perhubungan yang pertama ini berangsur-angsur menjadi pertalian yang bertambah tambah eratnya untuk kebahagiaan bangsa Sumatera dan bangsa Indonesia seluruhnya. Negara Sumatera Timur akan merasa suatu kehormatan untuk menerima perutusan Tuan sebagai tamu selama Muktamar ini. yang diundang ialah :

Aceh	Bengkalis
Tapanuli	Bangka
Nias	Belitung
Minangkabau	S. Selatan
Lampung	Bengkulu
Inderagiri	Jambi
	Riau.

Terlepas dari segala perbedaan paham politik saya menyatakan penghargaan saya, supaya Aceh juga akan mengirim suatu perutusan mewakilinya pada Muktamar pertama dari suku-suku bangsa Sumatera ini. Pembesar-pembesar di Sabang telah diperintahkan untuk menyambut perutusan Tuan dan mengawaninya ke Medan dengan kapal terbang.

Wali Negara Sumatera Timur  
Tgk. Dr. Mansur.<sup>70</sup>

Sehubungan dengan surat ajakan Wali Negara Sumatera Timur itu, Gubernur Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo, Tgk. Mohd. Daud Beureueh, mengeluarkan suatu selebaran yang dimuat dalam surat kabar Semangat Merdeka tanggal 23 Maret 1949 di

70. *Ibid.*, hal. 153 - 154.

Kutaradja, yang isinya menolak ajakan Tgk. Dr. Mansur tersebut.<sup>71</sup> Isi selengkapnya surat selebaran tersebut adalah, : Perasaan kedaerahan di Aceh tidak ada, sebab itu kita tidak bermaksud untuk membentuk satu Aceh Raya dan lain-lain karena kita disini adalah bersemangat Republikan. Sebab itu juga undangan dari Wali Negara Sumatera Timur itu kita pandang sebagai tidak ada saja, dari karena itulah kita tidak balas. Di Aceh tidak terdapat salah paham sebagaimana diterangkan oleh Belanda itu, bahkan kita mengerti betul apa yang dimaksud Belanda dengan Mukhtar Sumatera itu. Maksud Belanda supaya mendiktekan Tgk. Dr. Mansur supaya menjalankan politik *divide et impera* nya. Aceh telah siap menanti segala kemungkinan yang bakal timbul dari sikap penolakan itu. Kita yakin bahwa mereka/telah menerima baik undangan Tgk. Dr. Mansur tersebut, bukanlah orang Republikan, tetapi adalah kaki-tangan dan budak kolonialisme Belanda.<sup>72</sup>

Berdasarkan surat tanggapan Gubernur Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo tersebut, jelas bahwa rakyat Aceh tidak menginginkan bentuk Negara Federal gaya van Mook tersebut.

Mengingat Republik Indonesia masih dalam cengkeraman Belanda dan sulitnya komunikasi antar pulau di Indonesia, serta hubungan keluar, dan hubungan dengan peningkatan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, khususnya Angkatan Udara, maka pemerintah telah menginstruksikan kepada semua residen dalam wilayah Republik Indonesia, supaya membentuk suatu panitia (Dakota Fonds) dalam rangka mengumpulkan biaya buat pembelian pesawat udara Dakota.<sup>73</sup> Pada waktu kunjungan Presiden Sukarno ke Kutaradja, dalam suatu rapat raksasa dihadapan ribuan rakyat Aceh, Presiden telah menyinggung pula masalah itu. Dan dalam suatu pertemuan antara Presiden beserta rombongannya dengan GASIDA (Gabungan Saudagar Indonesia Daerah Aceh) bertempat di *Atjeh Hotel* Kutaradja, Presiden selain telah membicarakan berbagai hal sehubungan dengan situasi Negara pada waktu

71. Lihat Komite Musyawarah Angkatan 45 Daerah Istimewa Atjeh, *Modal Revolusi 45*, (Kutaradja; Seksi Penerangan/Dokumentasi Komite Musyawarah Angkatan 45 Daerah Istimewa Aceh, 1960), hal. 63.

72. Sendam I/Iskandar Muda, *loc - cit*.

73. T. Muhammad Ali Panglima Polem, *Memoires van Teuku Muhammad Ali Panglima Polem*, (Kutaradja, 17 Agustus 1972), hal 34. Terjemahan ke dalam bahasa Belanda oleh. J.H.J Brendgen, Haarlem, Nederland.

itu, juga pada kesempatan itu Presiden telah mengusulkan kepada pihak GASIDA apakah mereka sanggup menyediakan sebuah pesawat terbang Dakota (bekas pakai) yang berharga 120.000 *Dollar* Malaya atau sekitar 25 kg. emas. Menjelang akhir pertemuan itu, juga Presiden mengatakan, tidak akan mau makan sebelum mendengar jawaban dari GASIDA ya atau tidak, atas usul tersebut. Ketua GASIDA M. Djuned Yusuf, Pak Haji Zainuddin dan sesepuh GASIDA lainnya yang hadir dalam pertemuan itu, mengisyaratkan kepada T.M. Ali Panglima Polem (selaku juru bicara) bahwa mereka menerima usul Presiden tersebut. Selanjutnya GASIDA membentuk suatu panitia (untuk pelaksanaan pembelian pesawat itu), yang diketuai oleh T.M. Ali Panglima Polem.<sup>74</sup> Berdasarkan pembicaraan dengan Residen Aceh, kemudian diputuskan Aceh akan membeli 2 pesawat terbang Dakota, yang satu atas nama GASIDA dan yang satu lagi atas nama seluruh rakyat Aceh.

Pada bulan Agustus 1948, T.M. Ali Panglima Polem selaku Ketua Panitia pembelian pesawat tersebut, menerima sebuah surat dari Residen Aceh beserta sebuah Telegram yang bertanggal dan bernomor 23 Agustus 1948, No.3470/KSU/48 dan No. 3461/KSU/48, yang berasal dari Kepala Staf Angkatan Udara Komandemen Sumatera di Bukit Tinggi, Soejono. Isi telegram tersebut menyebutkan bahwa cek sebesar 120.000 dan 140.000 M.\$, telah diterima, yang tersebut terakhir diterima pada waktu kunjungan Presiden kesana. Dan kedua cek tersebut, telah diteruskan ke KSU AURI (Kepala Staf Angkatan Udara Republik Indonesia) di Yogya. Komodor Suryadharma selaku Kepala Staf, mengucapkan banyak terima kasih kepada rakyat Aceh atas bantuan itu.<sup>75</sup> Kedua pesawat yang dibeli dengan uang rakyat Aceh tersebut masing-masing diberi nama Seulawah I dan Seulawah II. Pesawat-pesawat ini mulanya mengambil route luar negeri, yaitu Rangoon (Burma) dan India. Sehubungan dengan pembelian pesawat Dakota ini, team peneliti belum mengetahui, apakah keresidenan-keresidenan lain yang juga membentuk panitia (*Dakota Fonds*) pada waktu itu, juga berhasil membeli pesawat tersebut, seperti yang dilakukan oleh rakyat Aceh.

---

74. *Ibid.*, hal. 32.

75. *Ibid.*, hal. 33.

Selain memberikan sumbangan 2 pesawat Dakota, untuk kepentingan Revolusi Republik Indonesia, rakyat Aceh juga menyumbang biaya-biaya untuk Pemerintah Pusat di Yogyakarta. Pada tahun 1949, Pemerintah Daerah Aceh telah mengeluarkan biaya untuk keperluan Pemerintah Pusat di Yogyakarta, sebesar S \$ 500.000 (Straits Dollar) dengan perincian, untuk perwakilan luar negeri (Mr. Maramis) S \$ 100.000, untuk Indonesia Office Singapore S \$ 50.000, untuk Angkatan Perang S \$ 250.000 dan untuk pengembalian Pemerintah ke Yogya S \$ 100.000.<sup>76</sup> Ketika semakin meningkatnya pertempuran disekitar Medan (Medan Area), banyak pejuang-pejuang Aceh yang dikirim ke sana (lihat sub bab B di atas). Dan untuk membantu pejuang-pejuang itu, atas inisiatif T.M. Ali Panglima Polem, Aceh telah mengirim pula 48 ekor kerbau kesana; dan berdasarkan surat yang diterima oleh T.M. Ali Panglima Polem dari Bahagian Perbekalan Front KSBO (Komando Sektor Barat Utara) di Langsa, kiriman tersebut telah diterima di sana.<sup>77</sup>

#### D. Usaha Masyarakat Aceh Dalam Beberapa Bidang Kegiatan.

Munculnya bermacam-macam organisasi pertahanan lokal di Aceh pada periode Revolusi Kemerdekaan (1945 – 1950), seperti telah disinggung di atas (Bab III), juga ikut membantu jalannya pemerintahan lokal di Aceh, yang pada periode itu sedang mengalami transisi dalam koordinasinya, yaitu dari sistem birokrasi tradisional seperti dalam bentuk daerah-daerah *Uleebalang* atau daerah-daerah yang berpemerintahan sendiri (*Uleebalangschappen* atau *Zelfbesturende landschappen*), ke arah sistem birokrasi modern seperti dalam bentuk-bentuk Kecamatan, Kabupaten dan sebagainya. Dan seperti di daerah-daerah lain di Indonesia yang juga mempunyai berbagai corak barisan kelasykaran dan kepemudaan yang berkriteria sendiri-sendiri, maka di daerah Aceh juga mempunyai ciri khas tersendiri. Misalnya dalam setiap usaha dan gerakan perjuangan kelasykaran/kepemudaan di daerah Aceh

---

76. S. M. Amin, *Kenang - Kenangan Dari Masa Lampau*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1978), hal. 103.

77. T. M. Ali Panglima Polem, *op. cit.*, hal. 32.

senantiasa menyadari dan menempatkan dirinya sebagai aparat pendukung pemerintah.<sup>78</sup>

Pada masa Revolusi Kemerdekaan, organisasi-organisasi seperti API (Angkatan Pemuda Indonesia atau Angkatan Perang Indonesia), BKR (Barisan Keamanan Rakyat), TKR (Tentera Keamanan Rakyat), BPI (Barisan Pemuda Indonesia), PRI (Pemuda Republik Indonesia), PESINDO (Pemuda Sosialis Indonesia) dan berbagai organisasi kepemudaan dan kelasykaran lainnya, ikut menentukan kelancaran pemerintahan di Aceh. Dalam penyusunan penempatan pejabat-pejabat dalam berbagai lembaga pemerintahan tingkat daerah, organisasi-organisasi lokal tersebut ikut serta menentukannya.

Sebagai titik awal perubahan pemerintahan di daerah Aceh terjadi setelah pecahnya "Peristiwa Cumbok" atau yang lebih dikenal dengan istilah "Revolusi Sosial", pada awal tahun 1946. Setelah peristiwa itu mulai terjadi pergeseran-pergeseran dan pergantian-pergantian kepemimpinan dalam beberapa lembaga pemerintahan tradisional di Aceh. Misalnya sebelum tahun 1946, istilah Kecamatan dan Kabupaten belum dikenal di daerah Aceh. Dan istilah-istilah ini baru populer digunakan masyarakat Aceh setelah pengakuan kedaulatan Negara Republik Indonesia oleh Kerajaan Belanda pada awal tahun 1950. Sebelum itu apa yang sekarang di sebut wilayah kecamatan adalah semula terdiri dari daera-daerah Uleebalang seperti telah disebutkan di atas, yang jumlahnya melebihi dari seratus banyaknya. Daerah-daerah ini adalah daerah yang sejak berabad-abad lamanya tidak mengenal pemerintahannya yang bercorak *collegiaal*. Dan sejarah daerah-daerah ini meriwayatkan bahwa penduduknya sejak beratus tahun lamanya hidup di bawah perintah para Uleebalang yang melaksanakan pemerintahan secara *dictatorial*.

Setelah tahun 1946, seperti yang telah disinggung pada awal bab ini, bahwa dalam waktu yang relatif singkat, daerah-daerah Uleebalang (*zelfbestuur*) itu terhapus dan sebagai gantinya ber-diri kesatuan-kesatuan daerah dengan sebutan "negeri". Seba-

---

78. Lihat Sendam I-/ Iskandar Muda, *op. cit.*, hal.103.

gai pimpinan negeri ini kemudian penetapannya dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia di Kutaradja.

Pada awal masa kemerdekaan (tahun 1945), daerah Aceh masih berstatus sebagai satu Keresidenan otonom yang berpusat pada Propinsi Sumatra Utara, yang berkedudukan di Pematang Siantar. Seperti telah disinggung dalam Bab III di atas, bahwa daerah Aceh pada masa itu merupakan bagian dari Propinsi Sumatera. Dan pelaksanaan pemerintahan Republik Indonesia di Aceh, mulai resmi berjalan setelah Teuku Nyak Arief pada tanggal 29 September 1945, diangkat sebagai Residen Republik Indonesia yang pertama untuk Daerah Aceh, serta Teuku Muhammad Ali Panglima Polem (anak Panglima Polem Muhammad Daud, pejuang terkenal pada akhir abad XIX dan awal abad XX), sebagai wakil Residen, yang diangkat oleh Gubernur Sumatera Mr. T.M. Hasan.<sup>79</sup> Residen, pertama Teuku Nyak Arief, dalam menjalankan pemerintahannya dibantu oleh suatu lembaga yang juga baru dibentuk, yaitu suatu badan perwakilan daerah yang dinamakan Komite Nasional Daerah. Badan ini terdiri dari beberapa anggota yang ditentukan dari hasil pemilihan rakyat yang telah ditunjuk atas pencalonan partai-partai.<sup>80</sup> Dan juga suatu Badan Eksekutif Komite Nasional Daerah Aceh, yang terdiri dari beberapa anggota yang dipilih oleh dan dari kalangan anggota-anggota Komite Nasional Daerah sendiri.

Dengan adanya kedua lembaga seperti tersebut di atas berarti telah terjadi suatu perubahan pokok (prinsipil) dalam sistem pemerintahan yang berlaku sebelumnya. Pada masa Hindia Belanda, di seluruh Aceh baik di daerah yang disebut *Zelfbestuurgebied* atau daerah yang berpemerintahan sendiri, maupun di daerah yang disebut *Rechtstreek bestuurd gebied* atau daerah yang diperintah langsung oleh Belanda, pemerintahan dijalankan oleh perseorangan (Uleebalang), yang memperoleh jabatan itu secara turun-temurun. Dan pemerintahan itu dijalankan oleh pejabat itu atas kebijaksanaan sendiri yang tidak terikat dengan suatu badan hukum lain.<sup>81</sup> Juga dengan adanya lembaga Eksekutif Komite

---

79. S. M. Amin, *op. cit.*, hal. 36.

80. Insider, *op. cit.*, hal. 14.

81. S. M. Amin. *op. cit.*, hal. 37.

Nasional Daerah itu, maka mulai tampak adanya Demokrasi dalam sistem pemeritahan otonomi lokal di Aceh. Tetapi karena sistem itu baru dalam peringkat awal, tentu saja tidak dapat berjalan dengan sempurna atau belum dapat berfungsi sebagai mestinya. Meskipun demikian pemerintahan Republik Indonesia yang pertama di daerah Aceh di bawah pimpinan Teuku Nyak Arief, yang merupakan pemerintahan pertama dalam alam kemerdekaan, adalah suatu langkah penting ke arah pemerintahan rakyat.<sup>82</sup>

Karena beberapa persoalan, mengakibatkan pemerintahan pertama di bawah pimpinan Teuku Nyak Arief, tidak berlangsung lama. Pada Pebruari 1946, Residen Teuku Nyak Arief meletakkan jabatan dan sebagai gantinya diangkat Teuku Muhammad Daud Syah bekas *Zelfbestuurder* atau Uleebalang Landschap Idi, di Aceh Timur. Dan juga pengurus Badan Eksekutif Komite Nasional Daerah mengalami perubahan. Ketuanya yang lama, Tuanku Machmud diganti dengan Mr. S.M. Amin, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kehakiman Keresidenan Aceh.

Seperti telah disinggung di atas, organisasi-organisasi kelasykaran juga ikut menunjang jalannya pemerintahan di daerah Aceh, terutama pada masa-masa awal kemerdekaan. Baik semasa Residen Teuku Nyak Arief maupun di bawah Residen Teuku Muhammad Daud Syah, kedua-duanya sama-sama mengikutsertakan unsur-unsur kelasykaran ikut berpartisipasi dalam pemerintahan. Karena berbagai kesulitan (adanya pertentangan-pertentangan dalam masyarakat, masalah-masalah dengan Jepang dan lain sebagainya), harus dihadapi oleh pemerintah, maka Residen Teuku Nyak Arief dalam kenyataannya lebih menyerupai pimpinan dari pada TKR (Tentara Keamanan Rakyat).<sup>83</sup> Begitu juga masa Residen Teuku Daud Syah, karena timbul berbagai masalah (seperti perselisihan antar golongan, peristiwa Cumbok, masalah Husin Al Mujahid, dan lain sebagainya), juga mengikutsertakan keaktifan organisasi PESINDO, khususnya Badan Keamanan PESINDO, untuk menjalankan pekerjaan kepolisian atau tugas-tugas lain yang berhubungan de-

---

82. *I b i d*

83. Mengenai peranan Teuku Nyak Arief dan TKR, lihat misalnya, Syamaun Gaharu, "Teuku Nyak Arief, Profil Seorang Pejuang, dalam harian *Mimbar Umum*, (Medan : 12 Mei 1979).

ngan masalah keamanan.<sup>84</sup> Dan berkat adanya kerja sama diantara pemerintah dengan lasykar-lasykar rakyat dan kepemudaan, maka Komite Nasional di bawah pimpinan Residen Teuku Daud Syah, segala sesuatu baik yang mengenai pemerintahan dalam arti yang terbatas, maupun yang mengenai perekonomian, kesehatan, pertanian, kepolisian, keuangan dan sebagainya, berlangsung dengan memuaskan.<sup>85</sup>

Pada permulaan tahun 1947, karena kesulitan komunikasi antara Gubernur Sumatera dengan daerah-daerah di Sumatera, maka untuk melancarkan roda pemerintahan ini, Sumatra dibagi dalam tiga bagian administratif, yaitu Sumatra Utara, Sumatra Tengah dan Sumatra Selatan. Dan pada masing-masing daerah ini ditempatkan Wakil-Wakil Gubernur dengan sebutan Gubernur Muda. Untuk Sumatra Utara sebagai Gubernur Muda, diangkat Mr. S.M. Amin (yang sebelumnya sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Aceh), untuk Sumatra Tengah, Mr. M. Nasroen dan untuk Sumatra Selatan, Dr. Muhammad Isa.

Sebagai akibat kegawatan agresi Militer Belanda yang pertama pada tanggal 21 Juli 1947, yang telah berhasil menduduki sebagian daerah Republik Indonesia, termasuk diantaranya Pematang Siantar, tempat kedudukan Gubernur Sumatra, maka Gubernur beserta Stafnya terpaksa mengungsi ke Bukit Tinggi. Gubernur Muda Sumatra Utara dapat ditawan oleh Belanda dan dibawa ke Medan, kemudian via Penang kembali ke Kutaradja.<sup>86</sup> Meskipun daerah Aceh bebas dari agresi itu, tetapi karena kesibukan-kesibukan yang berhubungan dengan masalah peningkatan keamanan, juga kegawatannya semakin meningkat. Sehubungan dengan hal ini, Wakil Presiden Republik Indonesia, Mohammad Hatta, dalam fungsinya sebagai Wakil Panglima Tertinggi Tentera Republik Indonesia, yang sedang menjalankan kekuasaan Pemerintah Pusat Republik Indonesia untuk Sumatra di Sumatra, berdasarkan surat keputusannya No. 3/BPKU/47, tanggal 26 Agustus 1947, yang dikeluarkan di Bukit Tinggi, menetapkan bahwa Daerah Keresidenan

---

84. S. M. Amin. *op. cit.*, hal. 38.

85. Insider, *loc. cit.*

86. *Ibid.*, hal. 42.

Aceh, Kabupaten Langkat dan Tanah Karo, sebagai suatu daerah Militer. Dan sebagai pimpinannya diangkat Teungku Muhammad Daud Beureueh (yang sebelumnya menjabat Kepala Jawatan Agama Daerah Keresidenan Aceh), sebagai Gubernur Militer dengan pangkat Jendral Mayor Kehormatan. Selanjutnya ditetapkan pula Penasehata Gubernur Militer dan pembantunya, yaitu Kolonel R.M.S. Suryosularso sebagai Kepala Staf A Ajudan Umum Komandemen Sumatra dan Letnan M. Nasir, sebagai Kepala Seksi II.<sup>87</sup>

Tugas utama Gubernur Militer, ialah menyusun dan menyatukan Tentera dan Lasykar-Lasykar rakyat ke dalam Daerah kekuasaan Gubernur Militer, supaya terdapat satu kesatuan Komando. Selain itu juga mengkoordinir urusan-urusan umum, baik yang mengenai sipil maupun militer, asalkan saja urusan-urusan ini termasuk dalam lingkungan pertahanan. Jadi Residen dan aparat-aparat pemerintahan sipil lainnya tetap menjalankan pemerintahan sipil sebagaimana biasa. Dengan demikian sebenarnya tugas dan kewajiban Gubernur Militer adalah tetap terletak pada masalah yang berhubungan dengan bidang pertahanan atau kemiliteran saja.<sup>88</sup>

Dasar hukum keputusan tugas dan kewajiban ini adalah, Undang-Undang keadaan dalam bahaya, tanggal 6 Juni 1946 No. 6 dan Peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 30, fasal I, Surat dari Panglima Tentera Komandemen Sumatra tanggal 25 Agustus 1947 No. 5 /PLL/BPK/47.<sup>89</sup>

Tahun 1948 terjadi perubahan lagi dalam status pemerintahan Keresidenan Aceh. Berdasarkan Undang-Undang No. 10-1948, dibentuk Propinsi Sumatra Utara yang terdiri atas daerah-daerah Aceh, Tapanuli dan Sumatra Timur. Sebagai Gubernur yang pertama diangkat Mr. S.M. Amin (jabatan sebelumnya Gubernur Muda Sumatra Utara). Pelantikan Gubernur ini dilaksanakan oleh Presiden Sukarno yang kebetulan pada waktu itu sedang berada di Kutaradja dalam perlawatannya ke daerah Aceh. Perubahan pemerintahan ini menjadikan Pulau Sumatera terbagi atas tiga Propinsi, yaitu Sumatra Utara, Sumatra Tengah dan Sumatra Selatan. Juga dengan penetapan Komisaris Negara untuk Sumatra, Kota Sibolga

---

87. Sendam I/Iskandar Muda, *op. cit.*, hal. 125.

88. S. M. Amin, *op. cit.*, hal. 40 - 41.

89. *Ibid.*

(yang sebelumnya sebagai ibukota Keresidenan Tapanuli) menggantikan Kutaradja (sebagai tempat kedudukan Gubernur Muda Sumatera Utara) sebagai ibukota sementara Propinsi Sumatera Utara.

Dengan pembagian itu, mulai tampak lagi perubahan-perubahan, terutama dengan munculnya beberapa lembaga baru dalam bidang pemerintahan di Sumatra umumnya dan di Aceh khususnya. Keresidenan Aceh dan Tapanuli yang sebelumnya menyerupai Keresidenan otonom, dihapuskan, sedangkan Residen-Residennya diperbantukan pada Gubernur. Seterusnya dibentuk Kabupaten-Kabupaten sebagai kesatuan-kesatuan wilayah yang memperoleh otonomi di bawah Bupati, bersama dengan Dewan Kabupaten yang terdiri dari anggota-anggota yang dipilih. Para Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sehari-hari dibantu oleh suatu Badan Eksekutif Dewan Perwakilan Kabupaten yang terdiri dari anggota-anggota Dewan Perwakilan Kabupaten.<sup>90</sup>

Akibat dari pada perubahan dalam lapangan pemerintahan ini, timbul masalah-masalah baru yang menyangkut reaksi dari sebagian rakyat. Di antara mereka ada yang pro, yang anti dan yang tidak menunjukkan sesuatu reaksi atas perubahan itu. Sehubungan dengan penunjukan Sibolga sebagai ibukota sementara Sumatera Utara, sebagian besar rakyat Aceh menganggap penetapan itu tidak tepat dan mereka berusaha supaya penetapan itu dicabut kembali dan Kutaradja dijadikan sebagai penggantinya, selama mengharap-kan Medan dapat direbut kembali.<sup>91</sup> Berbagai pernyataan atau resolusi dari organisasi-organisasi kelasyakaran, partai-partai dan surat-surat kabar dikeluarkan, yang nadanya semua menginginkan Kutaradja supaya ditetapkan sebagai ibu kota Propinsi Sumatera Utara.

Seperti telah disinggung di atas, bahwa pelaksanaan Undang-Undang pembagian Sumatera dalam tiga propinsi, dimulai dengan pembentukan suatu Dewan Perwakilan Sumatera Utara yang terdiri dari anggota-anggota Dewan Perwakilan Sumatra Utara yang telah dihapuskan dan yang didalam Dewan Perwakilan Sumatra ini me-

---

90. Insider, *op. cit.*, hal. 43 - 44.

91. *Ibid.*

wakili Aceh, Tapanuli dan Sumatera Timur. Rapat pembentukan itu dilaksanakan di Tapak Tuan ( Aceh Selatan ). Dan pada saat sidang pertama dilaksanakan (pada tanggal 13 - 12 - 1948), Gubernur Sumatera Utara Mr. S.M. Amin (sebagai Ketua Dewan Perwakilan mengucapkan sambutan pengarahannya, yang antara lain adalah sebagai berikut :

” . . . kita semua pada saat ini berkumpul diruangan ini di kota Tapak Tuan dipantai Atjeh Barat jang indah permai ini, dengan maksud melaksanakan kewadajiban jang diletakkan atas bahu kita masing - masing jaitu kewajiban membentuk Dewan Perwakilan Provincie Sumatra Utara. Kewajiban ini adalah untuk menjempurnakan bunji Undang-Undang No. 10 tahun 1948 jang telah disusun sebagai akibat dari Undang-Undang Dasar kita jang menghendaki supaya daerah-daerah kesatuan dalam Republik Indonesia kita ini mampu njai. Pemerintahan jang bertjorak demokratisch. Bilamana nanti Dewan Perwakilan Provincie Sumatra Utara telah terbentuk, maka dapatlah dijatakan bahwa kita telah memperoleh kemadjuan selangkah lagi dalam usaha kita menudju kearah pembentukan Negara jang berdasarkan kedaulatan rakjat.<sup>92</sup>

Dewan perwakilan Sumatra Utara ini beranggotakan 45 orang, yang mewakili golongan-golongan dan partai-partai (Partai Masyumi, Partai Syarikat Islam Indonesia, Partai Sosialis Indonesia, Partai Nasional Indonesia, SOBSI, Partai Komunis Indonesia, PESINDO, Parkindo dan Barisan Tani Indonesia), yang ada di Sumatra Utara pada waktu itu. Ke 45 anggota-anggota tersebut ialah : 1. Tgk. Ismail Yaccob, 2. Sutikno Padmo Sumarto, 3. Amelz, 4. H. Mustafa Salim, 5. Karim Muhammad Duryat, 6. M. Isa Daud, 7. Abdul Mukti, 8. Apan Daulay, 9. Tgk. Abdul Wahab, 10. M. Abduh Syam, 11. M. Saridin, 12. Bagindo Bujang, 13. Tgk. M. Nur El Ibrahimy, 14. Hadely Hasibuan, 15. A. Sutarjo, 16. A. Karim M.S., 17. Agus Salim, 18. Herman Siahaan, 19. Abdul Rahman Syihab, 20. M. Yusuf Abdullah, 21. Dr. Gindo Siregar, 22. Dr. R. Sunario, 23. Bachtiar Yunus, 24. Dr. Casmir Harahap, 25. D. Dyar

---

92. Insider, *op. cit.*, hal. 104.

Karim, 26. M. Siregar, 27. Kario Siregar, 28. Nulung Sirait, 29. M. Hutasoit, 30. M. Yunus Nasution, 31. S.M. Tarigan, 32. Lokot Batubara, 33. A. St. Soaloan, 34. S.M. Simanjuntak, 35. Mr. H. Silitonga, 36. Mr. R.L. Tobing, 37. Dr. H.L. Tobing, 38. Dr. Warsito, 39. Fachruddin Nasution, 40. Abdul Hakim, 41. Rustelumbana, 42. Patuan R. Natigor, 43. St. Mangaraja Muda, 44. Haji A. Azis, 45. Yahya Siregar.<sup>93</sup> Diantara ke 45 anggota-anggota yang tersebut di atas, yang hadir dalam sidang Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat itu hanya 29 anggota. Dan pada kesempatan itu juga telah dipilih 5 orang anggota untuk duduk dalam suatu Badan Eksekutif, yaitu Tgk. Muhammad El Ibrahimy (Partai Masyumi), Yahya Siregar (Partai Masyumi) Muhammad Yunan Nasution (Partai Masyumi), Amelz (Partai Syarikat Islam Indonesia), dan Melanton Siregar (Partai Kristen Indonesia).<sup>94</sup>

Sidang pembentukan Dewan Perwakilan Propinsi Sumatra Utara ini, berakhir pada tanggal 16 Desember 1948. Karena adanya berbagai pernyataan atau resolusi yang dikeluarkan oleh bermacam media massa, sehubungan dengan keinginan rakyat Aceh supaya Kutaradja ditetapkan sebagai ibu kota sementara Propinsi Sumatera Utara, maka di antara keputusannya yang diambil dalam sidang itu adalah memenuhi hasrat rakyat Aceh tersebut. Dengan sendirinya keputusan Komisaris Negara untuk Sumatera sebelumnya, yang telah menetapkan Sibolga sebagai ibu-kota Propinsi Sumatera Utara, dicabut kembali. Dan mereka yang menghendaki supaya Sibolga dijadikan ibu-kota tersebut, mematuhi keputusan Dewan Perwakilan Rakyat tersebut. Keputusan lain yang diambil dalam sidang tersebut, adalah penetapan pembentukan empat Kabupaten di Keresidenan Tapanuli, setelah mendengar usul dari salah seorang anggota sidang dan kemudian didukung oleh beberapa anggota lainnya. Selain itu, sebuah usul supaya Wakil Wanita juga terdapat dalam Dewan Perwakilan Rakyat itu, juga diterima sidang dengan suara bulat.<sup>95</sup>

---

93. S. M. Amin *op. cit.*, hal. 42.

94. *Ibid.*, hal. 52.

95. *Ibid.* Hal. 53.

Baik dari tujuan pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara itu, maupun dari sambutan Gubernur Sumatra Utara Mr. S.M. Amin, dan diantara keputusan-keputusan yang diambil dari sidang itu, mulai tampak lagi kecendrungan-kecendrungan ke arah Kesatuan Republik Indonesia, dengan suatu pemerintahan yang demokratis. Suatu Negara yang segala sesuatu dilaksanakan atas dasar keinginan rakyat dan setiap tindakan dilakukan untuk kepentingan bersama.

Akibat kegawatan yang ditimbulkan oleh agresi Militer Belanda yang kedua kali atas Republik ini pada tanggal 19 Desember 1948, yang dalam waktu singkat telah berhasil menduduki hampir seluruh Daerah di Indonesia, termasuk Yogyakarta (tempat pusat kegiatan Pemerintah Republik Indonesia pada waktu itu), maka Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Mohamad Hatta, memberi mandat kepada Mr. Syafruddin Prawiranegara (selaku Menteri Kemakmuran Republik Indonesia pada waktu itu), untuk membentuk suatu Pemerintahan Republik Indonesia Darurat di Sumatra.<sup>96</sup> Dan berdasarkan mandat ini Mr. Syafruddin Prawiranegara bersama dengan beberapa kawan seperjuangannya di Bukit Tinggi (Sumatera Barat), pada tanggal 22 Desember 1948, membentuk suatu Pemerintahan Republik Indonesia Darurat, dengan susunan jabatan dan personalia sebagai berikut: 1. Ketua merangkap menteri Pertahanan, Penerangan dan mewakili urusan Luar Negeri, Mr. Syafruddin Prawiranegara, 2. Menteri Luar Negeri Mr. A.A. Maramis, 3. Menteri Pengajaran, Pendidikan, Kebudayaan, mewakili urusan Dalam Negeri dan Agama. Mr. Teuku Muhammad Hasan, 4. Menteri Keuangan dan mewakili Kehakiman, Mr. Lukman Hakim, 5. Menteri Perburuhan Sosial, Pembangunan dan Pemuda serta Keamanan, Mr. Sutan Muhammad Rasyid, 6. Menteri Pekerjaan Umum dan mewakili Kesehatan, Dr. Sitompul, 7. Menteri Perhubungan dan mewakili Kemakmuran, Ir. Indrachaya.<sup>97</sup>

Untuk melancarkan roda pemerintahan di daerah Aceh, Komisaris Pemerintahan Pusat di Bukit Tinggi telah menetapkan peja-

96. Radik Utoyo, Sudirdjo *Çs. Album Perjuangan Kemerdekaan 1945 - 1950* (Jakarta : C.V. Alda, 1976, hal. 238

97. S. M. Amin. *op. cit.*, hal. 65 - 66.

bat-pejabat pada lembaga - lembaga pemerintahan daerah, yaitu Osman Raliby, sebagai Kepala Jabatan Penerangan J.P Pusposucipto, sebagai Kepala Jabatan Keuangan , Ali Hasmy, sebagai Kepala Jabatan Sosial , Dr. M Mahyuddin sebagai Kepala Jabatan Kesehatan, R. Hadri, sebagai Kepala Jabatan Pertanian, Perikanan dan Kehewanan, Ir. Muhammad Taher, sebagai Kepala Jabatan Pengairan Jalan Jalan dan Gedung - gedung, serta Karim M. Duryat, sebagai Kepala Jabatan Perguruan, Pendidikan, Kebudayaan .<sup>98</sup>

Hampir bersamaan waktunya dengan serangan terhadap Yogyakarta (Agresi Militer Belanda yang kedua), tentera Belanda juga menyerang dan merebut Bukit Tinggi (ibukota Republik Indonesia Darurat) dari tangan pejuang -pejuang Republik Mr. Syafruddin Prawiranegara beserta Stafnya terpaksa menyingkir dari sana. Karena di Sumatera daerah Aceh sebagai satu - satunya daerah yang bebas dari agresi ini, maka Mr. Syafruddin kemudian pindah ke Aceh ( Kutaraja).

Dalam sidangnya pada tanggal 27 Januari 1949, Dewan Pemeintah Daerah, telah menetapkan "Peraturan Pembentukan Kabupaten-Kabupaten Daerah Aceh" (Ketetapan No. 5/GSO/ tahun 1949) dengan bertitik tolak pada Undang - Undang No. 10 tahun 1948, sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan dalam Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Sumut di Tapak Tuan.<sup>99</sup> Sehubungan dengan perubahan dalam sistem pemerintahan ini, beberapa tokoh masyarakat yang juga anggota - anggota Dewan Perwakilan Rakyat Sumatra Utara (di antaranya Tgk. Muhammad Nur El Ibrahimy dan M. Junan Nasution). telah mengadakan perjalanan keliling ke beberapa Kabupaten di Aceh, untuk memberi penjelasan kepada rakyat tentang makna dan isi dari pada unsur otonomi dalam pemerintahan demokrasi dan perwakilan yang harus dilakukan melalui suatu pemilihan umum yang sebenar - benarnya.

Propinsi Sumatera Utara, yang terdiri dari Daerah Aceh, Tapanuli dan Sumatera Timur, yang dibentuk di Tapak Tuan pada bulan Desember 1948, hanya berlangsung kurang lebih 6 bulan. Perubahan sistem pemerintahan yang menyangkut daerah tersebut di

---

98. *Ibid.*, hal. 54.

99. *Ibid.*

atas , terjadi untuk kesekian kalinya. Daerah Aceh bersama dengan Kabupaten Langkat dan Kabupaten Karo disatukan lagi menjadi satu daerah militer, dan sebagai pimpinannya (Gubernur Militer) diangkat lagi Tgk. Muhammad Daud Beureueh dengan pangkat Jendral Mayor tituler.<sup>100</sup> Perubahan ini berdasarkan ketetapan Pemerintah Darurat Republik Indonesia, tanggal 16 Mei 1949, No 21/pem/PDRI. Dalam ketetapan ini ditegaskan bahwa kekuasaan pemerintahan, baik sipil, maupun militer, dialihkan kepada Gubernur Militer. Jadi dengan sendirinya posisi dari Propinsi Sumatera Utara menjadi berakhir. Dan dengan keputusan Pemerintah Darurat Republik Indonesia tanggal 17 Mei 1949, No. 22/pem/PDRI, pada pasal I menetapkan bahwa "Dengan berlakunya pemusatan kekuasaan sipil dan militer kepada Gubernur Militer di daerah-daerah militer Istimewa, jabatan Gubernur - Gubernur Propinsi di Sumatra buat sementara dihapuskan".<sup>101</sup>

Karena kesulitan komunikasi antara daerah - daerah yang dibawah oleh Gubernur Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo, maka untuk memudahkan dalam koordinasinya ditetapkan Kapten Nip Karim, sebagai petugas Militer dan Teungku Maimun sebagai petugas dalam pemerintahan sipil di daerah Langkat. Sedangkan untuk Tanah Karo, ditetapkan Mayor Jamin Gintings sebagai petugas Militer dan Bupati Rakutta Sembiring sebagai petugas dalam bidang pemerintahan sipil.

Dalam rangka penertiban aparat - aparat pemerintahan, Pemerintah Republik Indonesia Darurat, pada tanggal 17 Mei 1949, telah mengeluarkan sebuah keputusan No. 24/Pem/PDRI, mengenai ketentuan - ketentuan pengangkatan, pemberhentian sementara dan pemindahan pegawai - pegawai negeri. Dan sehubungan dengan ketetapan ini, Kepala Polisi Sumatera, telah pula mengeluarkan sebuah instruksi tanggal 21 Mei 1949 No. Pol./153/UG. untuk pelaksanaan dari pada keputusan Pemerintah Darurat Republik Indonesia tersebut. Dengan adanya berbagai perubahan dalam struktur

---

100. Seperti telah disinggung di atas berdasarkan surat keputusan Wakil Presiden Republik Indonesia, Moh. Hatta, sebagai Wakil Panglima Tertinggi Tentara Republik Indonesia, No. 3/BPKU/ 47, tanggal 26 Agustus 1947, yang dikeluarkan di Bukit Tinggi, juga telah pernah menetapkan Daerah Keresidenan Aceh, Langkat dan Tanah Karo, sebagai suatu Daerah Militer, lihat Sendam I/ Iskandar Muda, *loc. cit.*

101. S. M. Amin. *op. cit.*, hal. 70.

pemerintahan di daerah, terutama pada masa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, seperti telah diutarakan di atas, tentu saja menimbulkan kebingungan-kebingungan baik bagi aparat - aparat negara, sebagai pelaksana peraturan<sup>2</sup> Negara maupun bagi rakyat awam. Karenanya Komisaris Pemerintah pada tanggal 11 Juni 1949, telah mengirim suatu radiogram kepada Pemerintah Republik Indonesia Darurat, untuk meminta penjelasan tentang keputusan-keputusan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah tersebut.<sup>102</sup>

Dengan keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 20 Agustus 1949, Pemerintah Republik Indonesia Darurat dibubarkan Mr. Syafruddin Prawiranegara dalam jabatannya selaku Wakil Perdana Menteri, sebagai mewakili Pemerintah Pusat, berkedudukan di Kutaraja. Mengingat masa Revolusi Kemerdekaan merupakan masa transisi, maka tidak mengherankan bila setiap waktu terjadi perubahan - perubahan. Misalnya dengan pembubaran pemerintah Republik Indonesia Darurat dan penempatan Mr. Syafruddin Prawiranegara di daerah Aceh sebagai Wakil Perdana Menteri, maka untuk kesekian kalinya terjadi lagi perubahan dalam struktur pemerintahan di Aceh. Dengan wewenang yang ada padanya, maka Wakil Perdana Menteri mengadakan penempatan - penempatan baru yang menurut anggapannya baik atas Pulau Sumatera. Dalam pelaksanaan tugasnya Wakil Perdana Menteri dibantu oleh suatu Badan Penasehat yang terdiri dari Komisaris Pemerintah, Panglima Territorial Territorium Sumatera dan beberapa orang yang ditunjuk,<sup>103</sup> Berdasarkan ketetapan Wakil Perdana Menteri, sebagai pengganti peraturan Pemerintah No. 8/Des/WKPM, tahun 1949, Propinsi Sumatera Utara dibagi lagi untuk kesekian kalinya, menjadi dua Propinsi, yaitu : Propinsi Aceh dan Propinsi Sumatera Timur, yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1950.<sup>104</sup> Masing-masing Propinsi ini dibawah oleh Tgk. Mohammad Daud Beureueh (Sebelumnya sebagai Gubernur Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo) dan Dr. F.L Tobing (bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi Sumatera Utara) sebagai Gubernur.

---

102. *Ibid.*, hal. 71.

103. *Insider*, *op.cit* hal. 49.

104. Lihat Muhammad Ibrahim Cs., *Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh*. ( Banda Aceh : PPKD, 1977/ 1978, hal. 211.

Setelah terbentuknya pemerintahan Republik Indonesia Serikat, atau setelah Pengakuan Kedaulatan oleh Kerajaan Belanda kepada Indonesia, maka susunan pemerintahan di seluruh Indonesia mengalami perubahan lagi, yakni sebagai hasil dari pada persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia Serikat (yang berkedudukan di Yogyakarta). Dengan tercapainya persetujuan itu pada tanggal 19 Mei 1950 No. 21 tahun 1950, dan sidang Dewan Menteri tanggal 18 Agustus 1950, yang melahirkan Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1950, tanggal 14 Agustus 1950, yang menetapkan pembagian wilayah Republik Indonesia atas 10 Propinsi, telah menimbulkan suatu masalah baru, sehubungan dengan kedudukan Daerah Aceh dalam hal pelaksanaan ketetapan pemerintah tersebut.<sup>105</sup> Dalam hal ini Daerah Aceh ditetapkan sebagai bagian dari pada Propinsi Sumatera Utara. Timbul berbagai protes dari pemuka-pemuka masyarakat Aceh, baik dari kalangan Pamongpraja, mulai dari tingkat Gubernur sampai kepada kepala-kepala Mukim Juga dikalangan pemimpin-pemimpin masyarakat lainnya diluar kalangan pemerintahan. Mereka menginginkan supaya Aceh tetap berstatus sebagai Propinsi yang berdiri sendiri.<sup>106</sup> Terjadi beberapa pertemuan antara Pemerintah Pusat dengan tokoh-tokoh masyarakat Aceh di Kutaraja, tetapi dalam kenyataan Pemerintah Pusat tetap pada pendiriannya, Propinsi Aceh dihapus, dan Aceh berada dibawah Propinsi Sumatera Utara. Dan sebagai Wakil Pemerintah Sumatera Utara untuk Aceh ditempatkan seorang koordinator, yaitu Residen R,M Margono Danubroto.<sup>107</sup> Rentetan-rentetan peristiwa diatas, merupakan awal dari kemelut yang timbul di Aceh sesudah beberapa tahun berikutnya.

Seperti telah disinggung di atas, di Aceh pada masa awal revolusi kemerdekaan, telah terdapat sebuah pemancar Radio dengan kekuatan 1 kilowatt. Mulanya Radio ini ditempatkan di wilayah Bireun ( Aceh Utara ), yaitu di Krueng-Simpo', 20 Km ke jurusan Takengon, dan kemudian dipindahkan kearah Aceh Tengah dan di-

---

105. Lihat T. Alibasyah Talsya, *Sedjarah dan Dokumen Pemberontakan di Atjeh*, (Djakarta : Kesuma, tanpa angka tahun) hal. 29. Lihat juga Amrah Muslim, *Jchtt-sar Perkembangan Otonomi Daerah 1903 - 1058*, (Djakarta : Lembaga Administrasi Negara, 1960) hal .53.

106. T. Alibasyah Talsya, *loc. cit.*

107. T. Muhammad Ali Panglima Po'em, *op. cit.*

tempatkan di Rimba Raya (62 km. dari kota Bireun ke arah Takengon). Mungkin itulah sebabnya maka pemancar tersebut pada mulanya dikenal dengan nama "Radio Rimba Raya". Radio ini memakai gelombang 19 - 25 atau 60 meter, berada di udara dari jam 5 petang sampai 6 pagi.<sup>108</sup> Menurut buku Sendam I Iskandar Muda, Dua Windhu Kodam I Iskandar Muda, Radio Rimba Raya ini mempunyai riwayat sendiri, sebagai berikut : pada masa agresi Belanda I, berhasil dimasukkan sebuah pemancar radio dari Malaya melalui Tanjungpura ke Aceh dengan Speed Boat yang dipimpin oleh Mayor John Lie. Radio ini mula - mula ditempatkan di Krueg Simpo' dan kemudian dipindahkan ke Kutaraja. Sehari sesudah agresi Militer Belanda II, pemancar ini ditempatkan di sebuah desa yaitu Rimba Raya dan yang berjasa dalam pemasangan ini adalah seorang Indo Jerman yang sudah menjadi warga negara Indonesia namanya W. Schultz. Mengenai sasaran penyiaran radio ini dipegang oleh Kolonel Husin Yusuf, sedang koordinasi dan teknik penyiaran dilakukan oleh A. Gani Mutyara. Berita - berita disiarkan dalam 6 bahasa, yaitu Indonesia, Inggeris, Belanda, Arab, Cina dan Urdu. Radio Rimba Raya ini telah memegang peranan penting dalam menyiarkan dan mengobarkan semangat perjuangan, membantah siaran bohong Belanda yang dipancarkan melalui Radio Medan dan Batavia. Radio Rimba Raya ini juga dapat berhubungan dengan pemancar radio Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Suliki, Sumatera Barat. Juga dapat berhubungan dengan Kepala Staf Angkatan Perang Republik Indonesia Jendral Mayor Simatupang di Banaran. Melalui siaran ini juga instruksi - instruksi dari Pemerintah Darurat RI, dapat disalurkan kepada Perwakilan Republik Indonesia Dr. Sudarsono di India dan Palar di PBB. Karena Radio ini tidak saja berperan sebagai alat komunikasi umum, tetapi juga sebagai alat perang yang amat strategis.<sup>109</sup>

Selama berlangsungnya Revolusi Kemerdekaan Republik Indonesia, di daerah Aceh juga terdapat beberapa mass media lain-

---

108. Lihat Komite Musyawarah Angkatan 45 Daerah Istimewa Aceh. *op. cit* hal. 49 - 50.

109. Sendam I Iskandar Muda, *op.cit.* hal. 155 - 157. Lihat juga Komite Musyawarah Angkatan 45 Daerah Istimewa Aceh, *op. cit.*, hal. 50, 87, 89 dan 90.

nya, seperti surat - surat kabar dan majalah - majalah. Surat kabar yang paling awal terbit pada masa itu adalah Semangat Merdeka", yaitu yang terbit pada tanggal 18 Oktober 1945, di Kutaraja.<sup>110</sup> Selanjutnya muncul pula majalah-majalah seperti Pendekar Rakjat", "Pahlawan", yang merupakan majalah tengah bulanan resmi Tentera Republik Indonesia Divisi Gadjah Sumatera dengan pemimpin umum A.G. Mutyara dan Wakilnya Suryadi, mulai terbit 1 Januari 1947; "Fragmenta Politica" yang diterbitkan oleh Pejabat Penerangan Aceh dan merupakan majalah Tri Bulanan Politik; sebagai ketua pelaksana - Editornya Osman Raliby, Perencana pembantu Mr. S.M. Amin, Soetikno Padmo Soemarto dan Talsya.<sup>111</sup> Juga majalah "Kebangunan Islam", "Dharma", "Dunia Peladjar", "Mimbar Rakyat", "Bebas Puspa" dan "Kesuma", . Sedangkan majalah yang distensil adalah "Mestika", "Dewan Pers", "Perpindo" (Persatoean Peladjar Indonesia), dan "Bagian Karang - Mengarang Daerah Atjeh Kutaradja.

---

110. *Ibid.*, hal. 19.

111. Lihat, *Fragmenta Politica*, dalam rangka menyambut Tahun Baru 1947.

## B A B V

### SITUASI DAERAH ACEH PADA AKHIR REVOLUSI KEMERDEKAAN

#### A. Menjelang Persetujuan KMB.

Perkembangan - perkembangan yang dilalui bangsa Indonesia sejak awal kemerdekaannya hingga perwujudan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dapat dilihat melalui bentuk - bentuk kegiatan yang bertujuan untuk menegakkan, mempertahankan dan mengamankan kemerdekaan dari bermacam gangguan, baik yang datang dari luar maupun yang datang dari dalam. Peperangan dan Diplomasi (yang diakhiri dengan Konperensi Meja Mundar di Den Haag Negeri Belanda pada Bulan Nopember 1949), merupakan sarana - sarana perjuangan untuk mencapai tujuan pada masa itu<sup>1</sup> Ancaman akan kembalinya kekuasaan Kolonial telah menimbulkan kegelisahan yang eksplosif pada setiap pejuang yang mendambakan kemerdekaan. Karenanya mereka selalu berada dalam situasi kesiap siagaan. Mereka membentuk berbagai organisasi, baik yang bersifat lokal maupun yang bersifat Nasional, yang merupakan barisan perjuangan dan pertahanan bersama mereka. Setiap organisasi ini pada dasarnya mengandung nilai - nilai umum revolusi<sup>2</sup>, yang telah memberikan corak - corak khusus kepada organisasi itu berupa ekpresi kerja sama mereka, yang dapat dikaitkan dengan motivasi rakyat yang bersedia untuk mempertaruhkan segala - galanya.<sup>3</sup>

Sejajar dengan keamanan dan pertahanan pada masa itu, kegiatan golongan pemuda dan pelajar di Aceh lebih menonjol dari pa-

---

1. Mengenai kegiatan-kegiatan diplomasi bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya pada periode Revolusi Fisik, lihat misalnya, Sartono Kartodirjo (ed), *Sejarah Nasional VI*, (Jakarta; Departemen P dan K, 1975), hal. 29 - 59. Dan Leslie Palmer, *Indonesia and the Dutch*, (London Oxford University Press, 1965), hal. 46 - 72.

2. Beberapa konsep pokok tentang pengertian nilai nilai umum revolusi, lihat Sartono Kartodirjo, "Beberapa Masalah dan Metodologi Sedjarah Indonesia," *Lembaran Sejarah* No. 6 (Yogyakarta: Fak. Sastra dan Kebudayaan Universitas Gajah Mada, 1970, hal. 12 - 14.

3. A.B. Lopian, "Sejarah dan Sejarawan dan masa depan" dalam *PRISMA* No. 7, (Jakarta : LP3ES, 1976), hal. 5.

da golongan lain. Mereka ikut berpartisipasi dalam berbagai organisasi kelasykaran perjuangan. Berdasarkan sebuah maklumat yang berisi panggilan umum yang ditujukan kepada segenap pemuda Indonesia di Aceh yang berumur 18 tahun ke atas, agar ikut mengambil bagian dalam suatu wadah kepemudaan, dapat dilihat bagaimana peranan golongan pemuda di Aceh pada masa itu.<sup>4</sup> Sedangkan pada golongan angkatan tua masih memperhatikan keraguan mereka, masih ada yang kebimbangan, ketidak kompak, masih ada yang saling bertentangan dan kurang kesadaran nasionalnya<sup>5</sup>. Sehubungan dengan situasi golongan tua ini sekelompok pemuda, mengeluarkan sebuah peringatan dalam bentuk surat yang ditujukan kepada Ketua Komite Nasional Daerah Aceh, supaya diteruskan kepada angkatan tua<sup>6</sup>. Inti dari surat tersebut yaitu, golongan pemuda mengharapkan petunjuk - petunjuk dan contoh - contoh yang baik dari generasi tua. Dan mereka tidak mau lagi mendengar adanya perpecahan dan perselisihan dalam masyarakat Aceh<sup>7</sup>. Sementara itu para Ulama yang tergabung dalam organisasi PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh) juga belum menampakkan keaktifannya ikut berpartisipasi dalam perjuangan kemerdekaan terutama pada masa - masa awal revolusi.<sup>8</sup> Tetapi ada juga para pemuda yang bergabung dalam PUSA yang memasuki berbagai organisasi kelasykaran yang ada pada masa itu. Dan ada pula empat tokoh Ulama yang terkenal, yang mengatasnamakan Ulama seluruh Aceh mengeluarkan sebuah pernyataan bersama yang berisikan ajakan perang Sabil kepada seluruh rakyat Aceh dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.<sup>9</sup> Memang pada

<sup>4</sup> Komite Musyawarah Angkatan 45 Daerah Istimewa Aceh, *Modal Revolusi 45*, (Kutaraja : Dokumentasi dan Penerangan Angkatan 45 Daerah Istimewa Aceh, 1960) hal. 71.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal. 56.

<sup>6</sup> Surat ini ditandatangani oleh Syamaun Gaharu dan A. Hasjmy, masing-masing sebagai Ketua Markas Daerah Angkatan Pemuda dan Pemuda Republik Indonesia. *Ibid.* hal. 57.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Abdullah Azief, *Kongres Besar PUSA dan P. Pusa Tindakan Sedjarah Pergerakan di Atjeh*, (Kutaradja: Panitia Raya Kongres Besar Pusa dan P. Pusa, 1950), hal. 30.

<sup>9</sup> Lihat A. Hasjmy, T. Alhasyah Talsya, *Hari - hari Pertama Revolusi 45 di Daerah Modal*, (Banda Aceh : Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan masyarakat Sejarawan Indonesia Daerah Istimewa Aceh 1976) hal. 33. Dan maklumat keempat Ulama ini, lihat lampiran No. ....

setiap perjuangan menentang penjajahan seperti ini, semangat agama juga ikut berperanan mengikat rakyat seluruhnya. Daerah-daerah yang kuat agama seperti Aceh. Banten dan Sulawesi Selatan adalah sukar dimasuki oleh Belanda (baca penjajah).<sup>10</sup>

Karena tekanan - tekanan emosional para pemuda dan pelajar siap untuk mengabungkan diri dalam organisasi - organisasi kepeemudaan dan kelayakaran. Para pelajar banyak yang meninggalkan bangku sekolah dan mereka bergabung dalam kesatuan - kesatuan bersenjata. Seperti telah disinggung dalam Bab III di atas, bahwa sejak diumumkannya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, organisasi pertahanan bersama rakyat Aceh yang berstatus sebagai pertahanan lokal ialah API (Angkatan Pemuda Indonesia atau Angkatan Perang Indonesia), yang lahir pada awal Oktober 1945, sebagai hasil pertemuan dan pembicaraan antara Residen Republik Indonesia yang pertama untuk daerah Aceh, Teuku Nyak Arief dengan beberapa bekas opsir Gyungun (tentara sukarela pada masa pendudukan Jepang), diantaranya Syamaun Gaharu, Usman Nyak Gade, Teuku Hamid Azwar, Nyak Neh Rika, Said Usman dan Said Abdullah. Dan mereka ini juga yang sebagian duduk sebagai pengurus Markas Daerah dan Wakil - Wakil Markas Daerah API yang pertama kali untuk daerah Aceh.<sup>11</sup> Dalam perkembangannya organisasi API ini diubah namanya menjadi TKR (Tentara Keamanan Rakyat) agar sesuai dengan maklumat yang telah dikeluarkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 5 Oktober 1945, yang berbunyi : "Untuk memperkuat Perasaan Keamanan Umum Maka Diadakan Satu Tentara Keamanan Rakyat"<sup>12</sup>.

Organisasi API cepat berkembang dan menjalar keseluruh *Mukim - mukim* dan *gampong - gampong* di Aceh, melalui suatu lembaga yang disebut BAPA (Badan Penyokong API), yang berfungsi mengumpulkan dana dan memperluas keanggotaan API di

10. Lihat Abdullah Husein, *Peristiwa*, (Kuala Lumpur : Pustaka Antara, 1965), hal. 207.

11 Syamaun Gaharu, "Beberapa Catatan Tentang Perjuangan Menegakkan Kemerdekaan di Aceh sejak Proklamasi Sampai dengan pengakuan Kemerdekaan Republik Indonesia", *Prasaran pada seminar Perjuangan Aceh Sejak Tahun 1873 s/d Kemerdekaan Indonesia*, (Medan Panitia Peringatan Pahlawan Nasional dari Aceh, 22 s/d 25 Maret 1976), hal. 17.

12. "Perjuangan Angkatan Bersenjata Kita", dalam harian *Kompas*, (Jakarta: 14 Agustus 1970), hal. II.

Aceh.<sup>13</sup> Organisasi - organisasi lain yang lahir hampir bersamaan dengan waktu lahirnya API ialah IPI (Ikatan Pemuda Indonesia) BPI (Barisan Pemuda Indonesia), PRI (Pemuda Rakyat Indonesia), PESINDO (Pemuda Sosialis Indonesia), *Lasykar Mujahidin*, *Pasukan Berani Mati* dan kemudian berbagai organisasi kelasykaran lokal lainnya, yang semuanya merupakan wadah kegiatan pemuda dan pelajar pada waktu itu. Dalam perkembangannya agar berbagai ragam organisasi kepemudaan dan kelasykaran terkoordinir dalam suatu wadah persatuan, maka dianggap perlu untuk "membubarkan" lasykar - lasykar ini. Dan berdasarkan ketetapan Presiden Republik Indonesia Soekarno tanggal 5 Mei 1947, yang menginstruksikan Persatuan Tentera Republik Indonesia dengan lasykar - lasykar Rakyat, menjadi tentera resmi dengan nama TNI (Tentara Nasional Indonesia)<sup>14</sup>.

Berkat koordinasi yang berjalan lancar sempurna dan dari berbagai organisasi kelasykaran dan kepemudaan, maka percobaan-percobaan agresi Militer Belanda ke Daerah Aceh dapat digagalkan. Dua kali agresi Militer Belanda yang dilancarkan terhadap Republik yang akibatnya sangat dirasakan di daerah - daerah lain di Indonesia di Aceh bebas dari agresi ini. Dan karena daerah Aceh sebagai satu-satunya daerah yang tidak berhasil dimasuki lagi oleh Belanda (kecuali Pulau Weh, Sabang), sejak kekalahan mereka dengan Jepang pada tahun 1942, maka daerah Aceh mendapat julukan kehormatan sebagai "Daerah Modal Perjuangan Republik Indonesia."<sup>15</sup> Sebutan ini pertama kali diucapkan oleh Presiden Republik Indonesia yang pertama Soekarno, ketika menyampaikan amanatnya pada tanggal 16 Juni 1948, kepada Rakyat Aceh dalam suatu rapat raksasa yang diadakan dilapangan "explanade" (sekarang lapangan Blang Padang) Kutaraja (sekarang Banda Aceh). Dan dalam wejangan yang diberikannya kepada anggota - anggota Badan Pemerintahan Daerah Kere-

---

<sup>13</sup> Alfian (ed), *Segi-segi Sosial Budaya Masyarakat Aceh*, ( Jakarta : LP3ES, 1977), hal. 59. Lihat juga Syamaun Gaharu, *op.cit.*, hal. 19.

<sup>14</sup> S.M. Amin, *Kenang - kenangan dari Masa Lampau*, (Jakarta, Pradya Paramita, 1978), hal. 96.

<sup>15</sup> T. Alibasyah Talsya, *Sejarah dan Dokumen-dokumen Pemberontakan di Atjeh*, (Djakarta : Kesuma, tanpa angka tahun, hal. 27.

sidenan Aceh di Pendopo Keresidenan Aceh pada waktu itu<sup>16</sup>.

## B. Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Sikap Masyarakat Aceh.

Ideologi revolusi yang mencakup idee persamaan nasib dan hidup, telah membangkitkan harapan - harapan baru. Untuk lebih mempererat kesatuan kebulatan tekad, diciptakan pula simbol - simbol dan semboyan - semboyan umum yang berhubungan semangat bangsa. Hampir pada setiap lengan baju, ikat kepala dan topi - topi yang dikenakan pejuang - pejuang kemerdekaan pada waktu itu dihiasi dengan tempelan - tempelan merah putih yang merupakan simbol perjuangan mereka. Hal ini juga tercermin dalam berbagai selogan dan semboyan - semboyan, baik yang dikumandangkan lewat udara, maupun yang dicoretkan pada dinding - dinding tembok dan dilukiskan di atas kain - kain bagor selama masa itu. Pekik "Merdeka" dengan tangan yang dikepalkan ke atas adalah salam resmi pada masa revolusi kemerdekaan (revolusi fisik). Dan dimana - mana diseluruh Indonesia diteriakkan semboyan - semboyan yang senada, yang membuktikan adanya integrasi nasional pada masa revolusi kemerdekaan itu.

Demikian pula di Aceh, semboyan - semboyan seperti "Merdeka" 100%", "Sekali Merdeka Tetap Merdeka", "Enyahlah Penjajah", "Hidup Merdeka atau Syahid", dan beberapa yang ditulis dalam bahasa Inggris yang mungkin ditujukan kepada dunia luar, seperti "Freedom or Death", "Once Free Forever Free", menghiasi dinding - dinding tembok Toko, dinding - dinding meunasah, balai - balai pemuda, gerbong - gerbong kereta api, kendaraan - kendaraan umum dan pada tempat - tempat lainnya.<sup>17</sup> Bagi mereka yang tidak mau menjawab dengan Merdeka atau "Tetap", dicap sebagai antek "*Nica*" (*Nederland Indies Civil Administration*), suatu badan yang dibentuk oleh Belanda terutama di kota - kota yang telah didu-

<sup>16</sup> "Presiden di Tengah Rakyat Atjeh", dalam harian *Kedaulatan Rakjat*, (Yogyakarta : Kamis 17 Juni 1978).

<sup>17</sup> Lihat Usman Nyak Gade, "Sekitar Pembentukan Angkatan Pemuda Indonesia (API di Aceh)", *Paper* yang disampaikan pada acara diskusi Masyarakat Sejarawan Indonesia Daerah Istimewa Aceh, (Banda Aceh : Masyarakat Sejarawan Indonesia Daerah Istimewa Aceh, 1976), hal 7.

duki oleh sekutu, yang merupakan pusat Administrasi kolonialnya untuk melicinkan jalan ke arah pemulihan kedaulatan Belanda kembali atas Indonesia. Merdeka dan NICA adalah dua hal yang sangat bertentangan ketika itu, bagi orang-orang republik NICA adalah sesuatu yang harus dihancurkan, sedang bagi Pemerintah Belanda dan kaki tangannya "Merdeka" adalah sesuatu yang harus mereka hindarkan.

Unjuk perasaan yang diperlihatkan rakyat di daerah Aceh sebagai tanda kecintaan mereka terhadap kemerdekaan, dapat dilihat antara lain dalam sambutan yang mereka berikan ketika kunjungan Presiden Soekarno ke Aceh pada bulan Juni 1948<sup>18</sup>. Kunjungan ini dianggap rakyat Aceh sebagai kunjungan bersejarah. Cinta rakyat kepada Presidennya, kesediaan mengorbankan segala sesuatu untuk kepentingan Negara, semangat bertempur, keinginan hendak merdeka, segalanya ini dapat dilihat dalam kesempurnaan yang telah mereka berikan dalam menyambut kedatangan Kepala Negara mereka yang pertama ke-Aceh<sup>19</sup>.

Maklumat No.2/1948/G.S.O., yang dikeluarkan oleh Gubernur Sumatera Utara Mr. S.M. Amin di Kutaraja pada tanggal 6 September 1948, sehubungan dengan penyelesaian masalah "Cumbok Affaire" di Aceh,<sup>20</sup> mengandung nada ke arah persatuan bangsa. Kebijakan yang diambil karena ekses-ekses yang terjadi sebagai akibat peristiwa tersebut, lebih diutamakan kepentingan-kepentingan lainnya. Isi dari pada maklumat tersebut adalah sebagai berikut: Terhadap mereka yang, baik dengan langsung maupun dengan tidak langsung, telah campur dengan pembunuhan-pembunuhan yang bersangkutan dengan Peristiwa Cumbok, tidak akan dilakukan tuntutan karena kepentingan menghendaki diletakkannya diluar tuntutan"<sup>21</sup>.

<sup>18</sup> Kunjungan Presiden Republik Indonesia yang pertama kali ke Aceh, tepatnya berlangsung pada tanggal 15 Juni 1948. Rombongan Presiden ini terdiri dari 17 orang, diantaranya terdapat Komisaris Negara Urusan Umum di Sumatera, Teuku Hasma, Jenderal Major Suhardjo dan Residen Tapanuli Dr. Tobing. Ratusan ribu rakyat Aceh, diantaranya 6.000 murid sekolah ikut serta mengeluhkan rombongan Kepala Negara ini, lihat Harlan Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta, Loc. cit.

<sup>19</sup> Insider, *Atjeh Sepintas Lalu*, (Djakarta: Fa. Archapada, 1950), hal 42.

<sup>20</sup> Uraian mengenai "Peristiwa Cumbok", lihat pada BAB III di atas.

<sup>21</sup> Teuku Alibasyah Talsya, *op. cit.*, hal. 26.

Kebijaksanaan lainnya yang diambil oleh pemerintah di Aceh yang nadanya juga sama dengan yang di atas, yaitu lebih mengutamakan kepentingan keselamatan kelangsungan Negara Republik Indonesia dari pada kepentingan - kepentingan lainnya, dapat dilihat pula dari beberapa kasus seperti di bawah ini. Dalam bulan Agustus 1948, di Kutaraja timbul suatu gerakan yang dikenal dengan nama "Gerakan Said Ali Cs." Gerakan ini dipimpin oleh seorang penduduk Kutaraja yang bernama Said Ali Al Sagaaff dan dibantu oleh beberapa temannya (mungkin itulah sebabnya dinamakan gerakan Said Ali Cs). yaitu, Waki Harun, Haji Mukhsin, Teuku S'amaun Latif, Tgk. Muhammad Asyik, Muhammad Meuraxa dan Nyak Sabi. Tujuan gerakan ini adalah menuntut pergantian beberapa personalia pemerintahan di Aceh, dengan jalan memutasikan beberapa pejabat pemerintahan yang memegang posisi penting jabatan pemerintahan padamasa itu, yang mereka anggap telah melakukan penyelewengan - penyelewengan dan melalaikan kepentingan nasib rakyat. Sehubungan dengan gerakan ini, pemerintah telah mengeluarkan dua buah maklumat, yang pertama pada tanggal 20 Agustus 1948 oleh Gubernur Sumatera Utara Mr. S.M. Amin, dan yang ke dua pada tanggal 4 Nopember 1948, oleh Gubernur Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo, Teungku Muhammad Daud Beureueh. Maklumat yang terakhir ini terkenal dengan nama Maklumat No. G.M. 14 - M. Isi kedua maklumat tersebut secara garis besar adalah, Pemerintah menganggap gerakan menyimpang dari Undang - undang yang berlaku dan karenanya dapat menimbulkan kekeruhan dan kekacauan yang sangat merugikan keselamatan Negara dan rakyat pada umumnya<sup>22</sup> Pada mulanya terhadap pelaku - pelaku gerakan tersebut ditahan, tetapi dalam perkembangannya, mengingat demi kepentingan Negara, maka pada tanggal 27 Desember 1949, atas nama Wakil Presiden Republik Indonesia, Wakil Perdana Menteri Syafruddin Prawiranegara, kepada mereka diberikan abolisi (Pembebasan dari tuntutan hukum) dengan syarat bahwa mereka buat sementara waktu harus meninggalkan daerah Aceh dan dengan ketentuan

---

<sup>22</sup> *I b i d.*, hal. 45 - 48.

bahwa mereka akan ditahan dan dituntut kembali, bila janji itu mereka langgar<sup>23</sup>.

Pada waktu permulaan pelaksanaan Undang - undang pembagian Sumatera dalam tiga Propinsi, yang dimulai dengan pembentukan suatu Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara yang dilaksanakan di Tapak Tuan ( Aceh Selatan) pada tanggal 13 sampai 16 Desember 1948, rakyat Aceh umumnya dan rakyat Aceh Selatan khususnya, telah memberikan bantuan dan sokongan kepada panitia rapat pembentukan dewan itu.. Hal ini juga sebagai bukti adanya kecintaan rakyat Aceh dan keinginan mereka untuk melangkahakan kakinya ke arah persatuan dan kesatuan Negara Republik Indonesia<sup>24</sup>.

Agresi - agresi militer Belanda (yang pertama tanggal 21 Juli 1947, dan yang ke dua pada tanggal 19 Desember 1948), baik atas Jawa maupun di beberapa tempat di Sumatera dengan tujuan untuk melenyapkan Negara Republik Indonesia, telah meningkatkan kesiapsiagaan rakyat Aceh kearah pertahanan Negara. Dengan kebulatan tekad persatuan dan tujuan untuk mempertahankan kemerdekaannya telah menghapuskan perselisihan - perselisihan paham diantara golongan - golongan dalam lapisan masyarakat Aceh, seperti yang telah diutarakan di atas.<sup>25</sup>

Akibat kegawatan agresi Militer Belanda yang kedua di beberapa tempat di Jawa dan Sumatera, maka Panglima TNI (Tentera Nasional Indonesia) Komandemen Sumatera Kolonel Hidayat (Angkatan Darat), Kolonel Subiakto ( Angkatan Laut) dan Overste Suyono Karsono ( Angkatan Udara), telah memindahkan markasmarkasnya ke Aceh<sup>26</sup>. Di Aceh bersama - sama dengan rakyat, TNI telah melakukan tindakan - tindakan yang berhubungan dengan peningkatan pertahanan. Dan hasilnya seperti telah disinggung di atas, selain hanya beberapa gangguan yang dialami oleh pertaha-

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Insider, op.cit.*, hal. 45.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hal. 41.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hal. 47.

nan udara dari beberapa serangan musuh, maka daerah Aceh tidak berhasil dimasuki lagi oleh Belanda.

Keeratan hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah atau rakyat Aceh, yang juga mengandung unsur - unsur persatuan dapat dilihat pula dari beberapa kunjungan tokoh - tokoh Pusat Pemerintahan dari Jawa ke daerah Aceh.

Rombongan tamu dari pusat pemerintahan yang pertama kali mengunjungi Aceh ialah rombongan Mr. Hermani dan Mr. Abdul Majid Djojoadingrat. Mereka merupakan wakil - wakil Pemerintah Pusat yang untuk pertama kali mengadakan kunjungan kerja ke Aceh. Selama berada di Aceh mereka telah memberikan wejangan - wejangan yang sangat berharga bagi rakyat Aceh, terutama mengenai makna dan arti kemerdekaan Republik Indonesia. Pada waktu yang hampir bersamaan datang lagi rombongan DR. A.K. Gani yang pada waktu itu sebagai Koordinator Keamanan Pusat. Selama di Aceh DR. A.K. Gani juga telah memberikan petunjuk - petunjuk mengenai yang menyangkut dengan masalah-masalah keamanan di Indonesia umumnya dan daerah Aceh khususnya.<sup>27</sup> Dan seperti telah disinggung di atas, pada tanggal 15 Juni 1948 daerah Aceh juga mendapat kunjungan Presiden Republik Indonesia yang pertama, Soekarno. Dan dalam suatu rapat raksasa di lapangan Blang Padang Kutaraja (Banda Aceh) Presiden Soekarno selain telah menyebut daerah Aceh sebagai "daerah Modal Perjuangan Bangsa Indonesia", antara lain juga mengatakan sebagai berikut :

" . . . . Dari ribuan kilometer kami datang disini spesial untuk bertemu dengan rakyat Atjeh yang terkenal sebagai satu rakyat yang selalu berdjuaug untuk Kemerdekaan, yang selalu menjadi kampiun dan peloporperdjuaugan Kemerdekaan rakyat Indonesia. Segenap rakyat Indonesia di tanah Djawa, Sumatera dan lain-lain kepulauan, Sunda Ketjil, Kalimantan, Sulawesi mengarahkan matanja kepada saudara - saudara".<sup>28</sup>

Lebih lanjut dalam pidatonya di depan ribuan rakyat Aceh terse-

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hal. 39.

<sup>28</sup> Komite Musyawarah Angkatan 45 Daerah Istimewa Aceh, *op.cit.*, hal. 17.

but, Presiden Soekarno juga menegaskan : " Rakyat Aceh adalah contoh perjuangan kemerdekaan Seluruh Rakyat Indonesia . Seluruh rakyat Indonesia mengetahui hal ini, seluruh rakyat Indonesia melihat ke Aceh, mencari kekuatan batin dari Aceh, dan Aceh tetap menjadi obor perjuangan rakyat Indonesia <sup>29</sup> .

Pada tanggal 5 Juni 1949, Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama , Mohammad Hatta beserta rombongannya, yang antara lain terdiri dari Mr. A.G. Pringgodigdo sebagai sekretaris Negara, Mr. Ali Sastroamidjojo sebagai Menteri Pendidikan dan Pengajaran dan Kebudayaan, Dr Sukiman sebagai Menteri Dalam Negeri Mohammad Natsir sebagai Menteri Penerangan, Z. Baharuddin sebagai Anggota Badan Pengurus Komite Nasional Pusat, A. R Baswedan sebagai pegawai Tinggi Negara dan Syarif Kasim Sultan Siak juga mengadakan kunjungan kerja ke Aceh, dalam rangka peningkatan pertahanan dan pembangunan Negara. Dalam menyambut rombongan wakil Presiden dan pembesar -pembesar negara lainnya, rakyat Aceh telah mengadakan suatu pawai atau arak - arakan yang megah dan berdefile dihadapan rombongan wakil Presiden yang berdiri di tangga Pendopo Kegubernuran Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo pada waktu itu. Dan pada kesempatan itu, Wakil Presiden juga telah memberikan amanatnya dalam suatu rapat Samudera yang dikunjungi puluhan ribu rakyat. Sebagian dari Wakil Presiden tersebut adalah sebagai berikut :

Sering kita mendengar sembojan, bersatu kita teguh berpecah kita djatuh. Tjamkanlah sembojan ini dalam hati saudara-saudara. Baiklah untuk sementara kita lupakan perselisihan antara kita sesama kita yang perselisihan itu kemudian hari hari mungkin dapat dibereskan setjara damai, setjara mudah sekali, akan tetapi pokok tudjuan kita bersama adalah, mencapai rakyat jang makmur, rakjat jang merdeka, rakjat jang sedjahtera. Tetapi dalam masih memperdjuangkan tjita-tjita kita, padulah persatuan, djagalah persatuan. Kalau tidak dengan persatuan kita akan hantjur". <sup>30</sup>

Pada tanggal 23 Agustus 1949, Wakil Perdana Menteri Mr.Syaf-

<sup>29</sup> *Ibid.* hal. 101.

<sup>30</sup> S.M. Amin. *op. cit.*, hal. 78.

ruddin Prawiranegara bersama dengan Menteri Agama Kyai Haji Masykur juga mengadakan kunjungan kerja ke Aceh. Selanjutnya pada tanggal 23 September 1949, datang pula Menteri Pertahanan merangkap Acting Perdana Menteri Sri Sultan Hamangkubuno beserta rombongan yang terdiri dari Ketua Komite Nasional Indonesia Pusat, Mr. Assaat dan Menteri Penerangan Mr. Syamsuddin. Dan pada tanggal 18 Oktober 1949, berdatangan pula Menteri Keuangan, Mr. Lukman Hakim, Menteri Kemakmuran I. Kasimo dan Menteri Sosial & perburuhan Kusna.

Sebaliknya juga terdapat tokoh-tokoh masyarakat Aceh yang mengadakan kunjungan ke Pusat Pemerintahan di Jawa, dalam rangka melaksanakan tugas - tugas Negara. Misalnya pada awal tahun 1947, beberapa tokoh yang mewakili masyarakat Aceh yang juga sebagai anggota - anggota Komite Nasional Pusat yang telah dipilih oleh partai - partai yaitu, Mr. S.M. Amin sebagai wakil Ketua Badan Eksekutif Komite Nasional Aceh, Sutikno Padmosumarto, sebagai Wakil Kepala Kehakiman Daerah Aceh dan Amelz sebagai pemimpin Harian *Semangat Merdeka* di Kutaraja pada waktu itu, mengadakan kunjungan kerja ke Jawa untuk menghadiri rapat pleno Komite Nasional Pusat, yang membicarakan dan mengambil ketetapan pendapat tentang rencana Persetujuan Linggarjati.<sup>31</sup>

Kesediaan Wakil Presiden Mohammad Hatta mengirimkan amanatnya pada tanggal 19 Maret 1948 dari Yogyakarta, untuk dibacakan pada kongres Pembangunan PESINDO (Pemuda Sosialis Indonesia) Aceh, yang berlangsung pada tanggal 20 Maret 1948, juga menunjukkan tanda adanya keharmonisan hubungan antara Pemerintah Pusat (yang pada waktu itu berkedudukan di Yogyakarta) dengan daerah Aceh. Sebagian isi amanat Wakil Presiden tersebut adalah sebagai berikut :

"Besok adik-adikku mengadakan Kongres didasarkan kepada pembangunan Negara. Kami doakan mudah-mudahan kongres berhasil dengan peninjauan yang tegas bahwa pemuda berjuang untuk kemerdekaan Nusa dan Bangsa dan pula menjadi pelopor dalam pembangunan Negara dan masyarakat agar supaya bangsa Indonesia

---

<sup>31</sup> Insider, op. cit., hal. 40.

dimasa mendatang menjadi bangsa makmur, makanan dalam segala lapisan. Kita berjuang untuk mencapai kemerdekaan, bukan semata - mata untuk merdeka saja, melainkan supaya kemerdekaan yang kita capai itu memberi kemakmuran rohani dan jasmani bagi rakyat jelata seluruhnya.

Berjuanglah terus dengan darah muda, yang sudi berkorban dan berbakti kepada kepentingan umum dengan menyingkirkan kepentingan sendiri.<sup>32</sup>

Jadi kesemua perhatian timbal balik antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta dari kunjungan Wakil - wakil Pemerintah Pusat ke Aceh seperti telah diutarakan di atas, menandakan adanya suatu jalinan kerjasama antara Pemerintah Pusat dan rakyat di daerah Aceh. Dan kerjasama ini, tentu saja telah ikut menentukan keberhasilan - keberhasilan Perjuangan Kemerdekaan Bangsa Indonesia pada umumnya dan di daerah Aceh khususnya.

Seperti telah disinggung di atas, bahwa pada tanggal 29 September 1945, Teuku Nyak Arief diangkat sebagai Residen pertama Republik Indonesia untuk daerah Aceh. Hal ini berarti bahwa mulai sejak itu sebagai satu-satunya pemerintahan yang ada di daerah Aceh adalah pemerintah Republik Indonesia. Masa antara tahun 1945 sampai tahun 1950 adalah masa penuh transisi. Berbagai kegiatan telah ditempuh oleh bangsa Indonesia umumnya dan rakyat Aceh khususnya, dalam menegakkan, mempertahankan dan, mengamankan Negara Republik Indonesia. Berbagai macam ide ke arah persatuan bangsa telah terlihat melalui kegiatan - kegiatan seperti telah disebutkan di atas. Dari beberapa pandangan yang telah dikemukakan oleh tokoh - tokoh masyarakat Aceh pada masa itu, seperti dari uraian berikut ini, juga masih akan ditemui ide - ide persatuan tersebut.

Sebagian isi pidato Gubernur Sumatera Utara Mr. S.M Amin dalam sidang pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara yang berlangsung di Tapak Tuan ( Aceh Selatan) pada tanggal 13 Desember 1948, jelas mengandung ide - ide tersebut. Mr. S.M. Amin menegaskan bahwa adanya pengkotakan - pengkotakan

<sup>32</sup> "Amanat Bung Hatta Pada Kongres Pembangunan Pesindo Atjeh, dalam harian *Kedaulatan Rakyat*, ( Yogyakarta) Sabtu 20 Maret 1948.).

pada pemerintahan - pemerintahan lokal seperti kesatuan Keresidenan, yang didasarkan atas pertimbangan - pertimbangan kelompok etnis atau kesatuan kesukuan yang sempit, seperti Keresidenan Aceh didasarkan atas kesatuan suku Aceh, Keresidenan Tapanuli atas kesatuan suku Batak, Keresidenan Sumatera Timur atas kesatuan suku Melayu, adalah tidak seharusnya dipergunakan lagi di Republik ini. Oleh karena itu, pembentukan suatu Propinsi, janganlah didasarkan atas dasar Kelompok etnis yang sempit seperti tersebut di atas, tetapi atas baru, seperti atas dasar kesatuan ekonomi, persatuan politik dan sebagainya.<sup>33</sup> Pada bagian lain dari pidato tokoh masyarakat Aceh tersebut mengatakan sebagai berikut:

"Kita mengetahui, bahwa oleh Wakil Presiden kita dengan pihak Belanda, sekarang sedang dilakukan pembicaraan sebagai persiapan untuk perundingan yang akan dilaksanakan kembali. Nampaknya belum dapat juga diatasi segala kesulitan yang menjadi halangan dan rintangan untuk memperoleh persetujuan antara republik dengan Belanda. Mengingat keadaan yang demikian rupa maka adalah pada tempatnya, bilamana seluruh rakyat Indonesia tetap memberi sokongan yang sebaik baiknya kepada pemerintah pusat; sokongan bathin maupun sokongan lahir. Salahsatu dari bantuan yang berharga adalah, discipline nasional, yang harus kita tunjukkan. Seterusnya keinsafan yang sungguh sungguh pada setiap Negara.<sup>34</sup>

Dari kutipan kalimat di atas, juga terkandung ide - ide ke arah persatuan bangsa Indonesia.

Ketika tercapai suatu persetujuan antara RIS (Republik Indonesia Serikat) dengan RI (Republik Indonesia), mengenai penetapan 10 buah Propinsi di Seluruh Indonesia (yaitu persetujuan tanggal 19 Mei No. 21, 1950) di mana Aceh ditetapkan sebagai bagian dari pada Propinsi Sumatera Utara, rakyat Aceh melalui wakil - wakilnya ( Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh) pada tanggal 12 Agustus 1950, telah mengeluarkan suatu mosi sehu-

---

<sup>33</sup> Lihat Insider, *op.cit.*, hal. 105 - 106.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hal. 109.

bugan dengan penetapan itu. Dalam mosi itu dikemukakan keinginan - keinginan dan alasan - alasan mengapa mengapa rakyat Aceh berkeberatan dan mengapa mereka tetap bersikeras mempertahankan Aceh sebagai Propinsi Sendiri di bawah Pemerintahan Pusat. Hampir bersamaan dengan Mosi tersebut, telah dikeluarkan pula suatu pernyataan mengenai alasan - alasan dan tentang manfaatnya Aceh berpropinsi sendiri, sebagai daerah otonomi yang langsung di bawah Pemerintah Pusat. Sebagai kesimpulan dari pernyataan tersebut, ditekankan bahwa persatuan yang berabad-abad yang telah berlangsung itu, jangan dipisah- pisah dengan berpusat ke "kiblat" yang baru. Dengan segala potensi yang ada Aceh meminta mengurus dirinya sendiri di bawah pengawasan Pemerintah Pusat. Karena Aceh berkeinginan mempersiapkan dirinya dahulu supaya lebih mudah untuk ditempatkan di dalam kerangka Indonesia. Dalam kesimpulan tersebut juga ditekankan bahwa Aceh bukan hendak menyisahkan atau memisahkan diri dari saudara-saudaranya yang lain di Indonesia, tetapi Aceh tetap setia pada Pemerintah Pusat dan kepada saudara - saudaranya yang lain di seantoro Tanah Air<sup>35</sup>. Demikian pokok - pokok kesimpulan dari pernyataan rakyat Aceh tersebut, yang tentunya juga tidak lepas dari unsur-unsur atau idee-idee kearah persatuan bangsa Indonesia.

Sehubungan dengan persoalan di atas, sebelum itu atau pada tanggal 13 Mei 1950, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia beserta rombongan berkunjung ke Aceh dalam rangka menjajaki seberapa jauh Aceh akan tetap berpropinsi sendiri atau akan ditempatkan di bawah Propinsi Sumatera Utara yang akan dibentuk. Dalam suatu pertemuan yang dilangsungkan di tempat kediaman Gubernur Aceh, Teungku Muhammad Daud Beureueh guna membahas masalah tersebut, beberapa tokoh masyarakat Aceh telah memberikan pandangan pandangan mereka. Salah satu tokoh masyarakat Aceh tersebut yang juga sebagai anggota Dewan Pemerintahan Daerah Aceh, yaitu T.M. Amin mengemukakan pandangannya antara lain, "Kami mengharapkan supaya Negara kita menjadi Negara Kesatuan, dalam mana Aceh menjadi daerah Propinsi."<sup>36</sup>

---

35. T. Alibasyah Talsya, *op.*, hal. 34.

36. S.M. Amin. *op.cit.*, hal. 86 - 87.

Pada saat berlangsung pertemuan yang kedua antara rombongan Pemerintah Pusat (yang tiba di Aceh pada tanggal 26 September 1950), dengan pejabat - pejabat pemerintah di Aceh atau wakil-wakil rakyat Aceh, guna mencari penyelesaian persoalan Propinsi Aceh, telah berbicara pula Gubernur Aceh, Teungku Muhammad Daud Beureueh ( yang pada kesempatan itu sebagai pembicara terakhir). Sehubungan dengan persoalan Propinsi Aceh tersebut, Gubernur telah menyangkal dengan keras pendapat yang disinyalir oleh oknum - oknum tertentu, yang mengatakan bahwa, bila tuntutan otonomi daerah Aceh tidak dikabulkan, maka tidak ada jaminan keamanan dan mungkin akan menimbulkan hal - hal yang tidak diinginkan. Lebih lanjut tokoh masyarakat Aceh itu, juga mengatakan bahwa sekalipun tuntutan ekonomi Aceh ditolak oleh Pemerintah Pusat, rakyat Aceh akan tetap berdiri dibelakang Pemerintah Pusat bila masih diperlukan.<sup>37</sup>

Berdasarkan atas beberapa data yang telah diutarakan di atas; kiranya telah cukup membuktikan adanya sikap masyarakat Aceh ke arah cita - cita persatuan bangsa Indonesia seperti yang telah diperlihatkan dalam berbagai tindakan terutama melalui wakil - wakil mereka. Dan tentunya juga tidak dapat disangkal bahwa, unsur - unsur persatuan itu telah membawa keberhasilan - keberhasilan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya.

### **C. Kegiatan Masyarakat Dalam Berbagai Bidang Kehidupan**

Sebagai negara yang baru saja memproklamkan kemerdekaannya, Republik Indonesia pada waktu itu mengalami berbagai krisis dalam segala lapangan kehidupan. Situasi yang demikian ini dialami oleh hampir seluruh daerah di Indonesia. Aceh sebagai daerah yang letaknya cukup jauh dari pusat pemerintahan, juga tidak luput dari situasi krisis tersebut. Stabilitas politik, ekonomi, dan sosial belum terjamin. Sebagai contoh misalnya keadaan kehidupan rakyat yang serba kekurangan, terutama bagi pegawai - pegawai pemerintah yang sering kali tidak pernah menerima gaji secara teratur dan juga karena gaji yang diterimanya tidak mencukupi kebutuhannya.<sup>38</sup> Gaji seorang polisi yang berpangkat Inspektur

<sup>37</sup> Ibid., hal. 90.

<sup>38</sup> Andullah Husien, *op.cit.*, hal 267.

Kl. II, ialah lima ratus lima puluh rupiah uang Jepang. Gaji ini dibayar sebagian dengan uang Jepang dan sebagian lagi dengan *URIPSU* (Uang Republik Indonesia Propinsi Sumatera Utara). Dengan uang Jepang dibayar sejumlah dua ratus enam puluh lima rupiah dan sisanya dibayar dengan *URIPSU* sebanyak 10 rupiah. Satu rupiah *URIPSU* nilainya sama dengan 300 uang Jepang.<sup>39</sup>

Karena gaji tidak mencukupi maka pegawai Negeri di Aceh terutama mereka yang bukan asli dari Aceh (pendatang) sangat mengharapkan ada perbaikan. Suatu pemberian *catu* dan tunjangan tambahan yang dilaksanakan oleh pemerintah pada Desember 1949, tetap tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada mereka. Sedangkan harga bahan keperluan hidup sehari-hari semakin meningkat.<sup>40</sup>

Semula (pada awal revolusi kemerdekaan) alat pembayaran atau uang yang digunakan di Aceh adalah uang Republik Indonesia. Tetapi kemudian karena sulitnya komunikasi antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat di Jawa seperti telah disinggung di atas, maka Propinsi Sumatera Utara terpaksa mengeluarkan uang sendiri. Dan dengan semakin gawatnya keadaan serta juga karena Pusat Pemerintahan Sumatera dengan Keresidenan Aceh, maka Keresidenan Aceh juga terpaksa harus mengeluarkan uang sendiri, yang dikenal dengan nama *URIDA* (Uang Republik Indonesia Daerah Aceh). Sesudah daerah Aceh dimasukkan menjadi bagian dari Propinsi Sumatera Utara yang dibentuk pada akhir tahun 1948, Propinsi Sumatera Utara juga mengeluarkan uang sendiri, dengan alasan karena banyak uang kertas Propinsi Sumatera yang telah dipalsukan. Dan uang Sumatera Utara ini dikenal dengan nama *URIPSU* seperti tersebut di atas. Uang ini khusus dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi Sumatera Utara yang berkedudukan di Kutaraja dan berlakulah untuk seluruh Propinsi Sumatera Utara. Pengeluaran pertama *URIPSU* ini dilakukan pada tanggal 1 Maret 1949.<sup>41</sup> Selain *URIPSU* dan *URIDA* juga terdapat alat pembaya-

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> *Insider, op.cit.*, hal. 75.

<sup>41</sup> Contoh *URIPSU* ini, lihat misalnya Radik Utoyo, Sudirdjo Cs., *Album Perjuangan Kemerdekaan 1945 - 1950*. (Jakarta : C.V. Alda 1976), hal 263.

ran khusus lainnya berupa *Bon Contan* atau cek, yang dikeluarkan oleh markas - markas pertahanan setempat di Aceh. Misalnya Bon Contan yang dikeluarkan oleh Markas Pertahanan Aceh Timur di Langsa pada tanggal 2 Januari 1949, yang ditandatangani oleh Usman Adamy selaku Ketua Markas Pertahanan Aceh dan di persaksikan oleh Bupati Aceh Timur pada waktu itu, Tk. Maimun. Bon Contan ini dianggap sah dan diterima serta dipercaya oleh masyarakat. Dan juga dipergunakan untuk membiayai pasukan - pasukan pejuang Aceh yang berada di Wilayah Aceh Timur, di daerah perbatasan dengan Sumatera Timur, daerah Langkat dan Tanah Karo setelah agresi Militer Belanda yang kedua.<sup>42</sup>

Sistim pembayaran misalnya untuk membayar gaji - gaji pegawai pemerintah, berbeda dengan sistim sekarang. Pada waktu itu setiap Kantor menerima Bon Contan atau cek tersebut dari kantor Keuangan setempat, kemudian dijual kepada saudagar - saudagar atau pedagang - pedagang dengan memberikan komisi untuk mereka atau kepada orang yang memerlukannya.

Misalnya kalau Bon Contan itu bernilai Rp 200.000, maka kepada yang menukarkannya itu dijual dengan harga Rp 180.000 atau Rp. 175.000 saja.<sup>43</sup> Jadi sipembeli menerima keuntungan sekitar 10 sampai 15 %.

Mulanya Uang kertas Sumatera Utara (URIPSU) dapat dipertahankan kursnya, meskipun dicetak dalam jumlah yang banyak. Sebagai contoh dapat dikemukakan, jumlah uang kertas yang dicetak sejak tanggal 2 Mei sampai 8 Mei 1949 ( berarti dalam tujuh hari) sejumlah Rp 156.750.000 URIPSU terdiri atas lembaran Rp. 250 URIPSU sebanyak 405.000 lembar dan lembaran Rp 500 URIPSU sebanyak 111.000 lembar.<sup>44</sup> Yang mengurus percetakan dan pengedaran URIPSU ini, ditugaskan tanggung jawabnya kepada salah seorang karyawan pegawai keuangan yang bernama Abdul Muid. Nilai URIPSU dibandingkan dengan Dollar Singapura pada waktu itu atau waktu yang sama, dapat dipertahankan. Dan terda-

---

<sup>42</sup> Ibid.

<sup>43</sup> Abdullah Husein, *loc. cit.*

<sup>44</sup> S.M. Amin, *op.cit.* hal. 107

pat keseimbangan antara produksi dengan uang yang beredar. Tetapi dalam perkembangannya keseimbangan ini tidak dapat dipertahankan. Untuk mengatasi hal ini pada tanggal 16 Mei 1949, Pemerintah mengeluarkan suatu ketetapan No. 302/G.S.O., RI, yaitu menarik dari peredaran URIPSU sebanyak Rp 500.000.000.<sup>45</sup>

Seperti telah dikatakan di atas, bahwa keadaan kehidupan pada waktu itu serba kekurangan dan agak sukar. Berbagai kesulitan timbul dalam masyarakat berbagai akibat dari berbagai sebab pula, seperti naiknya harga barang kebutuhan sehari - hari setiap saat, berkurangnya import barang - barang keperluan rakyat dan sukarnya mendapatkan makanan pokok seperti beras yang menghilang dari pasaran.<sup>46</sup>

Dan jikapun beras ada dipasaran, tetapi harganya cukup tinggi. Situasi yang demikian itu menjadikan suatu tantangan, tidak saja kepada rakyat tetapi juga kepada Pemerintah Daerah. Dan pemerintah juga menyadari bahwa bila perbaikan tidak cepat diusahakan, mungkin sekali akan menimbulkan efek - efek negatif yang akan mengganggu kestabilan pemerintahan dan keamanan.<sup>47</sup>

Untuk mengatasi kesulitan - kesulitan penghidupan rakyat, pemerintah telah mengambil langkah - langkah tertentu, misalnya dengan mengeluarkan uang (alat pembayaran) sendiri, seperti telah dijelaskan di atas. Pembentukan suatu badan yang diketuai oleh Badan Eksekutif, Teungku Muhammad Nur el Ibrahimy untuk berusaha meningkatkan produksi dari berbagai usaha rakyat dan mengusahakan import barang barang yang diperlukan dari luar negeri, juga sebagai salah satu usaha Pemerintah ke arah perbaikan penghidupan rakyat.<sup>48</sup> Selain usaha Pemerintah Daerah dari pemerintah Pusat juga mencoba mengatasi keadaan dengan mengirimkan wakilnya ke Sumatera Utara. Misalnya pada bulan Agustus 1949 dikirim Mr. Syafruddin Prawiranegara, dan di sana telah mengeluarkan beberapa peraturan,. Antara lain yang dikenal dengan nama peraturan wakil Perdana Menteri yang bertanggal 22 September 1949,

---

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> Abdullah Husein, *op cit.*, hal. 268

<sup>47</sup> *Insider, loc. cit.*

<sup>48</sup> S.M. Amin, *loc. cit.*

No. 2 /1949/WPM, yang berhubungan dengan masalah larangan ekspor barang - barang dari Sumatera Utara. Juga peraturan Wakil Perdana Menteri tanggal 17 Oktober 1949, No. 1/1949/WPM, yang mencabut Ketetapan Komisaris Pemerintahan Pusat Sumatera Utara tanggal 14 Agustus 1948 No. 7/1948 yang mengutip bea ekspor dan perhitungan dollar untuk pembelian hasil bumi . Apa yang dijalankan oleh Wakil Perdana Menteri ini sebenarnya bertentangan dengan kebijaksanaan yang sebelumnya dijalankan oleh Pemerintah Daerah. Karena kebijaksanaan yang dijalankan Wakil Perdana Menteri itu berarti menghentikan pemasukan barang dari Luar Negeri dan mengurangi persediaan barang dan mengurangi pendapatan daerah. Dan memang ternyata kebijaksanaan yang ditempuh Wakil Perdana Menteri itu, tidak membawa hasil seperti yang diharapkan, sebaliknya situasi malahan menjadi bertambah buruk.<sup>49</sup> Tetapi kesemua usaha pemerintah tersebut merupakan suatu bukti adanya perhatian Pemerintah Pusat untuk mengatasi keadaan.

Meskipun situasi pada masa Revolusi Kemerdekaan diliputi suasana ketidak pastian, tetapi berbagai pula kehidupan rakyat dalam berbagai bentuk kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tetap berjalan. Kegiatan - kegiatan dalam bidang Pertanian, perdagangan, pertambangan, pertukangan , perikanan dan sebagainya berjalan sebagai mana lazimnya.

Malah beberapa sektor seperti perdagangan , perkebunan dan pertambangan merupakan sumber pendapatan utama pemerintah daerah dan ikut menunjang perbelanjaan buat kepentingan kelancaran roda pemerintahan dan revolusi pada waktu itu. Beberapa pedagang swasta, yang berkecimpung dalam sektor perdagangan antara lain, Muhammad Saman dari PT. PUSPA Nyak Neh dari Lhok Nga Co., Muhammad Hasan dari PIM (Perdagangan Indonesia Muda) dan Abdul Gani Mutiara, telah memainkan peranan mereka dalam melakukan perdagangan antara Aceh dengan Malaya (sekarang Malaysia) dan Singapura pada waktu itu.<sup>50</sup> Dengan adanya perdagangan itu, hasil produksi Daerah Aceh, seperti karet, kelapa sawit, damar, teh, kopi dan lain - lain sebagainya, baik yang diusa-

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, hal. 108.

<sup>50</sup> *Ibid.* hal. 103.

hakan oleh rakyat maupun oleh pemerintah, dapat diperdagangkan ke dua daerah tersebut. Dalam sektor perkebunan dapat disebutkan bahwa sesudah proklamasi Kemerdekaan Indonesia atau sejak bulan Oktober 1945, perkebunan - perkebunan yang sebelumnya diurus oleh Jepang, mulai diambil alih oleh pemerintah Republik Indonesia. Kemudian untuk melancarkan sektor ini, di Kotaraja didirikan sebuah Kantor Pusat perkebunan daerah Aceh yang dipimpin oleh Raden Elon (Raden Hadri ?). Selain kantor pusat perkebunan ini, yang didirikan pula suatu badan Kemakmuran dengan tugas untuk menjual hasil - hasil perkebunan dan menyediakan sarana - sarana untuk keperluan perkebunan. Kemudian pada tahun 1947, Badan Kemakmuran ini dibubarkan dan diganti dengan kantor Perdagangan juga mempunyai tugas yang sama dengan Badan Kemakmuran. Pada mulanya hasil - hasil perkebunan ini tidak memberi hasil seperti yang diharap, tetapi sejak tahun 1948 hasilnya sudah mulai memuaskan. Dan pada bulan Oktober tahun 1948 . Pemerintah Pusat mengambil alih pengurusan perkebunan yang ada di Aceh dan mengeluarkan Ketetapan sebagai berikut, Kantor Perkebunan Daerah Aceh di Kotaraja dihapuskan, Kebun - kebun bekas milik orang asing dan yang diusahakan oleh pemerintah Daerah Aceh ( Sumatera Utara) menjadi milik pemerintah Pusat dan menjadikan perkebunan Negara (PPN); Kebun - kebun bekas milik orang Jepang dan kebun - kebun milik pemerintah Hindia Belanda dijadikan perusahaan Perkebunan Republik Indonesia.<sup>51</sup>

Sektor pertambangan juga sebagai salah satu sektor penting, yang juga merupakan pendapat bagi daerah Aceh pada awal revolusi Kemerdekaan.<sup>52</sup> Misalnya tambang minyak Pangkalan Berandan merupakan sumber keuangan utama pemerintah daerah Aceh pada masa itu. Tambang minyak ini sebelumnya dikuasai oleh Jepang dan seketika meninggalkan pangkalan Berandan, mereka menghancurkan tambang ini. Tetapi kemudian oleh pekerja - pekerja Indonesia dapat dibetulkan kembali sehingga dapat mengha-

---

<sup>51</sup> *Ibid.* hal. 108 - 109.

<sup>52</sup> Lihat T. Ali Panglima Polem, *Memories van Teuku Muhammed Ali Panglima Polem.* (Kutaraja : 17 Agustus 1972), hal. 30. Terjemahan ke dalam Bahasa Belanda oleh JJI Brendgen, Haarlem Nederland.

silkan minyak lagi. Tambang ini mendapatkan minyak dari Perlak (Aceh Timur) yang disalurkan melalui pipa - pipa ke Pangkalan Berandan. Pada masa itu terdapat sekitar 3.000 pekerja yang bekerja pada tambang minyak itu.<sup>53</sup>

Seperti telah disinggung bahwa kehidupan perekonomian rakyat pada masa itu agak sukar. Hal ini dialami oleh pekerja - pekerja pada tambang minyak itu. Mereka tidak cukup terjamin kesejahteraannya. Karenanya mereka yang tergabung dalam suatu perkumpulan, yaitu "Serikat Buruh Minyak Sumatera Utara" yang berkedudukan di Langsa (Aceh Timur) di bawah Pimpinan R. Senikentara, mengorganisir suatu pemogokan dalam rangka menuntut perbaikan nasib mereka dalam hubungan dengan penerimaan gaji dan catu yang selalu terlambat, dan juga mereka menuntut perubahan struktur organisasi di pertambangan minyak itu.<sup>54</sup>

Ketidak stabilan situasi, tidak saja terjadi dalam lapangan ekonomi, tetapi juga dalam lapangan politik dan keamanan. Perubahan yang terus menerus terjadi dalam lapangan pemerintahan (lihat BAB IV di atas), munculnya berbagai gerakan seperti Revolusi sosial yang timbul sebagai akibat akumulasi bermacam-macam unsur dari latar belakang yang sama, Gerakan Teungku Amir Husiein Al Mujahid, yang merupakan lanjutan dari pada Revolusi Sosial (lihat BAB III di atas) Gerakan Said Ali Al Sagaff, yang menginginkan adanya *Clean government* atau pemerintahan yang bersih, di Aceh, Resolusi Partai Syarikat Islam Indonesia Cabang Aceh, yang tidak puas terhadap sistim pemerintahan daerah Aceh, peristiwa Langsa, yang menuntut perbaikan nasib pekerja-pekerja tambang minyak serta protes terhadap penguasa setempat. Gerakan Badan Keinsafan Rakyat yang menginginkan pemerintahan yang bersih, cukup membuktikan belum terdapat stabilitas politik serta keamanan yang mantap pada masa Revolusi Kemerdekaan Indonesia di Daerah Aceh;

Kegelisahan sehubungan dengan perubahan pemerintahan dapat dikemukakan contoh sebagai berikut, berdasarkan Undang-undang NO 2. tahun 1949, Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia (Mr. Syafruddin Prawiranegara) pada tanggal 18 Desember 19-

---

<sup>53</sup> S.M. Amin, *loc. cit.*

<sup>54</sup> Insider, *op.cit.*, hal. 78.

49, mengeluarkan suatu peraturan mengenai Pembagian Propinsi Sumatera Utara dalam dua Propinsi, yaitu Propinsi Aceh dan Propinsi Tapanuli - Sumatera Timur. Dengan penetapan ini telah menimbulkan pendapat - pendapat dalam masyarakat Aceh, yang menurut Mr. S.M. Amin dapat dibagi dalam tiga kelompok yaitu :

1. Mereka yang sebagian besar yang tidak merasa berkepentingan (interesse) dalam soal dua atau satu Propinsi, yang tidak mengetahui dan tidak mempunyai pengertian sedikit jua - pun tentang masalah ini.
2. Mereka yang sebagian kecil tidak menghendaki pembagian ini.
3. Mereka yang sebagian lebih kecil lagi, yang menginginkan pembagian ini dan berusaha dengan giat menciptakan keinginan ini menjadi suatu kenyataan.<sup>55</sup>

Mereka atau kelompok (termasuk golongan intelektual) yang tidak menghendaki pembagian ini, menganggap penetapan ini tidak pada tempatnya, mengingat situasi Negara Republik Indonesia pada waktu itu masih dalam Komplik dengan Kerajaan Belanda. Karena hasil KMB (Konperensi Meja Bundar) yang akan berakhir pada tanggal 17 Desember 1949, belum diketahui. Dan mungkin saja setiap saat Belanda akan mengulangi lagi agresi militernya terhadap Negara Republik Indonesia.<sup>56</sup> Dengan adanya masalah tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pada akhir tahun 1949 (menjelang Penyerahan Kedaulatan oleh Belanda kepada Republik Indonesia), iklim di Aceh diliputi perasaan gelisah (terutama pada golongan intelektual).

Sungguh tepat apa yang dikatakan oleh Alfian untuk generasi kita sekarang, bahwa salah satu hal yang sangat menonjol sebagai hasil Kemerdekaan ialah perkembangan dalam bidang pendidikan terutama pendidikan umum.<sup>57</sup> Tetapi apa yang dikatakan Alfian itu tentu saja belum berlaku untuk mereka yang hidup atau generasi pada masa awal Revolusi. Karena pada mula Kemerdekaan Republik Indonesia, tidak saja untuk daerah Aceh tetapi untuk seluruh daerah di Indonesia keadaan dalam bidang pendidikan masih

<sup>55</sup> *Ibid.*, hal. 54.

<sup>56</sup> *Ibid.*, hal. 55 - 56.

<sup>57</sup> Lihat Alfian, *Cendekiawan dan Ulama Dalam Masyarakat Aceh*, (Banda Aceh : Pusat Latihan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Aceh Darussalam, 1975), hal. 18.

sangat menyedihkan. Diperkirakan sekitar 93% penduduk Indonesia pada masa yang sama, masih buta huruf.<sup>58</sup> Hal ini tentu berkaitan dengan masa - masa sebelumnya (masa kolonial) dimana pintu sekolah pada masa itu secara sengaja diusahakan agar hanya terbatas kepada kelompok anak - anak dari golongan tertentu saja.

Seperti halnya dalam bidang pemerintahan, perubahan dalam lapangan pendidikan pun di Aceh mulai tampak sesudah pecahnya revolusi sosial pada akhir tahun 1946. Sesudah peristiwa itu pintu sekolah umum juga mulai terbuka lebar bagi semua lapisan masyarakat di Aceh. Tetapi karena pada masa itu merupakan masa revolusi, masa yang penuh dengan berbagai pergolakan, dimana perhatian pemerintah lebih diarahkan kepada hal-hal yang berhubungan dengan revolusi, maka sekolah-sekolah yang ada sebagai warisan dari masa kolonial, banyak yang terbengkalai dan ditutup. Hal ini berkaitan juga karena banyak guru dan murid-muridnya yang meninggalkan bangku sekolah masuk ke dalam barisan -barisan kepe-mudaan dan kelasykaran seperti telah disinggung di atas.

Meskipun demikian ada juga usaha-usaha dari pemerintah untuk mengatasi masalah pendidikan pada masa itu. Misalnya dengan mendirikan beberapa pendidikan guru, seperti KPKPKB (Kursus Pengajar Kursus Pengantar Kewajiban Belajar), dan Kursus PBH (Pemberantasan Buta Huruf).<sup>59</sup>

Seiring dengan Pendidikan Umum, Pendidikan Agama boleh dikatakan lebih menonjol di Aceh pada masa revolusi Kemerdekaan. Sebagai contoh dapat disebutkan, pada tahun 1949 di Kutaraja didirikan sebuah SMIA (Sekolah Menengah Islam Atas), sebagai lanjutan dari SMI (Sekolah Menengah Islam) yang sudah ada sebelumnya dan sudah dinegerikan. Selanjutnya atas inisiatif Teungku Ismail Yacob selaku Kepala Kantor Pendidikan Agama Daerah Aceh, SMIA ini diusahakan pula supaya menjadi negeri. Tetapi dengan adanya usul yang diketengahkan oleh Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia Mr. Syafruddin Prawiranegara yang pada waktu itu berkedudukan di Kutaraja, yaitu supaya SMIA itu

<sup>58</sup> Muhammad Ibrahim Cs. *Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh*, (Banda Aceh : Proyek Penelitian Dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1977/1978), hal. 222.

<sup>59</sup> *Ibid.*, hal. 223.

dijadikan saja SMA (Sekolah Menengah Atas) bagian C yang khusus menerima lulusan SMI, maka pengnegerian SMIA tersebut tidak jadi terlaksana, <sup>60</sup> dan SMIA tersebut tetap berstatus swasta sampai tanggal 31 Desember 1950. <sup>61</sup> Kemudian terhitung sejak tanggal 1 Januari 1951, berdasarkan ketetapan Menteri Agama No. 5/1951. SMIA tersebut diambil alih pengurusannya oleh Pemerintah dan dijadikan SGHA (Sekolah Guru Hakim Agama).

Sesudah Proklamasi Kemerdekaan Mahkamah Agama Daerah Aceh yang ada pada masa Jepang bernama (*Atjeh Syu Syukyo Hooin*, diubah namanya menjadi Dewan Agama Islam Aceh dan sebagai kepalanya ditunjuk Teungku Abdul Rahman Meunasah Meucap sebagai pengganti Teuku Haji Daj'far Sidiq Lamjabat, yang sudah memangku jabatan itu semenjak masa pendudukan Jepang. Yang tersebut terakhir ini berhenti dari jabatan itu karena sudah berusia lanjut. Pada waktu daerah Aceh sebagai daerah Keresidenan yang berada di bawah Propinsi Sumatera Utara, di Kutaraja dibentuk suatu Panitia yang diketuai oleh Muhammad Nur El Ibrahimy, untuk menyusun suatu struktur pejabat Agama Aceh. Dalam struktur ini ditetapkan bahwa bahagian Pendidikan Agama berada di bawah Pejabat Agama Keresidenan Aceh. Sebagai Kepala Pejabat Agama, ditunjuk Teungku Muhmamad Daud Beureueh dan sebagai Kepala Pendidikan Agama, ditunjuk Teungku Muhammad Nur El Ibrahimy. <sup>62</sup> Selanjutnya oleh pejabat - pejabat agama ini, ditetapkan sekolah - sekolah Agama yang sebelumnya berstatus swasta, diserahkan pengurusannya kepada pemerintah. Karenanya pada masa Revolusi Kemerdekaan di Aceh Kepala Bahagian Pendidikan Agama Daerah Aceh, telah menerima penyerahan 180 sekolah Madrasah *Ibtida - iyah diseluruh* Aceh dan nama-namanya dirobah menjadi SRI (Sekolah Rendah Islam). Penyerahan ini dilakukan dengan sepucuk surat penyerahan yang dinamakan "Qanun Penyerahan Sekolah - sekolah Agama kepada Pemerintah Daerah Aceh" <sup>63</sup> Dan semenjak penyerahan itu, maka terdapat lebih kurang 750 orang

<sup>60</sup> Ismuha, *Proses Perkembangan Pendidikan Agama Di Aceh*. (Banda Aceh: Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, 1976), hal. 13.

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> *Ibid.* hal. 12.

<sup>63</sup> *Ibid.*

guru dari 180 buah sekolah Madrasah Ibtida-iyah, yang mendidik guru negeri dan menerima gaji dari Pemerintah.

Meskipun situasi negara masih dalam suasana revolusi, tetapi kegiatan-kegiatan dalam rangka untuk menggalakkan peningkatan kecerdasan rakyat, tetapi tidak dilupakan oleh pemerintah. Sebagai contoh dapat disebutkan sebagai berikut - ketika akan dilangsungkan Konperensi Penerangan Daerah Aceh di Kutaraja pada akhir Desember 1947 sampai awal Januari 1948, oleh Panitia Konperensi tersebut (dalam hal ini Departemen Penerangan) telah menyebarkan poster dan panflet-panflet di seluruh Aceh, yang isinya mengajak para putra - putri serta pencinta seni Indonesia pada umumnya, untuk ikut berlomba melalui karya - karya mereka. Yaitu melalui lukisan-lukisan, poster - poster, pemandangan-pemandangan, gambar-gambar orang besar dan Pahlawan -Pahlawan Tanah Air baik yang dahulu maupun yang sekarang, kerajinan tangan, tekat menekat, sulam menyulam dan berbagai hasil karya baru pada masa kemerdekaan. Juga kepada pengarang-pengarang dan penerbit-penerbit buku, diminta supaya mengirimkan buku-buku dan majalah - majalah yang pernah mereka hasilkan atau terlibat pada masa itu, Bagi mereka yang karyanya dianggap indah dan terbaik menurut penilaian Panitia, akan diberikan hadiah yang lumayan.<sup>64</sup>

Berita mengenai pengakuan Belanda atas kedaulatan Bangsa Indonesia atas tanah airnya (sebagai salah satu hasil Konperensi Meja Bundar yang akan ditanda tangani oleh Ratu Belanda Juliana pada tanggal 27 Desember 1949 di Den Haag Negeri Belanda),<sup>65</sup> menjadikan kegembiraan yang luar biasa pada sebagian besar rakyat Indonesia. Sebagai luapan kegembiraan ini, baik di pusat Pemerintahan maupun di daerah - daerah seluruh Indonesia, diadakan upacara-upacara yang bersifat kenegaraan untuk menyambut berita gembira itu. Juga di Aceh, khususnya di Kutaraja

---

<sup>64</sup> *Poster/Pamflet*, yang dikeluarkan oleh Panitia Konperensi Penerangan Daerah Aceh di Kutaradja dalam rangka Konperensi Penerangan Daerah Aceh di Kutaradja, pada tanggal 27 Desember 1947 sampai 1 Januari 1948. Poster ini sekarang dimiliki oleh Drs. Muhammad Ibrahim Fakultas Keguruan Universitas Syiah Kuala, Darussalam Banda Aceh.

<sup>65</sup> Jan Pluvier, *Indonesia*. (Nijmegen : Sun , 1978), hal. 112.

(sebagai Ibukota Propinsi), pada tanggal yang sama atau 27 Desember 1949 dilangsungkan suatu rapat raksasa yang dihadiri selain oleh tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan-pimpinan pemerintahan juga oleh ribuan rakyat Aceh. Pada kesempatan itu, beberapa tokoh masyarakat Aceh telah memberikan Pidato sambutan mereka, diantaranya termasuk Komisaris Pemerintah Pusat Untuk Sumatera Utara, Mr. S.M. Amin. Sebagian dari Pidato Mr. S.M. Amin ini adalah sebagai berikut, "Pada saat yang bersejarah ini-saat yang membuka pintu gerbang Kedaulatan yang akan memberikan jaminan lebih besar kepada Bangsa Indonesia, tercapainya cita-cita kita bersama, kebahagiaan, kesentosaan, kesejahteraan, kemakmuran, ketenteraman dan keamanan . . . . ."<sup>66</sup> Pada bagian lain dari pidato tersebut antara lain juga dikatakan ". . . . Bangsa Indonesia pada saat ini, berdiri dihadapan pintu gerbang untuk memasuki suatu zaman yang baru kedjajaan dan kebesaran. Akan tetapi, dalam menudju kearah kedjajaan dan kebesaran jang kekal abadi, bangsa Indonesia masih akan melakukan perubahan dalam beberapa hal jang mengenai djiwanja untuk dapat mengatasi segala kesulitan-kesulitan dan rintangan-rintangan jang masih dihadapi"<sup>67</sup>

Dari sebagian sambutan tokoh masyarakat Aceh seperti disebutkan di atas, dapat dikatakan bahwa dengan adanya pengakuan kedaulatan itu mulai timbul harapan-harapan baru bagi rakyat Indonesia umumnya dan rakyat Aceh khususnya terutama dalam menghadapi masa depan mereka. Dan harapan akan masa depan yang lebih cerah, tercermin dalam berbagai kegembiraan rakyat. Sebenarnya Republik Indonesia Serikat yang merupakan suatu bentuk federasi yang pertama kali dalam negara Republik Indonesia, belum memuaskan tokoh-tokoh bangsa Indonesia baik di Pusat maupun di daerah. Meskipun kemerdekaan dan kedaulatan telah tercapai tetapi perjuangan bangsa Indonesia di dalam mencari susunan dan memperbaiki ikatan-ikatan mereka belum selesai.<sup>68</sup> Ben-

<sup>66</sup> *Insider*, op. cit., hal. 116.

<sup>67</sup> *Ibid*, hal. 120.

<sup>68</sup> Lihat Pidato Perdana Menteri Mohammad Natsir, melalui corong RRI (radio Republik Indonesia) Kutaradja (sekarang Banda Aceh) sehubungan dengan masalah Propinsi Aceh, pada tanggal 22 Januari 1951, dalam T. Alibasyah Talsyah. op. cit. hal. 39.

tuk federalisme dianggap belum sesuai dengan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945.

Dari pandangan seorang tokoh masyarakat Aceh lainnya pada waktu itu, yaitu T.M. Amin (selaku Dewan Pemerintah Daerah) seperti di singgung di atas, jelas mengatakan bahwa rakyat Aceh sangat mengharapkan bentuk Negara Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan.<sup>69</sup>

Dalam perkembangannya berkat perjuangan yang tidak kenal lelah dari tokoh-tokoh bangsa dan rakyat Indonesia, maka pada 17 Agustus 1950, terbentuklah susunan Negara yang lebih memuaskan perasaan bangsa Indonesia, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia.

---

**Perpustakaan**  
Direktorat Perlindungan dan  
Pembinaan Peninggalan  
Sejarah dan Purbakala

---

<sup>69</sup> S.M. Amin. *op. cit.*, hal. 86 - 87.

## LAMPIRAN I.

Susunan Pengurus Komite Nasional Indonesia (K.N.I) Daerah Aceh.

Ketua : Teuku Nyak Arief, Wakil Ketua Tuanku Mahmud (kemudian menjadi Ketua).

Anggota : 1. Dokter M. Mahjudin, 2. H. M. Zaunuddin, 3. Kamarusid, 4. Oemar Husni, 5. P. Lemahelu, 6. Tgk. Ismail Yakub, 7. Haji Bustaman, 8. Mr. S. M. Amin, 9. Sutikno Padmo Sumarto, 10. Tgk. Abdussalam, 11. Tahmrin Amin, 12. Ir. M. Thahir, 13. Ibrahim. 14. Muhammad ZZ. 15. Osmansyah. 16. Tk. Ali Lam Lagang. 17. Tgk. Abdul Rachman, 18. Muhammad Hanafiah, 19. R. Insun, 20. Ng. Suratno, 21. Raden Suwadi, 22. Tuanku Johan Ali, 23. M. Mokhtar, 24. Ahmad Abdullah, 25. Yahya, 26. Saleh, 31. Tgk. Syeh Abdul Hamid, 32. Afan Daulay, 33. Nurdin St. M, 34. Tgk. Zainul Abidin, 35. Mohd. Saridin, 36. Ahmad Binuali, 37. Karim M. Durjat, 38. Abd. Rachman, 39. Abd. Gani, 40. T. Ahmadsyah, 41. O. K. Dahlan, 42. Abdul Syam, 43. A. Munir. 44. Hasyim, 45. Nya' Haji, 46. Nyonya Abdul Aziş, 47. Teungku M. Daud. Beureuih, 48. Saleh, 49. Ahmad, 50. Husin Yusuf, 51. Hasyimi, 52. Hasan, 53. T. M. Amin, 54. Nyonya Sutikno Padmo Sumarto, 55. Idham, 56. Sayid Abubakar, 57. T. H. M. Jamin, 58. Amelz. 59. Ali Hasan, 60. M. Husin, 61. Sahim Hasyimi, 62. Raja Wahab, 63. Tgk. Suleiman Daud, 64. Tgk. Abdul Wahab, 65. T. A. Hasan.

## LAMPIRAN II.

Kantor Gubernur Propinsi  
Sumatera

Bah. D o k u m e n t a s i  
Bukittinggi

---

=====

**Daftar Pembahagian Daerah**  
**Atjeh tahun 1948, -**

=====

Keresidenan Atjeh Terdiri dari :

7 kabupaten  
 21 kewedanaan  
 102 negeri

1. Residen : Teuku Moehammad Daoedsjah  
 2. Bupati d/p (Urusan Pemerintahan Umum) : T. M. Amin.  
 3. Patih d/p (Sekretaris ) : Oesman  
 4. Patih d/p : Teungkoe Maimoen Habsjah  
 5. Wedana d/p : Said Aboebakar  
 6. Wedana d/p : Nja' Mansoer  
 7. Wedana d/p (Urusan Bangsa Asing ) : Amiroeddin  
 8. Wedana d/p (Bah. Otonomi) : Teungkoe Mahmoed Haroen  
 9. Wedana d/p : Toeankoe Ibrahim  
 10. Tjamat d/p : Zainal Abidin  
 11. Kepala Tata Usaha : M. Hoesin  
 12. Penjantun Usaha : Potan Harahap  
 13. Penjantun Usaha : T. P a k e h  
 14. Penjantun Usaha : H. Sjamoen  
 15. Penjantun Usaha : T. Alibasjah.

Kabupaten	Kewedanaan	Tjamat2/Wakil Wedana di.	Nama2 Bupati/Wedana /Tjamat
-----------	------------	--------------------------	-----------------------------

- |                               |               |   |
|-------------------------------|---------------|---|
| 1. Aceh Besar<br>(Kota Radja) | 1. Kota Radja | Teungkoe Zaini<br>Bakri<br>Teungkoe Sjech<br>Marhaban |
|-------------------------------|---------------|---|

		1. Kota Radja	Marzoeki
		2. Lho' nga	Teukoe Tjoet Adik
	2. Seulimeum		Ahmad Abdullah
2. Pidie (Sigli)	3. Sabang		Achmad Kamil (Tjamat)
			Teungkoe Abdoel Wahab
	4. Sigli		Teungkoe H. Ibrahim
		3. Sigli	Ibrahim Abdoeh
	5. Kota Bakti		Teukoe Poetih
	6. Meoreudoe		Nja' Abbas
		4. Meureudoe	Teungkoe Abdoel-lah.
3. Atjeh Oetara (Lho' Seumawe)			Teungkoe Soelaiman.
	7. Lho'Seumawe		Daoed
			Teungku Mohammad
			Daoed
		5. Lho'Seumawe	Moehammad Ali
	8. Bireuen		Balwi
	9. Lho'Soekon		Moehammad
			Adam
			Teungku Moehammad.
			Oesman
			Aziz
		6. Lho'Soekon	Teungku Abdoel Rani
4. Atjeh Timoer (Langsa)			
	10. Langsa		Teukoe A. Hassan
			Teukoe Abdoel Wahab Dahlawy
			Teukoe Mohd.
	11. Idi	7. Langsa	Hasby Oesman
			Teukoe Moehammad.
			Thaib

Kabupaten	Kewedanaan	Tjamat2/Wakil Wedana di	Nama2 Bupati/ Wedana/Tjamat
5. Atjeh Tengah (Takengon)	12. Tamiang	8. Idie	Moehamad Karim Arsjad Ishak Amin
		9. Kwala Sim- pang	Teukoe Moeham- mad Moesa Radja Abdoel Wahab Moeda Sedang (patih)
	13. Takengon		Moehammad Sa- leh.
	14. Blangke- djeren		Aman Sari Chabar Ginting.
	15. Koetatjane		Moehammad Hoe- sin Toeankoe Abdoel- lah.
6. Atjeh Barat (Meulaboh)	16. Meulaboh	10. Meulaboh	Teukoe Tjoet Ma mat Radja Adijan. Amin Saleh
	17. Tjalang	11. Tjalang	Radja Machmoed M. Sahim Hasjimy Abdoel Gafoer Achir.
	18. Simeuloer (Sinabang)		Teungkoel Moenier Byth Moehammad Djoe- ned. Teuku Teuboh Moehammad Sjam Moehammad Ilyas B.A.
7. Atjeh Selatan (Tapaktoean)	19. Tapaktoean	12. Blang Pidie	
		13. Tapaktoean	
	20. Kakongan		
	21. Singkel	14. Singkel	

## LAMPIRAN : III.

### Susunan Pengurus API di Aceh.

1. Markas Daerah API Berkedudukan di Kutaradja dengan :
  - Komandan : Syammaun Gaharu.
  - Kepala Staf : T. A. Hamid Azwar
  - Sekretaris : Husin Yusuf
  - Anggota : Nyak Neh Rica, Said Usman, Said Ali, T. M. Daud Samalanga, T. Sarung, Bachtiar Idham, T. Abdullah, Saiman.
2. Wakil Markas Daerah - I (WMD - I) berkedudukan di Kutaradja, di bawah pimpinan Nyak Neh dengan Komandan-komandan pasukannya :
  - Said Ali (Kutaradja), Usman Nyak Gade (Kutaradja), Said Abdullah (Kutaradja), Teuku Manyak (Seulimum).
3. Wakil Markas Daerah - II (WMD - II) berkedudukan di Sigli di bawah pimpinan T. A. Rahman dengan Komandan dan pasukannya :
  - T. Rica ( Sigli ), Abdul Gani (Sigli), T. Abdulrahman (Lammeulu), Hasballah Haji (Meuredu).
4. Wakil Markas Daerah - III (WMD - III) berkedudukan di Bireuen di bawah pimpinan T. M. Daud Samalanga dengan Komandan pasukannya :
  - Teuku Hamzah (Samalanga), Agus Husin (Bireuen), Husin Yusuf (Bireuen).
5. Wakil Markas Daerah - IV (WMD - IV) berkedudukan di Lho' Sukun di bawah pimpinan T. Mohd. Syah/Ibrahim Hatta dengan Komandan pasukannya :
  - Hasbi Wahidi (Panton Labu) Nurdin Hatta, Ajad Musi ( Lho' Sukun), A. Gani Dadeh, T. Usman Mahmud (Lho' Seumawe), T. Zulkifli, T. Yacop Muli (Lho' Seumawe).
6. Wakil Markas Daerah-V ( WMD - V) berkedudukan di Langsa di bawah pimpinan Bachtiar/ Dahlan dengan Komandan pasu-

- kannya : Ayub (Langsa), Nurdin Sufie (Idi), Daud Malem, B. Nainggolan (Kuala Simpang), Abu Samah, Petua Husin (Langsa).
7. Wakil Markas Daerah - VI (WMD – VI) berkedudukan di Kutacane di bawah pimpinan Muhammad Dien dengan Komandan-komandan pasukannya :  
Bahrum, Maaris Maat, A. Rahim, A. Jalim Umar.
8. Wakil Markas Daerah - VII (WMD – VII) berkedudukan di Meulaboh di bawah pimpinan T. Usman Yacob/T. Cut Rahman dengan Komandan-komandan pasukannya :  
Hasan Ahmad (Meulaboh), Raub, Hamidi Hs. (Suak Timah), A. Hanafiah, T. Gading, A.K. Jailani (Calang), Indah.
9. Wakil Markas Daerah - VIII (WMD – VIII) berkedudukan di Tapak Tuan di bawah pimpinan M. Nasir/Nyak Adam Kamil dengan Komandan-komandannya :  
Abdullah Sani (Tapak Tuan), H.M. Syarif, Blang Pidie) B. B. Jalal, Nyak Hukum (Bangongan), Iskandar.

#### LAMPIRAN : IV.

##### Susunan Pengurus Kelasykaran di Aceh.

1. Divisi Rencong
- a. Pimpinan Divisi :
- |                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Pimpinan Umum   | : A. Hasymi.        |
| Komandan Divisi | : Nyak Neh Lho'Nga  |
| Kepala Staf     | : M. Saleh Rachmany |
- b. Resimen - Resimen :
- (a) Resimen Pocut Baren di Kutaradja.  
Komandan : Zahara
- (b) Resimen-I di Kutaradja.  
Komandan : A. Gani Adam

- Kepala Staf : Jarimin
- (c) Resimen-II Sigli.  
 - Komandan : Putih Mauni, Sigli  
 Kepala Staf : Zainuddin Hs.
- (d). Resimen - III Lhok Seumawe  
 Komandan : T. Syammaoen Latief  
 Kepala Staf : T. Banta Sulaiman
- (e) Resimen- IV Aceh Tengah  
 Komandan : M. Zaharuddin, Takengon.  
 Wakil : M. Sjukur  
 Kepala Staf : Asep Jalil.
- (f) Resimen - V Aceh Timur Langsa.  
 Komandan : Tgk. Usman Aziz.  
 Wakil : Ismail
- (g) Resimen - VI Aceh Barat.  
 Komandan : H. Daud Dariah  
 Wakil : T. R . Iskandar.
- (h) Resimen - VII Aceh Selatan.  
 Komandan : M. Sahim Hasjmi  
 Kepala Staf : A. Gafur Akir.

2. Divisi - X/Tgk. Cik. Ditiro.

(1) Pimpinan Divisi.

- Komandan : Cek Mat Rachmany  
 Kepala Staf : Abdul Muthalib.

(2) Resimen :

a. Resimen Aceh Besar di Kutaradja.

- Komandan -  
 Resimen - I : Said Usman  
 Wakil : ----  
 Kep. Staf : ----

b. Resimen II Aceh Pidie di Sigli.

- Komandan -  
 Resimen : Said Usman  
 Wakil : Tgk. Amin Syamy

c. Resimen III Bireuen - Lhok Seumawe - Langsa :

- Komandan -

- Resimen : A. Muthalib, Bireuen  
Wakil : Tgk. Yusuf Berawang.
- d. Resimen IV Aceh Barat di Meulaboh :  
Komandan -  
Resimen : Tgk. Hasan Hanafiah  
Wakil : Tgk. Nyak Cut.  
Kep. Staf : T. R. Idris Putih.
- e. Resimen V Aceh Tengah/Takengon - Kutacane :  
Komandan -  
Resimen : Ilyas Lembu, Takengon.  
Kep. Staf : Saieh Adry.
3. Divisi Tgk. Cik Paya Bakong.
- (1). Pimpinan :  
Panglima : Tgk. Amir Husin Al Mujahid.  
Wkl. Panglima  
bhg. Keuangan : Tgk. Makhmud.  
Pelaksana Tugas :  
Panglima : Ajad Musyi.
- (2). Komandan Batalyon Divisi Berani Mati.  
Aceh Timur : Tgk. Usman Pendada.  
Aceh Utara : Tgk. M. Kasim Rasyidi.  
Aceh Tengah : Tgk. Banta Cut/Saleh Adry.  
Aceh Pidie : Tgk. Abdurrachman Buloh.  
Aceh Besar : Tgk. Nyak Sandang.  
Aceh Barat : Said Sulaiman.  
Aceh Selatan : Tgk. Nyak Raja.
- (3). Anggota Staf Perjuangan Rakyat.  
Panglima Revolusi : Tgk. Amir Husin Al Mujahid.  
Wakil Panglima : Tgk. Abu Bakar Amin.  
Kep. Staf : Tgk. Nurdin Sufi.
- (4). Staf Istimewa /Mobilisasi Wanita  
Ibu Maryan.  
Tgk. Aisyah Amin.  
Ti Aman Im Latif.  
Khatijah Aba.  
Dll.

4. Komando TPI Resimen Aceh /Divisi - X TNI.

- (1) Komandan Resimen : A. K. Yacobi.  
Wakil : M. Saleh Banta.  
Kepala Staf Umum : M. Hasan Ben.  
Wkl. Kep. Staf : M. Amin Hanafiah.

5. Komando Resimen TRIP (Tentara Pelajar Republik Indonesia).

- Komandan Resimen : Yahya Zamzami  
Staf. Inti : T. Yacob Sulaiman.  
: Awaluddin Awai.  
: T. Zaini.  
: T. Sulaiman.  
: Syamsuddin Ishak.  
: T. Samidan.  
: Ilyas N. R.  
: T. Husin.  
: T. M. Nur Arifin.  
: Maemun Saleh.

LAMPIRAN : V.

MAKLUMAT ULAMA SELURUH ACEH.

MAKLOEMAT OELAMA SELOEROEH ATJEH.

Perang Doenia kedoea jang maha dahsjat telah tammat. Sekarang di Barat dan di Timoer oleh 4 Keradjaan jang besar sedang diatoer perdamaian Doenia jang abadi oentoek keselamatan machloek Allah. Dan Indonesia tanah toempah darah kita telah dimakloemkan kemerdekaannja kepada seloeroeh doenia serta telah berdiri Repoeblik Indonesia dibawah pimpinan jang moelia maha pemimpin kita Ir. SOEKARNO.

Belanda adalah satoe keradjaan jang ketjil serta miskin satoe negeri jang ketjil, lebih kecil dari daerah Atjeh, dan telah hantjoer leboer, mereka telah bertindak melakoekan kechianatannja kepada tanah air kita Indonesia jang soedah merdeka itoe. oentoek didjadjahnja kembali. Kalaoe maksoed jang djahannam itoe berhasil,

maka pastilah mereka akan memeras segala lapisan rakjat, merampas semua harta benda negara dan harta rakjat dan dan segala kekajaan jang kita koempoelkan selama ini akan moesnah sama sekali. Mereka akan memperboedak rakjat Indonesia mendjadi hambanja kembali menjalankan oesaha oentoek menghapoes agama Islam kita jang soetji serta menindas dan menghambat kemoeiaan dan kemakmoeran bangsa Indonesia.

Di Djawa bangsa Belanda dan kaki tangannja telah melakoe kan keganasannja terhadap Kemerdekaan Repoeblik Indonesia hingga terdjadi pertempoeran dibeberapa tempat jang achirnja kemenangan berada dipihak kita. Soenggoehpoen begitoe, mereka beloem djoega insaf.

Segenap lapisan rakjat telah bersatoe padoe dengan patoeh berdiri di belakang maha pemimpin Ir. SOEKARNO oentoek menoenggoe perintah dan kewadjiban jang akan didjalankan. Menoe roet kejakinan kami bahwa perdjoeangan ini adalah perdjoeangan sutji jang diseboet "PERANG SABIL". Maka pertjajalah wahai bangsakoe, bahwa perdjoeangan ini adalah sebagai samboengan perdjoeangan dahoeleoe di Atjeh jang dipimpin oleh Almarhoem Tengkoeh Tjhi di Tiro dan pahlawan<sup>2</sup> kebangsaan jang lain. Dari sebab itoe, bangoenlah wahai bangsakoe sekalian, bersatoe padoe menjoesoen bahoe mengangkat langkah madjoe kemoeka oentoek mengikoet djedjak perdjoeangan nenek kita dahoeleoe, toendoeklah dengan patoeh akan segala perintah<sup>2</sup> pemimpin kita oentoek keselamatan Tanah Air Agama dan Bangsa.

KOETARADJA, 15 - 10 - 1945.

Atas nama Oelama Seleroeh Atjeh,		
Tgk. Hadji HASAN	Tgk.M. DAOED	Tgk. Hadji Dja'FAR
Kroeeng Kale	Beureueh	SIDIK
		Lamdjabat
	Tgk. Hadji AHMAD	
	HASBALLAH	
	Indrapoeri	
Diketahoei oleh		Disetoedjoei oleh
Jml. T.B. Residen Atjeh		Jml. Ketoea Comite Nasional.
T. NJA' ARIF		TOEANKOE MAHMOED

## DAFTAR BACAAN

### 1. Dokumen - dokumen.

Kantor Gubernur Propinsi Sumatera, Bagian Dokumentasi, *Salinan Daftar Ketetapan—Ketetapan Gubernur Propinsi Sumatera*, tahun 1948, No. 1 sampai No. 49, Bukittinggi, 1948.

\_\_\_\_\_ *Daftar Pembagian Daerah Atjeh tahun 1948*, Bukittinggi, 1948.

*Ketetapan Pemimpin Besar Bangsa Indonesia*, Ir. Soekarno, tanggal 22 Agustus 1945.

*Keputusan Presiden R.I.* No. 7/A/49, 4 Agustus 1949.

*Makloemat Atjehsyu Tyokan*, 25 Agustus 1945.

*Makloemat Atjehsyu Tyokan*, 25 Oktober 1945.

*Makloemat Oelama Seloeroeh Atjeh*, 15 Oktober 1945.

*Makloemat Goebornoer Soematra*, 30 Agustus 1946.

*Makloemat No. 1*, Panggilan Oemoem *PRI. Daerah Atjeh*, 17 Oktober 1945.

*Makloemat Pengoeroes Komite Nasional Daerah Atjeh*, 4 Oktober 1945; No. 1, 10 Oktober 1945, No. 2 dan 3; 13 Oktober 1945.

*Nasehat Kepada Sekalian Muslimin* (dalam tulisan Arab) dari Tgk. H. Hasan Kruengkale (Teungku Muhammad Hasan), 18 Zulkaedah 1364 H.

*Petikan Daftar Ketetapan Komandan Divisi Rentjong*, No. 10/P/1948, 23 Pebruari 1948.

*Penetapan Staf Resimen Ksatria Pesindo Kewedanaan Takengon* No. 122, tanggal 6 Januari 1947.

**Poster** Panitia Konperensi Penerangan Atjeh di Kutaradja, dalam rangka Konperensi Penerangan Atjeh di Kutaradja pada tanggal 27 Desember 1947 sampai Januari 1948.

**Seroean Tanah Air API**, tanggal 6 Oktober 1945.

**Soerat Edaran API**, tanggal 9 Oktober 1945.

**Soerat Edaran Atjehsyu Tyokan**, tanggal 24 Oktober 1945.

**Soerat Bersama Markas Daerah API dan PRI Daerah Atjeh**, Kepada Jml. Padoeka Toean 2 Pengoeroes Poesat Komite Nasional di Kutaradja, 18 Oktober 1945.

Uang Republik Indonesia, Propinsi Soematera, seri dua puluh lima rupiah, 17 Januari 1948.

## 2. Majalah dan Surat Kabar.

**Analisa**, 16 Agustus 1975.

**Atjeh Post**, No. 29, Agustus 1979.

**Atjeh Sinbun**, No. Istimewa, 8 September 1944; 15 Pebruari 1945; dan No. Istimewa 7 Agustus 1945.

**Berita Buana**, 22 - 23 Mei 1977.

**Duta Pancacita**, 23 Maret 1973.

**Fragmenta Politica**, No. tahun 1947.

**Harian Kedaulatan Rakyat**, Yogyakarta, tahun I, 9 Nopember 1945; Kamis 17 Juni 1948; Sabtu 20 Maret 1948.

**Kompas**, Djakarta 14 Agustus 1970.

**Madjalah Minami**, nomor khusus Atjeh.

**Mimbar Umum**, Medan, 12 Mei 1979.

**Pahlawan**, Tahun I No. 4 dan 8 tahun 1947.

**Pelita**, 27 April 1979.

*Peristiwa*, No. I Agustus 1979.

*Prisma* No. 7 Jakarta : LP3ES, 1979.

*Santunan*, No. 6 tahun I, Agustus 1976; tahun II, No. 8 dan No. 9, tahun III No. 17, 18, 19, 20, 21; tahun IV No. 24, 26, 27, 28 dan 34.

*Semangat Merdeka*, No. Istimewa, No 22 Oktober 1945; No. 19 I Desember 1945.

*Sinar Darussalam*, No. 62; 63; 69; 70. 71; 75/76; 88; 89 ;92/93.

*Vrij Nederland*, tahun 6 No. 26, 19 Januari 1946.

*Waspada*, 13 dan 17 Agustus 1979.

### 3. Buku - buku dan Artikel.

Abdul Muthalib, Muhammad, *Riwayat Perang Pandrah Masa Djiduk Djepang*, Kutaradja; Maktabah Atjeh, Raja, 1960.

Abubakar, Said. "Dewan Perwakilan Rakyat Aceh", *Majalah DPRD Daerah Istimewa Aceh* No, 2 tahun 1977.

Alfian, *Cendekiawan Dan Ulama Dalam Masyarakat Aceh*, Banda Aceh : Pusat Latihan Penelitian Ilmu - Ilmu sosial Aceh Darussalam, 1945.

Amin, S.M. *Kenang-kenangan Dari Masa Lampau*, Jakarta : Pradnya Paramita. 1978.

\_\_\_\_\_. *Sekitar Peristiwa Berdarah di Atjeh*, Djakarta: N.V. Soeroengan, tanpa angka tahun.

Arif, Abdullah, *Kongres Besar PUSA /P.PUSA Tindjauan Sedjarah Pergerakan di Atjeh*, Kutaradja : Panitia Raja Konggres Besar PUSA/ P. PUSA, 1950.

\_\_\_\_\_. "Sekitar Peristiwa Pengchianat Tjoembok", *Semangat Merdeka*, Kutaradja : Tanpa angka tahun.

- Amin, H.T.M. *Susunan Pemerintah Republik Indonesia di Aceh*, Banda Aceh : Kanwil Dep. P dan K Propinsi Daerah Istimewa Aceh & Masyarakat Sejarawan Indonesia Daerah Istimewa Aceh, 1976.
- Ariwiadi. *Gerakan Operasi, Militer VII, Penyelesaian Peristiwa Atjeh*. Djakarta : Mega Bookstore & Pusat Sejarah Angkatan Bersendjata , tanpa angka tahun.
- Beberapa Pemandangan Tentang Kehakiman di Daerah Atjeh*, Kutaradja, 1947.
- Benda, H.J. *Bulan Sabit Dan Matahari Terbit, Islam Indonesia, Pada Masa Pendudukan Jepang*, (Dhaniel Dhakidae, pen-terj)., Jakarta : Pustaka Jaya, 1980.
- Biro Sejarah PRIMA , *Medan Area Mengisi Proklamasi* . Jilid I. Medan : Badan Musyawarah Pejuang Republik Indonesia Medan Area, 1976.
- Dalimunte, A. Hakim . *Gerak - Gerik Partai Politik*. Langsa, Toko Buku Gelora, 1951.
- Hasjmy, A. *Peranan Agama Islam Dalam Perang Aceh dan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia*, Medan : Panitia Seminar Perjuangan Aceh Sejak 1873 sampai Kemerdekaan Indonesia, 1976.
- \_\_\_\_\_. "Karena Aceh Menentang, Gagallah Pembentukan Negara Sumatera, " *Sinar Darussalam* No. 89 April 1978.
- \_\_\_\_\_. "Teungku Abdul Wahab Seulimum", *Sinar Darussalam* No. 70, Juli 1976.
- \_\_\_\_\_. "Pangkalan Lhok Nga Yang Bersejarah ", *Sinar Darussalam*, No. 70 Juli 1976.
- \_\_\_\_\_. "Pendidikan Islam di Aceh Dalam Perjalanan

Sejarah". Sinar Darussalam, No. 63, Agustus / September 1975.

\_\_\_\_\_. "Mengenang Kembali Perjuangan Missi Haji R.I. ke. II, *Sinar Darussalam*, No. 88, Maret 1978.

\_\_\_\_\_. "Suka - Duka Koran - Koran Kiblik Dalam Tahun Tahun Revolusi Fisik", Harian *Waspada*, 13 Agustus 1979.

\_\_\_\_\_. dan T. Alibasyah Taksya, *Hari- Hari Pertama Revolusi 45 Di Daerah Modal*. Banda Aceh : Kanwil Dep. P dan K Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan MSI Aceh, 1976.

Hasan Basrie, Z. T. "Pangkalan Berandan Dibumihanguskan", Harian *Waspada*, 17 dan 18 Agustus 1979.

Hussain, Abdullah, *Terjebak*. Kuala Lumpur : Pustaka Antara, 1965.

\_\_\_\_\_. *Peristiwa*, Kuala Lumpur : Pustaka Antara, 1965.

Hasyim, Twk. "Detik - Detik Proklamasi 1945", *Warta Pendidikan dan Kebudayaan* No. 7 tahun 1971.

Insider, *Atjeh Sepintas Lalu*, Djakarta : Fa. Archapada, 1950.

Ismail Jacob, "Riwajat Gema Proklamasi di Atjeh", *Warta Pendidikan dan Kebudayaan* Dep. P dan K Propinsi Daerah Istimewa Aceh, 1971.

Ismuha, *Pendidikan Agama di Aceh*, Banda Aceh : Kanwil Dep. P dan K. Propinsi Daerah Istimewa Aceh MSI Daerah Aceh, 1976.

\_\_\_\_\_. "Pengetahuan Saja Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945", *Warta Pendidikan dan Kebudayaan* No. 7 Perwakilan Departemen P dan K Propinsi Daerah Istimewa Aceh, 1971.

\_\_\_\_\_. *"Sejarah Perkembangan Pendidikan Agama di*

- Aceh**, Banda Aceh : Majelis Ulama Daerah Istimewa Aceh 1978.
- Jajasan Pembina Darussalam. *10 Tahun Darussalam dan Hari Pendidikan Propinsi Daerah Istimewa Atjeh*, Darussalam : 1969.
- Joenoës Djamil, M. *Riwayat Barisan "F" (Fujiwara Kikan)*, Banda Atjeh : Pusat Latihan Penelitian Ilmu- Ilmu Sosial Aceh, 1975.
- Joesoef, Hoesin, "Sedjarah Perdjuaan Pemuda di Daerah Atjeh *Warta Pendidikan dan Kebudayaan* , No. 7, Banda Aceh : Kanwil Dep. P dan K Prop. Daerah Istimewa Aceh, 1971.
- Kementerian Penerangan R.I. *Republik Indonesia, Propinsi Sumatera Utara*, Djakarta : 1955.
- \_\_\_\_\_ *Keterangan dan Djawaban Pemerintah Tentang Peristiwa Daud Beureueh*, Djakarta : 1953.
- Kementerian Penerangan R.I *Pendapat Pemerintah Mengenai Laporan Panitia DPR – RI tentang Keadaan di Atjeh*, Djakarta : 1954.
- Kelompok Kerja SAB. *Sedjarah Singkat Perdjuaan Bersendjata Bangsa Indonesia*. Staf Angkatan Bersendjata, 1964.
- Knottenbelt, Maarten, "Kontak Dengan Aceh", *Vrij Nederland*. London : Thn. 6., 26 Januari 1946 Terjemahan Aboe Bakar.
- Lapian, A. B. "Sejarah Dan Sejarawan dan Masa Depan" Prisma No. 7, Jakarta : LP3ES, 1976.
- Menyambut Konperensi Muhammadiyah Wilayah Daerah Istimewa Atjeh*. Kutaradja ' Panitia Konperensi Muhammadiyah Daerah Istimewa Atjeh ke 26, 1962.
- Meuraxa. Dada: *Atjeh 1000 Tahun dan Peristiwa Teungku Daud Beureueh Cs*. Medan : Pustaka Hasmar, tanpa angka tahun.

- \_\_\_\_\_ . *Ungkapan Sejarah Aceh*, Medan : tanpa penerbit, 1976.
- \_\_\_\_\_ . *Perjuangan Rakjat Di Atjeh*. Medan : Mega Book Store, tanpa angka tahun.
- Mochtar J. Hasbi & Fauzi Hasbi, *Perang Bayu*. Medan : Panitia Seminar Perjuangan Aceh, 1976.
- Muhammad Ibrahim, *et. al. Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh*. Jakarta : P3KD, Departemen P dan K, 1977.
- \_\_\_\_\_ . *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh*, Jakarta : P3KD. Dep. P dan K., 1978.
- Mutyara, A.G. *Banda Aceh Pernah Berperanan Sebagai Ibukota R.I*, Medan : Panitia Seminar Perjuangan Aceh, 1976.
- Nasution, A.H. *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia jilid I Bandung* : Disjarah Angkatan Darat & Penerbit Angkasa. 1977.
- Nasution, A. H. *Sejarah Perjuangan Nasional di Bidang Bersenjata*, Djakarta : Mega Book Store, 1964.
- \_\_\_\_\_ . *Tentara Nasional Indonesia I*. Djakarta : Seruling Masa, tjetakan ketiga, 1970.
- Notosusanto, Nugroho, *Sedjarah Dan Hankam*, Djakarta : Lembaga Sedjarah Hankam, 1960.
- \_\_\_\_\_ . *Tentara Peta Pada Jaman Pendudukan Jepang di Indonesia*. Jakarta : Gramedia 1979
- Palmer, Leslie, *Indonesia and The Dutch*, London: Oxford University Press. 1965.
- Panitia Penerbitan Boekoe Peringatan, *Satoe Tahoen N.R.I di Soematra, 17 - 8 - 45 sampai 17 - 8 - 46*. Pemerintah Poesat Soematra, 1946.

- Panitia Pusat Peningkatan Lahirnja Pemerintah Darurat R.I. *Beberapa Tjataan Tentang : Lahirnja Tugas dan Perdjuangan Pemerintah Darurat Republik Indonesia 1969.*
- Panitia *Seminar Sedjarah Perdjuangan Pemuda Indonesia Daerah Tingkat II Atjeh Tengah.* Takengon : 1965.
- Pluvier Jan. *Indonesia Kolonialisme Onafhankelijkheid Neo-Kolonialisme.* Nijmegen : Sun, 1978.
- Piekaar, A.J. *Atjeh, En de Oorlog met Japan,* Den Haag : van Hoeve, 1949.
- Polem, Teuku Muhammad Ali Panglima, *Memoires van Teuku Muhammad Ali Panglima Polem.* Kutaraja, 17 Agustus 1972. Terjemahan ke dalam bahasa Belanda oleh J.H.J Brendgen.
- Pemerintah R.I. Daerah Atjeh. *Revolusi Desember 45 di Atjeh atau Pembasmian Pengchianat Tanah Air.* Kutaradja: 1950
- Pusat Latihan Penelitian Ilmu - Ilmu Sosial, Aceh, *Seminar Hasil Penelitian Lapangan,* tahun 1976, 1977, 1978, Darussalam. - Banda Aceh.
- Safwan, Mardanas, *Pahlawan Nasional Teuku Nyak Arief.* Jakarta; Proyek Biografi Pahlawan Nasional Departemen P dan K, 1975.
- Sartono Kartodirdjo, (ed). *Sejarah Nasional Indonesia , Jilid VI,* Jakarta, Departemen P dan K. 1975.
- Sejarah Militer Kodam - I/ Iskandar Muda. *Dwi Windu Kodam - I/ Iskandar Muda,* Kutaraja : 1972.
- Seksi Penerangan / Dokumentasi Komite Musyawarah Angkatan 45 Daerah Istimewa Atjeh, *Modal Revolusi. 45.* Kutaradja: Komite Musyawarah Angkatan 45 Daerah Istimewa Atjeh, 1960.
- Syammaun Gaharu. *Beberapa Catatan Tentang Perdjuangan Menegakkan Kemerdekaan di Aceh,* Medan : Panitia Seminar Perjuangan Aceh, 1976.

\_\_\_\_\_."Teuku Nyak Arief", Profil Seorang Pejuang", Harian *Mimbar Umum*, Medan 12 Mei 1979.

Syahadat, Haji. *Perjuangan Rakyat Aceh Tenggara Sejak tahun 1873 s/d Kemerdekaan R.I.* Medan : Panitia Seminar Perjuangan Aceh. 1976.

Syam. Abdullah. "Lhok Nga adalah Salah Satu Basis Perjuangan Indonesia Merdeka" *Waspada*, Medan : 17 Agustus 1979.

Sekretariat DPR— GR. Propinsi Daerah Istimewa Atjeh, *Dewan Perwakilan Rakyat Atjeh, Dalam Sedjarah Pembentukan Dan Perkembangan Pemerintahan di Atjeh Sedjak Proklamasi 1945 Sampai Awal Tahun 1968 Dan Produk-Produk Legislatif, 1968.*

Talsya, T. Ali Basyah. *10 Tahun Daerah Istimewa Atjeh.* Banda Atjeh : Pustaka Putroe Tjanden, 1969.

\_\_\_\_\_. *Sedjarah Dan Dokumen - Dokumen Pemberontakan di Atjeh*, Djakarta : Kesuma tanpa angka tahun.

\_\_\_\_\_. "Perjuangan Kemerdekaan di Aceh" *Santunan* thn III, No. 17, 18, 19, 20, 21; tahun IV. No. 24, 27, 28 dan 34.

Talsya. T. Ali Basyah, "Pesawat Terbang itu Bernama Seulawah" *Santunan*, tahun I, No. 6 : tahun II No. 8 dan 9.

\_\_\_\_\_. "Fragmen Revolusi 45 Di Aceh", *Sinar Darussalam*, No. 71 dan 75 / 76.

Ubit, T. Sabi. "Rakyat Yang Berjiwa Patriotik Melawan Penjajahan Fasisme Jepang" *Berita Buana*, Jakarta, 22 Mei 1975.

Usman Ismail, "Mengenang Detik - Detik Sejarah Proklamasi 17 Agustus 1945 di Aceh Timur" *Analisa*, Medan ' 16 Agustus 1975.

Usman Nya' Gade "Sekitar Pembentukan Angkatan Pemuda Indonesia (API) di Aceh", Banda Aceh : Kanwil Departemen P dan K. Propinsi Daerah Istimewa Aceh & Masyarakat Sejarawan Indonesia Daerah Aceh, 1976.

- Utoyo, Radik Cs, *Album Perjuangan Kemerdekaan 1945 - 1950*. Jakarta : C.V Alda, 1976.
- Veer, Paul van't *De Atjeh - Oorlog*, Amsterdam : Uitgeverij De Arbeiderspers, 1969.
- Zentgraaff. H.C.*Atjeh*. Terjemahan Aboe Bakar Bsf, dengan halaman tambahan dari penterjemah, belum diterbitkan.
- Dada Meutia. *Atjeh 1000 Tahun dan Peristiwa Tengku Daud Beureueh Cs*, Medan : Pustaka Hasmar, tanpa angka tahun
- Hamzuri, *Petunjuk Singkat Tentang Keris*, Jakarta : Museum Nasional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1979.
- Ismail Jacob, *Teungku Tjihik Di Tiro (Muhammad Saman) Pahlawan Besar Dalam Perang Atjeh ( 1981 - 1891 )*, Djakarta : Bulan Bintang, 1960.
- Julius Jacobs, *Het Familie en Kampongleven op Groot Atjeh*, Leiden : E.J.Brill, 1894.
- Muhammad Said, *Atjeh Sepanjang Abad*, Medan : Penerbit Sendiri, 1961.
- Talsya, *Aceh Yang Kaya Budaya*, Banda Aceh : Pustaka Meutia, 1972.
- Veltman, T.J., "Nota betreffende de Atjehsche goud en silversmeed kunst", Batavia : *TBG* jilid' XLVII, 1904.
- Zainuddin, H.M., *Tarech Atjeh dan Nusantara*, Medan : Pustaka Iskandar Muda, 1961.
- Zakaria Ahmad, *Sekitar Keradjaan Atjeh Dalam Tahun 1520 - 1675*, Medan : Monora, 1972.
-

## DAFTAR INFORMAN

- Aboe Bakar Bsf. (lahir 1917) tempat tinggal Banda Aceh, jabatan/pekerjaan sekarang karyawan PDIA, Pensiunan kantor Residen Aceh.
- Abdul Muis, (lahir 1928), tempat tinggal Takengon, jabatan/pekerjaan sekarang Ketua Legiun Veteran Kabupaten Aceh Tengah.
- Abdullah, Teungku (umur 75 tahun) tempat tinggal Tanah Luas, jabatan/pekerjaan sekarang pensiunan Hakim.
- Abdul Rani Tgk, (umur 73 tahun), tempat tinggal Tanah Luas Aceh Utara, jabatan/pekerjaan sekarang pensiunan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Luas Aceh Utara.
- Adam Ismail. (tempat lahir Banda Aceh), pensiunan TNI, dan bekas Sekwilda Kotamadya Banda Aceh.
- A. Gani Mutyara. (lahir 1923), tempat tinggal Medan; Direktur PT. Parasawita, Staf Redaksi surat kabar *Atjeh Sinbun*, majalah Pahlawan dan Kepala Jawatan Penerangan TNI Divisi X Sumatra.
- Al Amin, Kaan T. (lahir 4 April 1925), tempat tinggal Meulaboh bekas Asisten Wedana Meulaboh Aceh Barat.
- Ali Basyah, T. H. (lahir 1911) bekas zelfbestuurder, suntyo dan Wedana.
- Ali Hasjmy. (lahir 26 Maret 1914), tempat tinggal Banda Aceh jabatan/pekerjaan sekarang Rektor IAIN Ar-Raniri, bekas Gubernur Aceh dan kegiatan selama Revolusi Kemerdekaan antara lain, Ketua IPI /BPI/ PRI/ Pesindo Daerah Aceh.
- Ali Keureukon, T. (umur 68 tahun), pensiunan dan bekas anggota BPH Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- Amir Husin Al Mujahid. (lahir 1901), tempat tinggal Idi, bekas Ketua Pemuda PUSA, Wakil Koordinator Pertahanan Sumatera, Panglima TPR/Lasykar

Teungku Chiek Paya Bakong.

- A. Muthalib.** (lahir 1916), tempat tinggal Julok/Langsa, pedagang dan bekas Pemuda PUSA.
- Djohan T.** (52 tahun), tempat tinggal Banda Aceh, pegawai sekretariat DPRD Kotamadya Banda Aceh.
- Darul Aman** bekas Camat Bebesan (Aceh Tengah), tempat tinggal Blang Kolak I.
- Elia Sinar.** (WNI keturunan Cina)(lahir 1914), Banda Aceh anggota Veteran, pada masa Revolusi Kemerdekaan bekerja pada bahagian pengangkutan dan perbekalan Pesindo.
- Hasan Syah, T.** (lahir tahun 1928), tempat tinggal Lhok Seumawe, anggota MPR. RI. bekas Pesindo.
- Ismuha, H.** bekas Rektor IAIN Ar - Raniry, dan bekas pengurus Besar PUSA.
- Ibrahim Abduh,** (lahir 1917), tempat tinggal Banda Aceh, pensiunan, bekas Bupati Pidie dan aktif dalam Pemuda PUSA dan Mujahiddin.
- Ismail Ahmad,** (umur 66 tahun), tempat tinggal Banda Aceh, pedagang aktif sebagai pimpinan dalam mengumpulkan dan perjuangan selama Revolusi Kemerdekaan di Kutaraja.
- Ismail Arief.** (lahir tahun 1914), tempat tinggal Kuala Simpang bekas anggota BPH Aceh Timur. selama Revolusi Kemerdekaan selaku anggota Barisan Hisbullah Mujahiddin.
- Ismail Usman. H.** tempat tinggal Simpang Ulim, bekas Seinedan Ketua Mujahiddin Simpang Ulim.
- Jafar Kornilius.** (WNI keturunan Cina, lahir tahun 1914) anggota Veteran, tahun 1945 s/d 1947 bekerja pada bidang pengangkutan dan perbekalan Batalyon 13 TRI/ TNI Aceh Banda Aceh.

Muhammad Hasan T. (lahir 4 April 1906 di Sigli), anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mewakili Sumatra, selama Revolusi Kemerdekaan banyak pekerjaan yang dipangkunya, antara lain Gubernur Sumatra, Wakil Ketua Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan PDRI.

Muchlis Yusuf, H (lahir tahun 1915), tempat tinggal Blang Pidie bekas anggota Sidang Mahkamah Syariat Blang Pidie.

M. Arief Aminuddin. (lahir tahun 1926), bekas Komandan Batalyon IV Resimen III Divisi Rencong Kesatria Pesindo Takengon (Aceh Tengah)

Muhammad Basyah. (lahir tahun 1918) bekas wartawan Atjeh Sinbun, Semangat Merdeka, Sekretaris umum Pemuda PUSA, tempat tinggal Langsa.

Raja Iskandar, T. (lahir 2 - 2 - 1920 di Meulaboh), bekas Wakil Ketua BPI di Meulaboh.

Saifuddin Kadir, (lahir, 1 September 1926), tempat tinggal Takengon, bekas Staf Penerangan TNI Divisi X.

Soegondo, Kartoprodjo, K. (lahir di Yogyakarta 15 Juli 1908), tempat tinggal Medan, bekas pimpinan Taman siswa Aceh anggota perintis kemerdekaan.

Syabbuddin Razi, T ( lahir 16 Juli 1928), bekas pejuang '45.

Syammaun Gaharu, H (lahir Teupin Raya, 10 Nopember, 1913), tempat tinggal Medan, bekas Panglima Kodam I Iskandar Muda , masa Jepang lettu (Tjui) Gyugun : pada masa Revolusi antara lain, Ketua Markas Daerah API Daerah Aceh.

Sufi Ismail, Tgk. (umur 65 tahun), tempat tinggal Indrapuri Aceh Besar, bekas anggota Fujiwara Kikan.

Soeryo Atmodjo, RMD. (lahir di Solo, tahun 1900), tempat tinggal di Medan, bekas Komandan Kaibodan Pe-

ureulak (Aceh Timur), anggota KNI mewakili Peureulak, aktifis Masyumi (1945 - 1959) di Langsa.

Soetikno Padmo Soemarto. tempat tinggal Banda Aceh, bekas pengurus Taman Siswa Aceh, Anggota Badan Eksekutif KNI Daerah Aceh, anggota DPR Sumatera dan. bekas Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Usman Amin. (lahir Oktober 1922), tempat tinggal Tapak Tuan, bekas Wakil Komandan Kompi TKR Batalyon VIII, Resimen III Divisi X.

Ya'kub Ali, T.H (lahir 25 Maret 1917), tempat tinggal Sigli, bekas Pemuda PUSA.

Zainal Abidin Usman. (lahir 1919), tempat tinggal Takengon, pensiunan sosial Markas Legiun Veteran, Kabupaten Aceh Tengah.

---

## I N D E K

- A. Adami, 92.  
 A. Azis, Teuku, 13, 14, 50.  
 Abbaih, Teuku, 59.  
 Abbas, Mr. 31  
 Abdullah Arief, 12, 14.  
 Abdullah Husein, 47.  
 Abdullah Paloh, Teuku, 77.  
 Abdullah, Teuku, 45.  
 Abdul Jalil, Tgk. 20, 23.  
 Abdul Muthalib, 93.  
 Abdul Wahab, Tgk. 7, 13, 66, 80, 81.  
 Abdul Rahman, Tgk. 82.  
 Abdul Rahman Meunaseh Meucap, Tgk. 141.  
 Abu Bakar, Said, 7 12, 29, 48.  
 Abduh Syam, 51, 85, 109.  
 Adam, M, 93.  
 Adinegoro, 32, 33.  
 A.G. Mutiara, 14, 93, 95, 116, 136.  
 Agus Husen, 32  
 Ahmad Danur, Teuku, 29.  
 Ahmad Jeunib, Teuku, 7, 48.  
 Ahmad Hasballah Inderapuri, Tgk, 13, 54, 66.  
 Ajad Musi, 92.  
 A.K. Gani, 31, 33, 35, 126.  
 A.K. Jailani, 54.  
 A.K. Yakobi, 87.  
 Alamsyah, 84.  
 Ali Basyah Talsya, Teuku, 14, 47, 117.  
 Ali Basyah, Teuku, 26, 77.  
 Ali Murtolo, 19, 66.  
 Ali Hasjmy, 14, 27, 34, 47, 48, 51, 66, 73, 86, 112.  
 Ali, Said, 45, 124, 134.  
 Amelz, 14, 85, 109, 110, 126.  
 Amin \* (Pidie), T.M., 13, 81, 82, 131, 144.  
 Amin Bagus, 34.  
 Amin, S.M. 13, 66, 69, 105 - 107, 111, 117, 123, 124, 128, 129, 139, 143.  
 Amir, 31.  
 Amir Husin Al Mujahid, 50, 52, 66, 76 - 80, 92, 105, 138.  
 Amiruddin, S, 28.  
 Arifin, Tgk. 77.  
 A. Salam, 13.  
 Askari, 95.  
 A. Wahab Makmun, 87, 94.  
 Bachtiar, 45, 79.  
 Bachtiar Idham, 44, 45.  
 Beureunon, 67, 72, 74.  
 Bireun, 9, 32, 34, 56, 58, 77, 79, 83, 86, 94, 115, 116  
 Bukit Tinggi, 9, 11, 31, 33, 53, 101, 106 111.  
 Burhanuddin, 84.  
 Bustaman, 28.  
 Bustami, 28.  
 C.A. Sani, 59.  
 Calang, 8, 53, 85.  
 Cek Mat Rahmani, 52, 66, 92, 93.  
 Cot Plieng, 20, 22.  
 Cumbok, 65, 67, 69, 73, 75, 76, 103, 105, 123.  
 Cut (Tjut) Hasan, Teuku, 48, 67, 69.  
 Danubroto, R. M. 115.  
 Daud Beureueh, Tgk. Mohd, 7, 13, 14, 17, 28, 29, 48, 52, 54, 66, 73, 78, 87, 89 - 91, 93, 95, 97 - 99, 107, 113, 114, 127, 141.  
 Daud Dasyah, M. , 50.  
 Daud Samalanga, T. M, 41, 43, 68, 86, 92, 105, 106.  
 Djuned Jusuf, Muhammad, 48, 101.  
 Dullah, Teuku, 26.  
 Emil Dahniel, 59.  
 Gam Basyah, 84,  
 Gendong, S.M. 41.  
 Ghazali Yunus, 28, 32, 48.  
 Gintings, Djamin, 87, 94, 113,  
 Goh Moh Wan, 61.  
 Gosen son, G.F.V. 8, 9, 11.  
 Hamers, 59.  
 Hamid, T. 22, 23,  
 Hamid Azwar, T, 44, 45, 57, 70, 82.  
 Hamzah, T, 93.  
 Hanafiah, T, 41.  
 Hasan Ahmad, 84, 87, 93.

- Hasan Ali, 81, 84, 92.  
 Hasan Basri, 41.  
 Hasan Geulumpang Payong, T.M., 26.  
 Hasan Krueng Kalee, Tgk. H. 54.  
 Hasan Saleh, 84.  
 Hasballah Daud, 52.  
 Hasballah Haji, 87, 89.  
 Hasbi, Tgk, 13, 14,  
 Hasjim, M.K. 19.  
 Hasjim, Tuanku, 27, 48.  
 Hatta, Mohd. 30, 42, 106, 111, 127, 128  
 Hidayat, 95, 125.  
 Husin, M. 41, 81, 93.  
 Husin, Teuku, 78.  
 Husen Jusuf, 32, 50, 73, 74, 79, 83, 89,  
 90, 92, 93, 116.
- Ibrahim., T, 93.  
 Ibrahim, T. Panglima Agung, 77, 78.  
 Idie, 16, 34, 52, 77, 85.  
 Iino, S., 14, 17, 27, 29, 30, 37, 38, 43,  
 48, 49, 56.  
 Ilot, 72.  
 Ilyas Leubel, Tgk. 84.  
 Isa, Dr. Muhammad, 106.  
 Ishak Amin, Tgk. 82.  
 Ismail Jacok, 14, 20, 38, 66, 109  
 Itam Peureulak, T., 81.
- Jahja Zamsami, 87.  
 Jakfar Siddiq, Tgk. 13, 54, 141.  
 Jeunib, 7, 22, 23.  
 Joenoes Djamil, Tgk., 7, 14.  
 John Lie, 95, 116.
- Karim Duriat, 19, 109, 112.  
 Kasim Nasution, 87.  
 Keumala, 74.  
 Knottenbelt, M.J., 60 - 64.  
 Krueng Paujo, 56.  
 Krueng Raya, 9, 63, 85.  
 Kuala Simpang, 34, 58, 94.  
 Kutacane, 9, 11, 34, 94.
- Lakseumana Umar, T. 71.  
 Lala, 72.  
 Lameulo, 67, 70, 72, 73, 75.  
 Langa, 72.
- Langkat, 2, 3, 11, 87, 91, 93, 95, 97, 99,  
 100, 107, 113, 114, 124, 127,  
 134.  
 Langsa, 3, 34, 42, 47, 50, 57, 58, 63, 85,  
 96, 97, 102, 134, 138.  
 Lefrandt, B. W., 60.  
 Lhoknga, 10, 16, 47, 52, 56, 61, 63, 85,  
 94.  
 Lhokseumawe, 34, 56, 56, 63, 64, 77,  
 85.  
 Lhoksukon, 34, 58.  
 Lueng Putu, 71, 72, 74.
- Mahmud, T, 68, 69.  
 Mahmud, Twk, 35, 36, 41, 43, 48, 54,  
 57, 62, 69, 92, 105.  
 Manyak, T, 87, 94.  
 Mansur, Dr. Tgk. 98 - 100.  
 Matsyu bushi, 13, 18, 27, 48.  
 Meulaboh 74, 50, 63, 64, 85, 94.  
 Meureudu, 23.  
 Meutareun, 71, 72.  
 Muda Sedang, 41.  
 Muhammad ZZ, 22, 48.  
 Muhammad Daud Cumbok, T., 68, 71.  
 Muhamma d Hasan, Mr. T., 31, 32, 39,  
 42, 69, 104, 111.  
 Muhammad Hasjim, 33, 34, 47.  
 Muhammad Djohan Alamsyah, T. Chiek,  
 68.  
 Muhammadiyah, 12, 13, 19, 85.  
 Muhammad Syah, T, 45, 57, 73.  
 Muhammad Nur El Ibrahim, 109, 110,  
 112, 135, 141.  
 Muhammad Syafie, 32, 33, 35.  
 Mukhtar Nasution, 96.  
 Mukhtar, M. 41.  
 Mukhtar SK. 41.  
 Murdan, 48.  
 Muzzakir Walad, A, 93.
- Nagamatsu, M. 34.  
 Nainggolan, F. J, 17.  
 Nasir, M. 93, 107.  
 Nasroen, M. 106.  
 Nyak Ada, Kamil, 84.  
 Nyak Arief, Teuku, 6, 7, 17, 28, 29, 32,  
 35 - 37, 40 - 44, 48 - 50, 54, 57,  
 61, 62, 67, 68, 78, 79, 82, 104,  
 105, 120, 129.

- Nyak Neh, 45, 52, 84, 92, 93, 136.  
 Nyak Neh Rika, 44, 45, 120.  
 Nyak Umar, Tgk, 81.  
 Nip Karim, 113.  
 Nur, M., 28.  
 Nurdin Sufi, 79.
- Obara, 29.  
 Oesman Raliby, 85, 95, 112, 117.  
 Overakker, R. T. 8, 9, 11.
- Paudrah, 22, 23.  
 Panglima Polem, T.M. Ali, 7, 29, 37, 41,  
 67, 68, 73, 79, 101, 102, 104.  
 Paun, J. 7.  
 Peureulak, 9, 138.  
 PUSA, 7, 10, 12 - 14, 23, 65 - 67, 73,  
 76, 85, 119.
- Raja Djuniat, T, 26.
- Sabang, 4, 9, 27, 58, 59, 61, 63, 99,  
 121.  
 Sahim Hasjmy, 78.  
 Saleh Rahmani, 48.  
 Saleh Jafas, 41.  
 Samaun Gaharu, 16, 44, 45, 48, 50, 57,  
 66, 70, 73, 77, - 80, 82, 120.  
 Sarong, T, 45.  
 Sauni, 48.  
 Seulimuem, 8, 55, 60.  
 Siahaan, A., 87.  
 Siahaan, R, 87.  
 Sigli, 8, 34, 52, 56, 60, 63, 67, 70, 71,  
 75, 80, 85, 96.  
 Sitompul, H, 50, 83, 90.  
 Sofyan Hasan, 87.  
 Sudono, dr, 93.  
 Suhardjo Hardjo Wardoyo, 86.  
 Sukarno - (Bung), 30, 31, 39, 42, 54,  
 89, 94, 100, 107, 121, 123, 126,  
 Surjo Sularso, R.M. 92, 107.  
 Sutikno Padmo (Sumarto, 66, 92, 109,  
 117, 128.
- Takengon, 4, 9 - 11, 34, 58, 79, 82, 115,  
 116.  
 Taman Siswa, 12, 19.  
 Tanah Karo, 2, 3, 11, 87, 91, 93, 95, 97,  
 99, 100, 107, 113, 114, 124, 127,  
 134.  
 Tangse, 9 - 11, 96.  
 Tapaktuan, 34, 42, 64, 85, 109, 112,  
 129.  
 Thaleb, Teuku, 84.  
 Thio Kie Son, 17.  
 Tinggelman, 8.  
 Tjut Rahman, 45, 84, 85.  
 Trienggadeng, 74.
- Umar Kemangan, T, 67.  
 Usman, Said, 44, 45, 50, 120.  
 Usman Adami, 134.  
 Usman Nyak Gede, 44, 120.
- Van den Berg, 8.  
 Van Mook, 98, 100.
- Wimaji Alfiah, 84.
- Zahara, 52.  
 Zainal Arifin Abbas, 92, 93.  
 Zaini Bakry, 48.  
 Zainuddin, H, 101.

REVOLUSI KEMERDEKAAN INDONESIA DI AC

PERPUST

Perpustakaan  
Jenderal K.

959.  
IBR  
s

(19)